



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BPS
TAHUN ANGGARAN 2010**

DI PUSAT

**UNTUK PARA PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BPS PUSAT**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BPS
TAHUN ANGGARAN 2010**

DI PUSAT

**UNTUK PARA PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BPS PUSAT**

BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN BPS TAHUN ANGGARAN 2010 DI PUSAT

Katalog BPS :
Nomor Publikasi :
Ukuran Buku : 21 x 29.7 cm
Jumlah Halaman : 398 + xiv

Naskah:

Bagian Penyusunan Rencana

Penyunting:

Biro Bina Program

Penata Letak:

Biro Bina Program

Gambar Kulit Oleh:

Biro Bina Program

Penerbit:

Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Penjabaran seluruh kegiatan BPS-RI yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 dan Rencana Strategis (Renstra) BPS 2010-2014. Secara umum kegiatan statistik tahun 2010 diprioritaskan kepada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun dan Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Beberapa kegiatan statistik berskala besar di tahun 2010 meliputi SP2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Pertambangan dan Energi, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Transportasi, serta Survei Bidang Jasa dan Pariwisata.

Buku Petunjuk Teknis ini memuat pokok-pokok kebijakan Pimpinan BPS-RI dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran di Satuan Kerja (Satker) BPS-RI. Dalam buku ini juga dijabarkan penjelasan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 meliputi abstraksi, tujuan dan sasaran, metodologi, kegiatan dan keluaran, jadwal pelaksanaan serta penanggung jawab setiap kegiatan di BPS-RI.

Buku ini agar digunakan sebagai pedoman bagi para pengelola kegiatan dan anggaran di lingkungan BPS-RI untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 sehingga hasilnya efektif dan efisien.

Jakarta, Januari 2010
Kepala Badan Pusat Statistik



DR. Rusman Heriawan
NIP. 19511104.197403.1.001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	xiii
Bab I. Pendahuluan	1
I. Umum	3
II. Pedoman Dasar Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran	3
III. Program Dan Kegiatan	4
IV. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran	11
Bab II. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	15
I. Organisasi Pengelola Kegiatan dan Anggaran	15
II. Mekanisme Penggunaan Anggaran	20
III. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran	24
IV. Revisi DIPA	24
V. Alur Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	28
VI. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	31
VII. Hubungan Tata Kerja Antar Unsur Pelaksana	34
Bab III. Penjelasan Teknis Kegiatan BPS Pusat	39
I. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	39
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.....	46
III. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	48
A. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	52
B. Pembinaan/Penyusunan Program dan Rencana Kerja dan Anggaran	52
1. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	52
1) Penyusunan Renstra BPS 2010-2014	52
2) Penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030.....	54
3) <i>Updating Database</i> Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS	55
4) Evaluasi Kegiatan Statistik.....	56
5) Penyusunan SBK dan SHBJ	57
6) Penyusunan Laporan Aktivitas dan LAKIP BPS.....	57
7) Monitoring dan Evaluasi Program.....	59
8) Pengelolaan BMN	59

9)	STATCAP-CERDAS TF093092 Tahun 2010 (BLN)	61
10)	Biaya Pendamping STATCAP CERDAS.....	66
11)	Biaya PHRD <i>Grant</i> TF093092 Tahun 2010 (BLN)	67
12)	Biaya Pendamping PHRD <i>Grant</i>	68
2.	Penyelenggaraan Humas, Protokol, dan Pemberitaan	78
1)	Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan BPS.....	69
2)	Peningkatan Kualitas dan Wawasan SDM.....	70
3)	Penyusunan <i>Soft Library</i> Materi Pimpinan	71
4)	Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2010	72
5)	Studi Opini Publik Tentang Data Strategis BPS	74
6)	Rancangan Peraturan Kepala BPS	76
7)	<i>Soft Library</i> Dokumentasi Peraturan Perundangan	77
8)	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi BPS	78
3.	Penyusunan Renja KL dan Anggaran	78
1)	Penyusunan Renja KL	78
2)	Penyusunan Anggaran	80
C.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	81
1.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	81
1)	Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses <i>Online</i>	81
2)	Pengembangan Sistem Basis Data	85
3)	Pengembangan Sistem Informasi	86
4)	Pembuatan Program Pengolahan dan <i>Repository Data</i>	88
5)	Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi	89
6)	Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan <i>Website</i>	91
7)	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik.....	92
8)	Pembuatan Kemasan Layanan Publik Berbasis Digital	94
D.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	96
1.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	96
1)	Diklat Pimpinan Tingkat IV	96
2)	Diklat Pimpinan Tingkat III	96
3)	Diklat Pimpinan Tingkat II	97
2.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	98
1)	Diklat Prajabatan Golongan II	98
2)	Diklat Prajabatan Golongan III	99

3.	Rintisan Pendidikan Gelar	100
4.	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja	101
1)	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli.....	101
2)	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli.....	102
3)	Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar	103
4)	Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar	104
5)	Diklat Pemrograman <i>Database</i> Terintegrasi	105
6)	Diklat Kompetensi Pejabat Eselon IV	106
7)	Pembinaan Administrasi dan Pemberkasan CPNS	107
8)	Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi	108
9)	Pemilihan KSK Berprestasi.....	109
10)	<i>Assessment Center</i>	110
11)	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.....	111
12)	Penyusunan Uraian Pekerjaan Dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan.....	111
13)	Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian	112
14)	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	113
15)	Sosialisasi Penerimaan Bukan Pajak	114
16)	Pembinaan Administrasi Keuangan	115
E.	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/ Lembaga	116
1.	Evaluasi/Laporan Kegiatan	116
1)	<i>Review</i> Laporan Keuangan BPS Tahun 2009	116
2)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010	117
F.	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	119
1.	Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/ <i>Updating</i> /Analisa Data dan Statistik	119
1)	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	119
2)	Analisis Disparitas	120
3)	Analisis Statistik Ekonomi	122
4)	Penyempurnaan dan Pengembangan Konsistensi Statistik Ekonomi dan Sosial.....	124
5)	Pengembangan Indikator Pembangunan Regional	125
6)	Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Sosial.....	127
7)	Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi.....	129

8)	Pengembangan Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja	131
9)	Pengembangan Model Perekonomian Indonesia	133
10)	Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi, dan Ukuran- ukuran Statistik	135
11)	Penyusunan dan Pemeliharaan Kerangka Sampel Statistik Bidang	137
12)	Studi <i>Baseline</i> SDM BPS	139
2.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	140
3.	Survei Bidang Industri	140
1)	Survei Industri Besar/Sedang Bulanan	140
2)	Survei Industri Mikro dan Kecil	142
3)	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	143
4.	Survei Bidang Pertanian	147
1)	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	147
2)	Survei Perusahaan Perkebunan	148
3)	Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI	151
4)	Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian ..	153
5)	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH	154
6)	Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kedelai	155
7)	Survei Perusahaan Kehutanan	156
8)	Survei Kehutanan Rakyat	157
5.	Survei Bidang Perdagangan	164
1)	Kompilasi Data Statistik Ekspor	164
2)	Kompilasi Data Statistik Impor	165
3)	Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan	167
4)	Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	169
5)	Survei Statistik Lembaga Keuangan dan <i>Monitoring Kurs</i> Valuta Asing	172
6)	Survei Statistik Harga Perdagangan Besar	172
7)	Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD	174
8)	Survei Statistik Harga Produsen	175
6.	Survei Transportasi	185
1)	Survei Transportasi	185
2)	Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	189
7.	Survei Bidang Jasa Dan Pariwisata	192
1)	Survei Bidang Jasa dan Pariwisata	192

2)	Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi	194
8.	Survei Bidang Kependudukan	198
1)	Survei Upah	198
2)	Survei Struktur Upah	199
3)	Sakernas Semester I 2010	200
4)	Sakernas Semester II 2010	204
5)	Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Pemuda	207
6)	Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga Untuk Penimbang Survei Kependudukan 2010	208
7)	Susenas Panel 2010 (Estimasi Provinsi)	210
8)	Susenas KOR (Estimasi Kab/Kota) 2010	211
9)	Identifikasi Aglomerasi Potensi Desa di Indonesia	213
10)	Penyusunan Publikasi Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei	214
11)	Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2010	216
12)	Pilot Pendataan Podes 2010	217
13)	Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2010	218
9.	Survei Pertambangan	223
1)	Survei Pertambangan dan Energi	223
2)	Survei Konstruksi	223
10.	Survei Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	227
11.	Survei Bidang Sosial Ekonomi	228
1)	Penyusunan Neraca Regional	228
2)	Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK	230
3)	Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan	231
4)	Persiapan Penyusunan <i>Updating</i> Tabel <i>Input-Output</i> Indonesia 2010 ..	232
5)	Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)	235
6)	Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa-jasa (SPPJ)	238
7)	Penyusunan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan dan Jasa	239
8)	Penyempurnaan Data Dasar Penghitungan PDB dan PDRB.....	241
9)	Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling) 2010	243
10)	Survei Khusus Input-Output (SKIO) 2010	244

11) Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	245
12) Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta	247
13) Penyusunan Neraca Arus Dana.....	249
14) Studi Penyusunan Stok Kapital	252
15) Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB	254
16) PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan	256
17) Konsolidasi Neraca Pengeluaran	258
18) Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)	262
12. Survei Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan	270
1) Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan	270
2) Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010	273
3) Penyusunan Laporan dan Stok Modal Sosial 2009.....	274
4) Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010	275
5) Biaya Pendamping <i>TFSCB</i>	278
6) <i>Streamlining Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project (Grant-TF-057574)</i>	279
G. Pembinaan Statistik dan Sensus	280
1. Survei Bidang Kependudukan Data dan Statistik.....	280
1) Perencanaan SP2010	280
2) Pelatihan SP2010	281
3) Pelaksanaan Lapangan Sensus Penduduk 2010	282
4) Pelatihan Demografi	284
5) Pengolahan SP2010.....	286
6) <i>Updating</i> Peta Wilayah Administrasi	286
7) PES 2010	287
8) Publisitas Pelaksanaan SP2010	288
9) Pembentukan MFD SP2010	289
10) Pembangunan Desain dan Arsitektur Metadata SP2010	290
11) Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Publikasi SP2010.....	291
12) Pembangunan Desain dan Arsitektur Akses <i>Online</i> dan Layanan SP2010	292
13) Pembangunan Desain dan Arsitektur Sistem Dokumentasi SP2010.....	293
IV. Program Pendidikan Kedinasan	294
1. Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)...	295

1) Persiapan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik	295
2) Pelaksanaan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik	296
3) Pengajaran dan Perkuliahan.....	296
4) Penyelenggaraan Program D-IV	297
5) Riset Dosen	297
6) Penerimaan Mahasiswa Baru	298

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PkyB BPS Pusat Tahun Anggaran 2010	303
Lampiran 2. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PSPAN BPS Pusat Tahun Anggaran 2010	308
Lampiran 3. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program P2S BPS Pusat Tahun Anggaran 2010	309
Lampiran 4. Daftar Penanggung Jawab Kegiatan Program PK BPS Pusat Tahun Anggaran 2010	312
Lampiran 5. Jadwal Kegiatan BPS Pusat Tahun Anggaran 2010	313

FORMULIR

1. Form RPA (Contoh)	389
2. Form RPA	390
3. Form OPS.....	391
4. Form CTK.....	392
5. Form GDB	393
6. Form PMF.....	394
7. Form BHN	395
8. Form JLN.....	396
9. Form JS	397
10. Form UPH	398

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program PKyB Pusat Tahun Anggaran 2010.....	40
Tabel 2. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program PSPAN Pusat Tahun Anggaran 2010.....	47
Tabel 3. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program P2S Pusat Tahun Anggaran 2010	48
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Industri Tahun Anggaran 2009 & 2010	145
Tabel 5. Jumlah Responden Survei IMK Tahun Anggaran 2009 & 2010	146
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Kecamatan, Blok Sensus dan Ubinan Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 ...	160
Tabel 7. Perbandingan Jumlah Responden Survei Perkebunan Besar, Kehutanan dan Kehutanan Rakyat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 ..	161
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Responden Survei Perusahaan Hortikultura, Peternakan dan RPH serta Perikanan dan TPI Tahun Anggaran 2009 dan 2010	162
Tabel 9. Jumlah Responden Survei Struktur Ongkos Tanaman Kedelai Tahun Anggaran 2010	163
Tabel 10. Perbandingan Jumlah Responden Survei Harga Produsen & Konsumen Pedesaan Tahun Anggaran 2009 & 2010	177
Tabel 11. Perbandingan Jumlah Responden dan Kunjungan Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras Tahun Anggaran 2009 dan 2010	178
Tabel 12. Perbandingan Jumlah Responden Survei Statistik Lembaga Keuangan dan Monitoring <i>Kurs</i> Valas Tahun Anggaran 2009 & 2010	182
Tabel 13. Perbandingan Jumlah Responden Survei Harga Perdagangan Besar Tahun Anggaran 2009 & 2010.....	183
Tabel 14. Perbandingan Jumlah Responden Survei Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 & 2010.....	184
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Kunjungan Survei Transportasi Tahun Anggaran 2009 & 2010.....	191

DAFTAR TABEL

Tabel 16.	Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Jasa dan Pariwisata Tahun Anggaran 2009 & 2010.....	197
Tabel 17.	Perbandingan Jumlah Responden Survei Upah dan Survei Struktur Upah Tahun Anggaran 2009 & 2010	220
Tabel 18.	Perbandingan Jumlah Blok Sensus dan Rumah Tangga Sakernas Estimasi I & Sakernas Estimasi II Tahun Anggaran 2009 & 2010	221
Tabel 19.	Perbandingan Jumlah Blok Sensus dan Rumah Tangga Susenas Panel & Susenas Modul Tahun Anggaran 2009 & 2010	222
Tabel 20.	Perbandingan Jumlah Responden Survei Pertambangan & Energi dan Survei Konstruksi Tahun Anggaran 2009 & 2010.....	226
Tabel 21.	Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Neraca Produksi Tahun Anggaran 2009 & 2010	266
Tabel 22.	Perbandingan Jumlah Kunjungan Survei Bidang Neraca Konsumsi Tahun Anggaran 2009 & 2010	268
Tabel 23.	Perbandingan Jumlah Responden Survei Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan Tahun Anggaran 2009 & 2010	272

PENDAHULUAN

1

<http://www.123.go.id>

I. U M U M

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan BPS merupakan pedoman untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memuat pokok-pokok kebijakan Pimpinan BPS dalam mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan lapangan. Buku petunjuk teknis ini berisi penjelasan seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPS selama Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan klasifikasi Akun Standar BPS menjalankan fungsi Pelayanan Umum, Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri. Untuk menjalankan fungsi tersebut, seluruh kegiatan BPS dikelompokkan menjadi 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKyB);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN);
3. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S); dan
4. Program Pendidikan Kedinasan (PK).

II. PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Pedoman dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran BPS tahun 2010 adalah:
 - a. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
 - b. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 - d. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - e. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
 - h. PMK No. 119/PMK.02 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010;

- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar; dan
 - k. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
2. Arahan kebijakan Pimpinan BPS dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran BPS Tahun 2010 antara lain:
- a. Pelaksanaan program kegiatan dengan pengelolaan pembiayaannya tetap dilaksanakan sesuai dengan azas keterbukaan, peran serta, pembakuan, efisiensi dan kreatifitas;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, pada akhir tahun anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Meningkatkan efisiensi di segala bidang serta menghindarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh satuan kerja harus tetap ditingkatkan.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Seperti yang telah disebutkan pada bagian umum, empat program BPS di tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan Penerapan Pemerintahan yang Baik di bidang penyediaan data statistik.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 adalah :

- a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji, lembur, honorarium, dan vakasi.
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini meliputi pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS; pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan; poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat); pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; pengadaan pakaian dinas pegawai; pengadaan toga/pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga

teknis lainnya; perawatan gedung kantor; perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10; perawatan kendaraan bermotor roda 2; perawatan sarana gedung; langganan daya dan jasa; jasa pos/giro/sertifikat; dan operasional perkantoran dan pimpinan.

c. Pelayanan Publik atau Birokrasi

Kegiatan ini meliputi penyusunan naskah buku lainnya; penyusunan/pengumpulan/pengolahan/*updating*/analisa data dan statistik; penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program; penyelenggaraan humas, protokol dan pemberitaan; evaluasi/laporan kegiatan; perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara; monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; serta pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja, baik BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota secara bertahap untuk mendukung kelancaran administrasi serta kegiatan operasional pengumpulan data. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 mencakup pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, serta rehabilitasi bangunan gedung negara.

3. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

Program P2S bertujuan untuk:

- a. Menyediakan secara berkelanjutan statistik dasar yang berkualitas di bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter dan bidang lain baik yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, komputasi data serta administrasi;
- c. Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat;

- d. Mengembangkan metode penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan;
- e. Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.

Arah kebijakan program penyempurnaan dan pengembangan statistik adalah untuk:

- a. Menjamin kesinambungan penyediaan informasi statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun regional; dan
- b. Mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 yaitu:

- A. Penyelenggaraan Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik
 - 1) Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Kegiatan ini meliputi Pengelolaan Administrasi Keuangan serta Pengadaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa Non Konstruksi.
- B. Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran
 - 1) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
Kegiatan ini meliputi Penyusunan Renstra BPS 2010-2014; Penyusunan *Sigmaplan* BPS 2010-2030; *Updating Database* Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS; Evaluasi Kegiatan Statistik; Penyusunan SBK dan SHBJ; Penyusunan Laporan Aktivitas dan LAKIP BPS; Monitoring dan Evaluasi Program BPS; Pengelolaan BMN; STATCAP-CERDAS TF093092 tahun 2010 (BLN); dan Biaya Pendamping STATCAP-CERDAS.
 - 2) Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan
Kegiatan ini meliputi Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan

BPS; Peningkatan Kualitas dan Wawasan SDM; Penyusunan *Soft Library* Materi Pimpinan; Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2010; Studi Opini Publik tentang Data Strategis BPS; Rancangan Peraturan Kepala BPS; *Soft Library* Dokumentasi Peraturan Perundangan; Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi BPS; serta Sosialisasi Renstra dan Penyusunan Anggaran 2011.

3) Penyusunan Renja-KL dan Anggaran

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Renja-KL; dan Penyusunan Anggaran.

C. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Kegiatan ini meliputi Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses *On-Line*; Pengembangan Sistem Basis Data; Pengembangan Sistem Informasi; Pembuatan Program Pengolahan dan *Repository Data*; Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi; Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website*; Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik; Pembuatan Kemasan Layanan Publik Berbasis Digital; dan Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Sistem Informasi 2011.

D. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

1) Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Kegiatan ini meliputi Diklat Pimpinan Tingkat IV; Diklat Pimpinan Tingkat III; dan Diklat Pimpinan Tingkat II.

2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Kegiatan ini meliputi Diklat Prajabatan Golongan II; dan Diklat Prajabatan Golongan III.

3) Rintisan Pendidikan Gelar

Kegiatan ini meliputi Tunjangan Mahasiswa Tugas Belajar Program S2 dan S3 di Perguruan Tinggi Negeri Dalam Negeri.

4) Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja

Kegiatan ini meliputi Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli; Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli; Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar; Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar; Diklat Pemograman *Database* Terintegrasi; Diklat Kompetensi Pejabat Eselon IV; Pembinaan Administrasi dan Pemberkasan CPNS; Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi; Pemilihan KSK Berprestasi; *Assesment Center*; Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; Penyusunan Uraian Pekerjaan Dalam Rangka Penyusunan Informasi

Jabatan; Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian; Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan; Sosialisasi Penerimaan Bukan Pajak; dan Pembinaan Administrasi Keuangan.

- E. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga
- 1) Evaluasi/Laporan Kegiatan
Kegiatan ini meliputi *Review* Laporan Keuangan BPS Tahun 2009; dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010.
- F. Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi
- 1) Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/*Updating*/Analisa Data & Statistik
Kegiatan ini meliputi Penyusunan Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen; Analisis Disparitas; Analisis Statistik Ekonomi; Penyempurnaan dan Pengembangan Konsistensi Statistik Ekonomi; Pengembangan Indikator Pembangunan Regional (IPR); Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Sosial; Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi; Pengembangan Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja; Pengembangan Model Perekonomian Indonesia; Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi, dan Ukuran-ukuran Statistik; Penyusunan dan Pemeliharaan Kerangka Sampel Statistik Bidang; dan Studi *Baseline* SDM BPS.
 - 2) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
 - 3) Survei Bidang Industri
Kegiatan ini meliputi Survei Industri Besar/Sedang Bulanan; Survei Industri Mikro dan Kecil; dan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan.
 - 4) Survei Bidang Pertanian
Kegiatan ini meliputi Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubun; Survei Perusahaan Perkebunan; Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI; Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian; Survei Perusahaan Peternakan dan RPH; Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kedelai; Survei Perusahaan Kehutanan; dan Statistik Kehutanan Rakyat.
 - 5) Survei Bidang Perdagangan
Kegiatan ini meliputi Kompilasi Data Statistik Ekspor; Kompilasi Data Statistik Impor; Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan; Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras; Survei Statistik Lembaga Keuangan dan *Monitoring Kurs*

Valuta Asing; Survei Statistik Harga Perdagangan Besar; Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD; dan Survei Statistik Harga Produsen.

6) Survei Transportasi

Kegiatan ini meliputi Survei Transportasi; dan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi.

7) Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

Kegiatan ini meliputi Survei Bidang Jasa dan Pariwisata dan Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi.

8) Survei Bidang Kependudukan

Kegiatan ini meliputi Survei Upah; Survei Struktur Upah; Sakernas Semester I 2010; Sakernas Semester II 2010; Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Pemuda; Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga untuk Penimbang Survei Kependudukan 2010; Susenas Panel 2010 (Estimasi Provinsi); Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (Estimasi Kabupaten/Kota); Identifikasi Aglomerasi Potensi Desa di Indonesia; Penyusunan Publikasi Tren/Pola Migrasi Dari Berbagai Sensus dan Survei; Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2010; serta Pilot Pendataan Podes 2010.

9) Survei Pertambangan

Kegiatan ini meliputi Survei Pertambangan dan Energi; serta Survei Konstruksi.

10) Survei Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup; Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan; Penyusunan Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan Studi Perilaku Peduli Lingkungan Hidup.

11) Survei Bidang Sosial Ekonomi

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Neraca Regional; Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK; Penyusunan PDB Sektor Tahun Dasar Berjalan; Persiapan Penyusunan *Updating* Tabel *Input-Output* Indonesia 2010; Penyusunan Survei Khusus Perdagangan dan Jasa (SKSPJ); Survei Penyediaan Penggunaan Jasa-jasa (SPPJ); Penyusunan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan dan Jasa; Penyempurnaan Data Dasar Penghitungan PDB dan PDRB; Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling 2010); Survei Khusus *Input-Output* (SKIO) 2010; Penyusunan Neraca

Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba; Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta; Penyusunan Neraca Arus Dana (NAD); Studi Penyusunan Stok Kapital; Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB; PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan; Konsolidasi Neraca Pengeluaran; Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE); serta Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Neraca.

12) Survei Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan; Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010; Penyusunan Laporan dan Stok Modal Sosial 2009; serta Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010.

G. Pembinaan Statistik dan Sensus

1) Survei Bidang Kependudukan Data dan Statistik

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dan perencanaan Sensus Penduduk 2010 yang meliputi Perencanaan SP2010; Pelatihan SP2010; Pelaksanaan Lapangan 2010; Pelatihan Demografi; Pengolahan 2010; *Updating* Peta Wilayah Administrasi; PES 2010; Publisitas Pelaksanaan SP2010; Pembentukan MFD SP2010; Pembangunan Desain dan Arsitektur Metadata SP2010; Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Publikasi SP2010; Pembangunan Desain dan Arsitektur Akses *Online* dan Layanan SP2010; Pembangunan Desain dan Arsitektur Sistem Dokumentasi SP2010.

4. Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Sasaran Program Pendidikan Kedinasan ini adalah: tersedianya sarana dan prasarana pendukung pendidikan kedinasan, sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 adalah:

A. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

1) Pendidikan/ Pengajaran/Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktek)

Kegiatan ini meliputi: Persiapan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik; Pelaksanaan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik; Pengajaran dan Perkuliahan; Penyelenggaraan Program D-IV; dan Riset Dosen.

Dalam implementasinya, program-program tersebut di atas diuraikan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan fokus Rencana Strategis BPS 2005 - 2009, yaitu:

- a. Menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan untuk perumusan kebijakan dan mendukung pembangunan daerah;
- b. Koordinasi dengan *stakeholders*; dan
- c. Pembangunan kapasitas.

Dalam era sekarang ini, BPS akan melanjutkan peningkatan program strategis yang harus didukung oleh semua pihak dan harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010, yaitu:

- a. Pelaksanaan Sensus Penduduk di tahun 2010. Pembinaan konsep dan implementasi program ini ditugaskan kepada Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi MIS dan Sekretaris Utama;
- b. Peningkatan statistik wilayah kecil (*small area statistics*) dan pemasyarakatan data statistik sehingga setiap penyajian data statistik benar-benar "*user-oriented dan user friendly*". Pembinaan konsep dan implementasi program ini ditugaskan kepada Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, serta Deputi Bidang Statistik Sosial;
- c. Penyatuan dan keterpaduan data statistik baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembinaan dan implementasi program ini ditugaskan kepada Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- d. Peningkatan sistem informasi statistik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembinaan dan implementasi program ini ditugaskan kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- e. Peningkatan sistem pengelolaan sarana/prasarana kerja dan pengelolaan tertib lingkungan kantor (kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan). Pembinaan dan implementasi program ini ditugaskan kepada Sekretaris Utama; dan
- f. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan ditugaskan kepada Inspektur Utama.

IV. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan sepenuhnya dijalankan oleh Kepala BPS, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektur Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam

Peraturan Presiden No.86 Tahun 2007, dan Peraturan Kepala BPS No.7 Tahun 2008. Semua permasalahan yang timbul disampaikan kepada Pimpinan BPS sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Untuk pengelolaan anggaran, Kepala BPS bertindak selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi harus dilakukan dengan teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Para pengelola kegiatan harus mengacu pada semua ketentuan peraturan pengelolaan anggaran yang berlaku, seperti Undang-undang Perbendaharaan, Keppres No.80 Tahun 2003, serta berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Untuk kelancaran mekanisme pelaksanaan kegiatan, maka susunan organisasi pelaksanaannya perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan baik dari segi sistem maupun penerapannya antara lain mengenai:
 - a. Tugas, fungsi dan kewenangan setiap unsur pelaksana kegiatan;
 - b. Hubungan tata kerja antar unsur pelaksana kegiatan yang lebih harmonis dan terbuka serta memberikan peran secara lebih merata kepada semua satuan kerja; dan
 - c. Pelimpahan beban dan tanggung jawab sebagai pemegang tolok ukur kepada Pejabat Eselon III dalam menangani masalah pelaksanaan kegiatan.
5. Pada dasarnya semua aspek yang menyangkut pembiayaan seperti yang tertuang di dalam DIPA adalah hasil perencanaan bersama antara seluruh unit kerja di lingkungan BPS. Apabila dalam pelaksanaan nanti masih ditemukan hambatan, perlu dipecahkan melalui dua tahap pendekatan yaitu:
 - a. Permasalahan yang sifatnya tidak prinsip sejauh mungkin dapat diselesaikan oleh unit satuan kerja yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal yang memang mendesak dan menyangkut kebijakan yang telah ditetapkan Pimpinan BPS, harus dilaporkan ke Biro Bina Program untuk mendapatkan keputusan Pimpinan BPS.
6. Untuk pengelolaan anggaran SP2010 mengacu pada Buku Pedoman Pengelolaan Administrasi SP2010.

**ORGANISASI
PELAKSANAAN
KEGIATAN**

2

<http://www.15-90.id>

I. ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BPS tahun 2010, di bawah ini diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan susunan organisasi serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

1. Susunan organisasi pengelola kegiatan dan anggaran BPS terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK);
 - d. Penanggung Jawab Harian Kegiatan (PJHK);
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - f. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - g. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (P3NBP);
 - h. Pelaksana Kegiatan (PK);
 - i. Pejabat Pengadaan;
 - j. Panitia Pengadaan;
 - k. Bendahara Penerimaan;
 - l. Bendahara Pengeluaran;
 - m. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - n. Staf Pengelola Keuangan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola kegiatan dan anggaran:
 - a. PA
Pengguna Anggaran merupakan penanggung jawab dan pembina seluruh kegiatan di lingkungan BPS, yaitu Kepala BPS.
 - b. KPA
Kuasa Pengguna Anggaran bertugas membantu Kepala BPS dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Untuk TA 2010, Kepala BPS menunjuk Kepala Biro Bina Program sebagai KPA.
 - c. PJK
Penanggung Jawab Kegiatan bertugas membantu Kepala BPS dalam membina dan mengelola kegiatan menurut bidang tanggung jawabnya. PJK adalah Sekretaris Utama, para Deputi, dan Inspektur Utama.
 - d. PJHK
 - 1) Penanggung Jawab Harian Kegiatan adalah Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusdiklat/Ketua STIS/Inspektur, serta sekaligus sebagai atasan langsung

dari pelaksana kegiatan yang pelaksanaannya secara administratif berada di bawah tanggung jawabnya.

- 2) PJHK harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, serta hubungan tata kerja antar unit kerja di lingkungannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BPS.
- 4) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan semua kegiatan sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BPS.

e. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas membantu KPA dalam mengelola anggaran. Untuk TA 2010 KPA menunjuk 7 (tujuh) orang PPK, yaitu:

- 1) Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan untuk Program PSPAN;
- 2) Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan untuk Program PKyB,
- 3) Kepala Bagian Penyusunan Rencana untuk Program P2S, Kegiatan: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (0002), Pembinaan/ Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran (0035), Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (0054);
- 4) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk Program P2S, Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (0067), Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga (0092);
- 5) Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional untuk Program P2S Kegiatan Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan Sistem, Data, Statistik, dan Informasi (0094);
- 6) Kepala Bagian Standar Harga, Monitoring, Program dan Evaluasi Program untuk Program P2S Kegiatan Pembinaan Statistik dan Sensus (05551);
- 7) Kepala Bagian Administrasi Umum untuk Program Pendidikan Kedinasan.

f. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar bertugas membantu KPA dalam hal menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

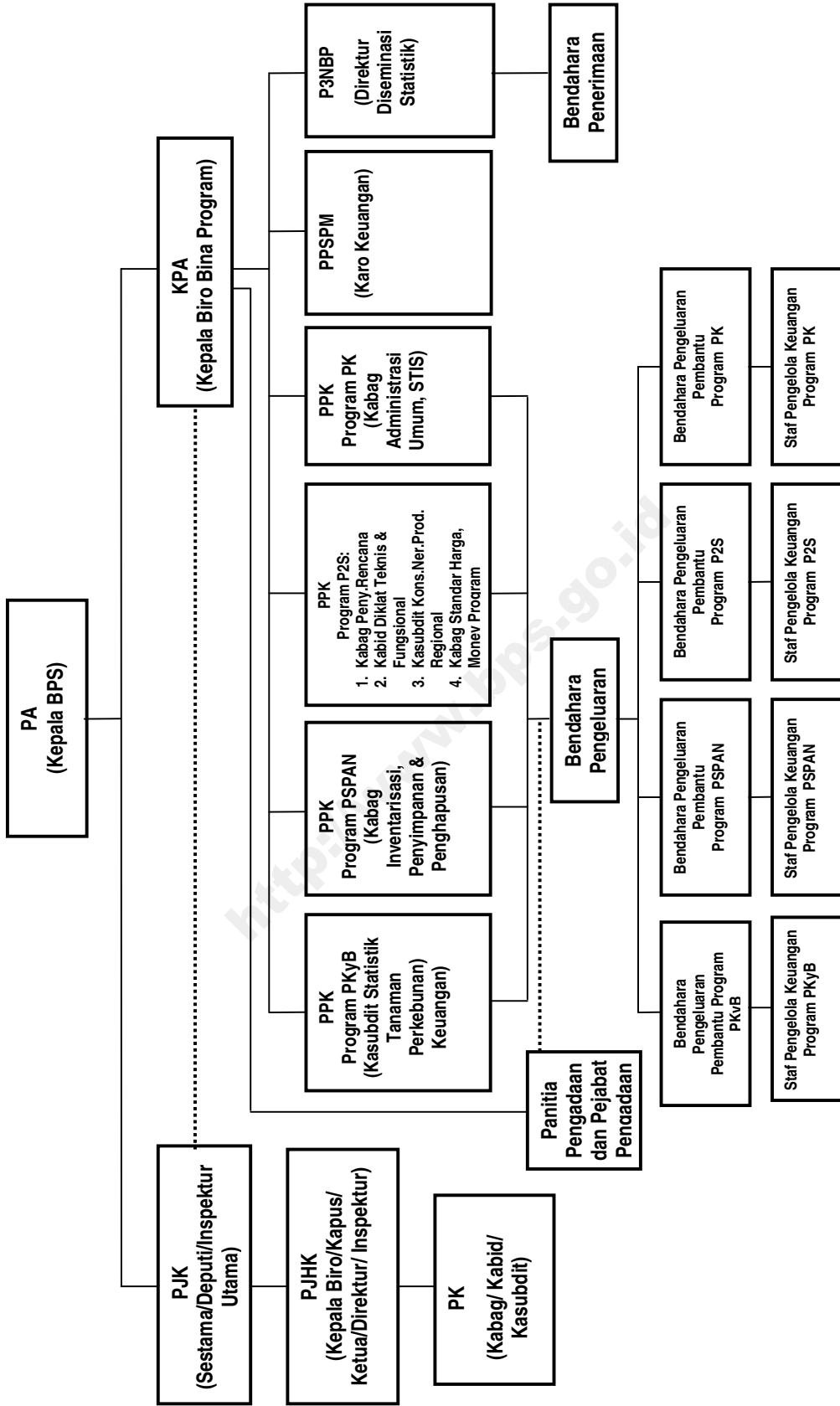
menerbitkan/menandatangani SPM. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah Kepala Biro Keuangan.

- g. **Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak**
Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak bertugas membantu KPA dalam hal pemungutan dan penerimaan negara. P3NBP adalah Direktur Diseminasi Statistik.
- h. **PK**
 - 1). PK adalah Kabag/Kabid/Kasubdit yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada PJHK.
 - 2). PK bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan, baik dalam hal teknis maupun pengelolaan administrasi keuangan dari kegiatan yang bersangkutan.
- i. **Pejabat Pengadaan**
Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh KPS dalam rangka melakukan pengadaan barang/jasa dengan nilai total pengadaan paling tinggi Rp. 50 juta. Dalam mengadakan barang/jasa dimaksud, Pejabat Pengadaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Panitia Pengadaan**
Panitia Pengadaan dibentuk dan ditetapkan oleh KPA sesuai kebutuhan. Panitia Pengadaan bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan BPS berdasarkan perintah KPA. Panitia Pengadaan dalam mengadakan barang/jasa harus berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- k. **Bendahara Penerimaan**
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan (menerima, menyimpan dan menyetorkan) uang PNBPN sesuai dengan perintah dan petunjuk KPA/P3NBP.
- l. **Bendahara Pengeluaran**
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab terhadap pengelolaan (menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan) uang untuk keperluan belanja negara sesuai dengan perintah dan petunjuk KPA.

- m. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pembantu Pengeluaran bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola uang negara pada keempat program BPS.
- n. Staf Pengelola Keuangan
Staf Pengelola Keuangan bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam mengelola uang negara pada keempat program BPS.

<http://www.bps.go.id>

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2010



Keterangan :

PPK Program P2S ada 4, yaitu:

1. Kepala Bagian Penyusunan Rencana untuk kode kegiatan 0002, 0035, 0054
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk kode kegiatan 0067 dan 0092
3. Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional untuk kode kegiatan 0094
4. Kepala Bagian Standar Harga, Monitoring, Program dan Evaluasi Program untuk kode kegiatan 05551

II. MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN

Mekanisme penggunaan anggaran tahun 2010 dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan penggunaan anggaran triwulanan; dan
2. Pelaksanaan penggunaan anggaran

Secara rinci kedua proses penggunaan anggaran tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan penggunaan anggaran triwulanan

- a. PK menyampaikan seluruh rencana kegiatan di lingkungannya selama tiga bulan ke depan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan jadwal kegiatan di Buku Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis) kepada PJHK dengan mengisi Formulir Rencana Penggunaan Anggaran Triwulanan (*FORM-RPA*);
- b. PJHK menandatangani rencana yang sudah dibuat dan meneruskan ke masing-masing PJK untuk disetujui;
- c. *FORM-RPA* yang sudah disetujui PJK disampaikan ke Sestama u.p. Biro Bina Program untuk dievaluasi. Pengajuan *FORM-RPA* selambat-lambatnya tanggal 15 sebelum triwulan yang diusulkan, kecuali untuk triwulan I paling lambat tanggal 31 Januari;
- d. Berdasarkan hasil evaluasi Sestama dibuat rekapitulasi rencana kegiatan triwulanan untuk ditandatangani oleh KPA; dan
- e. Dokumen *RPA* yang sudah disetujui KPA disampaikan kepada PJK yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPK dan Biro Keuangan sebagai dasar evaluasi terhadap realisasi pengajuan penggunaan anggaran. Sebaliknya, bila perencanaan kegiatan tidak disetujui oleh KPA maka dokumen akan dikembalikan ke PK dan ditembuskan ke PJK untuk dilakukan perbaikan seperlunya.

2. Pelaksanaan penggunaan anggaran

Secara umum, penggunaan anggaran oleh PK harus mendapat persetujuan dari masing-masing PJK sepanjang usulan PK sesuai dengan rencana triwulanan. Pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh PJK disampaikan kepada KPA untuk diproses lebih lanjut. KPA mempunyai kewenangan membatalkan persetujuan PJK apabila kegiatan yang diajukan tidak terdapat dalam rencana triwulanan. PK dapat melakukan revisi rencana triwulanan kepada KPA untuk

memperoleh persetujuan. Selanjutnya proses pencairan dana dilakukan berdasarkan surat perintah membayar setelah mendapat persetujuan PPK. Berikut ini diuraikan proses pencairan permintaan penggunaan anggaran pada bulan berjalan yang dibedakan menurut rincian pengeluaran, yaitu :

a. Tidak Melalui Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Penggunaan anggaran yang tidak melalui panitia pengadaan barang dan jasa antara lain untuk kegiatan perjalanan dinas (*FORM-JLN*), upah pendataan, konsinyasi (*FORM-OPS*), honor nara sumber, jasa konsultan (*FORM-JS*) dan sebagainya.

- 1) PK menyampaikan formulir permintaan penggunaan anggaran tersebut kepada PJHK yang menjadi atasan langsungnya;
- 2) PJHK menandatangani permintaan penggunaan anggaran tersebut dan meneruskan kepada PJK untuk disetujui dan ditandatangani;
- 3) Formulir yang sudah disetujui oleh PJK dikirim ke KPA untuk mendapat persetujuan. Khusus untuk kegiatan konsinyasi, formulir operasional yang telah disetujui KPA harus dilengkapi dengan SK KPA;
- 4) Formulir yang telah disetujui oleh KPA selanjutnya disampaikan ke PPK masing-masing kegiatan untuk diproses lebih lanjut. Kegiatan yang telah diproses PPK disampaikan ke Biro Keuangan untuk proses pembuatan SPJ;
- 5) Sebaliknya formulir yang tidak disetujui oleh KPA karena tidak ada dalam perencanaan triwulanan atau jadwal kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dalam rencana triwulanan, maka dokumen akan dikembalikan ke PK dengan tembusan ke PJK untuk dilakukan perbaikan dalam rencana triwulanan;
- 6) Selanjutnya proses pencairan anggaran yang sudah disetujui akan dilakukan oleh Biro Keuangan; dan
- 7) Biro Keuangan membuat laporan realisasi penggunaan anggaran setiap bulan kepada KPA.

b. Melalui Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Penggunaan anggaran yang melalui panitia pengadaan barang dan jasa antara lain untuk kegiatan pencetakan dokumen/publikasi (*FORM-CTK*), pengadaan barang/jasa seperti untuk belanja modal gedung dan bangunan (*FORM-GDB*),

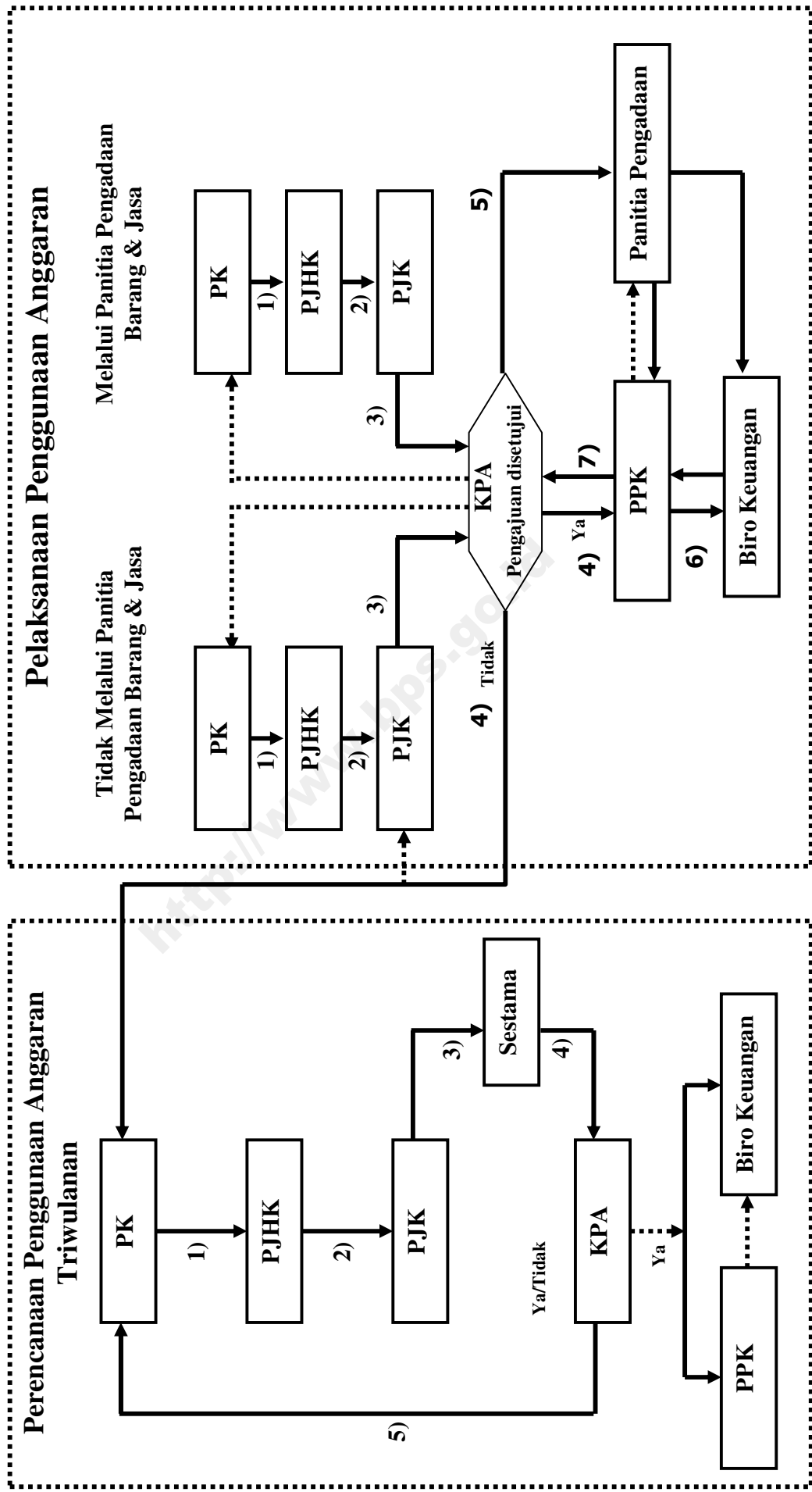
untuk belanja modal peralatan dan mesin/fisik lainnya (*FORM-PMF*), untuk belanja bahan (*FORM-BHN*), untuk pengadaan tenaga jasa konsultan (*FORM-JS*).

- 1) PK menyampaikan permintaan penggunaan anggaran untuk pencetakan dokumen/publikasi/pengadaan barang/jasa kepada PJHK yang menjadi atasan langsungnya¹⁾. Rencana pencetakan dokumen/publikasi/pengadaan barang jasa yang disampaikan harus dilengkapi dengan spesifikasi dan volume;
- 2) PJHK secara tertulis menyampaikan permintaan penggunaan anggaran tersebut kepada PJK untuk disetujui;
- 3) Dokumen yang telah disetujui oleh PJK, diteruskan kepada KPA untuk mendapat persetujuan;
- 4) Kegiatan yang sudah disetujui KPA disampaikan kepada PPK masing-masing kegiatan untuk diproses dan diteruskan kepada panitia pengadaan. Sebaliknya kegiatan yang tidak disetujui oleh KPA karena tidak ada dalam perencanaan triwulanan atau jadwal kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dalam rencana triwulanan dikembalikan ke PK dengan tembusan ke PJK untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan triwulanan;
- 5) Dokumen yang sudah diproses oleh panitia pengadaan disampaikan kepada PPK masing-masing kegiatan untuk proses pembuatan SPK, dan selanjutnya PPK meneruskan kepada Biro Keuangan untuk proses pembuatan SPM;
- 6) Selanjutnya proses pencairan anggaran yang sudah disetujui akan dilakukan oleh Biro Keuangan; dan
- 7) Biro Keuangan membuat laporan realisasi penggunaan anggaran setiap bulan kepada KPA.

Secara lebih sistematis mekanisme penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada Diagram Alur Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 berikut:

1) Khusus untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara terpadu, seperti pengadaan ATK, *computer supplies*, dan sebagainya, usulan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Biro Umum berdasarkan kebutuhan dari masing-masing PK setiap triwulan.

ALUR PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010



III. MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2006, setiap kementerian/lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Perka BPS No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Badan Pusat Statistik.

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:

- 1) Penanggung jawab kegiatan melaporkan kegiatannya dengan menggunakan formulir A kepada penanggung jawab program;
- 2) Selanjutnya penanggung jawab program melaporkan ke kepala kementerian/lembaga dengan menggunakan formulir B; dan
- 3) Setiap kementerian/lembaga melaporkan seluruh pelaksanaan rencana kegiatan dengan menggunakan formulir C ke Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dengan tembusan ke Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan data pendukung dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Biro Keuangan c.q. Bagian Perbendaharaan menyampaikan laporan realisasi keuangan ke Biro Bina Program setiap akhir bulan;
2. Biro Umum c.q. Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekspedisi melaporkan progres pengadaan barang dan jasa setiap bulan ke Biro Bina Program; dan
3. Biro Bina Program c.q. Bagian Standar Harga, Monitoring Program dan Evaluasi Program berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran menyusun pelaporan formulir A dan formulir B untuk satker BPS Pusat dan form C BPS.

IV. REVISI DIPA

Dalam hal DIPA memerlukan perubahan, PA/KPA dapat melakukan revisi DIPA pada tahun berjalan dan mengajukan pengesahannya kepada Dirjen Perbendaharaan.

1. Pengertian Revisi DIPA

Revisi DIPA adalah perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA. Ada 2 (dua) macam Revisi DIPA, yaitu:

- a. Revisi Kuning

Revisi Kuning adalah Penggantian Surat Pengesahan DIPA karena perubahan Pagu DIPA dan/atau perubahan Kode Satker.

b. Revisi Putih

Revisi Putih adalah revisi DIPA yang tidak mengakibatkan perubahan pagu dan/atau tidak mengakibatkan perubahan Kode Satker, antara lain :

- Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN, cara penarikan dana PHLN dan kode lokasi;
- Ralat kode akun;
- Perubahan akibat kekeliruan pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA;
- Pembukaan tanda blokir;
- Pergeseran dana dalam satu DIPA;
- Perubahan nomenklatur satker; dan
- Perubahan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2009.

2. Usulan Revisi DIPA

- a. PK menyampaikan dokumen usulan revisi DIPA kepada PJHK yang menjadi atasan langsungnya untuk ditandatangani;
- b. PJHK menyampaikan dokumen usulan revisi DIPA ke masing-masing PJK;
- c. Usulan revisi DIPA yang sudah disetujui PJK selanjutnya disampaikan kepada Sestama dengan tembusan kepada KPA;
- d. Setelah usulan revisi DIPA dikaji Biro Bina Program dan disetujui Sestama selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Departemen Keuangan untuk mendapat pengesahan. Sebaliknya bila usulan revisi DIPA tidak disetujui, maka dokumen usulan revisi DIPA dikembalikan ke PK untuk diperbaiki kembali;
- e. Usul pengesahan revisi DIPA diajukan oleh PA/Kuasa PA kepada Dirjen Perbendaharaan baik akibat perubahan SAPSK/SRAA maupun tanpa perubahan SAPSK/SRAA;
- f. Usul pengesahan revisi DIPA agar mencantumkan penjelasan/alasan dilakukannya revisi DIPA;
- g. Penyampaian usul revisi DIPA tersebut disertai lampiran:
 - Revisi DIPA halaman I – IV untuk Revisi Kuning;

- Revisi DIPA sesuai format yang tertuang dalam lampiran II Surat Dirjen Perbendaharaan untuk Revisi Putih;
 - ADK revisi DIPA; dan
 - Data pendukung lainnya sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur tata cara perubahan DIPA.
- h. Penyusunan konsep revisi DIPA baik revisi kuning maupun revisi putih menggunakan Aplikasi DIPA sesuai dengan petunjuk teknis pengoperasian Aplikasi DIPA; dan
- i. PA/Kuasa PA tidak melakukan pencairan dana yang dapat menimbulkan pagu minus selama proses penyelesaian revisi DIPA.

3. Pengesahan Revisi DIPA

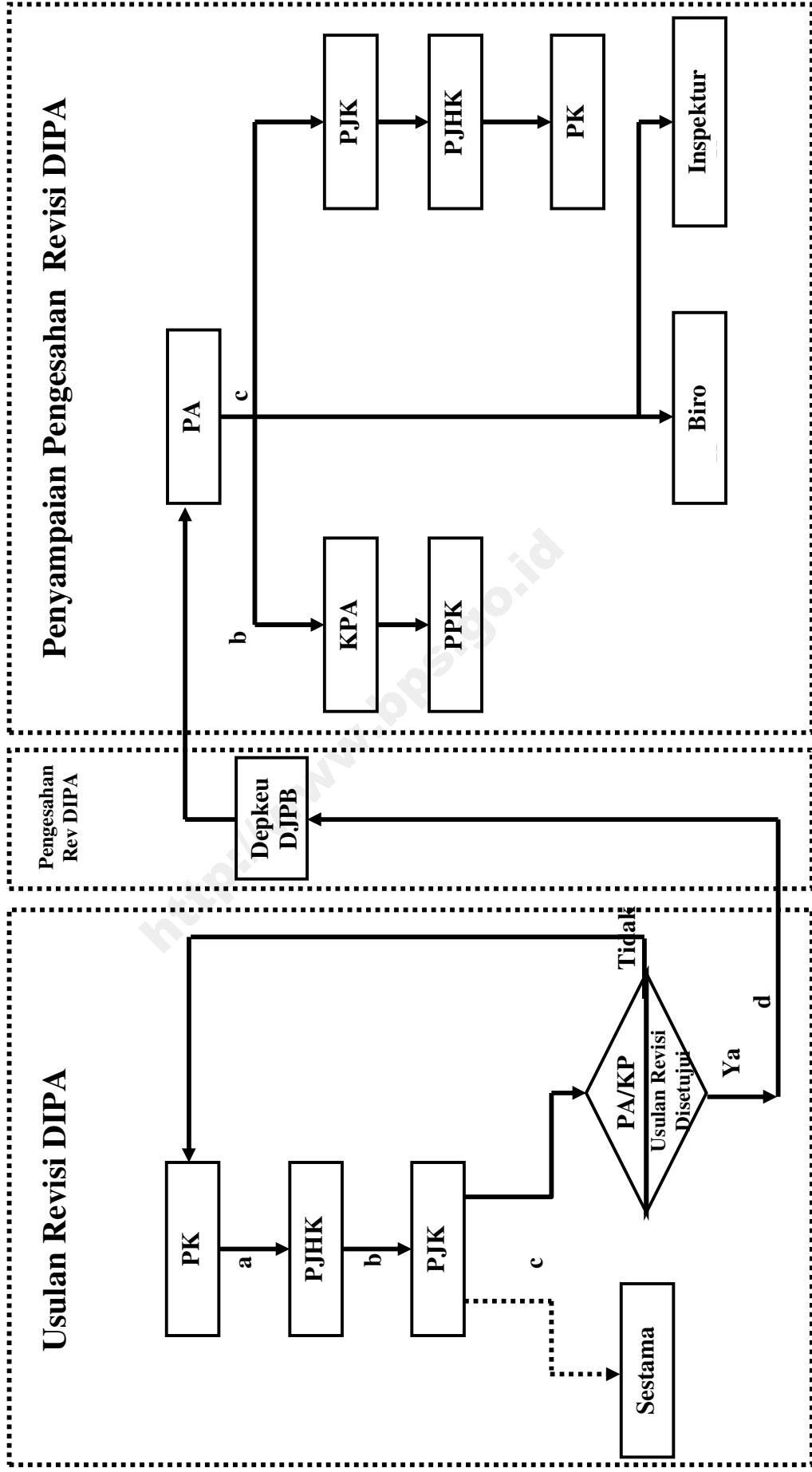
Setelah menerima usul revisi dari PA/Kuasa PA Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan proses sebagai berikut :

- 1) Meneliti kelengkapan usul revisi DIPA;
- 2) Melaksanakan penelaahan, mengadministrasi dokumen revisi DIPA dan meng-*update* data server;
- 3) Membuat Catatan Penelaahan untuk revisi kuning dan Nota Dinas untuk revisi putih, dengan melampirkan berkas penelaahan untuk diproses lebih lanjut; dan
- 4) Proses administrasi penyelesaian pengesahan revisi DIPA menggunakan Aplikasi Monitoring Penyelesaian DIPA.

4. Persetujuan Revisi DIPA

- a. Revisi DIPA yang sudah disahkan oleh DJPb diterima oleh PA/Sestama, dan oleh Biro Bina Program dokumen diperbaiki sesuai dengan perubahan DIPA;
- b. Sestama menyampaikan revisi DIPA yang sudah disahkan tersebut kepada KPA, PPK, PJK yang bersangkutan, dan Biro Keuangan; serta
- c. PJK menyampaikan revisi DIPA yang sudah disahkan kepada PJHK, yang selanjutnya dokumen tersebut diteruskan kepada PK untuk dilaksanakan.

ALUR REVISI DIPA TAHUN ANGGARAN 2010



V. ALUR REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

Dalam hal terdapat perubahan POK sebagai akibat dari Revisi DIPA, penyesuaian atas realisasi, perubahan judul pelaksanaan aktivitas dan lainnya, maka POK harus disesuaikan/*di-update*.

Revisi terhadap POK sepanjang tidak mengubah DIPA dilakukan oleh PA/KPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Usulan Revisi POK

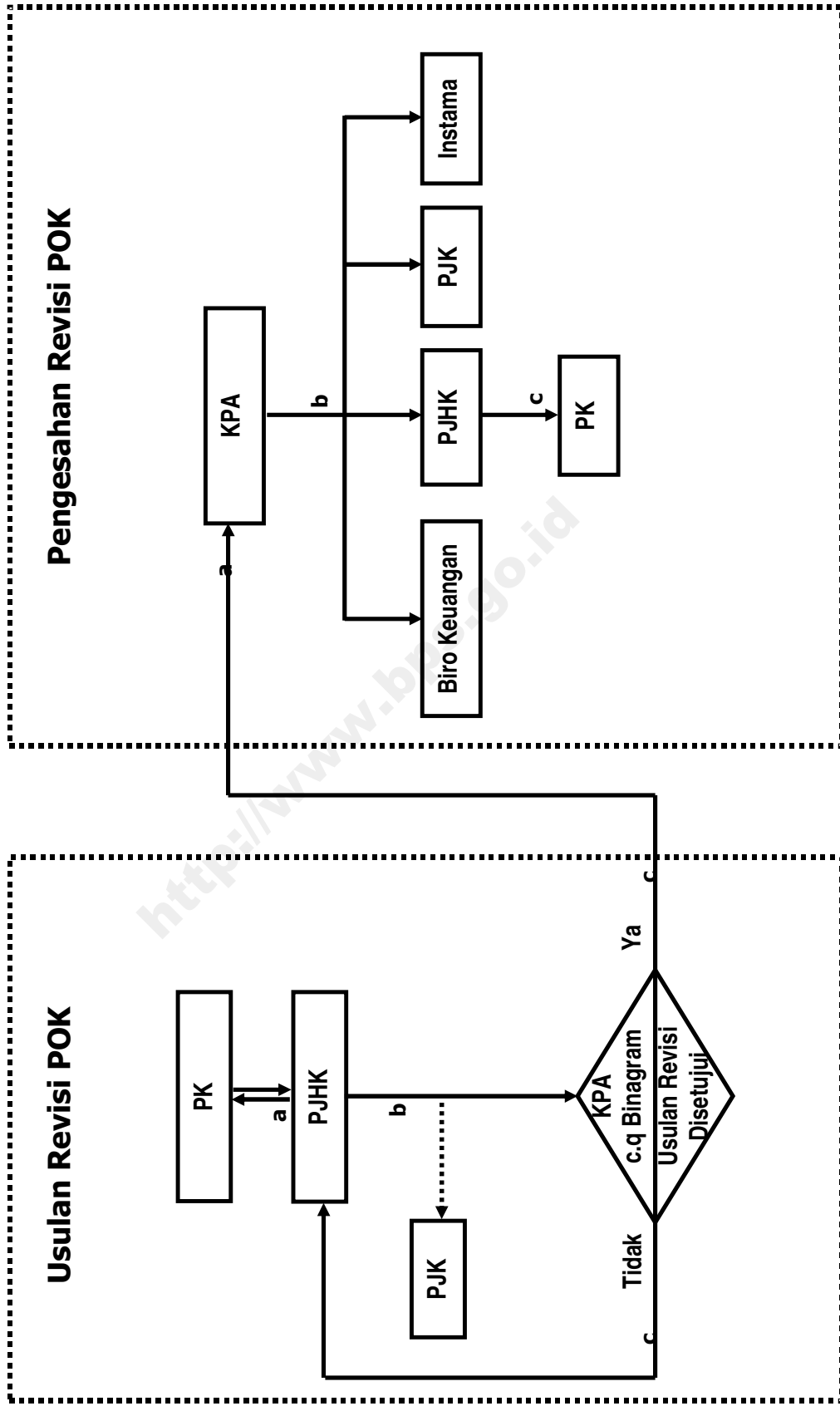
- a. PK menyampaikan dokumen usulan revisi POK kepada PJHK yang menjadi atasan langsungnya untuk ditandatangani;
- b. PJHK menyampaikan dokumen usulan revisi POK ke KPA dengan tembusan ke masing-masing PJK; dan
- c. Usulan revisi POK dikaji oleh Biro Bina Program dan apabila disetujui selanjutnya disampaikan kepada KPA. Sebaliknya bila usulan revisi POK tidak disetujui, maka dokumen usulan revisi POK dikembalikan ke PK untuk diperbaiki kembali.

2. Pengesahan Revisi POK

- a. Revisi POK yang sudah disetujui oleh Biro Bina Program diterima oleh KPA untuk disahkan;
- b. KPA melalui Biro Bina Program menyampaikan revisi POK yang sudah disahkan tersebut kepada PJHK yang bersangkutan, PPK yang bersangkutan, Inspektur Utama dan Biro Keuangan; dan
- c. PJHK menyampaikan revisi POK yang sudah disetujui kepada PK untuk dilaksanakan.

Untuk jenis revisi yang harus dilakukan dan kewenangan pengesahannya dapat dilihat pada gambar di halaman 27.

ALUR REVISI POK TAHUN ANGGARAN 2010



ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

JENIS REVISI YANG HARUS DILAKUKAN DAN KEWENANGAN PENGESAHAN JIKA TERJADI PERGESERAN BIAYA :

JENIS REVISI/KEWENANGAN PENGESAHAN	DALAM SATU PROGRAM											
	DALAM SATU KEGIATAN											
	SUB KEGIATAN SAMA				PINDAH SUB KEGIATAN				PINDAH KEGIATAN			
	KELOMPOK AKUN SAMA		PINDAH KELOMPOK AKUN		AKUN SAMA		PINDAH AKUN		AKUN SAMA		PINDAH AKUN	PINDAH AKUN
AKUN SAMA	PINDAH AKUN	4 DIGIT SAMA	4 DIGIT BEDA	AKUN SAMA	4 DIGIT SAMA	4 DIGIT BEDA	4 DIGIT SAMA	4 DIGIT BEDA	AKUN SAMA	AKUN SAMA	AKUN SAMA	AKUN SAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
Revisi yang dilakukan Kewenangan pengesahan revisi dalam jenis belanja yang sama Kewenangan pengesahan revisi dalam jenis belanja yang berbeda	POK	POK	DIPA	POK	POK	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA
	KPA	KPA	Kanwil DJPb	KPA	KPA	Kanwil DJPb	Kanwil DJPb	Kanwil DJPb	-	-	-	-
	-	-	DJA	-	-	DJA	-	DJA	-	-	DJA	DJA

Catatan :

1. Jika pergeseran biaya antar program, maka harus mengusulkan revisi DIPA ke DJA (Jakarta)
2. Jenis belanja dalam DIPA adalah : (51) Pegawai; (52) Barang dan (53) Modal
3. Aturan di atas tidak berlaku untuk Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

VI. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, serta Surat Peraturan Kepala BPS No.7 Tahun 2008, pada dasarnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap satuan organisasi dijalankan secara bertingkat. Kegiatan antar Bagian/Subdit dalam satu Biro/Direktorat dikoordinasikan oleh Kepala Biro/Direktur/Inspektur, antar Biro/Direktorat/Inspektorat dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur Utama, dan khusus yang menyangkut STIS dan Pusdiklat dikoordinasikan melalui Sekretaris Utama. Mengingat semakin meningkatnya beban kerja BPS dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, maka koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010 dijalankan menurut tugas dan fungsi satuan organisasi struktural masing-masing sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Selanjutnya tugas koordinasi tersebut diatur sebagai berikut:

1. Kepala BPS bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan serta menetapkan seluruh aspek kebijakan teknis dan administrasi;
2. Sekretaris Utama mempunyai tugas membantu Kepala BPS khususnya dalam mengkoordinasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pelatihan pegawai baik di dalam maupun di luar negeri seperti pemilihan/penetapan pegawai yang akan ditugaskan serta pengurusan administrasi, termasuk alokasi pembebanan biayanya;
 - b. Pembinaan terhadap aparat yang sehari-hari menangani masalah manajemen baik di pusat maupun di daerah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penunjang dan administrasi kegiatan (umum, kepegawaian, serta perlengkapan dan perbekalan); dan
 - d. Pengendalian pelaksanaan anggaran di lingkungan BPS baik dari segi pengelolaan keuangan, pencapaian target teknis, maupun keterpaduan pengelolaan manajemennya.
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas membantu Kepala BPS khususnya dalam mengkoordinasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembinaan terhadap pembentukan kerangka contoh induk (KCI) dan metodologi untuk berbagai pelaksanaan sensus dan survey;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian pengolahan dengan komputer, pembinaan tata cara dan pelaksanaan pengolahannya, serta aspek penyajian dan pelayanan data;

- c. Pembinaan sistem informasi statistik dan sistem informasi pemetaan/geografis serta kegiatan pengelolaan teknologi informasi;
 - d. Pembinaan terhadap pengelolaan biaya perjalanan yang secara teknis maupun aspek administrasi pembiayaan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - e. Perencanaan dan pengembangan personil di bidang komputer termasuk teknisi *hardware* serta mengkoordinasikan aspek teknis fungsional Pusdiklat.
4. Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas membantu Kepala BPS khususnya dalam hal mengkoordinasikan pembinaan teknis dan operasional kegiatan dalam direktorat-direktorat di lingkungannya sebagai berikut:
- a. Pembinaan terhadap berbagai analisis statistik agar berdaya guna dan berhasil guna, sejalan dengan program kegiatan serta prioritas BPS;
 - b. Pembinaan terhadap semua program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh satuan organisasi di lingkungannya termasuk koordinasi pelaksanaan di daerah;
 - c. Pemecahan semua permasalahan teknis dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi di lingkungannya termasuk di daerah;
 - d. Pelaksanaan kegiatan statistik sehari-hari baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek pembiayaan yang dilakukan oleh satuan organisasi di lingkungannya termasuk di daerah seperti :
 - 1). Tahap persiapan: penyusunan kuesioner, buku pedoman, pengadaan dokumen dan cara mendistribusikan sampai ke lokasi kegiatan, pengadaan instruktur, uji coba lapangan, serta penentuan tugas dan tanggung jawab para pelaksana di lapangan;
 - 2). Tahap pelaksanaan lapangan: semua permasalahan pencacahan/pengumpulan data di lapangan, pemeriksaan hasil pencacahan, dan penerimaan hasil-hasilnya; dan
 - 3). Tahap pengolahan sederhana, pra komputer, dan pasca komputer: semua kegiatan persiapan pengolahan, pelaksanaan pengolahan, serta persiapan penyusunan naskah publikasi.

- e. Pembinaan terhadap pegawai yang sehari-hari menangani masalah teknis di Pusat dan di Daerah;
 - f. Pembinaan terhadap pengelolaan biaya perjalanan yang secara teknis maupun aspek administrasi pembiayaan menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
 - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi kegiatan statistik antar departemen (pelayanan data yang dibutuhkan, sinkronisasi kegiatan, serta pembinaan kerjasama teknis dalam dan luar negeri).
5. Inspektur Utama mempunyai tugas membantu Kepala BPS khususnya dalam mengkoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS;
 - b. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS; dan
 - c. Pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala BPS.
6. Semua permasalahan yang timbul dalam rangka teknis dan operasional serta pengelolaan kegiatan sehari-hari di lingkungan Deputy Bidang Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Statistik Sosial, Deputy Bidang Statistik Produksi, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa serta Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Apabila permasalahan yang timbul tersebut mempunyai aspek dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretaris Utama serta Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, maka setelah permasalahannya dibahas secara matang oleh Deputy Bidang Teknis bersama Direktur yang bersangkutan dapat diteruskan kepada Sekretaris Utama dan atau Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.
7. Dalam melaksanakan koordinasi kegiatan sehari-hari Sekretaris Utama, para Deputy dan Inspektur Utama dibantu oleh para Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu:
- a. Sekretaris Utama dibantu oleh para Kepala Biro, Ketua STIS, dan Kepala Pusdiklat;
 - b. Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputy Bidang Statistik Sosial, Deputy Bidang Statistik Produksi, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, serta Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik dibantu oleh para Direktur di lingkungannya; dan
 - c. Inspektur Utama dibantu oleh para Inspektur.

8. Tugas dan fungsi Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur selaku PJHK sangat besar dalam membina para pelaksana kegiatan di lingkungannya sehari-hari, seperti:
 - a. Pembinaan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan termasuk aspek keterpaduannya;
 - b. Pembinaan terhadap teknis statistik yang dilaksanakan;
 - c. Pembinaan terhadap upaya pencapaian target dan kegiatan (fisik dan pembiayaan);
 - d. Pembinaan terhadap pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Penentuan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang berbentuk paket (urgensinya serta kewajaran rincian kegiatan dan satuan biayanya).
9. Pelaksanaan koordinasi sampai satuan organisasi pelaksana terkecil dilakukan secara bertingkat sesuai jalur birokrasi/jenjang hirarki baik yang bersifat struktural maupun fungsional sebagai berikut:
 - a. Bila ada permasalahan pada kegiatan dalam satu Biro/Pusat/STIS/Direktorat/Inspektorat, baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi dan keuangan, maka Kabag/Kabid/Kasubdit selaku PK menyampaikan permasalahannya kepada PJHK sebagai atasan langsungnya;
 - b. Bila ada permasalahan pada kegiatan yang berada di luar Biro/ Pusat/ STIS/Direktorat/Inspektorat, baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi dan keuangan, maka Kabag/ Kabid/Kasubdit selaku PK menyampaikan permasalahannya kepada Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur atasan langsungnya untuk dibahas dengan Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur yang terkait; dan
 - c. Apabila permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan pada tingkat Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur agar diteruskan ke Sestama/Deputi/Inspektur Utama sesuai dengan bidang tugasnya untuk diselesaikan baik pada tingkat Sestama/Deputi/Inspektur Utama yang bersangkutan maupun kemungkinan harus diselesaikan pada tingkat Kepala BPS.

VII. HUBUNGAN TATA KERJA ANTAR UNSUR PELAKSANA

1. Pada dasarnya tata kerja antar unsur pelaksana kegiatan bersifat hirarki struktural. Begitu pula dalam hal pembinaan dan pengendalian terhadap semua aparat pelaksana baik di pusat maupun di daerah harus tetap melalui jalur struktural yang berlaku.

2. Untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilakukan sesuai dengan jalur birokrasi seperti yang telah ditetapkan dalam Surat Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008.
3. Hubungan antar unsur pelaksana kegiatan harus tetap menerapkan asas saling membantu dan saling memahami batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
4. Dalam menangani setiap permasalahan harus menerapkan asas "*completed staff work*", yaitu semua pengelola kegiatan hendaknya sudah mampu menyusun dan mengolah setiap permasalahan serta mencarikan pemecahannya tanpa menunggu perintah atasan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
5. Setiap pelaksana kegiatan supaya tidak berpikir secara terkotak-kotak dan dalam pelaksanaan sehari-hari harus tetap memperhatikan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BPS.
6. Dalam menangani permasalahan yang bersifat lintas Bagian/Bidang/Subdirektorat, Biro/Pusat/STIS/Direktorat/Inspektorat dan lintas Deputi seperti permintaan data dari pihak luar, pengelolaan hubungan kerjasama luar negeri, pemeliharaan komputer dan pengelolaan kegiatan penunjang lainnya harus dilandasi semangat saling mengisi dan mencari pemecahan bersama yang paling optimal.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan aparat eksternal, baik yang mempunyai hubungan struktural maupun fungsional, diperlukan pendekatan untuk menjamin agar aparat tersebut sepenuhnya dapat membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan, yaitu:
 - a. Pendekatan secara formal melalui jalur birokrasi yang berlaku; dan
 - b. Pendekatan informal guna memperoleh dukungan moral untuk setiap bantuan yang diperlukan.
8. Pimpinan BPS telah memberikan arahan bahwa agar setiap permasalahan yang timbul dapat ditangani secara cepat dan lancar diatur sebagai berikut:
 - a. Masalah yang sifatnya menyangkut kebijakan umum seperti kebijakan anggaran, manajerial, realokasi kegiatan dan sejenisnya agar disampaikan langsung kepada Kepala BPS atau Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi terkait;
 - b. Masalah yang menyangkut kebijakan teknis dan metodologi agar diajukan langsung kepada Deputi yang terkait;
 - c. Masalah yang menyangkut kebijakan pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan agar disampaikan langsung kepada Inspektur Utama; dan

- d. Masalah pelaksanaan teknis operasional sehari-hari seperti kekurangan dokumen, kendala administratif dan teknis yang tidak berat dan sejenisnya supaya ditujukan kepada Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur yang terkait.
9. Dalam menangani permasalahan daerah, para Deputi dan para Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur serta para pelaksana kegiatan agar sudah dapat mengantisipasi porsi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sejak dini.
10. Pelaksanaan kerjasama teknis dengan instansi di luar BPS (dalam dan luar negeri) seperti pelaksanaan pekerjaan survei, pengolahan khusus, analisis dan sejenisnya, maka permintaan dari instansi luar tersebut supaya ditujukan kepada Eselon I dengan tembusan kepada Kepala BPS dan Sekretaris Utama. Sedangkan untuk penyelesaian administrasi keuangannya ditandatangani oleh eselon yang setara dengan tetap melaporkan kepada Kepala BPS, Sekretaris Utama, dan atasan langsung.
11. Tata persuratan dalam pengelolaan kegiatan secara garis besar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat-surat yang ditujukan kepada satuan organisasi di BPS daerah harus melalui BPS Provinsi dan ditandatangani serendah-rendahnya oleh Kepala Biro/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur dengan tembusan kepada Kepala BPS/Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur Utama atasan langsung;
 - b. Surat-surat yang ditujukan kepada satuan organisasi, baik yang bersifat lintas Biro/Pusat/STIS/Direktorat/Inspektorat maupun lintas Deputi, harus ditandatangani serendah-rendahnya oleh Kepala Biro/ Kapus/ Ketua/ Direktur/ Inspektur dengan tembusan atasan langsung. Apabila surat dimaksud ditandatangani oleh Deputi, maka tembusan perlu disampaikan juga kepada Kepala BPS sebagai laporan;
 - c. Surat-surat yang ditujukan kepada instansi lain supaya ditandatangani oleh pejabat yang setara eselonnya; dan
 - d. Surat-surat permohonan kepada Pimpinan BPS ditandatangani serendah-rendahnya oleh Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur. Tembusan surat diberikan kepada Sestama/Deputi/Inspektur Utama/ Karo/Kapus/Ketua/Direktur/Inspektur yang terkait.

**PENJELASAN
TEKNIS KEGIATAN
BPS PUSAT**

3

I. PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

Program PkyB bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan penerapan pemerintahan yang baik di bidang penyediaan data statistik. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan sebagainya. Lancarnya penyelenggaraan kegiatan penerapan pemerintahan yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas secara lebih efektif, efisien dan optimal dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas dan sesuai dengan jadwal waktu dan target substansi yang diharapkan. Pada akhirnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna data statistik. Secara umum kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 yang ditampung dalam program penerapan pemerintahan yang baik diuraikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program PKyB Pusat Tahun Anggaran 2010

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
01.01.09	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK
09.0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
0001	PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> 1 Belanja Gaji Pokok PNS 2 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 3 Kenaikan gaji 15%
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> 1 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2 Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> 1 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 3 Kenaikan gaji 15%
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> 1 Belanja Tunj. Anak PNS 2 Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13) 3 Kenaikan gaji 15%
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> 1 Belanja Tunj. Struktural PNS 2 Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> 1 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2 Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)
511125	<u>Belanja Tunj. Pph PNS</u> 1 Belanja Tunj. Pph PNS 2 Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji ke 13)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> Belanja Tunj. Beras PNS
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> Belanja Uang Makan PNS
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> 1 Belanja Tunjangan Umum PNS 2 Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)
511192	<u>Belanja Tunj. Lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI</u> Tunjangan uang duka PNS
512211	<u>Belanja uang lembur</u> 1 Uang lembur pegawai golongan I, II, III, dan IV 2 Uang makan lembur pegawai golongan I, II, III, dan IV
512311	<u>Belanja Vakasi</u> 1 Honorarium Tim Penerima & Pemeriksa Hasil Ujian Pegawai Baru: 2 Honorarium Pembuatan Naskah Ujian STIS 3 Honorarium Koreksi Hasil Ujian STIS 4 Honorarium Pengawas Ujian STIS

Lanjutan Tabel 1

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
512412	<u>Belanja Pegawai Transito</u> Belanja gaji pokok dan tunjangan lain-lain 3000 pegawai
09.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
0024	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/ANGKARAN PNS
521113	<u>Belanja untuk menambah daya tahan tubuh</u> Pengadaan bahan makanan untuk pegawai
0025	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Biaya check up kesehatan pejabat eselon III 2 Biaya check up kesehatan pejabat eselon IV 3 Biaya pemeriksaan kesehatan PNS ke Majelis Penguji Kesehatan
0026	POLIKLINIK/ OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Penyediaan obat-obatan untuk poliklinik umum 2 Penyediaan obat-obatan untuk poliklinik gigi
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Honorarium dokter 2 Honorarium perawat 3 Biaya pengadaan poliklinik umum dan gigi termasuk gigi palsu
0028	PELANTIKAN/ PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> Penyelenggaraan pelantikan
0032	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai 2 Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai baru
0034	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/ SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Pengadaan pakaian untuk pengemudi/ juru taman 2 Pengadaan pakaian untuk satpam 3 Pengadaan pakaian Para Medis 4 Pengadaan pakaian Resepsionis 5 Pengadaan pakaian juru bersih/CS taman 6 Cadangan pakaian dinas tenaga baru
0205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR
523111	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> 1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPS Pusat, STIS, dan Pusdiklat 2 Pemeliharaan halaman, perawatan taman/ jalan lingkungan BPS Pusat, Pusdiklat, dan STIS

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
1138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> 1 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 Esselon III & IV 2 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 Esselon III & IV 3 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-6
2005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> 1 Pemeliharaan kendaraan operasional roda-2 2 Pemeliharaan roda-2 BPS daerah Pengadaan tahun 2010
2006	PERAWATAN SARANA GEDUNG
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> BIRO UMUM 1 Pemeliharaan mesin STP (<i>Sewage Treatment Plant</i>) 2 Pemeliharaan Instalasi Listrik 3 Pemeliharaan Instalasi Air/PAM 4 Pemeliharaan Instalasi Telepon 5 Pemeliharaan BAS (<i>Building Automation System</i>) 6 Pemeliharaan Lift 7 Pemeliharaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (Mesin Tik, Meja/Kursi, fax, dsb) 8 Pemeliharaan Genset 9 Pemeliharaan Pompa Air 10 Pemeliharaan Rissograft folio dan DK 11 Pemeliharaan AC Central BPS 12 Pemeliharaan AC Split 13 Pemeliharaan <i>sound system</i> 14 Pemeliharaan travo 1250 KVA 15 Pemeliharaan Mesin cetak <i>offset/roll</i> & penunjangnya 16 Pemeliharaan Mesin Jahit Kawat/benang & Gestetner 17 Pemeliharaan Peralatan Dokter Gigi 18 Pemeliharaan <i>Viewer/Overhead Projector</i> 19 Pemeliharaan Mesin <i>Foto Copy</i> 20 Pemeliharaan PABX Telepon dan instalasi (BPS, Pusdiklat, STIS) 21 Pemeliharaan Mesin <i>handkey</i> 22 Pemeliharaan <i>Fire Hydrant</i> 23 Pemeliharaan <i>Fire Detector</i> 24 Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 25 Lampu <i>neon sign</i> 26 Pemeliharaan Mesin Print Document 7000 XEROX 27 Pemeliharaan Mesin Print Document 4750 XEROX DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK 1 Pemeliharaan komputer dan alat penunjangnya 2 Perawatan sistem UPS ruang data center & AC ruang server 3 Perawatan perangkat jaringan komunikasi data 4 Perawatan server all risk PUSDIKLAT 1 Perawatan mesin penyaring 2 Perawatan STP 3 Pemeliharaan instalasi telepon 4 Pemeliharaan Lift 5 Pemeliharaan AC Split 6 Pemeliharaan genset 150 KVA 7 Pemeliharaan PABX, telpon, dan instalasi 8 Perbaikan instalasi air 9 Perbaikan <i>hydrant</i>

Lanjutan Tabel 1

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
	10 Perbaikan <i>amplifier</i> 11 Perbaikan <i>fire alarm</i> 12 Perbaikan instalasi lampu taman
2007	LANGGANAN DAYA DAN JASA
522111	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa</u> Langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air)
2178	JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT
521114	<u>Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</u> Biaya pengiriman surat dinas
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
A.)	OPERASIONAL PERKANTORAN
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Biaya Koneksi Internet Primer 2 Biaya Koneksi Internet Sekunder 3 Koneksi Virtual Private Networks 4 Biaya operasional lain-lain dan keperluan kantor 5 Langganan majalah/surat kabar, buletin (dalam/luar negeri) 6 Biaya foto copy 7 Biaya konsumsi RAPIM, rapat FMS, rapat Struktural dan lainnya 8 Biaya konsumsi kegiatan sosialisasi BPS 9 Biaya operasional sehari-hari perkantoran 10 Biaya operasional satpam khusus hari raya 11 Biaya konsumsi jamuan rapat 12 Biaya jasa resepsionis 13 Pengadaan ATK atau ARK untuk keperluan sehari-hari kantor 14 Biaya jasa kebersihan/cleaning service 15 Biaya jasa pengemudi dan juru taman 16 Biaya jasa keamanan rumah dinas pondok bambu 17 Pengadaan pengharum ruangan kerja dan kelas Pusklat 18 Pengadaan peralatan lainnya
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Pengadaan Ensiklopedia Statistik 2 Biaya Pengawasan polisi untuk pengambilan uang dari BANK 3 Biaya penerimaan pegawai baru untuk BPS Pusat dan Daerah 4 Biaya penerimaan pegawai baru untuk BPS Pusat dan Daerah
522114	<u>Belanja sewa</u> 1 Biaya sewa alat kebersihan dan pengharum ruangan 2 Biaya fumigasi & pengharum ruangan 3 Sewa ruang penerimaan pegawai
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u> 1 Transpor lokal Satpam 2 perjalanan dalam rangka penerimaan pegawai
09.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI
0007	PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> (KPPN.019-JAKARTA II) 1 Pencetakan buku kerja/agenda eselon I & II 2 Pencetakan buku kerja/agenda eselon III 3 Pencetakan buku kerja/agenda eselon IV

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
	4 Pencetakan buku kerja/agenda KSK 5 Pencetakan kalender dinding 6 Pencetakan kalender meja 7 Pencetakan varia statistik 8 Pencetakan buku data strategis 9 Pencetakan buku petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SABMN Pusat Daerah 2 Biaya pertemuan/koordinasi Kasie Binagram 3 Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SAK Pusat Daerah 4 Pembahasan dan evaluasi non teknis 5 Pembahasan kegiatan sosial 6 Pengumpulan, penilaian dan konsultasi data/administrasi Kepegawaian 7 Penyusunan adm, evaluasi dan laporan pengawasan
524111	<u>Belanja perjalanan dinas boasa (DN)</u> 1 Transport lokal pemungutan data/administrasi Perlengkapan, Urdal & kearsipan 2 Transport lokal pemungutan data/administrasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran & Monitoring 3 Perjalanan Kasie Binagram 4 Transport lokal pemungutan data/administrasi Keuangan 5 Transport lokal pemungutan data non teknis 6 Perjalanan peliputan kegiatan sosial 7 Transport lokal kegiatan sosial 8 Transport lokal pemungutan data/administrasi Kepegawaian 9 Transport lokal pemungutan data/administrasi/konsultasi pengawasan
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM
A.)	PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN BELANJA PEGAWAI MENGIKAT
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Biaya tabulasi Penyusunan Anggaran/Perhitungan belanja Pegawai Pusat dan daerah 2 Pengadaan ATK dan komputer supplies 3 Biaya penyusunan anggaran/RKAKL 4 Rekonsiliasi data RKAKL 5 Penyusunan dan Perapihan data pendukung 6 Biaya penyusunan anggaran di daerah
B.)	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan 2 ATK & Penggandaan Juknis Keuangan
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama luar negeri 2 Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama dalam negeri 3 Pengumpulan dan penyiapan materi, kehumasan, hukum & organisasi
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u> 1 Monitoring/pembinaan Kehumasan dan sosialisasi statistik 2 Transport lokal pemungutan data/administrasi Kehumasan

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Evaluasi kegiatan tata usaha kepegawaian 2 Penyusunan pembinaan kepegawaian 3 Penyusunan laporan kepegawaian 4 Evaluasi jabatan fungsional 5 Evaluasi perencanaan anggaran 6 Evaluasi Penyusunan Anggaran 7 Evaluasi Standar Harga dan Monitoring Program 8 Penyusunan laporan TP/TGR dan Administrasi Keuangan 9 Penyusunan laporan akuntansi Keuangan 10 Penyusunan laporan perbendaharaan 11 Penyusunan laporan verifikasi keuangan 12 Penggandaan/pencetakan laporan TP/TGR, PNPB, juknis adm keuangan, pajak & laporan perhitungan anggaran negara 13 Penyusunan laporan pengadaan, kearsipan & ekspedisi 14 Penyusunan laporan kerumahtanggaan 15 Penyusunan laporan inventaris/LMBT 16 Penyusunan laporan penggandaan
0475	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembahasan perencanaan kepegawaian 2 Penyempurnaan dokumentasi tata naskah kepegawaian 3 Biaya penyelenggaraan ujian dinas 4 Pelatihan Teknis/Fungsional untuk pengembangan pegawai
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemindahan/penempatan pegawai lulusan STIS 2 Mutasi/promosi pegawai dari pusat ke daerah/daerah ke pusat 3 Mutasi/promosi pegawai antar daerah 4 Pemulangan pegawai yang pensiun & pesangon ke tempat menetap,dsb 5 Pemanggilan pegawai dalam rangka pelantikan jabatan
0487	MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring/pembinaan kepegawaian 2 Monitoring/pembinaan Penyus. Anggaran, Perencanaan & Monev 3 Perjalanan nara sumber 4 Monitoring/pembinaan adm keuangan 5 Rekonsiliasi penghitungan anggaran negara 6 Monitoring/pembinaan dan penyelesaian TP/TGR 7 Sosialisasi jadwal retensi arsip keuangan, PNBP 8 Perjalanan pimpinan 9 Monitoring/pembinaan kearsipan, Urdal & Perlengkapan 10 Peliputan kegiatan di daerah
524211	<u>Belanja perjalanan biasa (LN)</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perjalanan konferensi ke luar negeri, termasuk fiskal
0518	PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL DAN KEGIATAN
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Biaya Pembahasan dalam rangka penilaian awal Tim jabatan Fungsional 2 Biaya Evaluasi dalam rangka penilaian dan penelitian akhir Tim Jabatan Fungsional

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

Program PSPAN dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi.

Program ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian, tanggung jawab BPS dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program peningkatan sarana dan prasarana fisik ditekankan pada aspek pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik di BPS Pusat dan Daerah, STIS, dan Pusdiklat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik.

Kegiatan yang dicakup dalam Program PSPAN Pusat dapa tahun anggaran 2010 diuraikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program PSPAN Pusat Tahun Anggaran 2010

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA
0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
2003	SEWA GEDUNG KANTOR/ PERALATAN/ KENDARAAN
522114	<u>Belanja Sewa</u> 1 Sewa lahan parkir BPS Pusat 2 Sewa gudang/gedung pusat pengolahan di daerah
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Biaya Administrasi 2 Biaya Non operasional lainnya
0079	PEMBANGUNAN GEDUNG
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> 1 Perencanaan Perluasan gedung dan Asrama Pusdiklat 2 Lanjutan pembangunan gedung STIS 3 Revitalisasi gedung STIS
0081	PENGADAAN KENDARAAN
0289	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> Pengadaan kendaraan operasional Roda-2
0089	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG
0272	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> 1 Pengadaah Genset 2 Pengadaan AC Split Duck & perbaikan lift gedung 3 3 Mesin Cetak konsep CPR (Corporate Print Room) 4 Pengadaan DocuCenter-III 5 Pengadaan perlengkapan kantor BPS Prov/Kab/Kota 6 Pengadaan Meja dan Kursi kerja Gedung 5 dan 1 7 Pengadaan Meja dan Kursi kerja Gedung 2
0113	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
0508	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> Renovasi gedung 5 dan gedung 6

III. PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan, serta untuk penentuan kebijakan, baik nasional maupun regional. Berbagai kegiatan statistik yang ditampung dalam program ini pada tahun anggaran 2010 diuraikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program P2S Pusat Tahun Anggaran 2010

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
0002	PENYELENGGARAAN PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK
04863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
0035	PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM
A	Penyusunan Renstra BPS 2010-2014
B	Penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030
C	<i>Updating Database</i> Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS
D	Evaluasi Kegiatan Statistik
E	Penyusunan SBK dan SHBJ
F	Penyusunan Laporan Aktivitas dan LAKIP BPS
G	Monitoring dan Evaluasi Program
H	Pengelolaan BMN
I	STATCAP-CERDAS TF093092 Tahun 2010 (BLN)
J	Biaya Pendamping STATCAP CERDAS
K	Biaya PHRD <i>Grant</i> TF093092 Tahun 2010 (BLN)
L	Biaya Pendamping PHRD <i>Grant</i>
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN
A	Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan BPS
B	Peningkatan Kualitas dan Wawasan SDM
C	Penyusunan <i>Soft Library</i> Materi Pimpinan
D	Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2010
E	Studi Opini Publik Tentang Data Strategis BPS
F	Rancangan Peraturan Kepala BPS
G	<i>Soft Library</i> Dokumentasi Peraturan Perundangan
H	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi BPS
1436	PENYUSUNAN RENJA KL DAN ANGGARAN
A	Penyusunan Renja KL
B	Penyusunan Anggaran
0054	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
0040	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
A	Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data & Akses <i>Online</i>
B	Pengembangan Sistem Basis Data
C	Pengembangan Sistem Informasi
D	Pembuatan Program Pengolahan & <i>Repository Data</i>
E	Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi
F	Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik & <i>Website</i>
G	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik
H	Pembuatan Kemasan Layanan Publik Berbasis <i>Digital</i>

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
0067	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA
00011	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL
A	Diklat Pimpinan Tingkat IV
B	Diklat Pimpinan Tingkat III
C	Diklat Pimpinan Tingkat II
0014	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
A	Diklat Prajabatan Golongan II
B	Diklat Prajabatan Golongan III
0018	RINTISAN PENDIDIKAN GELAR
0021	PELATIHAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
A	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli
B	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli
C	Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar
D	Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar
E	Diklat Pemrograman <i>Database</i> Terintegrasi
F	Diklat Kompetensi Pejabat Eselon IV
G	Pembinaan Administrasi dan Pemberkasan CPNS
H	Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi
I	Pemilihan KSK Berprestasi
J	<i>Assesment Center</i>
K	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
L	Penyusunan Uraian Pekerjaan Dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan
M	Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian
N	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan
O	Sosialisasi Penerimaan Bukan Pajak
P	Pembinaan Administrasi Keuangan
0092	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN
A	Review Laporan Keuangan BPS Tahun 2009
B	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010
0094	PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK
A	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen
B	Analisis Disparitas
C	Analisis Statistik Ekonomi
D	Penyempurnaan dan Pengembangan Konsistensi Statistik Ekonomi dan Sosial
E	Pengembangan Indikator Pembangunan Regional (IPR)
F	Penyempurnaan & Pengembangan Indikator Statistik Sosial
G	Penyempurnaan & Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi
H	Pengembangan Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja
I	Pengembangan Model Perekonomian Indonesia
J	Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran-Ukuran Statistik
K	Penyusunan dan Pemeliharaan Kerangka Sampel Statistik Bidang
L	Studi <i>Baseline</i> SDM BPS

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM
0130	SURVEI BIDANG INDUSTRI
A	Survei Industri Besar/Sedang Bulanan
B	Survei Industri Mikro dan Kecil
C	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan
0131	SURVEI BIDANG PERTANIAN
A	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
B	Survei Perusahaan Perkebunan
C	Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI
D	Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian
E	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
F	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kedelai
G	Survei Perusahaan Kehutanan
H	Statistik Kehutanan Rakyat
00133	SURVEI BIDANG PERDAGANGAN
A	Kompilasi Data Statistik Ekspor
B	Kompilasi Data Statistik Impor
C	Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan
D	Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras
E	Survei Statistik Lembaga Keuangan dan <i>Monitoring Kurs</i> Valuta Asing
F	Survei Statistik Harga Perdagangan Besar
G	Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD
H	Survei Statistik Harga Produsen
00134	SURVEI TRANSPORTASI
A	Survei Transportasi
B	Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi
00135	SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA
A	Survei Bidang Jasa dan Pariwisata
B	Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN
A	Survei Upah
B	Survei Struktur Upah
C	Sakernas Semester I 2010
D	Sakernas Semester II 2010
E	Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Pemuda
F	Penghitungan Penduduk & Rumah Tangga Untuk Penimbang Survei Kependudukan 2010
G	Susenas Panel 2010 (Estimasi Provinsi)
H	Susenas KOR (Estimasi Kab/Kota)
I	Identifikasi Aglomerasi Potensi Desa Di Indonesia
J	Penyusunan Publikasi Tren/Pola Migrasi Dari Berbagai Sensus dan Survei
K	Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2010
L	Pilot Pendataan Podes 2010
M	Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2010
00138	SURVEI PERTAMBANGAN
A	Survei Pertambangan dan Energi
B	Survei Konstruksi
00141	SURVEI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
0142	SURVEI BIDANG SOSIAL EKONOMI
A	Penyusunan Neraca Regional

Lanjutan Tabel 3

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
B	Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK
C	Penyusunan PDB Sektor Tahun Dasar Berjalan
D	Persiapan Penyusunan <i>Updating Tabel Input-Output</i> Indonesia 2010
E	Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa
F	Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa-Jasa
G	Penyusunan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa
H	Penyempurnaan Data Dasar Penghitungan PDB dan PDRB
I	Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling 2010)
J	Survei Khusus <i>Input-Output</i> 2010
K	Penyusunan Neraca Rumahtangga dan Institusi Nirlaba
L	Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta
M	Penyusunan Neraca Arus Dana
N	Studi Penyusunan Stok Kapital
O	Studi Rekonsiliasi Neraca <i>Ex-Im</i> Jasa Penunjang PDB
P	PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan
Q	Konsolidasi Neraca Pengeluaran
R	Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
0145	SURVEI BIDANG POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN
A	Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan
B	Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010
C	Penyusunan Laporan dan Stok Modal Sosial 2009
D	Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010
E	Biaya Pendamping <i>TF SCB</i>
F	<i>Streamlining Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project (Grant-TF-057574)</i>
5551	PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN DATA DAN STATISTIK
A	Perencanaan SP2010
B	Pelatihan SP2010
C	Pelaksanaan Lapangan SP2010
D	Pelatihan Demografi
E	Pengolahan SP2010
F	<i>Updating</i> Peta Wilayah Administrasi
G	PES 2010
H	Publisitas Pelaksanaan SP2010
I	Pembentukan MFD SP2010
J	Pembangunan Desain dan Arsitektur Metadata SP2010
K	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Publikasi SP2010
L	Pembangunan Desain dan Arsitektur Akses <i>Online</i> dan Layanan SP2010
M	Pembangunan Desain dan Arsitektur Sistem Dokumentasi SP2010

Secara rinci kegiatan pada program penyempurnaan dan pengembangan statistik dijelaskan sebagai berikut:

A. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

B. PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM

1) Penyusunan Renstra BPS 2010-2014

a. Abstraksi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 telah menetapkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dibagi menjadi tahapan RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. RPJM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam PP No. 17 Tahun 2005 tersebut disebutkan bahwa setiap lembaga pemerintah termasuk BPS diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Pembuatan Renstra harus didasarkan atas RPJMN yang merupakan dokumen pembangunan nasional untuk lima tahun dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lembaga. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, BPS telah menyusun Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2005-2009 yang menjadi pedoman bagi jajaran Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2005-2009. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan disusunnya RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, maka BPS juga harus menyusun Renstra

BPS Tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari RPJMN 2010-2014. Pembuatan Renstra BPS bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban seperti disebut dalam Perpres No 7, tetapi adanya dokumen Renstra merupakan dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban menyediakan informasi bagi para pengguna informasi statistik. BPS juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan statistik yang dituntut dalam pelaksanaan RPJM. Seperti diketahui dalam RPJM diuraikan sasaran-sasaran semua lembaga pemerintah, baik departemen dan maupun non departemen, dan sebagian besar sasaran tersebut digambarkan dalam bentuk angka dan indikator statistik, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Human Development Index, angka perdagangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, agar BPS dapat memenuhi seluruh permintaan statistik tersebut, maka BPS perlu menyusun Renstra yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya pada kurun waktu 2010-2014 sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan arah pembangunan yang telah ditentukan. Pada tahun anggaran 2009 telah dilakukan tahapan studi persiapan dalam menyusun Renstra 2010-2014 sebagai suatu kajian pendahuluan untuk memperoleh berbagai informasi dari narasumber dan pengguna data. Dari hasil kajian tersebut perlu penyempurnaan dan finalisasi untuk menyesuaikan dengan program pemerintah yang baru telah terpilih pada pemilihan Presiden tahun 2009.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan informasi statistik dari pengguna data;
- (2) Mengumpulkan informasi sebagai masukan dari berbagai narasumber;
- (3) Menyesuaikan program pembangunan statistik dengan program pemerintah yang baru hasil pemilihan Presiden tahun 2009; dan
- (4) Finalisasi penyusunan Renstra BPS Tahun 2010-2014.

c. Metodologi

Sebagai tahap lanjutan dalam rangka finalisasi penyusunan Renstra BPS 2010-2014, maka akan dibentuk suatu tim yang merupakan kelompok kerja yang melibatkan berbagai unit kerja yang ada di BPS. Selanjutnya akan dilakukan rapat-rapat pembahasan baik internal BPS maupun dengan mengundang berbagai kalangan pengguna data dan para pakar di bidang statistik sebagai nara sumber melalui penyelenggaraan workshop. Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan informasi secara mendalam ke beberapa BPS Provinsi untuk memperoleh saran dan masukan guna penyempurnaan penyusunan Renstra BPS.

d. Hasil dan Keluaran

Buku Renstra BPS Tahun 2010-2014.

2) Penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030

a. Abstraksi

Penyusunan rencana jangka panjang merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah untuk menjawab tantangan di masa mendatang sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh instansi tersebut. Rencana jangka panjang dijabarkan dalam langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam kegiatan operasional untuk jangka waktu tertentu dalam menuju iklim pemerintahan yang baik. Dengan demikian rencana jangka panjang merupakan salah satu upaya dalam rangka menuju suatu proses kegiatan secara berkelanjutan. Dokumen perencanaan ini merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk menggerakkan tupoksi instansi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu secara koordinatif sehingga mampu menghadapi perubahan paradigma baru yang senantiasa selalu terjadi perubahan sesuai tuntutan keadaan. Melalui perencanaan yang strategis diharapkan dapat menjadi komitmen instansi untuk memecahkan berbagai kendala dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan sehingga dapat diimplementasikan pada setiap tingkatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, renstra (rencana strategis) dapat merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban dan merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program. BPS juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan statistik yang dituntut dalam pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dengan demikian, agar BPS dapat memenuhi seluruh permintaan statistik tersebut, maka BPS perlu menyusun rencana strategis jangka panjang di bidang statistik selama kurun waktu 2010-2030 yang disebut Sigmaplan BPS 2010-2030. Sigmaplan harus disusun secara komprehensif agar BPS mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya pada kurun waktu 2010-2030 sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan arah pembangunan yang telah ditentukan. Untuk menyusun Sigmaplan BPS 2010-2030 diperlukan suatu kajian, evaluasi, serta pengumpulan data dan informasi dari berbagai narasumber dan pengguna data.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan data dalam rangka menyusun perencanaan jangka panjang;
- (2) Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan statistik sesuai dengan perencanaan jangka panjang BPS; dan
- (3) Menyusun kembali draft rencana jangka panjang BPS sesuai dengan hasil evaluasi di lapangan.

c. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030 adalah dengan mengumpulkan bahan dari berbagai narasumber dan studi kepustakaan, melakukan rapat-rapat pembahasan dengan mengundang unit kerja di BPS, membentuk tim kelompok kerja, serta menyelenggarakan *workshop* untuk mencari masukan dari pengguna data.

d. Hasil dan Keluaran

Laporan *draft* awal rencana jangka panjang Sigmaplan BPS 2010-2030.

3) Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS

a. Abstraksi

Program peningkatan sarana dan prasarana fisik bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja baik BPS pusat maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota secara bertahap untuk mendukung kelancaran administrasi serta kegiatan operasional pengumpulan data. Dengan tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menyusun perencanaan program peningkatan sarana dan prasarana kerja baik di BPS Pusat, BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota perlu didukung dengan informasi *database* sarana dan prasarana fisik. Dengan tersedianya *database* sarana dan prasarana fisik yang lengkap maka akan sangat membantu dalam proses penyusunan rencana program tersebut sehingga diharapkan tidak akan terjadi kegiatan yang saling tumpang tindih atau kegiatan yang sama dilakukan berulang di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Tersedianya *database* sarana dan prasarana fisik yang dilengkapi dengan peta tematik yang menyajikan informasi ketersediaan sarana dan prasarana fisik menurut peta wilayah administrasi juga bermanfaat untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses penyusunan rencana kegiatan sarana dan prasarana fisik. Di samping itu juga akan sangat membantu bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alokasi anggaran dengan pertimbangan menurut skala prioritas.

Kegiatan penyusunan *database* sarana dan prasarana fisik beserta peta tematiknya pertama kali dilakukan pada tahun anggaran 2007, tetapi besarnya biaya yang dibutuhkan maka pengumpulan data secara langsung hanya dilakukan pada beberapa provinsi saja. Untuk melengkapi *database* sarana dan prasarana fisik seluruh provinsi maka perlu dilakukan updating *database* secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Untuk meng-*update database* sarana dan prasarana fisik di provinsi yang sudah ada datanya;
- (2) Untuk melengkapi dan menambahkan *database* sarana dan prasarana fisik di wilayah administrasi yang baru terbentuk; dan
- (3) Untuk mempercepat dan memudahkan pengambil keputusan dalam menentukan skala prioritas terkait dengan keterbatasan anggaran.

c. Metodologi

Untuk meng-*update* dan melengkapi *database* sarana dan prasarana fisik, maka akan dilakukan kegiatan pengumpulan data di seluruh kabupaten/kota pada provinsi yang belum lengkap datanya serta BPS Kabupaten/Kota yang baru terbentuk. Namun mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, maka *updating* pengumpulan data dilakukan secara bertahap di beberapa provinsi saja.

d. Hasil dan Keluaran

Laporan hasil *updating database* peta sarana dan prasarana fisik BPS Kabupaten/Kota kondisi tahun 2010.

4) Evaluasi Kegiatan Statistik

a. Abstraksi

Evaluasi kegiatan BPS adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Biro Bina Program melalui Bagian Penyusunan Anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi seluruh aktivitas BPS selama setahun dengan mengunjungi Kantor Perwakilan BPS di daerah maupun mengadakan pertemuan teknis yang dihadiri oleh pejabat BPS baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada koreksi terhadap kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan sehingga untuk kegiatan selanjutnya di tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan serta menerima masukan dari Perwakilan BPS di daerah sebagai pelaksana lapangan agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

c. Metodologi

Mengingat keterbatasan biaya yang disediakan maka kegiatan ini dilaksanakan secara sampel acak dengan mengunjungi Provinsi terpilih maupun memanggil para pejabat tertentu yang terkait dengan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan pertemuan teknis pimpinan BPS Pusat dan Daerah.

5) Penyusunan SBK dan SHBJ

a. Abstraksi

Dalam merencanakan suatu kegiatan, diperlukan adanya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan di BPS dan suatu harga satuan atas barang dan jasa, baik teknis maupun non teknis. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kegiatan yang berkelanjutan untuk mendapatkan satuan yang dimaksud.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan standar biaya khusus yang berlaku di BPS dan satuan harga barang dan jasa, baik teknis maupun non teknis, dalam rangka proses perencanaan pembiayaan.

c. Metodologi

Untuk kegiatan teknis, harga dimaksud diperoleh setelah melakukan konsultasi dengan nara sumber baik di Pusat maupun Daerah. Sementara untuk kegiatan non teknis, harga dimaksud diperoleh dengan mengunjungi responden terpilih di wilayah Jabodetabek.

d. Hasil dan Keluaran

Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh standar biaya khusus untuk kegiatan di BPS dan satuan harga untuk barang dan jasa, baik teknis maupun non teknis sebagai dasar perencanaan pembiayaan kegiatan di BPS baik pusat maupun daerah.

6) Penyusunan Laporan Aktivitas dan LAKIP BPS

a. Abstraksi

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik BPS mempunyai tugas menyelenggarakan statistik dasar dengan cara melaksanakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara-cara lain sesuai dengan perkembangan iptek. Pelaksananya dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Untuk menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BPS maka disusun laporan aktivitas BPS yang meliputi kegiatan teknis statistik maupun kegiatan non teknis. Kegiatan non teknis merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan teknis misalnya pengembangan pegawai, penyediaan anggaran serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Laporan kegiatan BPS tersebut di atas dipublikasikan secara rutin tiap

tahun, dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya maka untuk tahun anggaran 2010 akan diterbitkan buku Aktivitas Badan Pusat Statistik 2009. Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa semua jajaran instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran, mulai tahun anggaran 2000 wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penyusunan LAKIP dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi instansi tersebut. Laporan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 289/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perbaikan dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999. Penyusunan penetapan kinerja sebagai langkah awal dalam penyusunan LAKIP. Penyusunan penetapan kinerja diperlukan untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah (BPS baik di pusat maupun di daerah) terhadap anggaran yang telah direncanakan. Sehingga untuk melakukan penyusunan penetapan kinerja dan LAKIP BPS diperlukan pembahasan mendalam antar eselon I dan II di BPS.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Penyusunan publikasi laporan tahunan Aktivitas BPS untuk memberikan gambaran tentang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan statistik selama satu tahun anggaran;
- (2) Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja BPS dan kompilasi LAKIP seluruh satker BPS Provinsi/Kab.Kota, Eselon I, dan Eselon II BPS Pusat sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja BPS; dan
- (3) Penyusunan penetapan kinerja BPS dan kompilasi penetapan kinerja seluruh satker BPS Provinsi/Kab/Kota, Eselon I, dan Eselon II BPS Pusat.

c. Metodologi

- (1) Menyusun kuesioner untuk didistribusikan ke seluruh *subject matter* guna memperoleh data tentang berbagai kegiatan statistik yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran;
- (2) Mempelajari laporan-laporan keuangan dan kegiatan, pertemuan-pertemuan dan diskusi dalam menetapkan isi pokok kegiatan BPS dalam laporan tersebut; dan
- (3) Pertemuan-pertemuan dan diskusi dalam membahas penetapan kinerja BPS.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Laporan Tahunan Aktivitas BPS tahun 2009;
- (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Tahun 2009; dan
- (3) Laporan Penetapan Kinerja BPS 2010.

7) Monitoring dan Evaluasi Program

a. Abstraksi

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pengumpulan data/informasi dan pelaporan semua program kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS baik di Pusat maupun Daerah. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan membandingkan target/sasaran yang direncanakan dengan pencapaian pelaksanaan, menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan untuk suatu kegiatan tertentu. Informasi akan dapat dijadikan bahan evaluasi apabila dikelola dengan baik. Apabila suatu informasi dikelola secara manual, maka beberapa kendala yang akan muncul adalah kesalahan pengelompokan data, keterlambatan, kurangnya akurasi dan ragam informasi yang dapat dihasilkan. Sehubungan dengan adanya kendala tersebut maka perlu dibuat Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPS dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.

b. Tujuan dan Sasaran

Penyempurnaan pengembangan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi program sehingga sistem tersebut bisa *up to date*.

c. Metodologi

Terdiri dari :

- (1) Implementasi Sistem;
- (2) Pengujian Sistem; dan
- (3) Penyempurnaan Sistem.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang telah disempurnakan; dan
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan.

8) Pengelolaan BMN

a. Abstraksi

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Badan Pusat Statistik (sampai tingkat Kab/Kota berjumlah 474 Satuan Kerja/satker) maka diperlukan kegiatan awal

Monitoring/Pembinaan/Pelaporan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Negara seperti inventarisasi (tertib administrasi dokumen sumber BMN), pengelolaan (mulai penerimaan BMN, pergudangan/penyimpanan, dan pendistribusian) dan penghapusan (pemantauan BMN yang sudah tidak layak digunakan karena rusak atau kadaluarsa untuk segera dikeluarkan dari SIMAK BMN). Kegiatan awal ini dilakukan sepanjang tahun, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan rekonsiliasi data SIMAK-BMN mulai dari tingkat Provinsi dengan Kab/Kota dan BPS Pusat dengan seluruh Provinsi dan diakhiri dengan kegiatan akhir berupa penyusunan Laporan BMN Semester I, II, dan Tahunan selaku Satker dan selaku Instansi BPS untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan dan juga menyediakan data BMN untuk pemeriksaan baik oleh intern BPS (Inspektorat) dan ekstern (Badan Pemeriksa Keuangan).

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Memberikan arahan untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan BMN dilingkungan BPS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Mengolah data berdasarkan SIMAK-BMN dan dokumen sumber yang ada di tiap satker;
- (3) Mencari solusi yang sama/seragam bagi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BMN untuk seluruh satker;
- (4) Membuat Berita Acara Rekonsiliasi; dan
- (5) Menyusun Laporan Laporan BMN Semester I, II, dan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk merubah grade *disclaimer*.

c. Metodologi

SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, SIMAK-BMN dilaksanakan di seluruh 474 satker BPS, Monitoring/Pembinaan/Pelaporan data SIMAK-BMN semester I,II, dan Tahunan dilaksanakan dengan kunjungan ke daerah maupun evaluasi di pusat. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk kegiatan Rekonsiliasi data BMN yang dilaksanakan dalam 3 tahap pertama tingkat provinsi untuk data dari satker kab./kota, kedua nasional untuk data dari seluruh provinsi, dan ketiga rekonsiliasi data BPS dengan DJKN, Dep.Keu. Hasil Rekonsiliasi dengan DJKN digunakan untuk penyusunan Laporan BMN Semester I, II, dan Tahunan.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Bahan Rekonsiliasi Data SIMAK-BMN Seluruh satker;
- (2) Berita Acara (BA) Rekonsiliasi 33 Provinsi + Satker Pusat Semester I, II, dan Tahunan, Berita Acara Rekonsiliasi BPS dan DJKN-Dep.Keu Semester I, II, dan Tahunan;
- (3) Laporan Semester I, II, dan Tahunan BMN untuk DJKN, Dep.Keu dan BPK; dan
- (4) Stiker pada tiap BMN, Daftar Barang Ruangan di tiap ruang, Melakukan proses penghapusan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk barang yang sudah tidak layak digunakan, Laporan BMN Semester I, II, dan Tahunan.

9) STATCAP-CERDAS TF093092 Tahun 2010 (BLN)

a. Abstraksi

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dirasakan membawa dampak terhadap permintaan data dan informasi statistik yang semakin beragam, akurat, berkesinambungan dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi semacam ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari dunia usaha maupun konsumen data lainnya. Fenomena ini sejalan dengan diluncurkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh lembaga publik melakukan keterbukaan informasi yang dimilikinya dan menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan seluruh jajaran pemerintah untuk mengubah perilaku dan budaya kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No: 15/PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Institusi dimaksudkan untuk membangun profil dan aparatur Negara yang memiliki integritas, produktivitas tinggi, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan produktif dalam melayani masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, BPS dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam penyediaan data, statistik, dan informasi yang akurat, *up to date*, serta mudah untuk diakses. Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan. Program *Statistical Capacity Building - Change and Reform for the Development of Statistics* (Statcap-Cerdas) merupakan upaya BPS untuk menyajikan

produk statistik yang berkualitas dalam suatu sistem kerja yang sistematis tanpa distorsi serta didukung oleh SDM profesional dan teknologi informasi modern.

Dalam rangka mendukung upaya BPS tersebut, BPS perlu membuat Rencana Strategis (Renstra) Program Statcap-Cerdas untuk mewujudkan perubahan dan reformasi statistik. Untuk keperluan inilah, maka Renstra dimaksud dijabarkan dalam empat komponen utama yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik, (2) pengembangan SDM, (3) pengembangan kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (4) pengelolaan kelembagaan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Program Statcap-Cerdas dibagi ke dalam empat pilar utama, yaitu:

- (1) Meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan BPS;
- (2) Meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- (3) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM di BPS; dan
- (4) Meningkatkan pengelolaan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran dari Program Statcap-Cerdas adalah menjadikan BPS dalam lima tahun ke depan mampu menyajikan produk statistik yang berkualitas dalam suatu sistem kerja yang sistematis tanpa distorsi serta didukung oleh SDM profesional dan teknologi informasi modern.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam program Statcap-Cerdas merupakan kerangka alur kerja yang dimulai dari phase persiapan dengan menyusun beberapa dokumen seperti berikut ini:

- (1) Menyusun *Strategic Plan* BPS sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Perubahan dan Reformasi Pengembangan Statistik;
- (2) Membuat *Initial Business Process* dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh *Subject Matter* BPS sebagai gambaran aktual dari proses tata laksana kegiatan yang berlangsung di setiap SM.
- (3) Membuat *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Intermediate Outcome Indicator* (IOI) dari beberapa kegiatan terpilih yang akan dilaksanakan sebagai lokomotif dari perubahan dan reformasi pengembangan statistik;
- (4) Melakukan dan menyusun *Business Process Analysis* (BPA) dan *Business Process Reengineering* (BPR);
- (5) Membuat *Project Operating Manual* (POM) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan dan Reformasi Pengembangan Statistik di Indonesia;

- (6) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) dari beberapa kegiatan terpilih yang akan dilaksanakan sebagai lokomotif dari perubahan dan reformasi pengembangan statistik.
- (7) Membuat *Analysis Document* (AD);
- (8) Membuat *Top Level Integration System Architecture* (TLISA);
- (9) Membuat *Infrastructure System Architecture* (ISA);
- (10) Membuat *System Requirement Review* (SRR);
- (11) Membuat *Bidding Document*.

d. Hasil dan Keluaran

Output yang akan dihasilkan dari Program Statcap-Cerdas sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Data

- (1) Peningkatan Kualitas Data Neraca Nasional:
 - Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) berdasarkan SNA 2008, meliputi empat neraca pokok, yaitu: Neraca Produksi, Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, Neraca Modal, Neraca Keuangan;
 - PDB menurut Pendapatan;
 - PDB *seasonally adjusted*; dan
 - Tersedianya database internal & eksternal Neraca Nasional.
- (2) Peningkatan kualitas data Statistik IBS:
 - Meningkatnya *response rate* Industri Besar Sedang;
 - Standardisasi konsep dan definisi Industri Manufaktur antara BPS dengan instansi sektoral;
 - Tersedianya *database* internal dan eksternal IBS; dan
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional.
- (3) Peningkatan kualitas data Statistik Hortikultura & Tanaman Perkebunan:
 - Meningkatnya *response rate survey* statistik hortikultura dan tanaman perkebunan;
 - Standardisasi konsep & definisi data statistik hortikultura dan tanaman perkebunan antara BPS dengan instansi sektoral;
 - Tersedianya database internal & eksternal statistik hortikultura & tanaman perkebunan; dan
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional.
- (4) Peningkatan kualitas data statistik Harga Perdagangan Besar dan tersedianya data Statistik Harga Produsen:
 - Tersedianya Data Statistik Harga Produsen;

- Sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik HPB & Statistik Harga Produsen yang disempurnakan;
 - Meningkatnya *response rate* survey HPB;
 - Tersedianya database internal & eksternal HPB & Statistik Harga Produsen; dan
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional.
- (5) Peningkatan kualitas data statistik Ekspor-Impor melalui perbaikan sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik ekspor-impor terintegrasi antara BPS dengan Bea Cukai:
- Memperpendek *time lag release* data Statistik Ekspor- Impor;
 - MoU dan PKS dengan Bea Cukai dan BI;
 - Sistem transfer data secara elektronik antara Bea Cukai dengan BPS;
 - Tersedianya *database* internal & eksternal Statistik Ekspor-Impor;
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional;
- (6) Peningkatan kualitas data Susenas:
- Meningkatnya *respon rate* rumah tangga elit;
 - Perubahan Susenas Tahunan menjadi Susenas Bulanan;
 - Tersedianya *database* Susenas; dan
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional.
- (7) Peningkatan kualitas data Sakernas:
- Pelaksanaan Sakernas Triwulanan dan bulanan;
 - Meningkatnya *response rate* rumah tangga elit;
 - Tersedianya *database* Sakernas; dan
 - Tersedianya data yang diperlukan untuk penyusunan Neraca Nasional
- (8) Perbaikan penyelenggaraan survei melalui penerapan manajemen survei yang tepat:
- Meningkatnya kualitas manajemen survei;
 - Perbaikan metoda pengumpulan data dan monitoring;
 - Perbaikan kerangka sampling survei berbasis rumahtangga untuk rancangan; dan
 - SOP manajemen survei yang tepat.
- (9) Perbaikan rancangan/desain metodologi survei:
- Perbaikan rancangan metodologi untuk survei berbasis rumah tangga
 - Tersedianya metodologi yang diperlukan untuk pelaksanaan sensus dan survei BPS; dan
 - Tersedianya *updating sampling frame* untuk keperluan berbagai survei yang berbasis rumah tangga.

(10) Peningkatan kualitas analisis statistik:

- Peningkatan kualitas analisis statistik;
- Penyusunan analisis statistik musiman triwulanan, bulanan; dan
- Penyusunan Sistem *Total Quality Management* (TQM) khususnya yang berkaitan dengan koherensi dan mengkoordinir kegiatan konsistensi di setiap SM

(11) Peningkatan kualitas hubungan dengan pengguna data:

- Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data;
- Meningkatnya aksesibilitas terhadap *website* BPS;
- Terwujudnya sistem pengelolaan *softcopy* publikasi; dan
- Meningkatnya tingkat hubungan kemitraan dengan pengguna dan penyedia data.

(12) Perbaikan Sistem Diseminasi Data Statistik:

- Meningkatnya kualitas sistem diseminasi data statistik;
- Terwujudnya rancangan dan model *data warehouse*;
- Terwujudnya Sistem Pelayanan Statistik Terpadu;
- Terwujudnya model *Digital Library*;
- Meningkatnya kemudahan akses terhadap data BPS; dan
- Meningkatnya kualitas layanan statistik.

2) Pembangunan Infrastruktur dan TIK:

(1) Terciptanya Infrastruktur TIK yang modern, termasuk TIK BPS daerah dan *disaster recovery system*;

(2) Standarisasi TIK;

(3) Pelayanan *online* yang dapat diandalkan;

(4) Tersedianya data *warehouse*;

(5) Tersedianya *Enterprise Resource Planning* (ERP) BPS;

(6) *IT Governance*; dan

(7) Aplikasi MIS

3) Peningkatan Kapasitas SDM:

(1) Terciptanya SDM yang kompeten dan profesional yang berdasarkan *Code of Conduct*;

(2) Terciptanya Sistem Informasi Manajemen SDM (HRMIS);

(3) Budaya kerja berbasis kompetensi;

(4) Terciptanya manajemen perencanaan SDM;

(5) Terciptanya manajemen pelatihan SDM;

(6) Terciptanya manajemen kinerja;

- (7) Terciptanya manajemen karir;
- (8) Terciptanya manajemen kerja; dan
- (9) Terciptanya sistem remunerasi.

4) Efektifitas dan efisiensi Organisasi BPS melalui pengelolaan kelembagaan yang tepat:

- (1) Organisasi BPS yang efektif dan efisien;
- (2) Kredibilitas BPS meningkat;
- (3) Penerapan UU Statistik dan peraturan-peraturan;
- (4) Tersedianya *Enterprise Resource Planning* (ERP) BPS: perencanaan, anggaran, keuangan, SDM, infrastruktur, pengadaan, monitoring, dan *controlling*;
- (5) Nilai-nilai organisasi (*corporate values*): integritas, pelayanan, profesional, relevan, terpercaya, dan terbuka;
- (6) Sistem manajemen dokumen; dan
- (7) Sistem *auditing*, monitoring dan evaluasi.

10) Biaya Pendamping STATCAP CERDAS

a. Abstraksi

Biaya pendamping Statcap-Cerdas merupakan bentuk dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk membiayai berbagai kegiatan yang belum dicakup dalam pembiayaan Statcap-Cerdas. Biaya pendamping Statcap-Cerdas ini dialokasikan ke dalam DIPA BPS sejak tahun 2010.

b. Tujuan

Tujuan dari biaya pendamping Statcap-Cerdas adalah: Memberikan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional di Indonesia dalam rangka implementasi program Program Statcap-Cerdas.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam rangka memperkuat Program Statcap-Cerdas melalui biaya pendamping antara lain dengan membentuk *Liaison Officer* di setiap unit kerja di BPS yang akan saling bekerjasama dengan PMU *team* yang ditunjuk oleh Statcap Cerdas. Berbagai masukan untuk melakukan reformasi birokrasi akan dibahas melalui rapat-rapat pembahasan maupun melalui *workshop* dengan mengundang berbagai narasumber yang terkait dengan masalah reformasi birokrasi.

d. Hasil dan Keluaran

Terlaksananya uji coba implementasi Program Statcap-Cerdas.

11) Biaya PHRD *Grant* TF093092 Tahun 2010 (BLN)

a. Abstraksi

PHRD (*Program for Human Resources Development*) *Grant* merupakan program bantuan dari Pemerintah Jepang yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional yang dilaksanakan melalui program perubahan dan reformasi statistik. PHRD *Grant* ini secara khusus digunakan untuk mendanai persiapan pelaksanaan program perubahan dan reformasi statistik melalui Program Statcap-Cerdas (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for the Development of Statistics*). Program PHRD *Grant* dikukuhkan melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Departemen Keuangan mewakili Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia sebagai representatif dari pihak donor (Pemerintah Jepang).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari PHRD *Grant* adalah memberikan bantuan pendanaan untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional di Indonesia dalam rangka persiapan program reformasi dan perubahan statistik (Program Statcap-Cerdas).

c. Metodologi

- (1) Menyusun *Strategic Plan* BPS sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Perubahan dan Reformasi Pengembangan Statistik;
- (2) Membuat *Initial Business Process* dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh *Subject Matter* (SM) BPS sebagai gambaran aktual dari proses tata laksana kegiatan yang berlangsung di setiap SM;
- (3) Membuat *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Intermediate Outcome Indicator* (IOI) dari beberapa kegiatan terpilih yang akan dilaksanakan sebagai lokomotif dari perubahan dan reformasi pengembangan statistik;
- (4) Menyusun BPS MP (*Modernization Proposal*);
- (5) Melakukan dan menyusun *Business Process Analysis* (BPA) dan *Business Process Reengineering* (BPR);
- (6) Membuat *Project Operating Manual* (POM) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan dan Reformasi Pengembangan Statistik di Indonesia;
- (7) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) dari beberapa kegiatan terpilih yang akan dilaksanakan sebagai lokomotif dari perubahan dan reformasi pengembangan statistik;
- (8) Membuat *Analysis Document* (AD);

- (9) Membuat *Top Level Integration System Architecture* (TLISA);
- (10) Membuat *Infrastructure System Architecture* (ISA);
- (11) Membuat *System Requirement Review* (SRR); dan
- (12) Membuat *Bidding Document*.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah:

- (1) Tersusunnya *Strategic Plan* dan *Action Plan* Statcap-Cerdas;
- (2) Tersusunnya *Initial Bussiness Process*;
- (3) Tersusunnya *Key Performance Indicator* (KPI) dan *Intermediate Outcome Indicator* (IOI);
- (4) Tersusunnya BPS MP (*Modernization Proposal*);
- (5) Tersusunnya *Project Operating Manual* (POM);
- (6) Tersusunnya *Standard Operating Procedures* (SOP); dan
- (7) Tersusunnya *Analysis Document* (AD), *Top Level Integration System Architecture* (TLISA), *Infrastructure System Architecture* (ISA), *System Requirement Review* (SRR) serta *Bidding Document*.

12) Biaya Pendamping PHRD Grant

a. Abstraksi

Biaya pendamping PHRD *Grant* merupakan bentuk dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk membiayai berbagai kegiatan operasional yang belum dicakup dalam pembiayaan PHRD *Grant*. Biaya pendamping PHRD *Grant* ini dialokasikan ke dalam DIPA BPS sejak tahun 2009.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari biaya pendamping PHRD *Grant* adalah memberikan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional di Indonesia dalam rangka persiapan program reformasi dan perubahan statistik (Program Statcap-Cerdas).

c. Metodologi

-

d. Hasil dan Sasaran

- (1) Penyelenggaraan *workshop* dalam rangka persiapan Program Statcap-Cerdas;
- (2) Terselenggaranya berbagai diskusi dan pembahasan dalam rangka persiapan *workshop*; dan
- (3) Terlaksananya pengadaan barang.

2. PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN

1) Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan BPS

a. Abstraksi

Berdasarkan Perka BPS No.7 Tahun 2008, beban tugas dari subbagian kerja sama dan hubungan kelembagaan adalah melakukan penyiapan administrasi kerja sama dan hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah, lembaga tinggi negara, lembaga swasta dan masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beban tugas ini meliputi pengurusan dokumen perjalanan luar negeri, koordinasi dan penyiapan materi rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, dan penyiapan kerjasama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk MOU maupun kunjungan-kunjungan. Sampai sejauh ini belum ada laporan tahunan kegiatan kerjasama dan hubungan kelembagaan yang sangat penting untuk evaluasi, sehingga keberhasilan maupun kegagalan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tersebut diatas tidak termonitor dengan baik. Padahal, laporan ini sangat penting bagi pimpinan BPS baik di pusat maupun di daerah untuk dapat meningkatkan kinerja BPS, serta mengevaluasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan BPS yang berhubungan dengan kerjasama dan hubungan kelembagaan. Penyusunan laporan tahunan ini bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana karena diperlukan koordinasi serta bantuan baik dari unit-unit internal BPS dan instansi pemerintah lainnya, maupun dari lembaga-lembaga nasional/internasional. Oleh karena itu diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah:

- (1) Untuk mengumpulkan dan menginventarisasi permasalahan dan hasil yang dicapai subbagian kerjasama dan hubungan kelembagaan; dan
- (2) Untuk meningkatkan pengelolaan kerjasama dan hubungan kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Sasaran dari kegiatan ini diantaranya adalah:

- (1) Tersusunnya laporan tahunan kegiatan kerjasama dan hubungan kelembagaan di BPS Pusat; dan
- (2) Terkumpulnya informasi mengenai permasalahan dan kendala dari tahun ke tahun.

c. Metodologi

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan melakukan pendataan atau investarisasi kegiatan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kerjasama dan hubungan kelembagaan di BPS Pusat. Kemudian diikuti dengan menggali informasi mengenai

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, pada tahap terakhir adalah penyusunan laporan perkembangan semua kegiatan kerjasama yang terdiri dari laporan kegiatan RDP, laporan kegiatan MOU dan kerjasama dan laporan perjalanan pejabat/pegawai BPS ke luar negeri.

d. Hasil dan Keluaran

Laporan tahunan kegiatan yang terdiri dari:

- (1) Laporan tahunan hasil rapat RDP;
- (2) Laporan perkembangan MOU dan kerjasama; dan
- (3) Laporan perjalanan pejabat/pegawai BPS ke luar negeri.

2) Peningkatan Kualitas dan Wawasan SDM

a. Abstraksi

- (1) Permasalahan pelayanan administrasi secara modern sangat membantu kelancaran pelaksanaan penyediaan data statistik;
- (2) Memberdayakan sumber daya manusia yang berbakat untuk kemajuan yang lebih baik terutama di bidang kesekretarian, kehumasan, keprotokolan, teknik komputer dan MC;
- (3) Meningkatnya peranan BPS dalam rangka penyediaan data membuat para pimpinan makin sibuk, dalam menjalankan tugasnya diperlukan sekretaris yang profesional, terampil, dan andal dalam mengatur segala kegiatannya;
- (4) Pelaksanaan acara kehumasan dan protokoler perlu ditangani oleh tenaga profesional serta MC yang andal untuk kelancaran jalannya acara baik resmi maupun tidak resmi; dan
- (5) Kegiatan peningkatan kapasitas kesekretarian, kehumasan, keprotokolan, MC, dan staf teknis pimpinan sangat diperlukan untuk menunjang semua kegiatan pimpinan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Menciptakan SDM yang tangguh dan profesional di bidang kesekretarian, kehumasan, keprotokolan dan MC;
- (2) Dengan terciptanya SDM yang tangguh dan profesional dibidang kesekretarian, kehumasan dan keprotokolan dan MC diharapkan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik; dan
- (3) Memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas BPS.

c. Metodologi

Pelatihan dilaksanakan dengan metode andragogi dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, dan presentasi.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Dapat melaksanakan tata kegiatan kesekretarian, kehumasan, keprotokolan dan MC dengan baik sesuai dengan manajemen modern;
- (2) Dapat meningkatkan hubungan antar unit kerja secara proporsional;
- (3) Dapat meningkatkan citra organisasi/instansi terhadap pihak luar;
- (4) Dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas; dan
- (5) Dapat meningkatkan keterampilan staf pembantu pimpinan untuk bekerja secara lebih profesional.

3) Penyusunan *Soft Library* Materi Pimpinan

a. Abstraksi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan statistik dasar. Untuk dapat menyajikan statistik dasar, BPS melakukan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan iptek yang dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berhubungan dengan pentingnya peran BPS, pimpinan BPS khususnya eselon I sering diundang untuk menjadi narasumber maupun pembicara di dalam maupun luar negeri dimana mereka harus menyajikan kertas kerja, makalah, pidato, presentasi dan lain-lain tentang BPS maupun data dan informasi yang dihasilkan BPS di dalam maupun luar negeri. Disamping itu, dengan seringnya pimpinan BPS bepergian, kegiatan protokoler juga meningkat. Apalagi kegiatan protokoler adalah kegiatan Sub bagian Protokoler dan Persidangan yang berada dalam satu bagian, yaitu Bagian Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan. Sebagai perwujudan dari kebutuhan pimpinan tersebut, maka penyusunan *soft library* akan sangat membantu untuk mempersiapkan materi-materi pimpinan yang dibutuhkan untuk keperluan pimpinan. Dalam pada itu, untuk memperlancar kegiatan pimpinan maka dibutuhkan pula kegiatan protokoler dalam memperlancar lajunya acara-acara yang harus dihadiri oleh pimpinan BPS. Untuk itu buku pedoman tentang keprotokolan sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan protokol dengan sistematis dan lancar.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Untuk mendukung pimpinan BPS dalam terlaksananya kegiatan keprotokolan untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan BPS;

- (2) Untuk mendukung pimpinan BPS, terutama para eselon I BPS dalam mempersiapkan materi yang akan digunakan pimpinan BPS dalam kegiatan eksternal mereka; dan
- (3) Untuk memberikan potret/cerminan terhadap sejauh mana dan seberapa banyak kerja sama dan koordinasi yang telah dijalin oleh BPS dengan instansi lain, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing, dan masyarakat luas dalam satu tahun anggaran.

Sasaran dari kegiatan ini diantaranya adalah:

- (1) Tersusunnya pedoman protokoler BPS;
- (2) Tersusunnya makalah atau rangkuman materi pimpinan BPS di tahun 2009; dan
- (3) Terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan BPS untuk kegiatan dalam maupun luar negeri.

c. Metodologi

- (1) Pembuatan pedoman keprotokolan untuk mendukung kegiatan BPS, khususnya yang menyangkut pimpinan eselon I BPS;
- (2) Penyiapan materi pimpinan BPS memerlukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data baik ke seluruh *subject matter* dan unit lainnya di BPS serta sumber data lainnya;
- (3) Membangun sebuah basis data yang terdiri dari semua materi-materi pimpinan dari masa lalu maupun yang ada sekarang untuk mengantisipasi kebutuhan pimpinan BPS di masa mendatang;
- (4) Melakukan koordinasi dengan unit lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan;
- (5) Menyusun tabulasi dan presentasi dengan menggunakan perangkat lunak komputer untuk kebutuhan pimpinan; dan
- (6) Membuat tulisan maupun rangkuman materi yang dibutuhkan pimpinan.

d. Hasil dan Keluaran

Laporan akhir rangkuman kegiatan penyiapan materi pimpinan.

4) Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2010

a. Abstraksi

Data dan Informasi merupakan bagian pokok dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data dan informasi kependudukan dapat dibuat berbagai keputusan dan kebijakan pembangunan yang sangat terkait erat dengan komposisi dan keberadaan penduduk Indonesia. Data dasar kependudukan yang diperlukan harus sesuai dengan

keadaan masyarakat terkini, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati langsung dan sesuai dengan kebutuhan esensi bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan kesinambungan data dan informasi kependudukan, dalam hal ini kegiatan Sensus Penduduk yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Pelaksanaan kegiatan SP2010 yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab yang diemban oleh BPS. Untuk itu BPS mempunyai beberapa strategi untuk menyukseskan kegiatan SP2010. Strategi yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi SP2010 kepada pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas menjelang hari pelaksanaannya. Kegiatan Kehumasan sebagai "*Public Relation*" merupakan kegiatan yang strategis dan mendesak untuk selalu ditingkatkan sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Tujuan kegiatan adalah menciptakan pra-kondisi masyarakat agar memahami pentingnya statistik sehingga membantu sepenuhnya berbagai kegiatan sensus maupun survei BPS dan memanfaatkannya secara optimal dengan membangun citra "*corporate image*" yang baik. Keluaran hasil kegiatan ini ditampilkan melalui peningkatan mutu data dan pemanfaatan yang optimal statistik yang dihasilkan BPS oleh pemerintah dan masyarakat luas termasuk di dalamnya dunia akademik. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan komunikasi antara BPS dengan masyarakat luas, baik pemerintah maupun swasta/masyarakat, melalui berbagai media.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan akhir dari kegiatan kehumasan dalam rangka sosialisasi SP2010 adalah memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SP2010 dan kegiatan statistik yang dilakukan BPS, serta pemanfaatan statistik yang dihasilkan BPS bagi semua kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

c. Metodologi

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan BPS, antara lain melalui jumpa pers yang rutin dilaksanakan. Jadwal jumpa *pers* ada yang bulanan, triwulanan, empat bulanan, dan *ad hoc* tergantung materi yang akan di*release*. Selain itu juga dilaksanakan *workshop-workshop*, seminar, serta forum diskusi yang banyak mengundang pihak luar BPS. Di lingkungan internal BPS juga dilakukan dengan cara menerbitkan majalah *Varia Statistik* yang dicetak rutin setiap bulan. Untuk mengumpulkan berita seluruh kegiatan yang dilaksanakan diseluruh BPS, dilakukan juga liputan ke beberapa BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Sosialisasi kegiatan BPS tahun 2010 difokuskan pada kegiatan SP2010.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan berupa sosialisasi SP2010 melalui berbagai fasilitas media yang tersedia dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar statistik terutama statistik kependudukan yang dikumpulkan melalui SP2010 serta membangun *corporate image* yang baik. Itu semua diupayakan melalui program kegiatan.

5) Studi Opini Publik Tentang Data Strategis BPS

a. Abstraksi

Opini publik mengenai data strategis BPS dan kegiatan SP 2010 berkaitan dengan pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok masyarakat terhadap data dan kegiatan BPS tersebut. Di sisi BPS, dari waktu ke waktu organisasi ini terus berupaya menyempurnakan metodologi survei maupun sensus untuk meningkatkan kualitas data. Namun, hal ini belum disadari oleh masyarakat pada umumnya. Nampaknya sebagian masyarakat masih ada saja yang mengira BPS bekerja kurang benar, bahkan ada yang mengira BPS bukanlah lembaga yang bersifat independen dan bisa diintervensi oleh pemerintah. Dengan prinsip ini, mereka sering mengemukakan pendapat yang kurang tepat sehingga dapat memojokkan BPS. Padahal, BPS sebagai lembaga profesional tidak demikian dan lembaga ini harus mempertahankan dan meningkatkan citra maupun reputasi yang baik terhadap publik. Citra yang baik dan positif BPS tersebut tidak terlepas dari peran Humas BPS. Peran ini perlu dukungan kebijakan dan komitmen dari organisasi BPS, khususnya pimpinan puncak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pengetahuan tentang opini publik terhadap data strategis BPS sebagai salah satu kegiatan besar yang merupakan tugas utama BPS. Opini publik tentang BPS diharapkan mengenai sesuatu yang positif terhadap data dan kegiatan BPS, karena opini yang demikian secara moral akan mendukung eksistensi BPS. Namun kita menyadari bahwa untuk mencapai hal ini bukan sesuatu yang mudah. Analisis opini publik mengenai data strategis dan kegiatan SP 2010 diperlukan untuk mengetahui opini publik tentang hal tersebut untuk mendapatkan referensi bagi BPS untuk terus memperbaiki diri guna mencapai kemajuan. Untuk itu, Humas memandang perlu melaksanakan kegiatan analisis opini publik untuk mengamati *social judgement* mengenai data strategis dan kegiatan maupun hasil SP 2010 dalam upaya peningkatan strategi Humas BPS. Dengan pemahaman tersebut, Humas BPS secara internal dapat memberikan masukan kepada *subject matter* untuk melengkapi informasi maupun keterangan yang dapat menambah pengetahuan bagi publik. Secara eksternal, Humas BPS dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam penyebaran pesan, informasi, dan komunikasi (sosialisasi)

mengenai data strategis BPS maupun berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan SP 2010 kepada publik sebagai sasaran atau targetnya. Pemahaman ini dapat diperoleh baik dengan mengamati dan menganalisis isi berita/opini masyarakat pada berbagai koran tentang data strategis BPS dan kegiatan SP 2010 sebagai salah satu kegiatan unggulan BPS yang tentu menjadi perhatian bagi publik. Selain itu, untuk menambah pengetahuan guna meningkatkan strategi dan menyempurnakan hasil studi, studi ini juga akan meninjau rangkaian kegiatan SP 2010 di beberapa BPS Provinsi di Indonesia.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan studi ini untuk menganalisis opini publik terhadap data strategis BPS dan kegiatan SP 2010, untuk melihat kecenderungan *social judgement* terhadap hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi bagi BPS tersebut. Pemahaman yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan strategi kegiatan kehumasan BPS dalam meningkatkan citra BPS yang positif.

c. Metodologi

- (1) Data strategis yang dimaksud adalah: (a) data tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, (b) data Nilai Tukar Petani, (c) data produksi padi dan palawija, (d) data strategis lainnya;
- (2) Kegiatan SP 2010 yang dimaksud menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan SP 2010 seperti persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, pengolahan dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian publik;
- (3) Opini publik terhadap data strategis BPS dan kegiatan SP 2010 menggunakan metode *newspaper content analysis*. Sumber berita melalui koran Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, *Investor Daily*, Bisnis Indonesia, Indopos, Suara Pembaruan, *The Jakarta Post*, *Journal*, Kontan, Seputar Indonesia, Ekonomi Neraca dan Suara Karya dalam setahun terakhir pada tahun berjalan; dan
- (4) Untuk meningkatkan pemahaman tentang *social judgement* terhadap data strategis BPS dan kegiatan SP 2010 pada khususnya dilakukan studi mendalam dengan cara menggali informasi kepada berbagai pihak terkait pada beberapa BPS Provinsi di Indonesia. Untuk keragaman informasi maka dipilih provinsi dengan karakteristik beragam, seperti provinsi yang baru pertama kali melaksanakan sensus penduduk (provinsi baru), provinsi tempat berada kota besar,. Selain itu, provinsi yang dipilih juga mempertimbangkan keterwakilan dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Dengan pertimbangan tersebut, maka provinsi yang akan didatangi untuk studi meliputi Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, NTT, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Laporan hasil studi yang berisi analisis opini publik tentang data strategis BPS dan kegiatan SP 2010;
- (2) Tingkat yang lebih optimal kegiatan Humas, baik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi dalam perannya sebagai penghubung antara BPS dan masyarakat, serta kegiatan sosialisasi, khususnya menyongsong SP 2010; dan
- (3) Tingkat yang lebih optimal kegiatan Humas dalam menaikkan dan memelihara citra dan reputasi BPS yang positif.

6) Rancangan Peraturan Kepala BPS

a. Abstraksi

Pemekaran wilayah di Indonesia, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota saat ini sedang berjalan. Dengan adanya pemekaran wilayah baru, maka dituntut adanya penyesuaian organisasi pemerintah daerah yang baru pula. Untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah pemekaran, perlu dibentuk organisasi pemerintah daerah beserta perangkatnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berkaitan dengan pemekaran wilayah khususnya kabupaten/kota, dan PP Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa BPS adalah instansi bertikal, maka perlu segera dibentuk perwakilan BPS di daerah pemekaran. Beberapa faktor lain yang menjadi dasar supaya BPS membentuk perwakilannya di daerah pemekaran adalah 1). semakin besarnya permintaan data statistik dari pemerintah daerah baru hasil pemekaran. 2) Besarnya tuntutan masyarakat supaya BPS dapat menyajikan data statistik diwilayahnya. 3) Adanya desakan dari pemerintah daerah pemekaran, agar BPS segera membentuk kantor perwakilannya. Dari uraian di atas, perlu segera dibuat Keputusan Kepala BPS tentang perwakilan BPS di daerah pemekaran. Keputusan Kepala BPS ini dibuat sebagai payung hukum bagi dibentuknya organisasi BPS di daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Rancangan Keputusan Kepala BPS ini adalah:

- (1) Mencapai keseragaman teknis dalam penyusunan, pola pemikiran, pengertian, bahasa dan tafsiran sehingga mencapai kesatuan pola tindak;
- (2) Meningkatkan dayaguna, tepatguna, hasilguna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
- (3) Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan dalam komunikasi kedinasan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah dengan dibuatnya Rancangan Keputusan Kepala BPS, maka akan lebih memudahkan bagi BPS untuk dapat melaksanakan kegiatan perstatistikan di daerah.

c. Metodologi

BPS bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, melakukan studi kelayakan ke daerah pemekaran. Dari hasil studi ini BPS akan dibuat naskah akademik, yang nantinya diserahkan ke pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan disetujuinya BPS dalam membentuk perwakilannya di daerah pemekaran.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Naskah Akademik Pembentukan Kantor BPS baru; dan
- (2) Rancangan Keputusan Kepala BPS tentang Pembentukan Kantor BPS.

7) *Soft Library* Dokumentasi Peraturan Perundangan

a. Abstraksi

Informasi tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan statistik dan menunjang kegiatan statistik berkembang begitu pesat, hal ini perlu diimbangi dengan dokumentasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam bentuk *soft library* untuk mempermudah penggunaan dokumentasi tersebut oleh BPS, baik di pusat maupun daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk *soft library* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan statistik dan kegiatan penunjang statistik dapat tersusun dalam suatu *softcopy* yang dapat digunakan oleh BPS, baik di pusat maupun daerah. Sehingga landasan yuridis kegiatan statistik dan perangkat hukum yang berkaitan dengan kegiatan lain BPS dapat diketahui dan digunakan secara tepat.

c. Metodologi

Penyusunan dokumentasi hukum ini dilakukan dengan metode pembahasan penyiapan, penyusunan dokumen, analisis dan pembuatan *soft library* serta evaluasi.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Penyusunan peraturan perundang-undangan ini dapat berupa: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden; dan
- (2) Penyusunan basis data peraturan perundang-undangan, penyusunan basis data interaktif yang memuat informasi hukum.

8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi BPS

a. Abstraksi

Dalam rangka reformasi birokrasi diperlukan suatu standar pelayanan yang prima dari instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat juga dituangkan dalam Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dibuat pedoman standar, operasional, dan prosedur organisasi. Pedoman ini diperlukan sebagai petunjuk teknis tentang standar, operasional, dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pusat Statistik. Dari uraian di atas, pembuatan pedoman standar, operasional, dan prosedur diperlukan untuk dijadikan petunjuk teknis bagi unit organisasi yang ada di BPS dalam melaksanakan kegiatan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembuatan pedoman standar, operasional, dan prosedur adalah:

- (1) Terwujudnya keseragaman teknis dalam pelaksanaan kegiatan statistik;
- (2) Meningkatkan daya guna, tepat guna, hasil guna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
- (3) Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, salah tafsir, dan pemborosan dalam komunikasi kedinasan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah: Meminimalkan adanya tumpang tindih antar unit kerja dan memudahkan pelaksanaan kegiatan.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan pembahasan yang melibatkan unit kerja lain, baik pada BPS pusat maupun BPS di daerah.

d. Hasil dan Keluaran

Pedoman Standar, Operasional, dan Prosedur Kegiatan Statistik.

3. PENYUSUNAN RENJA-KL DAN ANGGARAN

1) Penyusunan Renja KL

a. Abstraksi

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan yang harus disusun oleh setiap instansi pemerintah. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2011 dilakukan pada tahun anggaran 2010, yang merangkum seluruh rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2011. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2011 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Dalam menyusun rencana kegiatan statistik BPS tetap memprioritaskan pada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, sedangkan kegiatan pendukung lainnya dengan prioritas selanjutnya dengan pertimbangan kondisi keuangan negara. Renja-KL tahun 2011 dari seluruh instansi pemerintah akan dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Penyusunan RKP tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RKP merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Renja-KL BPS Tahun 2011 disusun untuk digunakan sebagai pedoman kerja bagi para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di Pusat maupun di Daerah yang akan memberikan kejelasan arah dalam melaksanakan program pembangunan di bidang statistik pada tahun 2011. Dengan mengacu pada Renja-KL BPS Tahun 2011 diharapkan seluruh kegiatan statistik akan terlaksana secara efisien dan efektif melalui koordinasi kegiatan statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Untuk menyusun buku Renja-KL BPS tahun 2011;
- (2) Untuk menyusun buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran kegiatan (buku kuning) BPS Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2010; dan
- (3) Untuk menyusun buku pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk BPS Pusat dan Rencana Kegiatan Prasarana Fisik (RKF) untuk BPS Daerah untuk Tahun Anggaran 2012.

c. Metodologi

Tahap awal kegiatan ini dilakukan melalui kompilasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dari seluruh *subject matter* di BPS secara *online* menggunakan program aplikasi Sireka. Selanjutnya dilakukan proses editing dan evaluasi RKA sesuai dengan rate biaya yang berlaku. Seluruh RKA yang diajukan tersebut kemudian dirangkum menjadi dokumen Renja-KL. Setelah melalui tahap pembahasan dengan Departemen Keuangan

dalam hal ini DJA PK, dan DJA PB, Bappenas serta DPR, maka nantinya akan ditentukan besaran DIPA BPS. Seluruh kegiatan yang disetujui dalam DIPA selanjutnya dirangkum dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran kegiatan (buku kuning) BPS Pusat dan Daerah. Sedangkan untuk menyusun RKA tahun anggaran berikutnya, maka standar satuan harga juga harus disesuaikan kembali dengan inflasi tahun yang akan datang, sehingga perlu disusun buku pedoman penyusunan RKA untuk BPS Pusat dan RKF untuk BPS Daerah.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Buku Renja-KL BPS tahun 2011;
- (2) Buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran kegiatan (buku kuning) BPS Pusat dan Daerah tahun 2010; dan
- (3) Buku pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk BPS Pusat dan Rencana Kegiatan Prasarana Fisik (RKF) untuk BPS Daerah tahun 2012.

2) Penyusunan Anggaran

a. Abstraksi

Kegiatan Penyusunan Anggaran BPS adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Biro Bina Program melalui Bagian Penyusunan Anggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembiayaan BPS selama satu tahun Anggaran baik di Pusat maupun di daerah. Khusus untuk penyusunan Anggaran daerah, pada tahap finalisasi Anggaran, staf BPS di daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan Anggaran dipanggil ke kantor BPS Pusat untuk melakukan penyusunan dan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen keuangan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan baik.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan perencanaan Anggaran melalui penerapan prinsip Anggaran berbasis kinerja.

c. Metodologi

Kegiatan penyusunan Anggaran dilaksanakan melibatkan seluruh petugas penyusun Anggaran di masing-masing Provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan dan Keluaran dari kegiatan penyusunan Anggaran BPS adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebagai dasar penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran-Departemen Keuangan.

C. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

1. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1) Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses *Online*

a. Abstraksi

Peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik seperti diamanatkan dalam UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, membawa konsekuensi berupa tuntutan akan ketersediaan sistem informasi yang memudahkan pengguna data statistik memperoleh informasi secara cepat, akurat dan handal. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dari satu sisi BPS telah melakukan pembangunan kemas-kemasan informasi secara bertahap. Upaya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem-sistem tersebut perlu tetap dilakukan mengingat laju perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang disertai dengan meningkatnya volume pekerjaan, bentuk, dan variasi dari kemas-kemasan informasi yang diharapkan oleh para pengguna data. Dari sisi lain, adanya infrastruktur yang mampu mendukung beban kerja berupa pengumpulan, penyiapan, dan diseminasi informasi-informasi statistik yang semakin meningkat sangat mutlak diperlukan. BPS telah mengantisipasi hal tersebut dengan mulai membangun jaringan komputer dan komunikasi data secara bertahap semenjak tahun anggaran 1994/1995. Masing-masing tahapan pembangunan jaringan komputer dan komunikasi data dilakukan dengan pertimbangan yang matang, khususnya dari segi antisipasi terhadap jumlah pengguna, bentuk, dan jenis aplikasi, bentuk teknologi yang diadopsi serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti pembiayaan yang efektif dan efisien. Keberhasilan implementasi jaringan komputer dan komunikasi membawa dampak positif berupa peningkatan kinerja BPS secara keseluruhan. Berbagai bentuk aplikasi dan sistem informasi statistik maupun sistem informasi manajemen telah dapat direalisasikan berkat adanya infrastruktur pendukung tersebut. Dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang dapat merasakan manfaat dari penggunaan fasilitas ini, maka beban kerja yang harus ditanggung oleh jaringan komputer dan komunikasi tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap infrastruktur pendukung yang sudah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak ini semakin perlu untuk segera dilaksanakan. Di sisi diseminasi data, semakin banyak pengguna data BPS yang mengakses data statistik dari internet. Ini dibuktikan dengan makin populernya *Web* BPS. Pelayanan ini sejalan dengan UU no 16 tahun 1997 tentang statistik. Dalam melayani pengguna tersebut BPS, telah mempunyai hubungan internet yang dijalin sejak tahun 1994 dengan IPTEKNet. Peningkatan jumlah pengguna, dan kebutuhan akan data statistik yang semakin

beragam dan besar, dibutuhkan bentuk hubungan Internet baru yang mampu menampung penambahan tersebut. Kebutuhan ini telah dipenuhi dengan penambahan kapasitas jaringan melalui WasantaraNet sehingga BPS mampu memanfaatkan hal tersebut dengan penambahan kapasitas yang lebih besar. Dengan demikian diharapkan berbagai kekurangan dalam pelayanan yang ada selama ini dapat diperbaiki, berbagai layanan baru dapat diluncurkan, dan kebutuhan pengguna akan data statistik yang makin akurat dan beragam dapat dipenuhi. Peningkatan ini harus diiringi dengan ketersediaan layanan yang lebih terjamin. Untuk memenuhi hal tersebut pengamanan koneksi WasantaraNet dan jaringan internal secara fisik dan logis perlu dilakukan. Rupa pengamanan tersebut adalah dengan mengembangkan infrastruktur komunikasi pendukung dan pengembangan sistem keamanan jaringan. Muncul pula kebutuhan diseminasi data rinci untuk kalangan pemerintahan baik pusat dan daerah yang perlu diakomodasikan tanpa melanggar UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Keamanan data rinci yang didiseminasikan melalui Internet perlu diamankan dengan penggunaan teknologi *secure web services* yang sudah sejak lama ada. Penggunaan Internet sebagai media diseminasi data rinci kepada kalangan pemerintah pusat dan daerah merupakan alternatif terbaik mengingat Internet memberikan fleksibilitas dan kecepatan yang tinggi bagi pelayanan data bagi kalangan pemerintah. Dari sisi jaringan intranet, komunikasi data antara BPS Pusat dan BPS Daerah perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Hal ini terkait dengan pemasokan data dari BPS Pusat ke BPS Daerah. Tanpa peningkatan ini, BPS tidak akan mampu menanggapi kebutuhan pengguna data yang makin meningkat. Dari sini pula muncul kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan jaringan BPS Daerah dalam melayani pemrosesan data terdistribusi di kantor masing-masing. Di sisi teknis kebutuhan ini direalisasikan dengan penambahan jalur baru *Virtual Private Network* (VPN) dan peningkatan *bandwidth* VPN yang sudah ada. Jalur VPN yang bersifat privat ini menggantikan jalur internet yang bersifat publik karena VPN jauh lebih handal. Volume pekerjaan yang meningkat memerlukan pula kapasitas penyimpanan akhir data, dan kapasitas pengolahan yang makin besar pula. Berbagai teknologi yang muncul akhir-akhir ini memungkinkan peningkatan volume dan kapasitas tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Kapasitas penyimpanan dengan teknologi *storage area network* memungkinkan media penyimpanan digunakan untuk beberapa penggunaan sekaligus tanpa mengurangi kecepatan media tersebut. Hal ini sangat penting mengingat beban kebutuhan yang selalu berubah sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Infrastruktur komunikasi data yang memenuhi syarat pengolahan data yang cepat dan

akurat tidaklah cukup tanpa infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang terjamin dan berkualitas, pengamanan terhadap bahaya kehilangan data yang diakibatkan kecelakaan seperti kebakaran, bencana alam, dan perbaikan ruangan *data center*. Pengembangan infrastruktur pendukung yang dikenal sebagai *disaster recovery* mulai perlu diperhatikan mengingat arti penting BPS dan ketersediaan data statistik bagi pembangunan nasional.

b. Tujuan dan Sasaran

Rencana kegiatan proyek Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses *On-Line* untuk tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan Infrastruktur Data Center Sistem Informasi Statistik;
- (2) Meningkatkan Layanan Intranet;
- (3) Meningkatkan Layanan Ekstranet; dan
- (4) Merawat infrastruktur *data center*.

c. Metodologi

Kegiatan di Subdit Jaringan Komunikasi Data dilaksanakan dengan metodologi yang sistematis. Metodologi yang dapat menghasilkan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif dan menjadi aset organisasi yang strategis. Metodologi tersebut dirinci sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi/pendataan perangkat teknologi
- (2) Identifikasi dan pengembangan *pattern-pattern* (pola) arsitektur
 - Konfigurasi-konfigurasi standar yang banyak diterapkan (*best practice*) untuk berbagai sistem aplikasi.
 - Tiap *pattern* umumnya mempersyaratkan satu set infrastruktur teknologi.
 - Menjadi acuan bagi pengembangan aplikasi atau layanan baru.
- (3) Identifikasi dan pengembangan layanan infrastruktur
 - Identifikasi fungsi-fungsi sistem yang bersifat umum.
 - Jadikan fasilitas penyedia fungsi-fungsi tersebut sebagai layanan untuk umum.
- (4) Pengelolaan portfolio infrastruktur
 - Organisasikan *platforms, patterns*, dan layanan dalam suatu *portfolio* standar BPS.
 - Sebagai pusat informasi untuk perencanaan (*costing, capacity planning, quality assurance*).
 - *Review* secara periodik dilakukan atas standar-standar yang dipilih, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

- (5) Pelembagaan perencanaan infrastruktur
 - Memilih dan menetapkan standar-standar infrastruktur TI perusahaan.
 - Mengembangkan *interface* (misal: *middleware*) bagi penggunaan ulang/silang sumber daya infrastruktur.
- (6) Pengelolaan infrastruktur sebagai paket-paket solusi.
 - Memberikan pelayanan infrastruktur sebagai paket solusi
 - Lengkap dengan informasi tentang manfaat, kapasitas, persyaratan kinerja (*service level*), dan *costing*.
 - Memudahkan pihak manajemen bisnis untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan tentang investasi infrastruktur.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Penambahan akses intranet dan internet melalui VPN;
- (2) Layanan *Voice on IP*;
- (3) *SMS Center*;
- (4) Kemudahan penggunaan layanan Jaringan Komunikasi Data;
- (5) Sistem *drainage AC*;
- (6) *Maintenance* rutin AC;
- (7) *Server* berbasis *open source* (OpenLDAP);
- (8) Konsolidasi *database* pengguna layanan jaringan;
- (9) Aplikasi sistem replikasi *Directory Service*;
- (10) Virtualisasi file *system storage* -Migrasi dan konsolidasi *user* dan *workgroup file storage*- *Support* untuk *Java Server Pages*;
- (11) *Framework web service* berbasis SOAP dan WSDL;
- (12) Perangkat keras dan perangkat lunak untuk penyediaan sistem *redundant backup*- Metode dan kebijakan *distater recovery*;
- (13) Aplikasi sistem pemantauan dan pelaporan ketersediaan layanan jaringan;
- (14) Aplikasi sistem pemantauan dan pelaporan penggunaan *bandwidth* jaringan;
- (15) Aplikasi sistem pemantauan dan pelaporan penggunaan kapasitas penyimpanan data;
- (16) Aplikasi sistem pemantauan dan pelaporan penggunaan kapasitas *processing server*;
- (17) Aplikasi sistem pemantauan dan pelaporan *network intrusion*;
- (18) Modul autentikasi dan manajemen pengguna;

- (19) Sistem autentikasi *single-sign-on*;
- (20) Situs web dinamis melalui integrasi dengan *database service*;
- (21) *Content management system* (CMS);
- (22) Dokumentasi teknologi jaringan terbaru;
- (23) Dokumentasi teknologi *SMS Center*;
- (24) Dokumentasi teknologi pengembangan aplikasi;
- (25) Dokumentasi teknologi VoIP;
- (26) Perawatan perangkat jaringan komunikasi data di BPS Pusat;
- (27) Perawatan perangkat *server* secara *all-risk*; dan
- (28) Perawatan sistem UPS di *Data Center*.

2) Pengembangan Sistem Basis Data

a. Abstraksi

Data Indeks Harga Konsumen dan inflasi merupakan salah satu tolok ukur bagi perekonomian nasional. Pengelolaan data tersebut memerlukan prioritas yang tinggi baik dari segi kualitas dan ketepatan waktu. Data Statistik Ekspor dan Impor merupakan data yang menjadi andalan BPS dalam kiprahnya sebagai penyedia data yang statistik berkualitas. Penanganan database yang merupakan modal utama dalam pengelolaan data statistik tersebut menjadi masalah utama yang harus diprioritaskan. Demikian pula dengan penetapan *software* yang akan dipilih harus mampu memenuhi kebutuhan BPS baik dari sisi kualitas, kapasitas, dan biaya. Perubahan peraturan dalam administrasi keuangan negara berimbas pada sistem informasi manajemen keuangan yang selama ini merupakan fasilitas pengelola basis data keuangan di lingkungan BPS. Pengawasan dan pemberdayaan pegawai memerlukan informasi kepegawaian yang lengkap dan baik secara cepat dan akurat. Pengelolaan *database* yang baik memerlukan sumber daya yang handal baik dari segi kemampuan sumber daya manusia maupun dari segi fasilitas teknologi informasi yang dipergunakan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembuatan dan pengembangan sistem basis data untuk tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan data harga konsumen sesuai dengan peningkatan kebutuhan;
- (2) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan data ekspor sesuai dengan peningkatan kebutuhan;
- (3) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan data impor sesuai dengan peningkatan kebutuhan;

- (4) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen keuangan sesuai dengan peningkatan kebutuhan;
- (5) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen kepegawaian sesuai dengan peningkatan kebutuhan; dan
- (6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan *database*.

c. Metodologi

Kerja tim dan diskusi dengan *subject matter*.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan antara lain:

- (1) *Database* Statistik Harga Konsumen yang disempurnakan;
- (2) *Database* Statistik Ekspor yang disempurnakan;
- (3) *Database* Statistik Impor yang disempurnakan;
- (4) Sistem Aplikasi Statistik Harga Konsumen yang disempurnakan;
- (5) Sistem Aplikasi Statistik Ekspor yang disempurnakan;
- (6) Sistem Aplikasi Statistik Impor yang disempurnakan;
- (7) Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang disempurnakan;
- (8) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang disempurnakan; dan
- (9) Pengetahuan mengenai pengelolaan *database*.

3) Pengembangan Sistem Informasi

a. Abstraksi

Dunia teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Berbagai macam keunggulan yang dihasilkan oleh teknologi informasi mengalir terus seolah tiada henti. Keunggulan yang ditawarkan tersebut telah mempengaruhi segala kegiatan kita dan bahkan tanpa disadari hampir di semua lini pekerjaan sangat bergantung pada peran serta teknologi informasi. Untuk itu agar tidak tertinggal di bidang ini, maka haruslah mengikuti perkembangan teknologi informasi (TI). Berbicara tentang TI maka tidak lepas dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana TI. SDM sebagai faktor utama, sehingga diperlukan SDM yang handal untuk dapat selalu mengikuti perkembangan TI dan melakukan pengembangannya (*upgrade*). Yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana TI sebagai alat untuk melancarkan dan memudahkan pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer (*hardware*) yang memadai dan perangkat lunak komputer (*software*) yang lebih canggih dengan versi terkini. Sarana dan prasarana TI yang sudah ada juga harus dikelola dengan baik, oleh sebab itu dibutuhkan perawatan HW yang seksama yang akan membantu kelancaran dalam penyelesaian pekerjaan dan

dapat meningkatkan produktivitas. Faktor yang lain adalah pengadaan majalah dan buku-buku TI yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pengembangan sistem informasi, pengadaan peralatan, perawatan dan rekayasa informatika adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas sistem informasi;
- (2) Meningkatkan kualitas SDM;
- (3) Menyediakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Melakukan penyusunan spesifikasi dan kebutuhan untuk keperluan pengadaan komputer dan alat penunjang lainnya;
- (5) Melakukan perawatan komputer dan alat penunjang lainnya;
- (6) Menyusun *repository* data supaya mudah diakses oleh pengguna; dan
- (7) Melakukan pelayanan lainnya terkait dalam bidang TI.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- (1) SDM yang berkualitas;
- (2) Perangkat lunak yang sesuai kebutuhan dan *user friendly*;
- (3) Layanan yang prima terutama dalam perawatan komputer dan alat penunjang lainnya;
- (4) Program *entry data* yang *user friendly* dan canggih;
- (5) Sistem *repository data* yang mudah diakses;
- (6) Program *entry data* yang *user friendly* dan canggih; dan
- (7) Pengembangan TI yang terbina.

c. Metodologi

Pengembangan Sistem Informasi:

- (1) Membuat program perekaman data;
- (2) Melakukan perekaman data;
- (3) Melakukan kompilasi data; dan
- (4) Membuat sistem informasi.

Melakukan penyempurnaan sistem informasi pengadaan peralatan, perawatan dan rekayasa informatika:

- (1) Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peralatan TI seperti perangkat lunak, perangkat keras, buku-buku dan majalah tentang teknologi informasi;
- (2) Menyusun spesifikasi masing-masing kebutuhan di atas;

- (3) Membantu menyusun Rencana Kerja Syarat (RKS) untuk setiap pengadaan peralatan TI dan pengadaan perawatan komputer dan alat penunjang lainnya;
- (4) Membantu panitia lelang dalam masalah teknis;
- (5) Melakukan pendistribusian peralatan TI hasil pelelangan, bekerjasama dengan Biro Umum;
- (6) Melakukan pendeteksian terhadap perangkat komputer dan alat penunjangnya yang rusak;
- (7) Menyerahkan perangkat yang rusak kepada perusahaan perawatan komputer dan alat penunjangnya; dan
- (8) Melakukan uji kelayakan terhadap perangkat yang telah diperbaiki.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Tersedianya Majalah dan Buku-Buku TI;
- (2) Menyediakan hardware yang memadai sehingga menghasilkan pekerjaan yang cepat proses dan tepat waktu;
- (3) Buku pedoman operasional sistem *Repository Data*;
- (4) Buku Pedoman operasional sistem Pengelolaan *Hardware*;
- (5) Buku Pedoman operasional sistem Pengelolaan *Software*;
- (6) Buku Pedoman operasional sistem Fungsional PraKom;
- (7) Buku Pedoman operasional sistem Pengelolaan Buku dan Majalah;
- (8) Buku Pedoman operasional sistem entri dokumen Ekspor, Impor dan perekaman data lainnya;
- (9) *Hardware* dan *Software* yang setiap waktu dapat digunakan;
- (10) Buku Pedoman operasional perawatan komputer dan alat penunjangnya; dan
- (11) Tersedianya perangkat keras dan Perangkat lunak yang setiap waktu dapat digunakan.

4) Pembuatan Program Pengolahan dan *Repository Data*

a. Abstraksi

Sensus Penduduk merupakan salah satu kegiatan utama Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Indonesia. Selain itu informasi mengenai data statistik distribusi dan produksi membuat BPS menyelenggarakan kegiatan survei baik secara rutin maupun *ad hoc*. Kegiatan di atas bertujuan agar tersedia data statistik distribusi, produksi dan, sosial yang baik, benar serta akurat. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ataupun survei diperlukan persiapan sistem yang matang. Proses pengolahan data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelaksanaan sensus/survei. Agar data tersebut

bisa diolah secara cepat diperlukan suatu tahapan pengolahan yang mendukung. Pembuatan program pengolahan data untuk kegiatan sensus/survei diharapkan mampu mempercepat dan menjaga kualitas data hasil sensus/survei di Indonesia. Data statistik distribusi, produksi, dan sosial merupakan data yang diperlukan oleh pengguna data, baik pemerintah, swasta, kalangan pendidikan maupun masyarakat umum. Untuk itu, BPS perlu menyiapkan suatu sarana untuk mengelola data-data tersebut. Data hasil pengolahan survei dan sensus harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendukung hal tersebut diatas diperlukan kegiatan:

- (1) Pengumpulan dan penyusunan bahan dan pedoman;
- (2) Pengiriman tenaga teknis pengolahan data;
- (3) Pembahasan aturan *rule* validasi pengolahan data;
- (4) Penyusunan program pengolahan data; dan
- (5) Pembuatan buku pedoman program pengolahan dan *repository data*.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan program pengolah data adalah sarana untuk memindahkan dari kuesioner ke media komputer (data). Data tersebut akan diproses menjadi tabel untuk dilakukan analisa. *Repository data* akan meningkatkan kecepatan, keamanan, keterpaduan, dan kemudahan dalam pemakaian data guna pengembangan dan diimplementasikan dalam sistem pengolahan data.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data, buku-buku pedoman, serta program yang mempermudah pengolahan data.

c. Metodologi

Dilakukan secara terbuka bekerjasama dengan *Subject Matter* terkait.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Program pengolahan data statistik distribusi, statistik produksi dan statistik sosial;
- (2) Database server data statistik distribusi, statistik produksi dan statistik sosial; dan
- (3) Buku Pedoman Pengolahan dan *Repository data*.

5) Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

a. Abstraksi

Untuk mencapai standar kualitas publikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, perlu disusun standar pembuatan publikasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Pedoman pembuatan publikasi yang telah ada secara berkesinambungan harus terus disempurnakan guna menjawab selera dan kebutuhan konsumen dengan tetap

menampilkan *image product* yang baku bagi publikasi BPS. Di samping itu juga desain grafis dalam perwajahan publikasi perlu dikaji dan dievaluasi agar publikasi BPS yang disebarluaskan (diseminasi) kepada masyarakat mempunyai standar tertentu yang dapat mencirikan bahwa publikasi tersebut adalah propertisnya BPS. Evaluasi tentang peredaran publikasi Daerah Dalam Angka, Publikasi Khusus, Publikasi Lainnya, dan Publikasi Pusat melalui *mailing list* dilakukan untuk mengetahui pengguna potensial dan pangsa pasar dari produk publikasi BPS. Perkembangan teknologi informasi menuntut produk publikasi tidak hanya dalam bentuk cetakan tetapi dalam bentuk elektronik (*softcopy*), dan sejak tahun 2005 BPS mewajibkan selain produk publikasi cetakan juga dalam bentuk elektronik, maka untuk hal tersebut perlu dibangun suatu sistem publikasi elektronik terpadu. Hingga kini masih banyak *subject matter* dan BPS Daerah yang belum mampu menghasilkan publikasi elektronik secara baik, untuk itu perlu dilakukan workshop mengenai pembuatan publikasi dalam bentuk elektronik yang standar. Setiap produk publikasi harus memiliki nomor ISSN/ISBN, kegiatan pemberian nomor tersebut menjadi keharusan agar produk BPS diregister secara internasional. Akumulasi dari seluruh produk publikasi BPS yang dihasilkan selama setahun akan dirangkum dalam Katalog Publikasi BPS yang dibuat rutin setiap tahunnya. Selain daripada itu, pembuatan publikasi BPS yang dirangkum ke dalam publikasi data strategis juga menjadi perhatian dari semua level yang ada di masyarakat. Sehingga kehadiran buku itu akan memberikan solusi terhadap ketersediaan informasi yang cepat dan akurat serta berkualitas yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk menetapkan suatu keputusan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Meningkatkan pelayanan, kualitas dan ragam penyajian publikasi elektronik yang dihasilkan oleh BPS Pusat dan Daerah;
- (2) Pembuatan dan pengelolaan publikasi elektronik yang lebih baik, konsisten dan mudah dicari kembali;
- (3) Mengetahui kebutuhan publikasi;
- (4) Mengetahui peredaran publikasi ke pengguna; dan
- (5) Tersedianya buku katalog publikasi.

c. Metodologi

- (1) Penyempurnaan Pedoman;
- (2) Survei Kebutuhan;
- (3) Evaluasi;
- (4) Pembangunan Sistem Terpadu; dan
- (5) *Workshop*.

d. Hasil dan Keluaran

Pedoman Pembuatan Publikasi, data kebutuhan publikasi BPS, laporan peredaran publikasi BPS, sistem pulikasi elektronik terpadu, pemahaman yang seragam tentang pembuatan publikasi elektronik, nomor ISSN/ISBN untuk publikasi BPS, dan buku katalog publikasi BPS tahun 2010.

6) Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website*

a. Abstraksi

Produk akhir dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS adalah informasi statistik. Salah satu bentuk penyajian informasi statistik adalah publikasi. Publikasi yang diterbitkan oleh BPS tidak saja meningkat dalam ragamnya, tetapi juga kuantitasnya. Akan tetapi, semakin meningkatnya kebutuhan informasi statistik dan beragamnya permintaan penyajian informasi statistik yang mudah diakses oleh masyarakat mengharuskan BPS untuk meningkatkan keragaman format penyajian informasi statistik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah tersedia di BPS Pusat dan daerah, hal ini merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Piranti lunak yang telah didistribusikan ke seluruh daerah dan adanya tenaga teknis, memungkinkan dibuatnya kemasan statistik dalam bentuk elektronik. Kemasan statistik ini tidak saja dikemas dalam media komputer (CD, disket) tetapi juga dalam media internet (*website*).

b. Tujuan dan Sasaran

Penerbitan kemasan statistik elektronik baik dalam CD, disket maupun internet terutama ditujukan untuk memperluas jangkauan dan kualitas layanan statistik kepada pengguna data BPS. Dengan media elektronik, informasi dapat disebarluaskan tidak saja mudah, murah, tetapi juga cepat. Sehingga sasaran untuk menjadikan BPS sebagai pusat informasi statistik dapat tercapai.

c. Metodologi

Informasi statistik atau sumber data utama diperoleh dari *subject matter* atau publikasi BPS. Kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan metode *workshop* atau sosialisasi dengan nara sumber dari internal maupun eksternal BPS.

d. Hasil dan Keluaran

Sistem ini akan berlangsung selama 12 bulan, termasuk didalamnya pelatihan pembuatan kemasan elektronik untuk seluruh BPS provinsi serta evaluasi pada beberapa BPS provinsi terpilih. *Output* dari kemasan ini akan disebarluaskan kepada pengguna informasi statistik.

7) Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik

a. Abstraksi

Sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyempurnaan sistem aplikasi rujukan statistik perlu dilakukan. Hal ini terkait dengan pengejawantahan tanggung jawab BPS sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 Tahun 1999 maupun PP nomor 38, 41 dan 86 Tahun 2007 serta Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008. Penyempurnaan sistem perlu diikuti pula dengan peningkatan kuantitas dan kualitas isian metadata. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS, instansi pemerintah lainnya, maupun lembaga penelitian, dan institusi swasta lainnya. Penyempurnaan sistem dan peningkatan kuantitas maupun kualitas metadata kegiatan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dengan demikian, pada akhirnya diperoleh sistem aplikasi yang lebih baik dengan isian yang lebih banyak dan lebih akurat.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan terpenting penyempurnaan sistem aplikasi rujukan statistik adalah untuk meningkatkan kinerja, menyempurnakan *form-form* yang digunakan untuk mempermudah pengisian, dan mempersiapkan integrasi dengan metadata lainnya, serta menyempurnakan diversifikasi sistem diseminasi metadata. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- (1) Penyempurnaan lanjutan sistem aplikasi rujukan statistik dan *database* baik secara online maupun secara *offline*;
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi kegiatan statistik;
- (3) Penyusunan dan penyempurnaan panduan rekomendasi kegiatan statistik;
- (4) Penyusunan dan perbaikan kuesioner metadata; dan
- (5) Penghimpunan Data Penunjang, Metadata, dan Kebutuhan Data Pengguna Data Statistik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (1) Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini;
- (2) Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik;
- (3) Tersusun dan tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait; dan
- (4) Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik.

c. Metodologi

Pengumpulan metadata statistik sektoral dilakukan dengan kunjungan ke instansi penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus, sedangkan pengumpulan informasi tentang kebutuhan data, dilakukan dengan mengunjungi instansi pemerintah, pengunjung perpustakaan, maupun institusi swasta. Pelaksanaan pengumpulan metadata statistik sektoral dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengumpulan di instansi vertikal dan di instansi otonom. Penyelenggara di instansi vertikal dikumpulkan oleh Direktorat Diseminasi dan *Liaison Officer*, sedangkan di instansi otonom dipilih 11 provinsi. Sebelas provinsi tersebut meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Sebelum pelaksanaan lapangan (pengumpulan metadata) di 11 provinsi terpilih dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pembekalan pada petugas. Dalam pembekalan ini juga akan dilakukan pembekalan mengenai pemberian rekomendasi yang merupakan kewajiban BPS sesuai dengan UU Nomor 16/1997 dan PP Nomor 51/2000. Koordinasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya, dievaluasi pada tahun ini. Evaluasi dilakukan di daerah dengan bimbingan dari petugas Pusat. Evaluasi ini diperlukan untuk memilih, memilah, serta melengkapi kegiatan statistik. Sementara itu, pelaksanaan pengumpulan informasi tentang kebutuhan data (survei kebutuhan data) di daerah dilaksanakan di 11 provinsi terpilih yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Sebelum akhir pelaksanaan akan dilaksanakan supervisi terhadap pengumpulan data.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Rancangan sistem aplikasi rujukan statistik yang disempurnakan;
- (2) Piranti lunak aplikasi rujukan statistik yang disempurnakan;
- (3) Piranti lunak aplikasi penunjang monitoring dan evaluasi sistem;
- (4) Laporan hasil *monitoring* dan evaluasi sistem statistik dasar;
- (5) Laporan hasil survei kebutuhan data;
- (6) Panduan pemberian rekomendasi kegiatan statistik;
- (7) Katalog kegiatan statistik;
- (8) Penambahan dan penyempurnaan *database* metadata kegiatan statistik; dan
- (9) *Leaflet*.

8) Pembuatan Kemasan Layanan Publik Berbasis Digital

a. Abstraksi

Meningkatkan kepuasan pengguna data atas layanan data yang diberikan oleh Perpustakaan BPS merupakan salah satu tujuan yang selalu diupayakan. Berbagai upaya secara terus menerus dilakukan agar dapat memberikan layanan prima, salah satunya adalah dengan membuat kemasan layanan publik berbasis *digital*. Mengingat beragamnya jenis data yang tersedia dan beragam pula profesi para pengguna data maka sangat perlu untuk dibuat kemasan layanan publik agar memudahkan pengguna data dalam memperoleh data yang diperlukan. Layanan yang cepat dan tepat sangat diperlukan oleh pengguna data dan hal ini baru dapat terlaksana bila didukung oleh berbagai faktor diantaranya adalah kelengkapan dokumentasi, fasilitas/sarana prasarana yang memadai, dan kualitas petugas pelayanan yang sigap dan handal. Karenanya keterpaduan peningkatan kualitas sarana prasarana serta sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang didukung dengan OPAC, dokumentasi *digital* dan *digital library* yang akan memberi akses *online* bagi pengguna data.

b. Tujuan dan Sasaran

Pembuatan kemasan layanan publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna data sehingga pengguna data merasa puas atas layanan dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, dengan adanya dokumentasi yang telah dikemas dapat menghemat ruang, mengingat terus meningkatnya penerimaan ragam dan jumlah pustaka dalam *hardcopy* sedangkan keberadaan ruang masih belum sesuai dengan harapan. Sasaran akhir yang ingin dicapai diantaranya adalah peningkatan kualitas layanan dan terwujudnya dokumentasi statistik yang lengkap sehingga dapat menambah kepuasan kepada pengguna data BPS melalui layanan dan kemudahan akses perolehan data. Sehingga, nantinya dapat menjadi acuan bagi perpustakaan BPS Daerah dalam memberikan layanan dan melestarikan dokumentasi hasil kegiatan BPS.

Dalam mencapai sasaran akan dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- (1) Pengemasan layanan publik berupa dokumentasi *digital*;
- (2) Alih format ke dalam *digital*;
- (3) Pembuatan aplikasi katalog *online*;
- (4) Pembuatan aplikasi *digital library*;
- (5) Pembuatan katalog pustaka;
- (6) Pembuatan klasifikasi pustaka;

- (7) Pembuatan *database* klasifikasi pustaka;
- (8) Pembuatan *database* master wilayah daerah;
- (9) Peningkatan SDM melalui diklat; dan
- (10) Pembuatan Standar Operasional Prosedur.

c. Metodologi

Kegiatan pembuatan kemasan layanan publik kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya hanya bentuk kemasan yang dibuat berbeda, dan ditujukan untuk lebih memaksimalkan layanan, selaras dengan peningkatan kualitas SDM petugas pustaka melalui pendidikan dan pelatihan. Pembuatan aplikasi *digital library* akan dibuat dengan menggunakan *software Apache, Postgre* dan *MYSQL* dengan harapan dapat memberi kemudahan bagi pengguna data dalam akses terhadap koleksi pustaka yang ada. Sedangkan dalam pembuatan dokumentasi *digital* akan menggunakan *software Acrobat Adobe, Acrobat Reader* dan *Auto Run* agar dapat memberi keindahan dalam kemasan dan tampilan dokumentasi. Katalog pustaka disusun berdasarkan judul, pengarang, kolasi dan subyek yang dirinci menurut wilayah pengarang, sedangkan penyusunan klasifikasi pustaka dibuat dengan melihat subyek untuk setiap judul pustaka. Pengolahan pustaka akan dilakukan dengan mengurangi proses *entry (input data)*, oleh karenanya untuk mempercepat proses pengolahan pustaka dibuat *database* klasifikasi dan *database* master wilayah. Sebagai tindak lanjut atas pembinaan yang telah dilaksanakan pada perpustakaan BPS Provinsi maka akan dilaksanakan supervisi di 6 BPS Provinsi sebagai sampel atas tingkat keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan, selain itu akan dilaksanakan pembinaan dalam rangka pembuatan dokumentasi *digital* di 16 BPS Provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Dokumentasi *digital*;
- (2) Publikasi katalog pustaka;
- (3) Publikasi klasifikasi pustaka;
- (4) *Database* klasifikasi pustaka;
- (5) *Database* master wilayah daerah;
- (6) Aplikasi *digital library*;
- (7) Aplikasi Katalog *Online*;
- (8) SOP Perpustakaan dan Dokumentasi;
- (9) Peningkatan kualitas SDM dan layanan; dan
- (10) Terpenuhinya kebutuhan pengguna data.

D. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL

1) Diklat Pimpinan Tingkat IV

a. Abstraksi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur diklat yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural eselon IV.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

c. Metodologi

Diklatpim IV ditujukan untuk pejabat struktural eselon IV BPS yang dilaksanakan selama 5 minggu dengan metode tatap muka.

d. Hasil dan Keluaran

Terciptanya pejabat eselon IV yang memiliki kompetensi di bidang manajerial dan kepemimpinan.

2) Diklat Pimpinan Tingkat III

a. Abstraksi

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara

mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Diklat yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat PNS yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural eselon III.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS; menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan; pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

c. Metodologi

Diklatpim III ditujukan untuk pejabat struktural eselon III BPS yang dilaksanakan selama 7 minggu dengan metode tatap muka.

d. Hasil dan Keluaran

Terciptanya pejabat eselon III yang memiliki kompetensi di bidang manajerial dan kepemimpinan.

3) Diklat Pimpinan Tingkat II

a. Abstraksi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan langkah strategis yang mutlak harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ini menjadi makin penting ketika kesadaran publik akan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik terus meningkat. Terlebih, kini instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan global yang menuntut pelayanan publik agar semakin efektif dan efisien. Dalam kerangka

itulah, diperlukan diklat pimpinan untuk pegawai dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Sehingga diharapkan akan menghasilkan profil pegawai yang profesional dalam bidang tugasnya serta memegang teguh etika profesinya sebagai abdi negara dan masyarakat.

b. Tujuan dan Sasaran

Meningkatkan kompetensi pegawai sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sehingga terciptanya profil pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi pengembangan organisasi.

c. Metodologi

Dalam pelatihan dilakukan dengan metode andragogi, meliputi ceramah, diskusi, seminar, praktek, studi kasus dan simulasi.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan diklat diikuti oleh BPS Pusat dan BPS Provinsi sesuai dengan peruntukannya. Koordinator kegiatan adalah Biro Kepegawaian. Dengan adanya diklat tersebut diharapkan akan menghasilkan profil pegawai yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan pelayanan publik, yang dapat menunjang kegiatan organisasi.

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN

1) Diklat Prajabatan Golongan II

a. Abstraksi

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur diklat yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat PNS yang diperlukan untuk calon PNS adalah Diklat Prajabatan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

c. Metodologi

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan I dan II eks honorer selama 14 hari efektif dengan metode diskusi dan *workshop*.

d. Hasil dan Keluaran

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

2) Diklat Prajabatan Golongan III

a. Abstraksi

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur diklat yang mengarah ke peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan serta efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat PNS yang diperlukan untuk calon PNS adalah Diklat Prajabatan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah, meningkatkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural secara

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik.

c. Metodologi

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan III reguler selama 11 hari efektif dengan metode diskusi dan *workshop*.

d. Hasil dan Keluaran

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

3. RINTISAN PENDIDIKAN GELAR

a. Abstraksi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia khususnya di lingkungan BPS. Selain menyelenggarakan pelatihan, juga memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di bidang Statistik, Ekonomi dan Administrasi, melalui program strata 1 maupun strata 2 yang menawarkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang dibutuhkan pegawai BPS baik Pusat maupun Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada para pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik baik Pusat maupun Daerah yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan program beasiswa ini.

Sasaran kegiatan ini antara lain melakukan sosialisasi program beasiswa melalui:

- (1) Melakukan kegiatan penyeleksian secara administratif dan akademik;
- (2) *Website* BPS; dan
- (3) Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap peserta.

c. Metodologi

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara BPS Pusat dengan IPB, ITS, UNPAD dan UI. Perkuliahan dilaksanakan di masing-masing universitas dengan lama perkuliahan sebagai berikut: ITS selama 24 bulan, UI selama 18 bulan, IPB 18 bulan dan UNPAD 18 bulan.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran antara lain:

- (1) Modul pelatihan dan *hand out* peserta;
- (2) *Prototype* aplikasis berbasis *web*;
- (3) Pegawai BPS yang memiliki kompetensi dalam pengembangan aplikasi berbasis *web* dengan *Java Programming*; dan
- (4) Laporan & Evaluasi.

4. PELATIHAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

1) Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

a. Abstraksi

Badan Pusat Statistik selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Statistik (JFS) berkewajiban memberikan pembinaan serta pelatihan diklat fungsional Statistik. Pembinaan ini tidak saja untuk pegawai BPS, tetapi juga pegawai dari departemen/ instansi lain. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 003/KS/2003 No.25 Tahun 2003, BPS telah selesai menyusun juklak/juknis tentang Jabatan Fungsional Statistisi. SK ini merupakan penyempurnaan dari SK serupa yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk segera mensosialisasikan pedoman pelaksanaan JFS di kalangan BPS khususnya, serta instansi luar BPS. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan JFS, seseorang yang ingin menduduki JFS harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Pusdiklat BPS, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mengadakan dan melaksanakan diklat statistik. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pegawai BPS dan sebagian dari instansi di luar BPS, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi tingkat ahli.

Sasaran kegiatan ini antara lain:

- (1) Menyusun dan menyiapkan materi diklat;
- (2) Mengadakan pelatihan terhadap 60 peserta dalam 2 gelombang masing-masing dilaksanakan selama 26 hari efektif; dan

- (3) Memberikan cara dan metode penghitungan usulan Angka Kredit, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan jabatan fungsional statistisi.

c. Metodologi

Diklat dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktikum selama 26 hari efektif. Dengan tenaga pengajar para fungsional dosen, BPS Pusat, dan Pusdiklat BPS.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran antara lain:

- (1) Pemanggilan peserta, sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan;
- (2) Penyusunan materi diklat; dan
- (3) Penyiapan modul diklat dan *hand out* peserta.

2) Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

a. Abstraksi

Badan Pusat Statistik selaku instansi pembina Jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli berkewajiban memberikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan serta pelatihan diklat fungsional pranata komputer. Pembinaan ini tidak saja untuk kalangan BPS, tetapi juga lintas departemen. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menpan No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka kreditnya, BPS telah selesai menyusun juklak/juknis tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. SK ini merupakan penyempurnaan dari SK serupa yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk segera mensosialisasikan pedoman pelaksanaan JFPKTA dikalangan BPS khususnya serta instansi luar BPS umumnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan JFPKTA, seseorang yang ingin menduduki JFPKTA harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Pusdiklat BPS, sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkewajiban untuk mengadakan dan melaksanakan diklat komputer. Pada tahap awal, kegiatan ini diperuntukkan bagi peserta BPS dan sebagian dari instansi di luar BPS, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki JFPKTA. Sasaran kegiatan ini antara lain:

- (1) Merancang dan menyusun materi pelatihan;
- (2) Mengadakan pelatihan terhadap 50 peserta selama 2 gelombang (1 Gel = 26 hari efektif);

- (3) Peserta berasal dari BPS Pusat dan Daerah dan instansi luar; dan
- (4) Memberikan cara dan metode penghitungan usulan Angka Kredit, dan hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan jabatan fungsional pranata komputer.

c. Metodologi

Diklat dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktikum selama 26 hari efektif.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran antara lain:

- (1) Modul pelatihan dan *hand out* peserta;
- (2) Metode penghitungan, usulan, dan penetapan angka kredit; dan
- (3) Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli.

3) Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar

a. Abstraksi

Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang resmi ditunjuk Pemerintah dalam hal pengumpulan data, senantiasa berusaha untuk dapat mengumpulkan data yang akurat dan *up to date*. Data yang akurat dan *up to date* sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia pengumpul, pengolah, dan penganalisis data. Kenyataannya, banyak SDM BPS yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan statistik yang memadai, khususnya para ujung tombak pengumpul data yaitu Mantis/ Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan para staf BPS. Mengingat tersebarnya tempat tugas para mantis/KSK dan staf yaitu pada kabupaten dan kecamatan di seluruh wilayah Indonesia serta tanpa meninggalkan tugas selama belajar, maka upaya BPS dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi KSK dan para staf melalui Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar (DJJSD).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja para peserta diklat dan sekaligus meningkatkan mutu data statistik (data akurat dan *up to date*). Adapun sasaran kegiatan ini adalah melakukan pelatihan terhadap staf/KSK yang berpendidikan SMA/D1 sebanyak 200 orang dalam 5 gelombang dengan tenaga pengajar fungsional dosen, WI, pejabat struktural BPS Pusat dan Pusdiklat, serta staf Pusdiklat yang berkompetensi di bidangnya.

c. Metodologi

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan jarak jauh secara mandiri dengan mempelajari modul diklat yang telah disusun dalam 5 modul.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan dilakukan selama 10 bulan mulai bulan Januari s/d Oktober 2010, mengingat sistem belajar dilakukan secara mandiri maka perlu dilakukan tutorial yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi untuk setiap materi pelajaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di seluruh Indonesia oleh penanggung jawab BPS Provinsi dan Kabupaten dan berkoordinasi dengan penanggung jawab Pusat (Pusdiklat). Jumlah peserta pelatihan adalah sebanyak 702 orang dengan rincian sebagai berikut : (1) Setiap BPS Provinsi (33 Provinsi) boleh mengirim peserta dari 5 kabupaten masing-masing 4 orang, dengan jumlah sebanyak 825 orang, (2) Setiap Biro/Direktorat (20 Biro/Direktorat) boleh mengirim peserta masing-masing 2 orang, dengan jumlah sebanyak 42 orang. Setelah memiliki sertifikat kelulusan, peserta dapat mengajukan usulan untuk menjadi pejabat Fungsional Statistisi.

4) Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar

a. Abstraksi

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pusdiklat BPS adalah membina dan meningkatkan SDM BPS dari sisi teknis maupun manajemen. Koordinator Statistik Kecamatan adalah salah satu unsur SDM BPS yang bertugas mengumpulkan data statistik yang perlu dibina dan ditingkatkan keterampilannya. Dengan visinya yang baru yaitu "BPS penyedia statistik berkualitas" tentunya memerlukan tenaga KSK yang handal dalam mengumpulkan data dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi tugas yang tidak ringan tersebut, para KSK haruslah dibekali metode-metode statistik dari metode pengumpulan data, pengolahan data dasar sampai pada analisis sederhana. Dengan demikian, para KSK nantinya dapat benar-benar memahami proses akhir dari tugas yang telah mereka kerjakan dan secara tidak langsung berperan serta dalam menyediakan data statistik yang berkualitas.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas data statistik melalui peningkatan pengetahuan dan kinerja para peserta didik; dan
- (2) Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan data dan analisis statistik dasar bagi KSK.

Sasaran kegiatan ini antara lain:

- (1) Merancang dan menyusun materi; dan
- (2) Mengadakan pelatihan terhadap 66 peserta diklat selama 10 hari efektif dan dilakukan dalam 2 angkatan.

c. Metodologi

Diklat dilaksanakan dengan metode tatap muka selama 10 hari. Materi disampaikan secara teoritis dan praktikum langsung menggunakan fasilitas komputer. Peserta diminta untuk membuat tugas akhir sebagai bahan evaluasi dalam penyerapan materi diklat.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan dilakukan selama 10 hari kerja dan diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Selama pelatihan peserta diasramakan di Pusdiklat. Panitia penyelenggara (tenaga pelaksana) adalah pegawai Pusdiklat. Instruktur/tenaga pengajar pelatihan berasal dari BPS Pusat dan Pusdiklat. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Modul pelatihan dan *hand out*; dan
- (2) KSK yang handal dalam menyediakan data dan dapat melakukan analisis data statistik secara sederhana.

5) Diklat Pemrograman *Database* Terintegrasi

a. Abstraksi

Sesuai dengan UU No 16 Tahun 2001 BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyedia data statistik. Ketersediaan data statistik sebagai fakta publik yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mendukung tugas dan fungsi BPS tersebut maka diperlukan berbagai peningkatan dan pengembangan dalam berbagai hal termasuk pengembangan teknologi informasi. Teknologi Informasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat berbagai aktifitas BPS khususnya menyangkut produksi data dan penyajian data statistik kepada pengguna data. Dengan kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi yang pesat serta dikembangkannya konsep *wide area network* (WAN) maka aplikasi yang ada diarahkan pada aplikasi berbasis *web* untuk terciptanya efisiensi dan integritas data. *Java programming* adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup handal untuk membangun berbagai aplikasi khususnya aplikasi berbasis *web*. *Java programming* memiliki fleksibilitas baik dalam pembangunan aplikasi maupun implementasi aplikasi dalam berbagai *platform* perangkat lunak dan perangkat keras yang ada. Pusdiklat BPS sesuai dengan Keputusan Kepala BPS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi pegawai BPS melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang. Salah satu kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah keahlian pegawai BPS dalam mengembangkan aplikasi berbasis *web* dengan *Java Programming* dan *PostgreSQL*.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada pegawai BPS khususnya lulusan D4 STIS dalam pemogramman *database*. Sasaran kegiatan ini antara lain:

- (1) Merancang dan menyusun materi pelatihan;
- (2) Mengadakan pelatihan terhadap 40 peserta diklat selama 26 hari efektif; dan
- (3) Memberikan materi *Java programming* dan *PostgreSQL*.

c. Metodologi

Metode pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer, dan materi yang diajarkan teori dan praktek. Peserta diwajibkan membuat kertas kerja pada sesi terakhir untuk mengetahui daya serap materi yang diajarkan.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran antara lain:

- (1) Modul pelatihan dan *handout* peserta;
- (2) *Prototype* aplikasis berbasis *web*;
- (3) Pegawai BPS yang memiliki kompetensi dalam pengembangan aplikasi berbasis *web* dengan *Java Programming*; dan
- (4) Laporan & evaluasi.

6) Diklat Kompetensi Pejabat Eselon IV

a. Abstraksi

Kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional amupun daerah. Dalam era reformasi dan globalisasi, data yang dikeluarkan oleh BPS dituntut untuk untuk lebih berkualitas dan beragam, dengan demikian program pembangunan yang berdasarkan informasi data yang berkualitas diharapkan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar data BPS lebih lengkap, akurat dan mutakhir, maka BPS harus bekerja lebih keras dalam upaya meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, namun keseluruhan kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik akibat keterbatasan SDM yang dimiliki. Kualitas SDM tersebut tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan formal tetapi juga memiliki penguasaan berbagai metodologi statistik dari pengumpulan data sampai dengan analisis statistiknya. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas khususnya bagi para pejabat struktural Eselon IV, sangat diperlukan penyegaran substansi materi teknis dan analisis statistik untuk membantu pelaksanaan tugas , demi tercapainya visi BPS yaitu penyedia statistik berkualitas.

b. Tujuan dan Sasaran

Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan statistik bagi Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Merancang dan menyusun materi; dan
- (2) Mengadakan pelatihan terhadap 120 orang yang dilaksanakan dalam 3 gelombang, tiap gelombang diikuti 40 peserta selama 18 hari efektif.

c. Metodologi

Diklat dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktikum selama 18 hari efektif.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran antara lain:

- (1) Modul pelatihan dan *hand out* peserta; dan
- (2) Pejabat Eselon IV yang handal dibidang teknis statistik dan analisis.

7) Pembinaan Administrasi dan Pemberkasan CPNS

a. Abstraksi

Pengangkatan CPNS dari lulusan D-IV STIS dan umum telah berlangsung setiap tahun. Pemberkasan CPNS disiapkan oleh Bagian Mutasi Pegawai. Pemberkasan CPNS tersebut meliputi lulusan D-IV STIS yang diperkirakan berjumlah 300 orang, dan umum yang sesuai dengan formasi yang akan ditetapkan oleh Menpan.

Penerimaan CPNS dari peserta daerah memerlukan pemberkasan dokumen yang sesuai dengan persyaratan penerimaan CPNS. Untuk itu perlu mengadakan kunjungan ke provinsi untuk memberi pengarahan dalam penyempurnaan berkas dimaksud.

b. Tujuan dan Sasaran

Untuk penelitian berkas dilakukan secara intensif baik secara internal maupun eksternal. Penelitian secara internal (BPS) dilakukan agar sejak dini dapat diketahui permasalahan yang timbul dan perlu penanganan segera.

Penelitian eksternal (dengan pihak BKN) dilakukan bersama, sehingga permasalahan yang timbul dapat segera ditangani.

c. Metodologi

Kegiatan penelitian berkas pengangkatan CPNS.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini diharapkan dapat tepat waktu penerbitan SK, pengangkatan CPNS.

8) Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi

a. Abstraksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS, Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi tentu BPS tidak terlepas dari tugas untuk selalu melakukan pembinaan tidak hanya yang terdapat di BPS, akan tetapi juga semua PNS yang menjadi pejabat pranata komputer dan statistisi. Secara berkala melalui suratnya ke instansi pembina jabatan fungsional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu mengingatkan apakah kewajiban selaku instansi pembina sudah dilaksanakan. Pembinaan yang dimaksud berupa tugas yang harus dilakukan, yaitu diantaranya adalah meningkatkan kualitas pejabat fungsional melalui seminar, lokakarya, sarasehan, panel, dan sejenisnya, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi bagi jabatan fungsional yang dibinanya serta memfasilitasi penyusunan kode etik profesi yang dilakukan oleh organisasi profesi untuk mengendalikan kualitas pribadi pejabat fungsional. Berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu diselenggarakan kegiatan "Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Pemerintahan Provinsi, Pemkot/Pemkab Terpilih di Wilayah NKRI serta Pembinaan Pranata Komputer dan Statistisi di Instansi Luar BPS". Penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut perlu dilakukan guna menyebarluaskan jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi sebagai salah satu kegiatan pembinaan yang harus dilakukan oleh BPS selaku instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi. Untuk menjembatani serta memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pranata komputer, sebagai instansi pembina BPS akan menyelenggarakan Kongres Pejabat Fungsional Pranata Komputer. Salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan pembinaan tersebut salah satunya adalah *database* dan sistem informasi mengenai jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer. Data-data mengenai riwayat penilaian, jumlah pejabat, dan sebagainya yang sudah dibangun dalam satu Sistem Informasi Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer harus dikelola dengan baik untuk menjaga kualitas informasi yang diberikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu Penyempurnaan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer yang ada di BPS yang diharapkan akan bermanfaat bagi pejabat statistisi dan pranata komputer secara keseluruhan.

b. Tujuan dan Sasaran

Setelah dilakukan kegiatan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi, diharapkan jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi semakin

berkembang luas, pengetahuan mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi di kalangan PNS meningkat, sehingga mereka menjadi termotivasi untuk menjadi pejabat pranata komputer dan statistisi. Dengan demikian dapat semakin meningkatkan profesionalisme PNS secara keseluruhan.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah dengan kegiatan pembelajaran tatap muka, dengan pembicara yang memberikan penjelasan mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi. Pembahasan, diskusi dan *updating database* jabatan fungsional serta pembahasan mengenai usul perpanjangan batas usia pensiun pranata komputer dan statistisi.

d. Hasil dan Keluaran

Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi menjadi semakin berkembang secara luas, pengetahuan mengenai Pranata Komputer dan Statistisi semakin meningkat, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme PNS pada umumnya.

9) Pemilihan KSK Berprestasi

a. Abstraksi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan langkah strategis yang mutlak harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ini menjadi makin penting ketika kesadaran publik akan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik terus meningkat. Terlebih, kini instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan global yang menuntut pelayanan publik agar semakin efektif dan efisien. Dalam kerangka itulah, untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja KSK baik yang menyangkut semangat kerja, prestasi kerja maupun mutu hasilnya diperlukan pemilihan KSK Berprestasi.

b. Tujuan dan Sasaran

Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sehingga terciptanya profil pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi pengembangan organisasi.

c. Metodologi

Pemilihan KSK Berprestasi dilakukan secara bertingkat dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Pemilihan KSK Berprestasi dilaksanakan oleh BPS Pusat dan BPS Provinsi sesuai dengan peruntukannya. Koordinator kegiatan adalah Biro Kepegawaian. Dengan adanya

Pemilihan KSK Berprestasi tersebut diharapkan akan menghasilkan profil pegawai yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan pelayanan publik, yang dapat menunjang kegiatan organisasi.

10) *Assessment Center*

a. Abstraksi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dari hari ke hari peran BPS dalam menyediakan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semakin besar. Untuk menyediakan data yang berkualitas, dituntut profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana tugas pegawai BPS. Para pengguna data BPS akan semakin percaya bahwa data yang dihasilkan oleh BPS berkualitas apabila terbukti bahwa pelaksana tugas-tugas di BPS memang mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menguji apakah pelaksanaan tugas telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditentukan perlu dilakukan pengukuran/*assessment test* terhadap para pemangku jabatan □tructural di lingkungan BPS berdasarkan ukuran standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BPS. Dengan demikian akan didapatkan gambaran yang jelas mengenai kompetensi para pemegang jabatan apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini berguna sebagai bahan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia BPS.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan mengukur kompetensi yang dimiliki oleh pejabat □tructural eselon II BPS berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPS.

c. Metodologi

Dalam pelaksanaan tes dilakukan dengan metode *inventory*, simulasi, *assignment* dan wawancara yang dilakukan oleh tim independen/konsultan.

d. Hasil dan Keluaran

Setelah dilakukan kegiatan *assessment test* untuk pemegang jabatan struktural eselon II BPS diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki oleh semua pejabat struktural eselon II BPS tersebut apakah sudah sesuai standar yang ditentukan oleh BPS, untuk selanjutnya merupakan penduan bagi Baperjakat BPS dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan karir pejabat struktural tersebut.

11) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

a. Abstraksi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Badan Pusat Statistik, maka perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan.

b. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/satuan organisasi, serta untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/satuan organisasi.

c. Metodologi

Tata cara yang digunakan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor: 43/KEP/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Nomor: 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural adalah Standar Kompetensi Umum dan Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural pada Badan Pusat Statistik, untuk jenjang jabatan eselon I, II, III, dan IV BPS Pusat dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

12) Penyusunan Uraian Pekerjaan Dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan

a. Abstraksi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik pada khususnya, dalam pemberian penghasilan perlu didasarkan pada suatu standar penggajian yang memenuhi asas keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, sebagai ukuran diperlukan informasi yang menyeluruh tentang pegawai negeri untuk menghitung dan menentukan besaran penghasilan yang dapat diberikan. Informasi yang dikumpulkan diperoleh melalui kegiatan penyusunan uraian pekerjaan dalam rangka penyusunan formasi informasi jabatan.

b. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan uraian pekerjaan bertujuan untuk menyiapkan dan menerapkan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip-prinsip *merit*, *equity*, dan kompetitif guna meningkatkan profesionalisme dan memacu kinerja PNS.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya sistem remunerasi yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi.

c. Metodologi

Tata cara yang digunakan dalam penyusunan uraian pekerjaan adalah seperti yang diatur dalam KEPMEN/195/M.PAN/7/2007 dan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Struktur Gaji dan Tunjangan Berbasis Kinerja dan *Merit*, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada bulan Juli 2007.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari kegiatan penyusunan uraian pekerjaan adalah informasi jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum pada Badan Pusat Statistik dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

13) Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian

a. Abstraksi

Pengelolaan SDM dalam setiap organisasi adalah suatu kegiatan yang selalu ada dari masa ke masa dan dibutuhkan dalam setiap organisasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang berisi data-data kepegawaian yang akan dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal dan dengan kemudahan pemakaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) ini akan membantu siapapun dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kepegawaian.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan SIMPEG, agar tingkat keterpakaian informasi yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna data kepegawaian.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah evaluasi informasi yang ada berdasarkan masukan dari satuan organisasi lain di dalam maupun di luar Biro Kepegawaian, dan validasi data dengan membandingkan data yang ada dengan laporan yang diberikan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa tabel dan daftar yang digunakan sebagai masukan bagi satuan organisasi yang melakukan perencanaan maupun evaluasi kegiatan maupun evaluasi organisasi BPS di Pusat dan Daerah, serta pelaksanaan kegiatan Sistem Administrasi Instansi.

14) Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan

a. Abstraksi

Sesuai Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pasal 1 nomor 38 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan Keuangan. Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, Eselon I sampai tingkat Kementerian/Lembaga. Satker di BPS terdiri dari 499 satker dan 34 wilayah, setiap satker diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke jenjang di atasnya. Salah satu penyebab *disclaimer* laporan keuangan BPS tahun 2006 dan 2007 karena terdapat ketidakkonsistenan data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Keuangan BPS semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga sampai tingkat Kementerian/Lembaga akan terpelihara dan terhindar dari opini *disclaimer*. Rekonsiliasi ini melibatkan 33 BPS Provinsi yang perannya merangkap sebagai wilayah/gabungan satker-satker dibawahnya. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali yaitu menjelang penyampaian laporan keuangan BPS semester 1 dan tahunan. Mengingat pentingnya rekonsiliasi data ini dan terkait dengan opini laporan keuangan BPS tahun 2006 dan 2007 yang *disclaimer*, untuk itu agar dapat menjadi perhatian mengingat pentingnya dilakukan kegiatan ini.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- (1) Untuk melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan barang terhadap laporan keuangan tingkat wilayah/gabungan dari satker-satker di bawahnya dengan laporan keuangan tingkat yang lebih tinggi di atasnya; dan
- (2) Untuk mendorong terciptanya administrasi di bidang pelaporan keuangan BPS yang lengkap dan akurat serta sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Sasaran:

- (1) Terwujudnya tertib administrasi di bidang pelaporan keuangan di tingkat wilayah dan tingkat satker-satker di bawahnya,
- (2) Terwujudnya laporan keuangan yang lengkap dan akurat serta sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan rekonsiliasi data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan dengan memanggil pengolah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari BPS Provinsi yang berperan sebagai wilayah/gabungan dari satker-satker di bawahnya, pertemuan-pertemuan dan diskusi dalam upaya untuk menyamakan data keuangan dan barang. Dengan dilakukan rekonsiliasi diharapkan laporan keuangan BPS dapat disajikan secara lengkap, akurat, dan konsisten.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan rekonsiliasi ini diprogramkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada saat menjelang penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan. Keluaran laporan hasil rekonsiliasi laporan keuangan yang selanjutnya secara resmi akan dilaporkan kepada pimpinan BPS.

15) Sosialisasi Penerimaan Bukan Pajak

a. Abstraksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBPNP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Agar penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBPNP dalam lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu dilakukan koordinasi yang menyeluruh ke seluruh BPS Provinsi. Sebagai satker pengelola PNBPNP, Bagian Perbendaharaan selalu melakukan pembinaan tidak hanya yang terdapat di BPS, akan tetapi juga BPS Provinsi di seluruh Indonesia. Secara berkala melalui suratnya ke instansi pengelola PNBPNP, Menteri Keuangan selalu mengingatkan apakah kewajiban selaku instansi pengelola sudah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud berupa tugas yang harus dilakukan, yaitu di antaranya adalah meningkatkan kualitas pemasukan PNBPNP melalui revisi PP tentang jenis dan tarif PNBPNP, meningkatkan kuantitas pemasukan PNBPNP dengan mencari jenis PNBPNP yang baru dari yang sudah ada,

memfasilitasi penyusunan dan pelaporan PNBPN bagi BPS Provinsi yang belum memahami sepenuhnya tata cara dan mekanisme penyusunan dan pelaporan PNBPN BPS. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi PNBPN di BPS Provinsi untuk menyebarkan PNBPN sebagai salah satu kegiatan pembinaan yang harus dilakukan oleh Bagian Perbendaharaan selaku satker pengelola PNBPN.

b. Tujuan dan Sasaran

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi PNBPN, diharapkan akan menambah informasi dan pengetahuan bagi BPS Provinsi tersebut mengenai PNBPN, sehingga mereka menjadi termotivasi untuk meningkatkan pemasukan PNBPN yang pada akhirnya dapat meningkatkan APBN secara keseluruhan.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, dengan pembicara dari BPS yang memberikan penjelasan mengenai PNBPN.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan diselenggarakan di BPS dengan koordinator Biro Keuangan, Bagian Perbendaharaan, dengan melibatkan Tim Pengelola PNBPN BPS di lakukan di 33 provinsi.

16) Pembinaan Administrasi Keuangan

a. Abstraksi

- (1) Rendahnya pemasukan laporan administrasi keuangan berkaitan dengan kemampuan dan pemahaman tentang administrasi keuangan, khususnya pengetahuan bendaharawan;
- (2) Permintaan laporan setiap saat oleh DPR/DPRD maupun Departemen Keuangan atau instansi terkait;
- (3) Meningkatkan kemampuan petugas/SDM yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- (4) Cepat dan tertibnya laporan keuangan secara menyeluruh; dan
- (5) Dilakukan dengan pembinaan melalui pelatihan atau kursus.

b. Tujuan dan Sasaran

Melatih dan membina pelaksana administrasi keuangan (bendaharawan/ calon bendaharawan) Kabupaten/Kota yang pada akhirnya dapat mendukung/melaksanakan tugas-tugasnya dengan tepat dan cepat.

c. Metodologi

Pelatihan dengan tatap muka dan praktek (*role playing*) kegiatan bendaharawan pengeluaran di dalam kelas.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah lancarnya administrasi keuangan khususnya pengetahuan seorang bendaharawan yang mendukung kegiatan teknis statistik serta meningkatnya pemasukan laporan keuangan secara periodik per triwulan.

E. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN

1) *Review* Laporan Keuangan BPS Tahun 2009

a. Abstraksi

Sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Kementerian Negara/Lembaga masing-masing. Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat berkewajiban melakukan *review* terhadap Laporan Keuangan BPS, untuk memberikan keyakinan kepada BPKP & BPK bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan SAP tersebut.

Kewajiban *review* tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 pasal 32 ayat (4) dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 Tahun 2006 yang mengatur bahwa APIP bertugas untuk melakukan *review* atas laporan keuangan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- (1) Untuk menelaah laporan keuangan dan catatan akuntansi; dan
- (2) Untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BPS sebelum disampaikan oleh Kepala BPS kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Sasaran:

- (1) Memberikan dasar bagi Inspektorat Utama untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan seperti dalam pelaksanaan audit; dan
- (2) Memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam *review* laporan keuangan BPS dilakukan dengan prosedur penelusuran dan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan data sumber lainnya. Permintaan keterangan/informasi dari sumber-sumber terkait dan analisisnya merupakan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut selanjutnya laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil kegiatan atau keluaran berupa Pernyataan Telah Mereviu atas laporan Keuangan BPS yang nantinya akan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Kepala BPS kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010

a. Abstraksi

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan kegiatan pengawasan/ pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yang berkesinambungan setiap tahunnya. Objek yang diperiksa adalah seluruh kegiatan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja di lingkungan BPS Pusat dan Daerah. Inspektorat Utama BPS mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS, baik pengawasan/pemeriksaan tahunan maupun pengawasan/ pemeriksaan khusus pada objek pemeriksaan (obrik) yang telah diprogramkan ataupun atas perintah khusus Pimpinan BPS. Sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Inspektorat Utama BPS mempunyai kewajiban untuk ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan BPS. PKPT 2010 dilakukan terhadap obrik di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum diperiksa dalam PKPT tahun sebelumnya. Daerah yang akan diperiksa sebanyak 33 Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota dengan jumlah obrik 245 Satuan Kerja (satker). Setiap Obrik/Satker akan diperiksa oleh tim, yang masing-masing beranggotakan 3 orang pemeriksa dan 1 orang supervisi dengan hari pemeriksaan sebanyak 20 hari dan supervisi 4 (empat) hari.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

- (1) Untuk membina ketaatan pengadministrasian keuangan negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada setiap satker di lingkungan BPS;
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, yang dibandingkan dengan rencana/anggaran yang telah ditetapkan di masing-masing satker di lingkungan BPS; dan
- (3) Untuk mendorong terciptanya tertib administrasi dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran:

- (1) Menjadikan instansi BPS yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
- (2) Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (3) Terwujudnya aparat pengelola anggaran yang jujur, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan PKPT ini, dilakukan dengan pertemuan-pertemuan dan diskusi dalam menetapkan obrik PKPT yang komprehensif. Dengan tersusunnya obrik PKPT yang komprehensif ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan dapat terarah dengan baik, sehingga mencapai visi, misi, dan tujuan Inspektorat Utama.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil kegiatan atau keluaran kegiatan PKPT ini berupa laporan intern hasil pemeriksaan yang selanjutnya secara resmi akan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai tindak lanjut dari laporan intern, sebanyak obrik yang ada untuk keperluan pelaporan pada obrik yang bersangkutan dan instansi terkait (BPKP, BPK dan Menpan).

F. PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI

1. PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/ *UPDATING*/ANALISA DATA DAN STATISTIK

1) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

a. Abstraksi

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Indikator Dini tentang ekonomi yang dapat memberikan sinyal-sinyal perekonomian jangka pendek baik dari sisi pebisnis (produsen) maupun rumah tangga (konsumen). Informasi yang bersifat dini tentang kondisi perekonomian terkini menjadi harapan bagi para pelaku ekonomi baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum. Untuk itu, BPS telah menghitung kedua macam indikator dini tersebut sejak tahun 1996. Karena pentingnya informasi ini, maka sejak tahun 2001 hasil analisis ITB dan ITK sudah dipublikasikan secara meluas setiap triwulan melalui *press release* bersamaan dengan hasil perkiraan Produk Domestik Bruto Triwulanan. Untuk kesinambungan dan mengingat pentingnya informasi ini maka kegiatan penghitungan ITB dan ITK masih perlu dilanjutkan.

b. Tujuan dan Sasaran

Analisis Sistem Pemantauan Indikator Dini:

- (1) Menghitung dan menganalisis ITB dan ITK yang dapat memberikan informasi dini tentang kondisi bisnis dan ekonomi konsumen secara triwulanan; dan
- (2) Memberikan perkiraan kondisi bisnis dan konsumen tiga bulan ke depan menggunakan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.

c. Metodologi

Penghitungan ITB dan ITK. Indeks Tendensi Bisnis terdiri dari dua indeks yaitu Indeks Tendensi Bisnis Kini dan Indeks Tendensi Bisnis Mendatang. Masing-masing jenis indeks tersebut merupakan komposit dari beberapa variabel. Indeks Tendensi Konsumen juga terdiri dari dua indeks yaitu Indeks Tendensi Konsumen Kini dan Indeks Tendensi Konsumen Mendatang. Masing-masing jenis indeks tersebut juga merupakan komposit dari beberapa variabel dengan penimbang tertentu. Penghitungan indeks masing-masing variabel menggunakan *Diffusion index*, yaitu: $I_{vi} = (TS/n) * 100\%$ I_{vi} = Indeks variable ke-i TS = Total Skor setiap variabel N = Jumlah Responden Rumus dari Indeks Indikator Kini dan mendatang: I_{IK} tau I_{IM} = hasil penjumlahan dari indeks masing-masing variabel ($w * I_{vi}$) I_{IK} = Indeks Indikator Kini (baik untuk ITB maupun ITK) I_{IM} = Indeks Indikator Mendatang (untuk ITB dan ITK) w =penimbang.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen, dimana penyajiannya dilakukan secara triwulanan dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS). Di samping BRS yang dikeluarkan secara triwulanan, penyajian akan dibuat pula dalam bentuk publikasi yang merupakan penyajian yang lebih rinci dan lengkap yang disertai metodologi serta analisisnya.

2) Analisis Disparitas

a. Abstraksi

Permasalahan sosial tanpa disadari seringkali muncul sebagai dampak dari adanya ketimpangan dalam berbagai hal dan juga ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai gambaran, ketimpangan dalam hal input pembangunan akan berdampak pada ketimpangan dari sisi *output* yang dihasilkan. Ketimpangan *output* pembangunan akan tercermin dari adanya ketimpangan dalam tingkat hidup penduduk. Sebagian penduduk yang tingkat hidupnya rendah akan memiliki sejumlah persoalan seperti sulitnya memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan juga pendidikan. Permasalahan-permasalahan sosial akan muncul manakala mereka berupaya memenuhi kebutuhan. Bila tidak diantisipasi, permasalahan sosial akan semakin berkembang, dan dapat terakumulasi menjadi permasalahan bangsa dan negara. Disparitas *input* pembangunan disinyalir telah terjadi sejak sebelum pelaksanaan OtDa. Yang paling sering terdengar adalah disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), disparitas antara Jawa dengan Luar Jawa. Dengan diterapkannya otonomi daerah, disinyalir jurang ketimpangan dalam hal *input* maupun *output* pembangunan antar daerah menjadi semakin lebar. Daerah-daerah yang kuat SDM dan sumber daya alamnya akan semakin maju, dan sebaliknya. Demikian pula dengan permasalahan pangan dan gizi, masih terdapat sejumlah daerah yang terlilit akan persoalan ini. Kelangkaan pangan, distribusi yang tersendat dan daya beli yang terbatas membuat penduduk miskin di sejumlah daerah larut pada persoalan pangan dan gizi. Terkait dengan hal itu, sebagai evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang akan dikaji yaitu: 1) Analisis Disparitas Input Pembangunan, 2) Analisis Situasi Pangan dan Gizi.

b. Tujuan dan Sasaran

Analisis Disparitas Input Pembangunan:

- (1) Menyusun indeks komposit yang menggambarkan ukuran *input* pembangunan suatu daerah dengan menggunakan metode taksonomik; dan

- (2) Membandingkan peringkat *input* pembangunan suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Analisis Situasi Pangan dan Gizi:

- (1) Memberi gambaran tentang keadaan konsumsi pangan;
- (2) Memberi gambaran tentang akses rumah tangga terhadap pangan;
- (3) Gambaran tentang ketahanan pangan; dan
- (4) Gambaran tentang status gizi masyarakat.

Melalui penelitian ini pemerintah daerah akan dapat mengetahui bidang-bidang pembangunan yang memerlukan perhatian khusus, sementara pemerintah pusat akan dapat mengetahui daerah-daerah yang masih memerlukan supervisi khusus dalam pelaksanaan OtDa selanjutnya.

c. Metodologi

Analisis Disparitas Input Pembangunan:

Ukuran pembangunan di tiap-tiap daerah dihitung dengan menggunakan metode taksonomik. Ukuran pembangunan di tiap-tiap daerah ini selanjutnya dibandingkan dengan ukuran pembangunan dari daerah yang menjadi rujukan sehingga diperoleh posisi relatif pencapaian pembangunan suatu daerah relatif terhadap daerah rujukan. Beberapa variabel yang dipertimbangkan sebagai *input* pembangunan, diantaranya:

- (1) Jumlah penduduk;
- (2) % penduduk usia produktif;
- (3) Luas wilayah;
- (4) PDRB per kapita;
- (5) % desa tanpa sarana pendidikan;
- (6) Rasio murid guru;
- (7) % desa tanpa sarana kesehatan;
- (8) % desa tanpa sarana tenaga kesehatan;
- (9) % desa tanpa sarana jalan roda empat;
- (10) % desa tanpa sarana telepon;
- (11) % desa tanpa program TV; dan
- (12) % desa tanpa sarana pasar permanen/semi permanen.

Analisis Situasi Pangan dan Gizi:

Analisis dilakukan secara deskriptif maupun dengan menggunakan model-model statistik. Gambaran tentang konsumsi pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan dilakukan dengan menggunakan data SUSENAS, sementara gambaran tentang status gizi

masyarakat, utamanya status gizi ibu dan balita dilakukan dengan menggunakan data SDKI. Analisis dipertajam dengan menggunakan sumber data yang lain seperti data dari Departemen Pertanian khususnya untuk gambaran tentang ketahanan pangan.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran Analisis Disparitas Input Pembangunan:

Peringkat suatu daerah berdasarkan ukuran *input* pembangunan baik berdasarkan variabel tunggal maupun ukuran komposit. Seluruh keluaran ini akan disajikan dalam bentuk publikasi: Analisis Disparitas Input Pembangunan.

Keluaran Analisis Situasi Pangan dan Gizi :

Gambaran tentang situasi pangan dan gizi tingkat nasional maupun daerah. Seluruh keluaran ini akan disajikan dalam bentuk publikasi: Analisis Situasi Pangan dan Gizi.

3) Analisis Statistik Ekonomi

a. Abstraksi

Analisis fundamental adalah metode analisis yang menggunakan kekuatan fundamental dari suatu negara. Perkembangan berbagai informasi atau isu yang berkembang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang penting untuk dicermati.

Pada dasarnya fundamental dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik, keuangan-moneter, dan eksternal. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisis fundamental adalah PDB, inflasi, neraca pembayaran, dan ketenagakerjaan. Faktor politik, sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui waktu terjadinya (*timing*) secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Para pengamat pasar valuta asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata uang, selain indikator keuangan lainnya, seperti jumlah uang yang

beredar. Faktor eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak regional bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era alokasi *global asset*, arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara.

b. Tujuan dan Sasaran

Analisis Fundamental:

- (1) Memberikan gambaran perkembangan indikator fundamental Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, keuangan, dan moneter maupun eksternal; dan
- (2) Memberikan masukan bagi pemerintah dan dunia usaha tentang analisis fundamental Indonesia sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan sinergi dalam memajukan perekonomian Indonesia.

c. Metodologi

Gambaran umum fundamental Indonesia pada periode tertentu dianalisis secara deskriptif dengan mencermati perkembangan indikator-indikator ekonomi, politik, keuangan dan moneter, serta eksternal. Analisis fundamental juga akan mempertimbangkan ukuran rasio-rasio yang diakui secara internasional untuk mengevaluasi pencapaian dari setiap indikator-indikator ekonomi, politik, keuangan-moneter, dan eksternal pada periode tersebut. Kondisi fundamental ekonomi, misalnya, bisa dicermati dari pertumbuhan ekonomi domestik tetap meningkat, inflasi rendah, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Kondisi politik, misalnya, bisa dicermati dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) pada periode penelitian. Kondisi fundamental keuangan dan moneter, misalnya, bisa dicermati dari kondisi perbankan nasional melalui rasio kredit bermasalah/*non-performing loan* (NPL), likuiditas, dan permodalan atau melalui dampak otonomi daerah melalui penerapan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kondisi fundamental eksternal, misalnya, bisa dicermati dari dampak yang ditimbulkan oleh turbulensi pasar keuangan global melalui perdagangan pasar saham.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dari kegiatan Analisis Fundamental Indonesia akan disajikan dalam bentuk publikasi dan *output* lainnya berupa *database* dari data-data fundamental Indonesia periode tertentu.

4) Penyempurnaan dan Pengembangan Konsistensi Statistik Ekonomi dan Sosial

a. Abstraksi

Data statistik sangat penting bagi perencanaan, *monitoring* dan evaluasi program dan kebijaksanaan pembangunan. Data statistik yang dapat dipercaya akan mendukung penentu kebijaksanaan dan pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Sementara itu keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh konsistensi data antar waktu, antar wilayah dan antar indikator. Untuk itu studi mengenai konsistensi data menjadi sangat diperlukan. Dalam TOR ini memuat 2 kegiatan yaitu:

(1) Studi Konsistensi Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Data mengenai konsumsi rumah tangga dihasilkan dari data Susenas Modul Konsumsi. Selain dari Susenas, informasi mengenai konsumsi rumah tangga dapat dilihat dalam PDB/PDRB, dan Tabel *Input Output*. Perbedaan data konsumsi rumah tangga antar sumber data dalam level tertentu akan mempengaruhi analisis mengenai konsumsi rumah tangga. Untuk itu guna melihat keterbandingan data konsumsi rumahtangga yang dihasilkan BPS, perlu dilakukan studi mengenai konsistensi data konsumsi rumah tangga.

(2) Studi Konsistensi Data PODES

Data Potensi Desa (PODES) dikumpulkan setiap 3 tahun berkaitan dengan pelaksanaan Sensus. Data PODES yang terakhir dikumpulkan pada tahun 2007 berkaitan dengan Sensus Penduduk 2010. Data Podes menghimpun berbagai informasi tentang potensi desa/kelurahan yang banyak digunakan baik oleh pemerintah maupun praktisi. Dalam rangka *targeting* program pengentasan kemiskinan, data PODES digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa tertinggal. Selain itu data PODES juga digunakan untuk *updating* klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan. Berpijak dari hal tersebut, adalah penting untuk memastikan reliabilitas data agar kajian yang menggunakan data PODES dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa variabel dalam data PODES yang diduga tidak konsisten sehingga menyulitkan pemakai data, terutama pada kajian data antar waktu. Selain itu informasi mengenai infrastruktur, sosial dan ekonomi perlu dikaji dan dibandingkan dengan informasi sejenis yang dikeluarkan oleh pihak lain. Sebagai contoh data jumlah Puskesmas perlu dibandingkan dengan data yang dikumpulkan oleh Departemen Kesehatan. Untuk itu, studi ini akan mencoba mengkaji tingkat konsistensi data PODES baik konsistensi antar variabel maupun konsistensi data PODES dengan data dari sejenis dari sumber lain.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Studi Konsistensi Konsumsi Rumah Tangga bertujuan untuk melihat konsistensi data konsumsi rumahtangga berdasarkan Susenas, PDB dan table I-O; dan
- (2) Studi Konsistensi Data Podes Studi bertujuan untuk melihat konsistensi antara data PODES secara internal dan eksternal. Analisis internal dimaksudkan untuk melihat konsistensi antar variabel yang dihasilkan oleh data PODES secara cross section ataupun antar waktu. Sedangkan analisis eksternal dilakukan untuk melihat konsistensi beberapa indikator hasil PODES dengan data sejenis dari sumber lain baik di dalam maupun di luar BPS.

c. Metodologi

- (1) Studi Konsistensi Konsumsi Rumah tangga akan dilakukan dengan membandingkan 3 set data yaitu Susenas Modul Konsumsi, PDB dan tabel I-O; dan
- (2) Studi Konsistensi Data Podes Studi ini akan dilakukan dengan menggunakan 3 set data PODES terakhir yaitu PODES ST 2003, PODES SE 2006 dan PODES SP 2010 serta data-data pembanding lainnya seperti SUSENAS dan data sekunder lainnya. Selanjutnya analisis digunakan dengan cara deskriptif dan inferensi. Hasil analisis akan diperkuat dengan hasil kegiatan observasi lapangan terhadap beberapa variabel PODES di 8 provinsi yang mewakili 5 pulau besar di Indonesia. Dalam kegiatan observasi lapangan ini akan dilakukan pencacahan antara lain jumlah infrastruktur dan fasilitas umum di setiap desa. Hasil observasi lapangan dan kajian konsistensi data PODES akan dikaji lebih lanjut melalui kegiatan verifikasi di 5 provinsi yang datanya dicurigai kurang valid.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Laporan berisi konsistensi data Konsumsi Rumah Tangga antar jenis data beserta analisisnya; dan
- (2) Laporan berisi konsistensi data PODES antar variabel, antar sumber data beserta analisis konsistensinya.

5) Pengembangan Indikator Pembangunan Regional

a. Abstraksi

Permasalahan utama yang terjadi di Indonesia ialah adanya ketimpangan hasil pembangunan antar daerah. Ada dua faktor utama yang dapat menerangkan munculnya ketimpangan ini yaitu ketidaksetaraan anugerah (*endowment*) dan kesalahan tumpuan strategi pembangunan yaitu sasaran-sasaran pembangunan diarahkan hanya untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan mengabaikan aspek pemerataan dan

keadilan. Adanya kesenjangan atau ketimpangan hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah berimplikasi pada kondisi perekonomian di wilayah tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada bidang-bidang sosial seperti rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, adanya suatu ukuran pembangunan wilayah yang komprehensif yang merupakan agregat dari berbagai indikator pembangunan di berbagai bidang seperti indikator ekonomi, sosial dan lingkungan dipandang perlu untuk menggambarkan berhasil atau tidaknya pembangunan suatu wilayah, tingkat perkembangannya dan perbedaan (disparitas) dengan wilayah-wilayah lainnya. Salah satunya melalui Indeks Pembangunan Regional (*Regional Development Index*) yang disingkat dengan IPR. Kajian awal tentang indeks tersebut yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2009 yang mengukur capaian pembangunan wilayah di tingkat provinsi perlu dilakukan penyempurnaan guna menghasilkan ukuran yang lebih valid dan mampu mengukur perubahan antar waktu.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyempurnaan penyusunan Indeks Pembangunan Regional ialah untuk :

- (1) Menyempurnakan metodologi penyusunan IPR yang dilakukan pada kajian awal;
- (2) Mengetahui perkembangan pembangunan daerah menurut kawasan, provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) Mengetahui perbedaan pembangunan antar daerah serta tingkat kesenjangan;
- (4) Mengetahui wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam wilayah percepatan pembangunan nasional; dan
- (5) Memberikan gambaran besarnya/tingkat permasalahan.

c. Metodologi

Mengkaji ulang metode Penyusunan Indeks Pembangunan Regional pada kajian awal tahun 2009 yang diawali dengan penelitian terhadap beberapa indikator yang digunakan pada kajian awal khususnya tentang sensitivitas dan validitas dari setiap indikator yang digunakan. Pengumpulan data terbaru/terkini dan indikator lain yang mungkin belum dimasukkan dalam kajian awal.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa publikasi " Penyempurnaan Metodologi Indeks Pembangunan Regional ". Publikasi tersebut berisi:

- (1) Indikator Pembangunan Regional tingkat provinsi;
- (2) Peringkat Peningkatan Indikator Pembangunan Regional;
- (3) Peringkat Wilayah Menurut Kelompok Indikator;

- (4) Tingkat kesenjangan regional dan peringkatnya; dan
- (5) Analisis antar waktu dan antar wilayah.

6) Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Sosial

a. Abstraksi

Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan nasional yang dimaksud disini adalah mencakup pembangunan sosial dan ekonomi. Karena pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial pada masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan serangkaian program yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu. Guna keperluan program evaluasi dan perencanaan tersebut, dibutuhkan sejumlah indikator-indikator sosial yang dapat mencerminkan pembangunan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, yang dapat dilihat dari perkembangan antar waktu, keragaman antar daerah serta tersedianya data yang berkesinambungan. Hal ini akan sangat membantu dalam melakukan koreksi pada program yang sedang berjalan atau akan menentukan perencanaan bagi program yang akan datang. Aspek tentang kesejahteraan masyarakat disadari sangat luas dan kompleks sehingga diperlukan penentuan jenis-jenis indikator sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk itu, kegiatan penyempurnaan dan pengembangan indikator statistik sosial menitikberatkan pada indikator-indikator yang dapat terlihat dan terukur pada beberapa aspek, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, perumahan, dan aspek sosial lainnya. Data yang digunakan selain berasal dari data BPS (primer), juga didukung oleh data dari beberapa instansi terkait (sekunder). Data tersebut kemudian disajikan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) yang terbit secara tahunan. Dalam penyusunannya, selalu diupayakan perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus, antara lain cakupan indikator sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen data yang semakin kritis. Agar penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka perbaikan dan penyempurnaan Data Basis Indikator Sosial melalui sistem yang terpadu dan terintegrasi perlu terus ditingkatkan baik di Pusat maupun di Daerah. Selain publikasi Inkesra, dilakukan pula penyempurnaan dalam rangka penyusunan publikasi Laporan Sosial yang menyajikan topik berbeda setiap edisi. Topik yang dibahas mencakup balita, *gender*, lanjut usia (lansia), kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan permasalahan sosial lainnya. Laporan ini juga dilengkapi

dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi mendalam (*indepth study*) di beberapa provinsi. Publikasi ini juga terbit rutin setiap tahunnya dengan menitikberatkan pada masalah sosial yang dianggap sebagai isu aktual yang cukup menarik untuk disajikan pada tahun berjalan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan penyempurnaan dan pengembangan indikator statistik sosial adalah untuk mengetahui :

- (1) Tingkat dan perkembangan berbagai jenis indikator statistik sosial;
- (2) Melihat perkembangannya antar daerah dan kelompok penduduk;
- (3) Memberikan gambaran tingkat permasalahan sosial yang dihadapi; dan
- (4) Mendeteksi prioritas bidang/sector yang memerlukan perhatian khusus.

c. Metodologi

Dalam pelaksanaan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009, tahap-tahap yang dilakukan adalah:

- (1) Perencanaan/Persiapan, dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan. Pada tahap perencanaan disusun kelompok kerja yang beranggotakan 12 orang termasuk seorang yang menjadi ketua tim sebagai penanggung jawab pelaksanaan;
- (2) Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data sekunder, baik yang berasal dari BPS maupun dari instansi terkait, kemudian melakukan konsultasi ahli terhadap para pakar Inkesra di daerah. Setelah itu kelompok kerja yang telah dibentuk melakukan penelitian di daerah yang telah ditentukan;
- (3) Pengolahan. Tahap pengolahan dilaksanakan setelah semua data dihimpun, baik data primer maupun data sekunder. Dari data yang terkumpul akan dilakukan penghitungan dan tabulasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan publikasi;
- (4) Penyajian/Publikasi. Hasil penghitungan dan pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik/gambar, dan juga dilengkapi dengan ulasan secara deskriptif dan penjelasan teknis. Penulisan/finalisasi penulisan Inkesra dilakukan oleh tim kelompok kerja, yang masing-masing anggota timnya akan melaporkan hasil/ulasan/analisisnya pada ketua tim yang kemudian akan mengedit ulasan dan menyempurnakan hasil laporan tersebut. Laporan disusun dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyempurnaan Sistem Data Basis Indikator Sosial Seiring dengan tersedianya publikasi Inkesra yang terus berkelanjutan, maka data yang terdapat dalam Sistem Data Basis Indikator Sosial juga terus dilakukan pembaharuan

(*update*) sesuai dengan kondisi data yang ada. Sejalan dengan itu, sistem *software*-nya juga terus akan disempurnakan agar dapat memenuhi harapan penggunaanya;

(5) Sementara dalam pelaksanaan penyusunan publikasi Laporan Sosial 2009, tahap-tahap yang dilakukan adalah:

- Perencanaan Persiapan, dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan. Pada tahap perencanaan ini kegiatan pertama yang dilakukan adalah memilih beberapa wilayah yang akan dilakukan penelitian secara mendalam (*indepth study*) sesuai dengan topik yang dipilih dan menentukan jumlah responden yang akan diteliti. Pada tahap selanjutnya adalah merancang daftar pertanyaan (kuesioner), baik untuk rumah tangga maupun untuk instansi terkait yang akan menjadi responden di daerah;
- Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data di wilayah terpilih melalui studi mendalam, dengan mengunjungi responden-responden yang telah ditentukan. Selain melakukan wawancara, juga melakukan observasi/pengamatan lapangan untuk mendapatkan hasil yang akurat;
- Pengolahan. Tahapan pengolahan dilaksanakan setelah semua data dihimpun, baik data primer maupun data sekunder yang didapat dari beberapa instansi terkait di daerah. Dari data yang terkumpul akan dilakukan tabulasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan publikasi; dan
- Penyajian/Publikasi. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel/grafik/gambar, juga dilengkapi dengan ulasan dari setiap wilayah berdasarkan pengamatan dan studi mendalam yang telah dilakukan di lapangan. Kemudian hasil analisis tersebut akan di edit dan disempurnakan oleh ketua tim yang kemudian disajikan dalam publikasi Laporan Sosial 2009.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009 dan Laporan Sosial 2009 merupakan publikasi tahunan, yang menyajikan informasi tentang kondisi dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan.

7) Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi

a. Abstraksi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan statistik yang semakin beragam, maka secara bertahap Subdirektorat Indikator Statistik-BPS melakukan penyempurnaan dan pengembangan indikator-indikator statistik baik yang bersifat bulanan, triwulanan

maupun tahunan. Penyempurnaan dan pengembangan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kualitas isi dan cakupan materi yang dimuat dalam laporan. Untuk penyempurnaan isi dilakukan dengan mempertajam daya analisis dan evaluasi laporan, memperluas cakupan isi terutama tentang isu-isu yang bersifat aktual dan didukung dengan data terkini. Dengan demikian, secara bertahap pembangunan perstatistikan semakin dirasakan manfaatnya dalam membantu kelancaran pembangunan nasional. Pada tahap sekarang, Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi difokuskan pada laporan perekonomian dan indikator-indikator yang bisa menggambarkan pembangunan ekonomi.

Laporan-laporan tersebut didasarkan pada data BPS (primer) dan data instansi lain (sekunder) yang telah diteliti konsistensi dan kebenarannya. Indikator yang disajikan juga mencakup metode baru yang dikembangkan untuk menggambarkan tingkat aktifitas perekonomian saat ini serta arah pergerakan perekonomian dalam beberapa bulan mendatang berupa indeks, yang merupakan gabungan dari beberapa variabel ekonomi. Penyajiannya berupa Indikator Ekonomi Bulanan, Tinjauan Kinerja Perekonomian Triwulanan dan Laporan Perekonomian Tahunan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Meningkatkan kualitas substansi, penampilan, cakupan dari berbagai indikator-indikator statistik khususnya mengenai bidang ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan swasta;
- (2) Mengembangkan variasi laporan dan teknik analisis, sesuai dengan kemajuan pembangunan ekonomi; dan
- (3) Menyempurnakan isi laporan, terutama mengenai:
 - Kelengkapan variable;
 - Kemutakhiran data;
 - Evaluasi dan konsistensi data; dan
 - Ketajaman analisis dan perluasan cakupan.

c. Metodologi

Pengumpulan data untuk penyusunan berbagai laporan bersumber dari data mentah BPS maupun data dari publikasi BPS serta didukung oleh data sekunder dari instansi terkait. Selain itu, untuk analisis yang didukung data-data dan metodologi statistik juga dilakukan konsultasi dengan pakar berkaitan dengan fenomena kejadian yang berhubungan dengan kondisi ekonomi terkini.

d. Hasil dan Keluaran

Penyusunan Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2009, Tinjauan Kinerja Perekonomian Indonesia Triwulanan, Indikator Ekonomi Bulanan yang disajikan dalam bentuk publikasi yang berisikan tabel-tabel dan uraian analisis secara deskriptif dan induktif serta grafik/gambar. Sedangkan, penyajian dikelompokkan menurut sektor/bidang dan disajikan menurut agregat nasional dan provinsi serta posisi Indonesia dalam kawasan regional.

8) Pengembangan Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja

a. Abstraksi

Kegiatan penyempurnaan dan pengembangan model statistik sosial untuk tahun 2010 dibagi dalam dua kegiatan yaitu pengembangan model klasifikasi desa menggunakan analisis *rating* dan pengembangan model struktur ekonomi dan kesempatan kerja serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dua kegiatan tersebut meski terbagi dalam dua RKA, namun sebenarnya merupakan satu tolok ukur dari kegiatan Penyempurnaan dan Pengembangan Model Statistik Sosial. Pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok, yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang (Swasono dan Sulistyaningsih, 1993). Artinya, laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga Manning (1995) dalam Suhartini (2001) mengatakan bahwa titik balik untuk aktivitas ekonomi (*economic turning-point*) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenaga kerja (*labor turning-point*). Sehingga, masalah yang sering diperdebatkan adalah: (1) apakah penurunan pangsa PDB sebanding dengan penurunan pangsa serapan tenaga kerja sektoral, dan (2) industri mana yang berkembang lebih cepat, agroindustri atau industri manufaktur. Jika transformasi kurang seimbang maka

dikuatirkan akan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Bertolak dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka studi ini bertujuan untuk melihat perubahan struktural yang terjadi dalam perekonomian Indonesia, khususnya dinamika perubahan struktur ekonomi (pangsa produksi terhadap PDB) dan kesempatan kerja baik antar sektor maupun antar sub sektor pada sektor pertanian dan perubahan struktur kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan demikian, dapat ditentukan formula model pembangunan yang tepat dalam menyikapi perubahan struktural ekonomi dan kesempatan kerja serta perubahan struktur kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi era globalisasi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan model struktur ekonomi dan kesempatan kerja serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah:

- (1) Melihat perubahan struktural ekonomi khususnya pangsa produksi terhadap PDB;
- (2) Melihat perubahan struktur kesempatan kerja baik antar sektor, khususnya sektor pertanian;
- (3) Melihat perubahan struktur kualitas sumber daya manusia khususnya dikaitkan dengan angkatan kerja; dan
- (4) Menyusun model pembangunan yang tepat dan efektif menyikapi perubahan ketiga komponen di atas.

c. Metodologi

Pengembangan model struktur ekonomi dan kesempatan kerja serta kualitas sumber daya di Indonesia diawali dengan mengumpulkan berbagai data atau indikator yang dianggap dapat menggambarkan pembangunan nasional dan regional. Selanjutnya, fokus yang ingin dilihat adalah seberapa besar rasio penyerapan tenaga kerja terhadap pangsa PDB menurut sektor. Selain itu, mobilitas tenaga kerja khususnya pada sektor pertanian juga diteliti terutama yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Model Fei-Renis yang biasanya digunakan dalam hal ini akan dikaji ulang apakah masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Untuk itu, akan dilakukan uji model dan penyusunan model baru yang lebih tepat dan efektif.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa publikasi Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja serta Kualitas Sumberdaya Manusia di Indonesia yang berisi:

- (1) Kajian tentang perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Indonesia;

- (2) Kajian tentang perubahan struktur kesempatan kerja yang terjadi di Indonesia;
- (3) Kajian tentang perubahan struktur kualitas sumberdaya yang terjadi di Indonesia;
dan
- (4) Kajian tentang model pembangunan yang tepat dan efektif berkaitan dengan perubahan struktur yang terjadi.

9) Pengembangan Model Perekonomian Indonesia

a. Abstraksi

Pengembangan model perekonomian Indonesia merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyempurnaan dan pengembangan model statistik ekonomi. Kegiatan pengembangan model perekonomian Indonesia dan pengembangan model analisis ekonomi dan sosial meski disusun dalam 2 (dua) RKA, namun sebenarnya merupakan satu tolok ukur dari kegiatan Penyempurnaan dan Pengembangan Model Statistik Ekonomi. Konstelasi ekonomi global cenderung berpotensi mengguncang ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Betapa tidak, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menjadi 2%, yang sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Meningkatnya harga minyak dunia, yang pernah menembus US\$100/barel dan harga-harga komoditas pangan akan membayang-bayangi kinerja perekonomian Indonesia di tahun ini. Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 0,5%-1%. Dampak dari resesi global yang berasal dari resesi di AS akan mempengaruhi proyeksi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Perekonomian global, diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,4%, yang sebelumnya sebesar 5,2% pada tahun 2007 menjadi 4,8% pada tahun 2008. Resesi di Amerika Serikat akan mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia dari sisi ekspor maupun impor, serta pasar saham dan pasar uang. Dampak resesi AS yang paling terasa adalah terjadinya penurunan ekspor. Sebenarnya dampak pelemahan perekonomian AS sudah dirasakan Indonesia sejak tahun lalu. Ini terlihat dari tren pertumbuhan ekspor ke AS yang mengalami penurunan. Biasanya pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS sebesar 10%, akan tetapi pada tahun lalu hanya sebesar 5%. Jepang yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia, selain AS juga terkena efek domino akibat kedekatan ekonomi negara itu dengan AS. Pada Juni 2008 lalu saja surplus perdagangan Jepang terpangkas sekitar US\$ 1,28 miliar atau turun sekitar 90% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena di atas memberikan gambaran yang kongkrit hubungan sebab akibat dalam dunia perekonomian secara makro. Pemahaman

terhadap fenomena perekonomian Indonesia saat ini dan hubungannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan sangat membantu dalam menentukan sikap atau kebijakan yang mengarah ke harapan atau ekspektasi yang ingin dicapai. Untuk bisa memahami fenomena perekonomian Indonesia baik sekarang maupun yang akan datang, dibutuhkan pengembangan metode kuantitatif untuk dapat melakukan analisis fenomena perekonomian Indonesia, Model Perekonomian Indonesia.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan Model Perekonomian Indonesia ialah untuk:

- (1) Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perekonomian Indonesia;
- (2) Membangun sebuah formula model ekonometrik simultan yang berbasis pada PDB; dan
- (3) Mengetahui dampak perubahan faktor-faktor utama tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

c. Metodologi

Model perekonomian yang digunakan untuk peramalan disini berdasar pada jenis model Keynesian. Struktur model perekonomian yang digunakan disini berbasis pada PDB (Produk Domestik Bruto). Untuk meramalkan kinerja ekonomi perlu mempertimbangkan beberapa asumsi tentang laju pertumbuhan dari variabel eksogen. Proyeksi PDB di dalam tahun berjalan ditetapkan dengan asumsi setelah mempertimbangkan dengan seksama kinerja dari PDB sampai ke kondisi yang terakhir. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam membangun model perekonomian berdasar pertimbangan tersebut. Pendekatan pertama dengan model kuantitatif, yaitu struktur model dibangun dalam bentuk formula seperti yang ada di bawah ini. Pendekatan kedua, yaitu dengan pengembangan model komputasi berbasis *neural network*. Dua pendekatan digunakan untuk verifikasi dan validasi dari masing-masing model yang terbangun. Struktur dari Model Perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) $GDP = PC + PCF + GC + GCF + EX - IM + S$;
- (2) $PC = f(GDPV/PGDP, PC(-1), PPC)$;
- (3) $CF = f(LO/PCF, GDP(-1), FI, ER)$;
- (4) $IM = f(GDP, IM(-1), PIM/PGDP)$;
- (5) $PGDP = f(M1, M2, PEX, P_RICE, P_GASOL, ER)$;
- (6) $XNO = f(GDP-USA, GDP-JAPAN, PXNO)$;
- (7) $BEKAS = XNO + XO$; dan
- (8) $PPC = f(PGDP)$.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa formula Model Perekonomian Indonesia yang dapat memberikan pemahaman terhadap hal-hal berikut:

- (1) Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perekonomian Indonesia;
- (2) Besarnya dampak/pengaruh faktor-faktor utama tersebut dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia; dan
- (3) Pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa mendatang, mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia saat itu.

10) Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi, dan Ukuran-ukuran Statistik

a. Abstraksi

Penyediaan berbagai jenis data statistik oleh BPS biasanya dilakukan melalui kegiatan sensus atau survei. Kegiatan tersebut memerlukan proses yang panjang dan biasanya mencakup tahapan pembuatan pedoman dan kuesioner, pendataan lapangan, pengolahan hasil lapangan, serta pembuatan tabel dan analisis. Di antara tahapan tersebut di atas, tahapan pembuatan pedoman merupakan tahapan yang sangat fundamental. Hal ini disebabkan pedoman tersebut akan digunakan sebagai acuan pada tahapan berikutnya. Pedoman pelaksanaan sensus atau survei pada umumnya berisi tentang konsep definisi dan klasifikasi terkait dengan data yang akan dikumpulkan, serta tata cara bagaimana data tersebut dikumpulkan, diolah, ditabelkan dan dianalisis.

Sampai saat ini, pedoman yang mencakup konsep definisi dan klasifikasi masih disiapkan oleh masing-masing satuan kerja teknis terkait, sehingga dimungkinkan terdapat kekurangseragaman. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah standardisasi konsep definisi dan klasifikasi. Langkah tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan kepentingan instansi-instansi terkait dan juga keterbandingan dengan standar dan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Konsep definisi dan klasifikasi yang harus distandardisasikan cakupannya sangat luas, sehingga perlu secara bertahap proses tersebut dilakukan. Pada tahun anggaran 2010 ini direncanakan dilakukan standardisasi konsep definisi, cara penilaian, cara pengukuran kegiatan produksi dan *output* yang meliputi berbagai aspek. Sedangkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan klasifikasi akan dilakukan penyusunan tabel kesesuaian antara KBLI 2009 dengan KBLI 2005 dan *updating* sistem pencarian kode. Kegiatan produksi dan *output*-nya merupakan komponen yang sering ditanyakan dalam sensus atau survei bidang ekonomi dan pertanian. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, perlu dilakukan

standardisasi sehingga terdapat keseragaman tentang konsep produksi, bagaimana cara menilai dan mengukur *output* dari masing-masing kegiatan ekonomi di *intern* BPS ketika melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Standardisasi juga dimaksudkan untuk lebih menyeragamkan penafsiran antara penyedia dan pengguna data dalam melakukan analisis, baik itu instansi terkait maupun lembaga internasional. Penyusunan tabel kesesuaian antara KBLI 2009 dengan KBLI 2005 merupakan tindak lanjut dari penyusunan publikasi KBLI 2009. Hal ini perlu dilakukan untuk menjembatani pengguna data lapangan usaha bila ingin membandingkan data secara runtun waktu. Sedangkan *updating* sistem pencarian kode dilakukan karena telah bergantinya klasifikasi yang digunakan menjadi klasifikasi yang merujuk pada hasil UNSD terakhir. Sistem pencarian kode ini dimaksudkan untuk membantu pengguna klasifikasi dalam melakukan pengkodean lapangan usaha ketika melakukan *editing* hasil pendataan. Disamping itu, sistem pencarian kode juga dimaksudkan untuk membantu pengguna klasifikasi dalam mencari kesesuaian antara klasifikasi yang lama dan yang baru.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah:

- (1) Tersediannya publikasi konsep definisi kegiatan produksi, *output* dan segala aspeknya yang standar;
- (2) Tersediannya publikasi tabel kesesuaian antara KBLI 2009 dengan KBLI 2005; dan
- (3) Tersediannya sistem pencarian kode yang paling mutakhir sesuai dengan klasifikasi yang terakhir digunakan.

Sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Menyediakan publikasi tentang kegiatan produksi, *output* dan segala aspeknya yang lebih standar;
- (2) Menyediakan publikasi tabel kesesuaian antara KBLI 2009 dengan KBLI 2005; dan
- (3) Menyediakan sistem pencarian kode yang paling mutakhir.

c. Metodologi

Penyusunan standardisasi definisi, cara penilaian dan cara pengukuran kegiatan ekonomi dengan segala aspeknya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Pengumpulan literatur atau referensi dari berbagai sumber, seperti unit kerja teknis BPS, instansi terkait, lembaga internasional, baik secara langsung maupun melalui internet, b) Melakukan penterjemahan literatur atau referensi hasil pengumpulan dari lembaga internasional, c) Melakukan kompilasi konsep definisi hasil pengumpulan maupun terjemahan, d) Melakukan perbandingan konsep definisi dari berbagai sumber untuk

membuat konsep definisi yang lebih operasional, e) Melakukan penyusunan *draft* konsep definisi bersama pihak-pihak terkait, f) Melakukan pembahasan konsep definisi bersama pihak-pihak terkait. Penyusunan tabel kesesuaian antara KBLI 2009 dengan KBLI 2005 dilakukan dengan metode sebagai berikut: a) Membandingkan judul dan deskripsi pada tingkatan 5 (lima) digit kode yang terdapat dalam KBLI 2005 dan KBLI 2009, b) Menuliskan kode KBLI 2005 dan KBLI 2009 yang mempunyai judul dan deskripsi sama, c) Menyusun program untuk membuat *database* tabel konversi, d) Melakukan pengolahan untuk mendapatkan agregasi kesesuaian pada tingkatan 4 (empat), 3 (tiga), 2 (dua) digit kode, e) Menyusun dan menerbitkan publikasi tabel kesesuaian antara KBLI 2005 dan KBLI 2009. Penyusunan sistem pencarian kode (SPK) dilakukan dengan metode sebagai berikut: a) Melakukan *updating* kata kunci berdasarkan KBLI 2009 dan tabel kesesuaian, b) Memilih kata-kata yang akan dijadikan kata kunci berdasar judul dan deskripsi yang terdapat dalam KBLI 2009, c) Menyusun sistem *editing* untuk menghapus kata-kata yang bukan kata kunci.

d. Hasil dan Keluaran

Secara umum kegiatan ini menghasilkan:

- (1) Konsep definisi tentang kegiatan ekonomi dan *output*-nya yang berkaitan dengan jenis kegiatan, cara penilaian dan cara pengukurannya dalam bentuk buku publikasi;
- (2) Tabel kesesuaian antara KBLI 2005 dan KBLI 2009 dalam bentuk buku publikasi; dan
- (3) Sistem pencarian kode dalam bentuk sistem aplikasi.

11) Penyusunan dan Pemeliharaan Kerangka Sampel Statistik Bidang

a. Abstraksi

Dalam rangka menunjang rencana pembangunan jangka menengah nasional di semua bidang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peran serta Badan Pusat Statistik di dalam RPJM yang tertuang didalam rencana strategis pembangunan statistik (RENSTRA) BPS melalui program penyempurnaan dan pengembangan statistik, dan program penyusunan/pengumpulan/pengolahan/*updating*/ analisa data dan statistik adalah pembentukan, penyempurnaan, dan pengembangan kerangka sampel. Kerangka sampel yang sering disebut Master File Desa dibentuk berdasarkan data yang ada pada kerangka induk, yang berisikan seluruh *unit sampling*, berupa identitas wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, sampai ke unit terkecil suatu wilayah pencacahan yaitu blok sensus, dan atau satuan lingkungan setempat (SLS), yang dilengkapi variabel-variabel pokok yang digunakan sebagai dasar alokasi dan pengambilan sampel sensus dan survei. MFD yang lengkap dan mutakhir

digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan statistik di bidang pertanian, ekonomi, sosial dan kependudukan. Dalam rangka pembentukan, pengolahan, dan pemeliharaan, serta evaluasi/penyajian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada Sensus Ekonomi 2006, BPS dalam hal ini subdit KCI diharapkan mampu menyediakan suatu MFD yang mutakhir yang sama antara Pusat dan Daerah dan mempunyai muatan blok-blok konsentrasi untuk sektor-sektor non pertanian, sehingga dapat digunakan pada survei-survei ekonomi lanjutan lainnya. Hasil pendaftaran perusahaan/usaha Sensus Ekonomi 2006 menghasilkan data tentang jumlah perusahaan/usaha di suatu wilayah termasuk didalamnya jumlah tenaga kerja dan omset. Informasi ini telah digunakan sebagai dasar pengambilan sampel SE06-UMB dan SE06-UMK yang dilaksanakan tahun 2007. Sebagai *master sampling frame*, hasil *listing* SE-06 tersebut dijadikan dasar pembentukan KCI-UMB dan KCI-UMK yang berfungsi sebagai *sampling frame* untuk kegiatan pencacahan survei perusahaan/usaha dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan bersifat khusus tergantung *subject* survei yang dilakukan. Dari hasil studi tentang relevansi keragaman kegiatan usaha yang terdapat dalam *sampling frame* dan *updating* direktori perusahaan yang dilakukan tahun 2009 akan dijadikan dasar untuk melakukan pertimbangan apakah kerangka yang sudah terbentuk masih dapat digunakan dilihat dari sisi teknis pengambilan sampel. Kegiatan ini merupakan pengembangan metodologi penyelenggaraan statistik, khususnya pengembangan kerangka contoh induk sesuai dengan tuntutan perubahan statistik yang diperlukan. Penyempurnaan, pengembangan, dan pemutakhiran kerangka sampel perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan (relevan), lengkap, akurat, dan kondisi terkini (*up to date*). Desentralisasi pengambilan sampel yang diharapkan dapat dilakukan BPS Daerah telah dilaksanakan untuk Survei Ubinan.

Pengembangan kerangka sampel ubinan, yang mencakup variabel muatan blok sensus, dan teknik pengambilan sampel Survei Ubinan terus dikembangkan agar dapat diterapkan suatu kerangka sampel dan tehnik pengambilan sampel ubinan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan survei.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Penyempurnaan sistem dan program penarikan sampel ubinan, agar didapatkan sistem program yang tepat untuk digunakan dalam penarikan sampel survei ubinan;
- (2) Memonitor pelaksanaan paket program penarikan sampel ubinan di daerah;
- (3) Mengevaluasi permasalahan dan masukan untuk penyempurnaan paket program survei ubinan;

- (4) Mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kondisi sebaran unit-unit perusahaan/usaha hasil pencacahan SE06-UMB dan SE06-UMK dibandingkan saat ini;
- (5) Mendapatkan informasi seberapa jauh perubahan keragaman dan distribusi populasi dari unit-unit perusahaan/usaha;
- (6) Membentuk dan memutakhirkan kerangka sampel usaha sebagai dasar pengambilan sampel survei dengan pendekatan usaha, serta menjajaki alternatif metodologi yang akan digunakan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun regional di bidang ekonomi.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah evaluasi dan kompilasi data yang ada. Membuat mekanisme penarikan sampel survei ubinan di BPS Daerah yang terpadu untuk seluruh provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dari kegiatan *Updating* Direktori Perusahaan data SE06 ini adalah evaluasi terhadap keberadaan unit-unit usaha hasil pencacahan SE06-UMB dengan hasil *Updating* Direktori tahun 2009 dan SE06-UMK dengan hasil studi relevansi keragaman karakteristik kegiatan usaha/perusahaan tahun 2009, sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan *sampling frame* khususnya untuk bidang ekonomi dalam bentuk KCI-Ekonomi.

Sedangkan untuk kegiatan penyempurnaan penarikan sampel survei ubinan kegiatan dan keluarannya adalah:

- (1) Menyusun dan membuat kerangka sampel survei ubinan, dengan melakukan pemutakhiran terhadap perubahan wilayah administrasi, rumah tangga usaha tani padi, dan palawija per komoditi, muatan variabel lainnya, yang digunakan sebagai dasar penarikan sampel survei ubinan; dan
- (2) Evaluasi terhadap hasil pemutakhiran sistem dan program pengambilan sampel ubinan, sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan kerangka sampel, dan sistem program penarikan sampel ubinan.

12) Studi *Baseline* SDM BPS

a. Abstraksi

Untuk meningkatkan kualitas data yang bermutu tinggi dan dapat diandalkan, BPS melalui program STATCAP-CERDAS melakukan program untuk melakukan perubahan dan reformasi dalam pengembangan statistik. Program yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi perbaikan kualitas data statistik, modernisasi BPS dengan menerapkan TIK yang

tepat dan sesuai, perbaikan manajemen SDM dan pengelolaan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, sering dijumpai permasalahan yang muncul yang dapat menghambat pelaksanaan keberhasilan program. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah yang muncul sehingga dapat dilakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan. Berhasil tidaknya program ini sangat tergantung dari peranan SDM dalam menghadapi perubahan dan reformasi yang akan dilakukan. Untuk itu dilakukan studi baseline SDM guna mengetahui tingkat kesiapan SDM dalam menghadapi pelaksanaan program. Hasil studi ini digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan demi keberhasilan program.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari studi baseline SDM ini adalah untuk mengetahui:

- (5) Proporsi SDM BPS yang cenderung mendukung reformasi;
- (6) Proporsi SDM BPS yang masih belum dapat menerima/memahami reformasi;
- (7) Proporsi SDM BPS yang tidak peduli; dan
- (8) Alasan-alasan yang melatarbelakangi sikap SDM BPS terhadap program CERDAS.

c. Metodologi

- (1) Penentuan provinsi yang menjadi sampel;
- (2) Pengkajian hal-hal yang menjadi bahan permasalahan;
- (3) Penyusunan tingkat permasalahan (permasalahan ringan, sedang, dan berat); dan
- (4) Pengelompokan provinsi-provinsi kedalam tingkat permasalahan.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Peta kesiapan SDM BPS dalam menyongsong perubahan dan reformasi yang akan dilaksanakan; dan
- (2) Gambaran mengenai alasan-alasan utama yang mendasari sikap mereka terhadap perubahan dan reformasi di BPS.

2. PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM

3. SURVEI BIDANG INDUSTRI

1) Survei Industri Besar/Sedang Bulanan

a. Abstraksi

Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan yaitu survei yang dilakukan secara sampel terhadap perusahaan industri sedang (memiliki tenaga kerja 20-99 orang) dan perusahaan Industri Besar (memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih). Dari Survei IBS

Bulanan diperoleh angka Indeks Produksi, Indeks Harga dan Indeks Pekerja yang berguna untuk membantu menghitung Produk Domestik Bruto Triwulanan khususnya sektor industri, dan untuk melihat laju pertumbuhan sektor IBS secara bulanan, triwulanan maupun tahunan. Dengan dilakukannya survei IBS secara bulanan, maka diperoleh angka indeks produksi, indeks harga dan indeks pekerja IBS secara lebih cepat dan *up to date* untuk melihat perkembangan produksi, harga dan pekerja yang terjadi pada perusahaan IBS. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung angka indeks adalah Metode Diskrit Divisia. Indeks produksi industri bulanan diperlukan untuk melihat perkembangan atau laju pertumbuhan dari sektor industri secara lebih cepat dalam periode waktu bulanan.

b. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan nasional, sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri di masa depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional. Indeks pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu data yang sangat dibutuhkan baik untuk memantau hasil pembangunan khususnya di sektor industri maupun untuk penyusunan kebijakan perekonomian secara umum. Oleh karena itu, diperlukan tersedianya data produksi seperti: banyaknya produksi, harga, nilai produksi, maupun jumlah pekerja setiap bulan, sehingga dapat dihitung angka Indeks Produksi, Indeks Harga, dan Indeks Pekerja IBS yang dapat digunakan sebagai indikator dini untuk melihat laju pertumbuhan sektor industri secara bulanan. Dengan demikian, indeks produksi, indeks harga maupun indeks pekerja dapat memberikan sinyal dalam rangka meningkatkan peran industri pengolahan agar menjadi modal penggerak perekonomian nasional.

c. Metodologi

- (1) *Design sample* : tidak ada perubahan (sama dengan tahun sebelumnya);
- (2) *Sampling frame* : Survei IBS Tahunan tahun 2005;
- (3) Banyaknya sampel = 1576;
- (4) *Cut of point* : output \geq 387,575 milyar rupiah (C1) = 455;
- (5) Top 1 % of output per worker (C2) = 84;
- (6) Sisanya dengan PPS (*Probability Proportional to size*) S = 1037;

(7) *Representative* sampai 3 digit ISIC Revisi 3 untuk Nasional; dan

(8) Representatif sampai satu digit ISIC Revisi 3 untuk 31 Provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi yang dihasilkan:

(1) Indeks Produksi Bulanan Tahun 2009; dan

(2) Perkembangan Indeks Tahun 2004.

2) Survei Industri Mikro dan Kecil

a. Abstraksi

Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan survei yang dilakukan secara sampel terhadap perusahaan industri mikro (memiliki tenaga kerja 1 - 4 orang) dan perusahaan industri kecil (memiliki tenaga kerja 5 - 19 orang).

Dari kegiatan survei tersebut dapat diperoleh angka banyaknya usaha, tenaga kerja yang terserap, upah dan gaji, struktur biaya, produksi, permodalan, pemasaran, kendala serta prospek usaha, yang dapat dipakai sebagai bahan analisa yang dituangkan dalam profil industri mikro dan kecil tahun 2010. Angka estimasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan dan pembinaan usaha IMK pada level provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Survei IMK adalah untuk mendapatkan berbagai data yang berkaitan dengan kegiatan IMK seperti :

(1) Banyaknya unit usaha dan jenis usaha;

(2) Penyerapan tenaga kerja dan modal;

(3) Biaya *input* dan jenis bahan baku yang digunakan;

(4) Nilai *output* dan jenis komoditi yang dihasilkan;

(5) Nilai tambah atas biaya faktor produksi;

(6) Kesulitan/hambatan dan prospek masing-masing usaha; dan

(7) Berbagai informasi lain yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Sasaran survei ini adalah usaha/perusahaan IMK yang terpilih sampel di setiap wilayah pencacahan terpilih.

c. Metodologi

Kerangka sampel blok sensus yang digunakan pada kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil menggunakan Kerangka Sampel Induk Industri Mikro dan Kecil (KSI-IMK). KSI-IMK adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan muatan jumlah usaha kategori D (Industri). Kegiatan stratifikasi ditujukan untuk mengelompokkan unit-unit area (blok sensus) menurut komposisi jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil menurut jenis

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi dilakukan pada level kabupaten/kota.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2009.

3) Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

a. Abstraksi

Pembangunan sektor industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, dalam pembangunan sektor industri harus diusahakan agar tercipta kaitan yang erat antara industri besar, sedang, dan kecil untuk dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya industri kecil. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut sangat diperlukan data statistik industri besar dan sedang yang berkesinambungan setiap tahun, sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Jumlah perusahaan industri dari tahun ke tahun terus bertambah dan perusahaan yang sudah dicatat akan ada yang berubah aktifitas, produktivitas, atau produksinya. Pertambahan dan perkembangan tersebut perlu dicatat dengan baik agar data statistik industri yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang tepat sesuai dengan keadaan di lapangan. Direktori yang mutakhir sangat diperlukan dalam pengolahan, antara lain untuk estimasi perusahaan yang tidak respon, revisi data, karena adanya perusahaan baru yang sebenarnya sudah produksi komersial beberapa tahun sebelumnya atau karena adanya perusahaan yang sebenarnya sudah mati sejak beberapa tahun sebelumnya. Di samping itu, kualitas dan kemutakhiran data hasil survei perlu ditingkatkan, mengingat jumlah perusahaan yang dicakup dalam survei meningkat maka sehingga diperlukan sistem informasi manajemen pemantauan pemasukan dokumen di KS Kabupaten/Kotamadya yang disebut KABSIS.

b. Tujuan dan Sasaran

Mendapatkan nama dan alamat perusahaan industri pengolahan yang aktif dan tergolong sedang atau besar yang belum tercatat di Direktori BPS serta untuk menghapus, dari Direktori perusahaan yang aktif, nama dan alamat perusahaan yang digolongkan perusahaan tidak aktif seperti perusahaan yang sudah tutup, menjadi kecil, atau yang berubah kegiatannya ke sektor bukan industri, yang bergabung dengan perusahaan lain, dan yang tercatat lebih dari sekali.

Sedangkan KABSIS ditujukan untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kesahihan data hasil survei melalui pembinaan dan peningkatan kualitas petugas;
- (2) Mendapatkan direktori perusahaan industri besar/sedang yang akurat dan tepat waktu;
- (3) Mengumpulkan dan mengolah data berbagai karakteristik dari perusahaan industri besar dan sedang di seluruh Indonesia;
- (4) Mendapatkan data banyaknya perusahaan, tenaga kerja, output, input, nilai tambah, dan data lainnya yang berguna perencanaan disektor industri pada khususnya dan ekonomi pada umumnya;
- (5) Menyusun indikator perkembangan sektor industri; dan
- (6) Meningkatkan kualitas dan kesahihan data hasil survei melalui pembinaan dan peningkatan kualitas petugas.

c. Metodologi

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada seluruh perusahaan industri yang tergolong besar dan sedang yang tercatat dalam direktori BPS. Jadi, pencacahan dalam kegiatan ini dilakukan secara lengkap (sensus), perusahaan industri yang dicakup dalam kegiatan ini adalah seluruh perusahaan industri pengolahan di Indonesia yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- (1) Direktori Industri Besar dan Sedang tahun 1991 s/d 2007;
- (2) Studi perusahaan tutup, non respon, usang dan studi I-B; dan
- (3) Statistik industri besar dan sedang tahunan, statistik industri besar dan sedang (Bahan baku), statistik industri besar dan sedang (produksi), buku Indikator Industri.

**Tabel 4. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI BIDANG INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	IBS Bulanan		IBS Tahunan	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4	13	54	178
2	Sumatera Utara	33	73	1 361	1 535
3	Sumatera Barat	9	14	224	265
4	Riau	6	40	243	295
5	Jambi	5	15	134	165
6	Sumatera Selatan	9	23	250	330
7	Bengkulu	2	13	19	36
8	Lampung	14	22	262	441
9	Kep. Bangka Belitung	-	13	121	169
10	Kepulauan Riau	26	52	423	400
11	DKI Jakarta	60	144	2 366	2 366
12	Jawa Barat	148	396	7 112	8 737
13	Jawa Tengah	48	112	5 133	6 518
14	D.I. Yogyakarta	2	15	626	649
15	Jawa Timur	103	253	7 051	5 356
16	Banten	80	175	2 468	2 183
17	Bali	2	13	466	695
18	Nusa Tenggara Barat	-	13	208	332
19	Nusa Tenggara Timur	-	14	68	94
20	Kalimantan Barat	11	17	137	248
21	Kalimantan Tengah	2	13	63	63
22	Kalimantan Selatan	8	10	166	211
23	Kalimantan Timur	9	15	158	222
24	Sulawesi Utara	3	13	114	134
25	Sulawesi Tengah	-	13	50	79
26	Sulawesi Selatan	8	14	490	516
27	Sulawesi Tenggara	-	13	108	178
28	Gorontalo	-	13	86	62
29	Sulawesi Barat	-	1	17	22
30	Maluku	1	14	73	69
31	Maluku Utara	1	-	16	20
32	Papua Barat	2	13	36	28
33	Papua	-	14	24	24
Jumlah		596	1 576	30 127	32 620

**Tabel 5. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN SURVEI IMK
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Responden	
		2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	268	1 870
2	Sumatera Utara	442	2 080
3	Sumatera Barat	326	1 800
4	Riau	125	1 110
5	Jambi	92	990
6	Sumatera Selatan	294	1 720
7	Bengkulu	69	820
8	Lampung	496	2 230
9	Kep Bangka Belitung	34	580
10	Kepulauan Riau	45	650
11	DKI Jakarta	208	1 390
12	Jawa Barat	2 592	5 040
13	Jawa Tengah	4 698	6 840
14	D.I. Yogyakarta	394	2 070
15	Jawa Timur	3 754	6 120
16	Banten	442	2 090
17	Bali	472	2 160
18	Nusa Tenggara Barat	695	2 650
19	Nusa Tenggara Timur	394	1 990
20	Kalimantan Barat	224	1 500
21	Kalimantan Tengah	102	1 010
22	Kalimantan Selatan	275	1 650
23	Kalimantan Timur	83	890
24	Sulawesi Utara	174	1 320
25	Sulawesi Tengah	135	1 160
26	Sulawesi Selatan	611	2 470
27	Sulawesi Tenggara	221	1 490
28	Gorontalo	84	920
29	Sulawesi Barat	76	870
30	Maluku	84	910
31	Maluku Utara	43	650
32	Papua Barat	14	380
33	Papua	34	580
JUMLAH		18 000	60 000

4. SURVEI BIDANG PERTANIAN

1) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubunan

a. Abstraksi

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan penyediaan lapangan kerja. Subsektor tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai merupakan komoditi yang sangat strategis dan menjadi salah satu ukuran ketahanan pangan nasional. Untuk itu pemerintah setiap tahun berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan. Formulasi berbagai program peningkatan produksi tanaman pangan memerlukan dukungan data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, setiap tahun dilakukan pengumpulan data luas panen dan data rata-rata produksi per hektar (produktivitas) untuk bahan penghitungan produksi tanaman pangan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan survei pertanian tanaman pangan/ubinan adalah untuk mendapatkan data:

- (1) Luas tanam, panen, serta luas puso tanaman padi dan palawija;
- (2) Produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman padi dan palawija;
- (3) Luas penggunaan lahan terutama lahan sawah;
- (4) Banyaknya alat/mesin pertanian (alsintan); dan
- (5) Keterangan tentang perbenihan.

Sasaran kegiatan survei pertanian tanaman pangan/ubinan adalah:

- (1) Tersedianya data produksi tanaman padi dan palawija; dan
- (2) Tersedianya data luas penggunaan lahan terutama lahan sawah, banyaknya alat/mesin pertanian, dan data perbenihan.

c. Metodologi

Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Data luas panen diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) dengan menggunakan Daftar SP-PADI, SP-PALAWIJA, SP-LAHAN, SP-ALSIN TP dan SP-BENIH TP. Pengumpulan data SP dilakukan secara lengkap di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia. Sementara data produktivitas (hasil per hektar) diperoleh dari hasil Survei Ubunan (Daftar SUB-S) yang dilakukan secara sampel. Petugas pengumpulan data SP adalah KCD (Kepala Cabang Dinas Kecamatan)/Mantri Tani, dan pengumpulan data produktivitas/ubinan dilakukan oleh KSK dan KCD. Survei ubinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan rumah tangga berdasarkan pengukuran

langsung di lapangan. Sementara untuk pengumpulan data SP tanaman pangan menggunakan pendekatan *area* (kecamatan) berdasarkan laporan KCD.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dari kegiatan ini adalah buku publikasi :

- (1) Angka Ramalan I (ARAM I) Produksi Padi dan Palawija;
- (2) Angka Ramalan II (ARAM II) Produksi Padi dan Palawija;
- (3) Angka Ramalan III (ARAM III) Produksi Padi dan Palawija;
- (4) Angka Sementara (ASEM) Produksi Padi dan Palawija;
- (5) Angka Tetap (ATAP) Produksi Padi dan Palawija; dan
- (6) Luas Lahan Menurut Penggunaannya.

2) Survei Perusahaan Perkebunan

a. Abstraksi

Data statistik perusahaan perkebunan dan karet remah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah di subsektor perkebunan. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, para perencana dan pengambil kebijakan dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan rinci, sehingga rencana kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah dan mengenai sasaran. Dengan demikian peranan subsektor perkebunan dalam hal penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa maupun sebagai penghasil bahan baku bagi industri hilir yang mengolah hasil tanaman perkebunan dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, perlu dilakukan pengumpulan data secara rutin setiap tahun agar evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pada dasarnya ada 4 (empat) kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:

- (1) Pengumpulan Data Bulanan Perusahaan Perkebunan
Pengumpulan data bulanan perusahaan perkebunan merupakan pengumpulan data pokok perusahaan perkebunan

Data dikumpulkan secara bulanan dan variabel yang dicakup hanya terbatas untuk luas tanaman, produksi dan persediaan (*stock*). Komoditi yang dicakup baru terbatas 8 jenis tanaman perkebunan yaitu karet, kakao, kelapa sawit, kopi, kina, tebu, teh, dan tembakau. Pemilihan 8 komoditi ini didasarkan pada pentingnya peranan komoditi tersebut terhadap PDB sub sektor perkebunan maupun sebagai sumber penghasil devisa negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komoditi dan pengumpulan datanya dilakukan dengan *mailing system*. Hasil pengolahan data bulanan perusahaan perkebunan selama ini dipublikasikan dalam Indikator Ekonomi yang tingkat penyajiannya merupakan angka nasional dan hanya mencakup luas

areal, produksi dan stok. Di samping itu untuk komoditi kelapa sawit, karet dan teh disajikan juga pada publikasi tahunan dengan tingkat penyajian provinsi.

(2) Pengumpulan Data Tahunan Perusahaan Perkebunan (Struktur Ongkos Perusahaan Perkebunan)

Pengumpulan data struktur ongkos untuk perusahaan perkebunan per jenis tanaman dilakukan dengan pendekatan perusahaan (administratur perkebunan) yang dilakukan dengan cara sensus (*complete enumeration*) setiap tahun. Informasi yang dikumpulkan jauh lebih rinci, seperti penguasaan dan penggunaan lahan, luas dan mutasi tanaman, produksi, serta struktur ongkos produksi. Mulai tahun 2004, semua jenis komoditi dicakup yakni dengan membuat model kuesioner Kor dan Modul. Kor dimaksudkan untuk menampung informasi dari perusahaan perkebunan yang sifatnya umum, sedangkan modul untuk menampung informasi struktur ongkos dari salah satu jenis komoditi utama yang diusahakan.

(3) *Updating* Direktori Perusahaan Perkebunan

Direktori perusahaan perkebunan adalah daftar nama dan alamat dari perusahaan perkebunan yang digunakan sebagai *frame* untuk pencacahan rutin survei perusahaan perkebunan. Kegiatan *updating* direktori tersebut pernah dilakukan pada tahun 2002 saat ada pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2003. Untuk dapat melakukan pencacahan dengan baik, diperlukan direktori yang lengkap dan akurat sesuai dengan keadaan yang terakhir. Mengingat sudah hampir 8 (delapan) tahun belum dilakukan kegiatan *updating* direktori, maka oleh karena itu pada tahun anggaran 2010 diusulkan kegiatan *updating* direktori yang akan dilakukan oleh petugas KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk, sehingga dapat diperoleh direktori yang mutakhir. Hasil *updating* direktori tersebut akan digunakan sebagai *frame* untuk kegiatan pencacahan tahun selanjutnya. Kegiatan *updating* direktori tersebut diharapkan dapat dilakukan setiap tahun.

(4) Studi Produktivitas 5 komoditas Perkebunan Rakyat

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perkebunan khususnya data produksi perkebunan rakyat, maka diperlukan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kewajaran suatu data tersebut. Salah satu indikator tersebut yaitu produktivitas dari suatu komoditas tanaman perkebunan. Produktivitas yang dimaksud yakni banyaknya produksi per satuan pohon ataupun per satuan luas, untuk setiap komoditas tanaman perkebunan tentunya memiliki produktivitas yang berbeda-beda. Untuk komoditas tanaman perkebunan yang sama juga dapat

memiliki produktivitas yang berbeda tergantung pada umur tanaman, keadaan wilayah (iklim, kondisi tanah, dsb), maupun jenis varietas yang digunakan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui indikator produktivitas dari suatu komoditas tanaman perkebunan rakyat diperlukan suatu studi produktivitas. Pada studi ini dipilih 5 (lima) komoditas tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, tebu dan tembakau.

b. Tujuan dan Sasaran

Pengumpulan data perusahaan perkebunan dan industri karet remah bertujuan untuk mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka perencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan menimbulkan kekeliruan yang fatal. Data-data yang dikumpulkan dalam survei bulanan perusahaan perkebunan, meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan, luas tanaman, produksi dan *stock*, terbatas untuk 8 jenis komoditi perkebunan, yaitu karet, kakao, kelapa sawit, kopi, kina, tebu, teh, dan tembakau. Data-data yang dikumpulkan dalam survei tahunan perusahaan perkebunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) meliputi jenis tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja, dan struktur pendapatan. *Updating* direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh nama dan alamat perusahaan perkebunan secara lengkap dan benar serta memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman. Studi produktivitas 5 komoditas perkebunan rakyat dimaksudkan untuk mendapatkan produktivitas (rata-rata produksi per pohon maupun per satuan luas) dari suatu komoditas tanaman yang diusahakan oleh rakyat (petani).

c. Metodologi

Untuk survei bulanan perusahaan perkebunan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komoditi dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kombinasi yaitu *mailing system* dan *revisit* oleh petugas langsung. Apabila sebuah administratur perkebunan mengusahakan lebih dari satu komoditi perkebunan, maka untuk administratur perkebunan tersebut dikirimkan beberapa kuesioner sesuai dengan jumlah dan jenis komoditi yang diusahakan. Untuk survei tahunan perusahaan perkebunan sebagai unit pencacahan adalah administratur perkebunan. Pencacahan dilakukan oleh KSK dengan periode pencacahan satu tahun sekali. Untuk kegiatan *updating* direktori perusahaan perkebunan tahapan kegiatannya yaitu pengumpulan informasi direktori

perusahaan perkebunan dari instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, melakukan *matching* antara direktori yang ada di BPS dengan direktori yang berasal dari sumber lain, melakukan pengecekan lapangan, serta pengolahan hasil pengecekan tersebut. Untuk studi produktivitas 5 (lima) komoditas perkebunan rakyat sebagai unit studi yaitu rumah tangga yang mengusahakan komoditas kopi, kelapa sawit, karet, tebu dan atau tembakau. Studi dilakukan di wilayah provinsi yang potensi komoditas tersebut berdasarkan hasil Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan 2004 (Sensus Pertanian 2003). Untuk satu komoditas dilakukan di 2 (dua) provinsi potensi, dan setiap provinsi dicacah 10 rumah tangga. Untuk komoditas kopi (Provinsi Lampung dan Jawa Timur), kelapa sawit (Riau dan Sumatera Utara), karet (Jambi dan Kalimantan Selatan), Tebu (Jawa Tengah dan Jawa Timur), sedangkan tembakau (Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah). Pengambilan sampel rumah tangga dilakukan secara *purposive*. Studi dilakukan dengan metode wawancara dengan responden selain itu juga dilakukan uji petik atau pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap produksi suatu komoditas yang dipanen.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran:

- (1) Daftar nama dan alamat perusahaan perkebunan;
- (2) Struktur Ongkos Komoditi Perusahaan Perkebunan;
- (3) Statistik Kelapa Sawit Indonesia;
- (4) Statistik Karet Indonesia;
- (5) Statistik Teh Indonesia; dan
- (6) Hasil Studi Produktivitas 5 Komoditas Perkebunan Rakyat.

3) Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI

a. Abstraksi

Sebagai negara agraris dan maritim, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Selain itu sektor tersebut merupakan sektor penghasil produk perikanan yang merupakan penyediaan sumber protein hewani yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Mengingat kebutuhan produk perikanan terus meningkat, maka dibutuhkan informasi mengenai ketersediaan produk perikanan baik perikanan hasil penangkapan maupun budidaya. Lebih dari 60 persen produksi perikanan disumbang oleh perikanan hasil penangkapan, dan lebih dari 90 persen hasil penangkapan ikan merupakan hasil penangkapan ikan laut. Data perikanan yang selama ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik adalah data

produksi ikan yang dikumpulkan melalui pendekatan perusahaan berbadan hukum baik Perusahaan Budidaya Ikan maupun Penangkapan Ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Data perusahaan Perikanan dikumpulkan secara tahunan, sedangkan data TPI dikumpulkan secara tahunan dan triwulanan. Seiring dengan adanya pemekaran Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang sebelumnya tergabung dalam Direktorat Statistik Pertanian khususnya Sub Direktorat Statistik Perikanan yang sebelumnya adalah Seksi Statistik Perikanan, maka perlu adanya perluasan dan penajaman data perikanan. Dengan adanya dukungan data yang lebih lengkap, cermat dan cepat maka para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat melihat gambaran perkembangan sektor perikanan secara menyeluruh guna mengevaluasi program yang telah dan sedang berjalan sehingga dapat menganalisa prospek peranan sektor perikanan guna pengambilan keputusan untuk program yang akan datang. Pengumpulan data sektor perikanan yang lebih lengkap, akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Pengumpulan data melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertujuan untuk mendapatkan jumlah direktori TPI/PPI, sistem penjualan ikan secara lelang/tidak lelang, jumlah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PPI; dan
- (2) Pengumpulan data budidaya/penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya/penangkapan ikan, banyaknya produksi, pengeluaran produksi, pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja.

c. Metodologi

Survei terhadap perusahaan perikanan berbadan hukum baik penangkapan maupun budidaya dilakukan secara tahunan melalui pendekatan seluruh unit yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk survei TPI/PPI dilakukan baik secara tahunan dan triwulanan. Hasil survei untuk sementara masih dilakukan pengolahan di Pusat (kecuali TPI tahunan maupun triwulanan dilakukan pengolahan di daerah) sehingga dokumen hasil survei dikirimkan ke BPS Pusat untuk dilakukan pengolahan dan tabulasi. Sedangkan untuk TPI, daerah mengirimkan *file* hasil pengolahan data (entri data) ke BPS Pusat.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi yang diterbitkan adalah:

- (1) Statistik Perusahaan Penangkapan Ikan dan Budidaya Ikan;
- (2) Statistik Produksi Ikan yang Dijual di TPI/PPI; dan
- (3) Direktori Perusahaan Penangkapan Ikan, Budidaya Ikan dan TPI/PPI.

4) Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian

a. Abstraksi

Dalam rangka meningkatkan mutu data statistik, maka kegiatan survei hortikultura masih perlu dilakukan perbaikan baik secara teknis maupun administrasi dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tahap lanjutan perbaikan data statistik hortikultura adalah implementasi produktivitas hortikultura dengan pengukuran lapang di beberapa provinsi potensi dengan sumbangan terbesar terhadap produksi Indonesia. Dasar penentuan sampel pengukuran lapang menggunakan populasi KCI-TAN hasil ST03. Keragaman tanaman hortikultura memerlukan peningkatan mutu data statistik hortikultura yang harus dilakukan secara bergantian per komoditi setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data statistik hortikultura. Seperti halnya perusahaan hortikultura yang terus menerus dimutakhirkan baik di BPS Pusat maupun Daerah. Pemutakhiran ini dilakukan terhadap direktori perusahaan hortikultura yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki semua data hortikultura secara keseluruhan baik pada Survei Hortikultura dan Survei Perusahaan Hortikultura maupun pada Indikator Pertanian.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Survei hortikultura untuk mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan;
- (2) Perusahaan hortikultura untuk menyediakan direktori perusahaan hortikultura yang terbaru, sehingga dapat membantu perkembangan agribisnis hortikultura; dan
- (3) Indikator pertanian adalah untuk menyediakan data penunjang sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan di sektor pertanian.

c. Metodologi

- (1) Dengan menggunakan KCI-Tan 2003, dipilih beberapa jenis tanaman sebagai strata untuk memperoleh BS yang relevan dalam melakukan penghitungan produktivitas hortikultura dan estimasi produksi hortikultura di Indonesia;
- (2) *Updating* perusahaan dilakukan melalui pengutipan direktori dari instansi terkait, kemudian dilakukan pengecekan lapangan;

- (3) Survei perusahaan hortikultura melalui pancacahan perusahaan yang aktif; dan
- (4) Indikator pertanian dengan kompilasi data sekunder dari instansi terkait.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Publikasi Sayuran Indonesia;
- (2) Publikasi Buah-buahan Indonesia;
- (3) Publikasi Tanaman Hias Indonesia;
- (4) Publikasi Tanaman Obat-obatan Indonesia;
- (5) Publikasi Perusahaan Hortikultura;
- (6) Publikasi Indikator Pertanian; dan
- (7) Publikasi Studi Produktivitas.

5) Survei Perusahaan Peternakan dan RPH

a. Abstraksi

Sebagai negara agraris dan maritim, sektor pertanian khususnya sektor peternakan mempunyai peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto sehingga sangat diperlukan data peternakan yang rinci, cermat dan terpadu. Dengan adanya data yang rinci, cermat dan terpadu maka para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat melihat gambaran perkembangan sektor peternakan guna evaluasi program yang telah dan sedang berjalan dan dapat menganalisa prospek peranan sektor peternakan guna pengambilan keputusan untuk program yang akan datang. Untuk mendapatkan data peternakan maka diperlukan survei peternakan, dan RPH secara rutin setiap tahun supaya evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan direktori yang lengkap, serta melakukan *listing* terhadap direktori perusahaan peternakan, RPH, dan *keurmaster* untuk memperbaiki estimasi data produksi daging. Data yang dihasilkan dari survei ini antara lain data produksi peternakan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan peternakan, jumlah pemotongan hewan dan produksi daging yang dihasilkan dari RPH dan estimasi populasi ternak. Selain itu data peternakan juga harus lengkap, akurat dan *up to date* sehingga rencana kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah dan mengenai sasaran.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Pengumpulan data melalui RPH bertujuan untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong dan produksi daging, data tersebut diperlukan sebagai bahan penghitungan untuk PDB;

- (2) Estimasi populasi ternak bertujuan untuk memperbaiki data populasi ternak yang sangat berkaitan dengan produksi daging melalui kegiatan pemotongan; dan
- (3) Pengumpulan data tahunan melalui perusahaan peternakan bertujuan untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran serta nilai tambah. Data tersebut dapat menggambarkan struktur perusahaan peternakan di Indonesia.

c. Metodologi

Pengumpulan data perusahaan peternakan, dan RPH adalah secara sensus, dengan menyediakan kuesioner sebanyak direktori perusahaan peternakan dan RPH. Sedangkan *listing* estimasi populasi ternak dilakukan secara survei terhadap sampel rumah tangga dalam blok sensus yang telah ditetapkan. Petugas lapangan sebagian besar KSK dan staf BPS Kabupaten/Kota. Petugas pemeriksa adalah staf BPS Kabupaten/Kota dan Provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah;
- (2) Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Kecil;
- (3) Statistik Perusahaan Peternakan Unggas; dan
- (4) Statistik Pemotongan Ternak-Statistik Populasi Ternak.

6) Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kedelai

a. Abstraksi

Tanaman padi, jagung dan kedelai merupakan tiga komoditas tanaman pangan yang sangat strategis di Indonesia. Oleh karena itu agar formulasi berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketiga komoditas tersebut menjadi lebih tepat sasaran, perlu didukung dengan data yang akurat dan mutakhir. Salah satu data penting yang dibutuhkan adalah mengenai Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). Informasi lainnya yang juga diperlukan adalah kendala yang dihadapi petani dan prospek usaha tani ke depan. Data SOUT ketiga jenis komoditas tersebut terakhir adalah hasil Sensus Pertanian 2003 yang dilaksanakan pada tahun 2004. Ke depan direncanakan untuk melakukan survei SOUT untuk ketiga komoditas tersebut sekali 3 tahun secara bergiliran. Pada tahun 2008, dilakukan survei SOUT Padi, tahun 2009 direncanakan survei SOUT Jagung dan tahun 2010 survei SOUT Kedelai. Dalam periode 3 (tiga) tahun tersebut, SOUT padi, jagung dan kedelai diyakini telah banyak mengalami perubahan.

b. Tujuan dan Sasaran

Bertujuan untuk mendapatkan data mengenai struktur ongkos usaha tani kedelai, antara lain meliputi penggunaan benih, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, jasa pertanian dan biaya/pengeluaran lain yang dikeluarkan, serta kendala dan prospek usaha tani kedelai.

c. Metodologi

Survei SOUT Kedelai tahun 2010 ini direncanakan dilakukan secara sampel di 10 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, D.I. Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, dan Sumatera Utara) Penentuan/pemilihan 10 provinsi tersebut didasarkan pada potensi tanaman kedelai di Indonesia. Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) tahun 2007, luas panen kedelai pada 10 provinsi tersebut telah mencapai 91,66 persen dari total luas panen kedelai nasional sehingga diharapkan telah dapat mewakili kondisi seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya sampel rumah tangga per provinsi dan per kabupaten/kota dialokasikan secara proporsional terhadap luas panen kedelai masing-masing provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ATAP tahun 2007. Sementara alokasi sampel per Blok Sensus dilakukan proporsional terhadap jumlah petani kedelai yang melakukan panen pada suatu *subround* tertentu berdasarkan hasil *listing* survei ubinan. Pelaksanaan lapangan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan atau staf Badan Pusat Statistik daerah, dengan cara melakukan wawancara terhadap rumah tangga petani sampel.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi yang dihasilkan adalah Publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Kedelai Tahun 2010.

7) Survei Perusahaan Kehutanan

a. Abstraksi

Data statistik perusahaan kehutanan sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah di subsektor kehutanan. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, para perencana dan pengambil kebijakan dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan rinci, sehingga rencana kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah dan mengenai sasaran. Dengan demikian peranan subsektor kehutanan dalam hal penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa maupun sebagai penghasil bahan baku bagi industri hilir yang mengolah hasil hutan dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, perlu dilakukan pengumpulan data secara rutin setiap tahun agar evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Data perusahaan kehutanan dikumpulkan secara rutin setiap tahun. Berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan kehutanan dibedakan menjadi 4, yaitu:

- (1) Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- (2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT);
- (3) Perum; dan

- (4) Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar seluruh perusahaan kehutanan yang ada dicacah secara lengkap.

b. Tujuan dan Sasaran

Pengumpulan data perusahaan kehutanan bertujuan untuk mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka perencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan menimbulkan kekeliruan yang fatal.

c. Metodologi

Pencacahan survei perusahaan kehutanan dilakukan oleh KSK dengan periode pencacahan satu tahun sekali. Sebagai unit pencacahannya adalah *base camp* atau kantor cabang (HPH1, HPHT dan Perum), kantor pusat perusahaan (HPH2) dan perusahaan (STL).

d. Hasil dan Keluaran

Hasil-hasil yang akan dihasilkan antara lain publikasi:

- (1) Direktori Perusahaan Kehutanan 2009;
- (2) Statistik Perusahaan HPH 2009;
- (3) Statistik Perusahaan HTI 2009; dan
- (4) Statistik Perusahaan STL 2009.

8) Survei Kehutanan Rakyat

a. Abstraksi

Kesejahteraan masyarakat desa kawasan hutan di negara-negara berkembang telah menjadi fokus perhatian dari berbagai organisasi internasional karena semakin berkurangnya luasan hutan yang menjadi sumber kehidupannya, sementara tingkat kemiskinan masih tetap tinggi. Pemberdayaan masyarakat telah menjadi kata kunci pembangunan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Hampir seluruh kegiatan pembangunan selalu dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, sekalipun dengan pola dan pendekatan yang berbeda. Program pemerintah yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan akan meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat kawasan hutan. Semakin tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil hutan sebagai sumber dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akses masyarakat yang tidak terkontrol terhadap hutan menjadi salah satu penyebab laju *deforestasi* yang semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan program dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan dengan tetap mengacu pada konsep pelestarian hutan.

Kurangnya data statistik yang menggambarkan kondisi masyarakat di kawasan hutan menjadi salah satu faktor penghambat terealisasinya program pemerintah tersebut. Sejak tahun 1993 Badan Pusat Statistik telah melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik kehutanan. Data kehutanan yang dikumpulkan adalah data statistik perusahaan Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman, Perum Perhutani, dan perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar. Akan tetapi pengumpulan data rumah tangga di kawasan hutan belum dilakukan secara kontinyu. Hal tersebut menyebabkan BPS belum dapat memberikan data kehutanan yang lengkap kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan di subsektor kehutanan serta permintaan dari konsumen data kehutanan lainnya. Untuk memenuhi tuntutan penyajian data kehutanan yang komprehensif, BPS perlu melakukan penyempurnaan pengumpulan data kehutanan baik dari cakupan maupun metodologi serta ketepatan waktu penyajian data.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dari Survei Kehutanan Rakyat Tahun 2010 (SKR2010) adalah sebagai berikut:

- (1) Tujuan umum: memperoleh data yang rinci mengenai profil masyarakat yang tinggal di desa-desa kawasan hutan termasuk potensi hutan rakyat; dan
- (2) Tujuan Khusus:
 - Melengkapi data statistik kehutanan yang telah dihasilkan sebelumnya;
 - Menyiapkan data dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat kawasan hutan;
 - Menindaklanjuti kegiatan identifikasi desa di kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya; dan
 - Mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan analisis lanjutan seperti analisis kemiskinan masyarakat kawasan hutan serta analisis lain yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna data.

c. Metodologi

Survei Kehutanan Rakyat 2010 akan dilakukan pada tahun 2010 dengan jumlah sampel 43.500 rumah tangga hutan rakyat. Metodologi yang akan digunakan adalah *sampling* 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tahap 1: pemilihan sampel desa yang terletak di kawasan hutan; dan
- (2) Tahap 2: dari setiap desa yang terpilih di tahap 1, akan diambil sejumlah sampel rumah tangga hutan rakyat berdasarkan *frame* rumah tangga hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03). Petugas akan mendatangi rumah tangga sampel tersebut untuk mengumpulkan data yang rinci mengenai kondisi rumah tangga di kawasan hutan.

Agar pelaksanaan Survei Kehutanan Rakyat 2010 dapat berjalan lancar, perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan survei. Tahapan kegiatan SKR2010 adalah sebagai berikut:

(1) Pembentukan kerangka sampel desa yang terletak di kawasan hutan

Dari hasil survei Potensi Desa tahun 2006, di Indonesia terdapat 69.957 desa dan kelurahan. Dari seluruh desa tersebut, sebanyak 18.784 desa di antaranya berlokasi di dalam dan di tepi kawasan hutan. Hasil PODES tersebut perlu dievaluasi lagi dengan informasi lain berupa peta kawasan hutan yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan. Untuk mendapatkan informasi letak desa terhadap kawasan hutan berdasarkan informasi peta kawasan hutan, dilakukan overlay peta kawasan hutan Departemen Kehutanan dengan peta batas administrasi desa yang dimiliki BPS;

(2) Uji coba kuesioner pertama (pilot I)

Pilot I kuesioner SKR2010 dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Pebruari-Maret 2010 di dua provinsi yaitu Riau dan Kalimantan Barat. Pilot I ini bertujuan untuk melihat ketepatan konsep dan definisi serta cakupan materi pertanyaan dalam kuesioner serta lamanya waktu pencacahan dan identifikasi berbagai permasalahan di lapangan. Sebagai petugas Pilot I adalah staf inti dan Kasie di BPS;

(3) Uji coba kuesioner kedua (pilot II)

Hasil evaluasi dari Pilot I akan digunakan untuk menyempurnakan kuesioner sehingga diperoleh kuesioner final. Sebelum pelaksanaan survei, masih perlu dilakukan Pilot II yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2010 di Jawa Barat dan Papua. Tujuan utama dari Pilot II adalah melihat kelancaran organisasi lapang. Dalam Pilot II ini, petugas pencacah adalah KSK dan mitra statistik, sementara instruktur dan supervisor adalah staf inti dan kasie dari BPS.

(4) Pelaksanaan Survei Kehutanan Rakyat 2010

Survei Kehutanan Rakyat 2010 (SKR2010) akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia yang mencakup 43.500 rumah tangga yang berada di kawasan hutan. Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan dijadwalkan pelaksanaannya pada bulan Juni-Juli 2010. Pengolahan dan publikasi data akan dilakukan di BPS dan dijadwalkan selesai pada bulan September 2010.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari Survei Kehutanan Rakyat 2010 adalah:

- (1) Publikasi Statistik Kehutanan Rakyat 2010; dan
- (2) Potensi Hutan Rakyat 2010.

Tabel 6. PERBANDINGAN JUMLAH KECAMATAN, BLOK SENSUS DAN UBINAN SURVEI STATISTIK TANAMAN PANGAN/UBINAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010

No.	Provinsi	Kecamatan		Blok Sensus		Ubinan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	276	276	111	111	510	510
2	Sumatera Utara	383	417	907	907	4 731	4 731
3	Sumatera Barat	160	175	411	411	2 457	2 457
4	Riau	151	151	163	163	756	756
5	Jambi	114	128	186	186	772	772
6	Sumatera Selatan	212	216	231	231	1 035	1 035
7	Bengkulu	110	110	97	97	512	512
8	Lampung	204	204	535	535	2 524	2 524
9	Kep. Bangka Belitung	40	40	146	146	653	653
10	Kepulauan Riau	56	59	12	14	64	73
11	DKI Jakarta	44	44	72	72	508	508
12	Jawa Barat	610	620	1 504	1 504	7 275	7 275
13	Jawa Tengah	568	573	1 828	1 828	9 484	9 484
14	D.I. Yogyakarta	78	78	269	269	1 304	1 304
15	Jawa Timur	661	662	2 155	2 155	10 472	10 472
16	Banten	152	154	324	324	1 557	1 557
17	Bali	57	57	260	260	1 468	1 468
18	Nusa Tenggara Barat	116	116	384	384	1 623	1 623
19	Nusa Tenggara Timur	273	285	213	213	952	952
20	Kalimantan Barat	175	175	288	288	660	864
21	Kalimantan Tengah	112	119	151	151	600	600
22	Kalimantan Selatan	147	149	342	471	2 356	2 356
23	Kalimantan Timur	135	136	127	127	378	378
24	Sulawesi Utara	148	150	76	76	424	424
25	Sulawesi Tengah	118	147	176	176	1 089	1 089
26	Sulawesi Selatan	303	304	809	809	4 532	4 532
27	Sulawesi Tenggara	183	201	100	100	520	520
28	Gorontalo	59	65	55	55	299	299
29	Sulawesi Barat	62	66	69	76	387	387
30	Maluku	64	73	26	26	122	122
31	Maluku Utara	64	110	21	22	98	102
32	Papua Barat	102	136	18	22	84	102
33	Papua	346	368	48	60	225	276
Jumlah		6 283	6 564	12 114	12 269	60 431	60 717

**Tabel 7. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI PERKEBUNAN BESAR, KEHUTANAN DAN KEHUTANAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010**

No.	Provinsi	SOPPB Tahunan		Kehutanan		Kehutanan Rakyat	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	89	93	30	11	-	3 925
2	Sumatera Utara	378	379	30	34	-	3 045
3	Sumatera Barat	78	78	10	8	-	125
4	Riau	117	117	59	70	-	685
5	Jambi	61	61	18	20	-	375
6	Sumatera Selatan	97	97	19	13	-	1 250
7	Bengkulu	28	32	1	1	-	715
8	Lampung	41	42	9	6	-	470
9	Kep. Bangka Belitung	20	21	21	1	-	105
10	Kepulauan Riau	3	3	1	4	-	95
11	DKI Jakarta	-	-	75	99	-	-
12	Jawa Barat	248	248	34	61	-	2 750
13	Jawa Tengah	91	90	18	29	-	4 900
14	D.I. Yogyakarta	4	2	5	6	-	150
15	Jawa Timur	190	163	34	36	-	3 930
16	Banten	16	16	10	8	-	315
17	Bali	6	6	18	25	-	90
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	1	-	-	355
19	Nusa Tenggara Timur	6	6	2	-	-	1 965
20	Kalimantan Barat	64	62	53	79	-	1 790
21	Kalimantan Tengah	46	46	62	67	-	2 315
22	Kalimantan Selatan	60	62	16	25	-	300
23	Kalimantan Timur	91	33	104	120	-	2 115
24	Sulawesi Utara	45	45	6	8	-	470
25	Sulawesi Tengah	25	24	17	14	-	1 512
26	Sulawesi Selatan	26	26	17	14	-	590
27	Sulawesi Tenggara	4	8	2	2	-	1 777
28	Gorontalo	33	33	4	3	-	265
29	Sulawesi Barat	15	13	-	1	-	250
30	Maluku	4	4	13	12	-	545
31	Maluku Utara	1	1	9	14	-	565
32	Papua Barat	5	4	22	27	-	3 290
33	Papua	2	2	37	9	-	2 471
Jumlah		1 904	1 827	757	827	-	43 500

**Tabel 8. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI PERUSAHAAN HORTIKULTURA; PETERNAKAN & RPH;
Serta PERIKANAN dan TPI
TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010**

No.	Provinsi	Hortikultura		Peternakan & RPH		Perikanan dan TPI	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	-	-	704	503	69	1 038
2	Sumatera Utara	27	33	321	428	30	518
3	Sumatera Barat	2	2	309	381	25	357
4	Riau	2	2	16	44	5	79
5	Jambi	-	1	24	34	1	43
6	Sumatera Selatan	6	6	106	288	-	10
7	Bengkulu	-	1	16	16	5	706
8	Lampung	10	10	95	162	25	301
9	Kep. Bangka Belitung	-	2	41	65	40	44
10	Kepulauan Riau	2	2	6	8	6	133
11	DKI Jakarta	196	252	44	12	25	-
12	Jawa Barat	131	131	597	628	205	1 768
13	Jawa Tengah	44	44	1 254	1 523	395	2 859
14	D.I. Yogyakarta	17	17	172	164	75	317
15	Jawa Timur	79	64	1 169	1 217	190	346
16	Banten	13	13	48	63	160	592
17	Bali	7	7	121	160	24	165
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	254	290	60	584
19	Nusa Tenggara Timur	4	4	159	315	10	43
20	Kalimantan Barat	5	5	226	202	157	1 509
21	Kalimantan Tengah	-	1	68	56	5	43
22	Kalimantan Selatan	1	1	49	58	5	12
23	Kalimantan Timur	1	1	39	50	15	126
24	Sulawesi Utara	3	3	34	24	28	141
25	Sulawesi Tengah	1	1	134	141	40	48
26	Sulawesi Selatan	23	23	433	445	87	67
27	Sulawesi Tenggara	-	-	28	24	36	362
28	Gorontalo	-	-	120	44	46	78
29	Sulawesi Barat	-	-	32	-	-	6
30	Maluku	-	2	16	48	8	72
31	Maluku Utara	-	-	16	8	5	40
32	Papua Barat	-	-	12	9	2	45
33	Papua	2	2	12	4	3	-
Jumlah		579	633	6 675	7 414	1 787	12 452

**Tabel 9. JUMLAH RESPONDEN SURVEI STRUKTUR ONGKOS
TANAMAN KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	Provinsi	Responden
(1)	(2)	(3)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	438
2	Sumatera Utara	111
3	Sumatera Barat	-
4	Riau	-
5	Jambi	-
6	Sumatera Selatan	-
7	Bengkulu	-
8	Lampung	-
9	Kep Bangka Belitung	-
10	Kepulauan Riau	-
11	DKI Jakarta	-
12	Jawa Barat	369
13	Jawa Tengah	2 498
14	D.I. Yogyakarta	821
15	Jawa Timur	5 926
16	Banten	-
17	Bali	171
18	Nusa Tenggara Barat	1 690
19	Nusa Tenggara Timur	-
20	Kalimantan Barat	-
21	Kalimantan Tengah	-
22	Kalimantan Selatan	-
23	Kalimantan Timur	-
24	Sulawesi Utara	-
25	Sulawesi Tengah	-
26	Sulawesi Selatan	357
27	Sulawesi Tenggara	-
28	Gorontalo	119
29	Sulawesi Barat	-
30	Maluku	-
31	Maluku Utara	-
32	Papua Barat	-
33	Papua	-
JUMLAH		12 500

5. SURVEI BIDANG PERDAGANGAN

1) Kompilasi Data Statistik Ekspor

a. Abstraksi

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti yang telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka salah satu kebijakan Pemerintah dalam bidang perdagangan luar negeri adalah menggalakkan sektor ekspor secara optimal. Perencanaan yang baik dan terpadu dalam sektor ini dapat dicapai, bila didukung oleh informasi/data statistik ekspor yang baik dan berkualitas serta tepat waktu. Kebutuhan pemerintah akan data ekspor bulanan dan analisis makro dalam setiap Sidang Menko Perekonomian dan Sidang Kabinet, memerlukan data terkini yang disajikan lebih dini, cermat, dan akurat. Selain membutuhkan data berbentuk tabel-tabel, pemerintah juga menginginkan agar BPS dapat mengemas informasi perkembangan ekspor yang lebih deskriptif dan analitis. Dengan informasi semacam ini, pemerintah dapat melihat perkembangan, keterkaitan, peta pasar, dan hal-hal lain tentang ekspor nasional secara komprehensif.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari kegiatan kompilasi statistik ekspor ini adalah:

- (1) Untuk menghasilkan data ekspor setiap bulan yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat, baik volume maupun nilai;
- (2) Untuk menghasilkan angka sementara, angka ekspor bulanan untuk dilaporkan dalam Sidang Menko Perekonomian dan Sidang Kabinet; dan
- (3) Untuk menghasilkan laporan perkembangan dan analisa statistik ekspor. Pergeseran kebutuhan pengguna data ke arah yang lebih naratif dan analitis, merupakan fenomena yang harus segera diantisipasi. Untuk itu maka dilakukan penyusunan analisa perkembangan ekspor. Analisa ini akan dibagi dalam dua sajian, yaitu:
 - Analisis tentang kinerja ekspor nasional dalam 10 tahun terakhir; dan
 - Analisis tentang komoditi ekspor menurut sektor.

Dengan tersedianya data semacam ini, maka para pengguna data memperoleh informasi secara lengkap tentang keadaan ekspor nasional.

c. Metodologi

Input data untuk menghasilkan data statistik ekspor diperoleh dari dokumen PEB yang merupakan produk administratif dari Kantor-Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dokumen-dokumen itu dikumpulkan dari KPBC melalui Bank Indonesia di Jakarta. Secara berkala BPS mengirim petugas ke lokasi-lokasi KPBC di daerah yang tingkat keterlambatannya

tinggi. Pengiriman ini sangat diperlukan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan mencari solusi dari keterlambatan dokumen. Sebagian dari dokumen sudah diterima dalam bentuk *soft copy*. Proses pengolahan data ekspor dilakukan menggunakan sistem *entry* (untuk dokumen *hardcopy*), kemudian dilakukan validasi dan evaluasi/pengecekan dan konsistensi intra rekord dan antar rekord.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari kompilasi ini akan disajikan dalam bentuk publikasi untuk masing-masing topik yaitu:

- (1) Ekspor Tahunan 2009;
- (2) Ekspor Bulanan data Tahun 2010;
- (3) Ekspor menurut ISIC Tahun 2009;
- (4) Indeks Harga Ekspor Tahun 2009;
- (5) Analisis Komoditi Ekspor 2009; dan
- (6) Direktori Eksportir 2009.

Publikasi/laporan ini nantinya akan disebarluaskan ke: Badan Pusat Statistik Provinsi, Perpustakaan-perpustakaan di perguruan tinggi, Badan Litbang dari instansi pemerintah, kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

2) Kompilasi Data Statistik Impor

a. Abstraksi

Kegiatan ekonomi perdagangan luar negeri menuntut tersedianya informasi yang lengkap, cermat dan tepat waktu. Salah satu informasi tersebut adalah statistik impor yang merupakan salah satu komponen dalam penyusunan statistik perdagangan luar negeri. Sumber data yang digunakan adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB, dokumen model BC 2.0) dan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor dari Satu Tempat ke Tempat Lain dalam Pengawasan Pabean (BC 2.3 Impor) dalam media *hardcopy* dan *softcopy* yang diterima BPS dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) se-Indonesia. Dari statistik impor dapat dilihat impor menurut komoditi (klasifikasi *Harmonized System* - HS dan *Standard International Trade Classification* - SITC), negara asal dan pelabuhan bongkar serta penggunaannya sebagai barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal (Klasifikasi *Broad Economic Categories* - BEC). Informasi statistik impor sangat penting sebagai bahan perencanaan pembangunan serta strategi dan kebijakan pemerintah yang salah satu sasarannya diarahkan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku/penolong dan barang modal yang berasal dari impor. Sektor industri ini diharapkan

mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor non migas dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Disamping itu, sebagai bagian integral pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi regional perlu dilaksanakan secara terpadu dan disesuaikan dengan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga juga diperlukan tersedianya informasi regional yang *up to date*. Untuk memberi dorongan kepada peningkatan ekspor non migas, pemerintah secara konsisten melanjutkan kebijaksanaan penentuan Kawasan Berikat sebagai suatu kawasan industri tujuan ekspor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk berkaitan dengan pelaksanaan di bidang impor. Statistik menunjukkan bahwa impor barang ke Kawasan Berikat semakin signifikan besarnya, sehingga perlu didapat gambaran yang menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk itu pengolahan data impor barang ke Kawasan Berikat (dokumen model BC 2.3) harus semakin ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dengan PIB. Selain itu pemasukan dokumen PIB ke BPS dari daerah terus ditingkatkan ketepatan waktunya dengan monitoring dan evaluasi pemasukan dokumen.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data impor;
- (2) Menyusun dan menyajikan data impor menurut jenis barang (HS dan SITC), negara asal, pelabuhan bongkar dan golongan penggunaan barang baik bulanan maupun tahunan; dan
- (3) Menyajikan data statistik impor keseluruhan dan impor ke Kawasan Berikat mencakup nilai, volume dan negara asal barang serta distribusinya dalam tahun 2009 dan 2010.

c. Metodologi

Sumber data yang digunakan untuk penyusunan statistik impor adalah PIB. BPS menerima dokumen PIB dari KPBC se-Indonesia. Sedangkan PIB *softcopy* diterima dari 23 KPBC utama. PIB ini digunakan untuk mencatat barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Untuk Kawasan Berikat, pencatatan barang impor tidak menggunakan PIB tapi menggunakan dokumen BC-2.3. Penerimaan dokumen PIB (*hardcopy*) dilakukan dengan sistem *carry over* sedangkan penerimaan PIB *softcopy* sesuai dengan data aktual bulan pengolahan. Tahap pengolahan data PIB *hardcopy* dan BC-2.3 ini adalah *batching, editing, coding, entri data, validasi, dan tabulasi*. Untuk PIB *softcopy*, pengolahan validasi dan tabulasi dilakukan tanpa melalui proses *batching, editing, coding, dan entri data*.

d. Hasil dan Keluaran

Pengolahan dokumen PIB dilakukan dengan sistem *carry-over*. Dengan menggunakan sistem ini, maka dokumen PIB dari daerah pada suatu bulan tertentu akan ditunggu selama satu bulan sampai bulan berikutnya, sedangkan dokumen yang datang terlambat akan dimasukkan dalam pengolahan bulan berikutnya. Pengolahan dokumen PIB ini dilakukan dengan manual dan komputer. Pengolahan manual antara lain dilakukan dalam proses penyortiran dokumen, pengelompokan dokumen, *editing* dan *coding*. Sedangkan pengolahan komputer dilaksanakan pada proses pencatatan dokumen, meng-*key input* data ke komputer proses validasi dan proses tabulasi. Hasil dari kegiatan akan disajikan dalam bentuk publikasi:

- (1) Berita Resmi Statistik untuk impor 2010;
- (2) Buletin statistik impor bulanan data tahun 2009 dan 2010;
- (3) Statistik impor tahunan 2009; dan
- (4) Penyajian data statistik impor untuk publikasi indikator ekonomi, buletin ringkas dan lainnya.

3) Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan

a. Abstraksi

Pengumpulan data statistik harga produsen dan konsumen pedesaan (Statistik Harga Pedesaan) merupakan kegiatan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Data harga yang dicakup adalah harga-harga di pedesaan, yang dikumpulkan melalui survei harga produsen sektor pertanian dan survei harga konsumen pedesaan. Pencacahan data harga dilakukan secara rutin (bulanan) di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Responden adalah petani sebagai produsen hasil pertanian dan pedagang eceran di pasar pedesaan untuk harga-harga di pedesaan, baik makanan maupun non makanan. Kegiatan survei ini menghasilkan berbagai indikator harga dan Nilai Tukar Petani, yang sangat berguna untuk bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan nasional. Selain kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, pada tahun anggaran 2010 juga akan dilaksanakan beberapa studi, yaitu Studi Pengolahan Ikan Hasil Nelayan, Studi Tanaman Hias dan Tanaman Obat-obatan, serta Studi Penyusunan Diagram Timbang NTP Kehutanan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data harga produsen sektor pertanian dan konsumen pedesaan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan

indeks harga dan indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya pertanian. Survei harga-harga ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik, Indikator Ekonomi, Ringkasan Eksekutif Statistik Ekonomi Makro Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, bahan laporan rapat kabinet bulanan, dan upah *riil* pekerja pertanian sebagai indikator kemiskinan. Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.

c. Metodologi

(1) Survei harga produsen sektor pertanian

- Pengumpulan data dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta;
- Unit sampel adalah kecamatan yang dipilih secara purposif bersyarat dengan kriteria merupakan kecamatan potensi sektor pertanian dan *marketable surplus*-nya cukup besar.
- Besarnya sampel per bulan sebanyak 3.688 kecamatan yang dikelompokkan menjadi sampel survei HP Tanaman Pangan (HP-2.1) sebanyak 1.155 kecamatan, HP Hortikultura (HP-2.6) sebanyak 1.155 kecamatan, HP Tanaman Perkebunan Rakyat (HP-2.2) 282 kecamatan, HP Peternakan (HP-2.3) sebanyak 371 kecamatan, HP Perikanan Penangkapan (HP-2.4.1) sebanyak 340 kecamatan, HP Perikanan Budidaya (HP-2.4.2) sebanyak 340 kecamatan, dan HP Kehutanan (HP-2.5) sebanyak 45 kecamatan;
- Pencacahan dilakukan setiap bulan sekitar tanggal 15, dengan menanyakan transaksi selama tanggal 1 – 14;
- Responden adalah petani/produsen yang menghasilkan barang (produk) pertanian, pedagang alat pertanian dan usaha persewaan alat pertanian; dan
- Responden yang harus didatangi di tiap sampel kecamatan bervariasi (petani, pedagang, usaha persewaan), sehingga tiap sampel kecamatan paling sedikit tiga responden.

(2) Survei harga konsumen pedesaan

- Pengumpulan data dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta;
- Unit sampel adalah kecamatan yang dipilih secara purposif bersyarat dengan kriteria merupakan kecamatan yang desa-desanya daerah pedesaan dan memiliki pasar tetap dimana konsumennya diharapkan sebagian besar adalah petani/nelayan dari sub sektor pertanian, sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan;

- Besarnya sampel per bulan sebanyak 1.324 kecamatan, yang terdiri dari sampel HKP Kelompok Makanan sebanyak 662 kecamatan dan HKP Kelompok Non Makanan juga sebanyak 662 kecamatan;
- Pencacahan dilakukan setiap bulan sekitar tanggal 15 atau pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15;
- Responden adalah pedagang yang menjual barang/jasa konsumsi rumah tangga di pedesaan baik kelompok makanan maupun non makanan; dan
- Responden yang harus didatangi di tiap sampel kecamatan bervariasi (pedagang, dokter, bidan, tukang cukur, tukang jahit, tukang becak, tukang ojek, tukang bangunan, puskesmas, rumah sakit, sekolah, kantor pos, kantor pajak, tempat rekreasi, dll) sehingga tiap sampel kecamatan paling sedikit tiga responden.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Publikasi Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia, Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat;
- (2) Publikasi Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian di Indonesia, Subsektor Peternakan dan Perikanan;
- (3) Publikasi Statistik Harga Konsumen Pedesaan di Indonesia;
- (4) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia;
- (5) Publikasi Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan;
- (6) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan;
- (7) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura;
- (8) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat;
- (9) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan;
- (10) Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan; dan
- (11) Berbagai indikator harga dan Nilai Tukar Petani yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik, Indikator Ekonomi, Ringkasan Eksekutif Statistik Ekonomi Makro Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, bahan laporan rapat kabinet bulanan, dan upah riil upah buruh tani sebagai indikator kemiskinan.

4) Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras

a. Abstraksi

- (1) Statistik Harga Konsumen (SHK) adalah salah satu data statistik ekonomi makro yang sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai bahan dari berbagai analisis lainnya. Salah satu kegunaannya yang sangat populer, data SHK sebagai data dasar

penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang dipakai antara lain untuk mengukur dan mengidentifikasi inflasi/deflasi, harga beras, dan harga bahan pokok lainnya;

- (2) Inflasi harus dikendalikan agar angka pengangguran dapat ditekan dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi. Pengendalian inflasi yang berbiaya sangat besar melalui subsidi BBM, listrik, kesehatan, dan sebagainya memerlukan angka inflasi yang akurat. Subsidi ratusan triliun berkurang maknanya jika inflasi tidak akurat. Hasil Survei Biaya Hidup 2007 (SBH 2007) diimplementasikan secara bertahap untuk meningkatkan reliabilitas Survei Harga Konsumen dan akurasi angka inflasi yang dihasilkan; dan
- (3) Mengingat Survei Biaya Hidup hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, maka diagram timbang dan paket komoditas juga berlaku selama periode tersebut. Untuk dapat menangkap perkembangan harga, khususnya komoditas yang perubahan kualitas/merknya sangat cepat dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dilakukan survei khusus volume peredarannya. Variasi kualitas/*merk* komoditas yang tercakup dalam paket komoditas hasil SBH 2007 dapat menunjukkan pentingnya komoditas tersebut dalam penghitungan IHK.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mendapatkan data Statistik Harga Konsumen; dan
- (2) Menyusun IHK, laju inflasi/deflasi baik di tingkat ibukota provinsi, 33 kabupaten/kota maupun nasional, identifikasi penyebab inflasi/deflasi, penyediaan statistik harga beras dan harga bahan pokok lain.

Secara rinci tujuan dan sasaran survei adalah:

- (1) Mendata harga barang dan jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat;
- (2) Menghitung indeks harga konsumen dan inflasi/deflasi;
- (3) Identifikasi penyebab inflasi/deflasi bulanan maupun periode lainnya;
- (4) Menyediakan data harga beras dan bahan pokok, tarif pekerja operasional rumah tangga untuk penyusunan kebijakan pemerintah dan pihak lain;
- (5) Mendata volume penjualan eceran beras dan bahan pokok lain menurut jenis dan kualitas yang diperjualbelikan di pasar;
- (6) Untuk mengetahui peranan masing-masing pasar dalam pembentukan harga beras di suatu kota;
- (7) Menyediakan data *proxy* biaya hidup di kota SBH maupun nasional; dan

- (8) Sebagai dasar berbagai analisa pasar, kebutuhan hidup, upah minimum, penyediaan dan perbaikan gaji karyawan, deflator PDB, deflator kemiskinan, dan sebagainya.

c. Metodologi

Indeks Harga Konsumen diolah dari data Statistik Harga Konsumen, yang dikumpulkan di 66 kota (33 ibukota provinsi dan 33 kota lainnya) yang dapat mencakup antara 200–450 komoditas dengan 2–4 kualitas/merk untuk setiap komoditas.

Data harga dikumpulkan dari pasar tradisional, pasar swalayan, responden meliputi: toko-toko di luar pasar, *outlet* eceran, toko/gerai di *departement store*, rumahtangga, bengkel, rumah sakit, instansi, perusahaan, dan sebagainya. Waktu observasi terdiri dari harian, mingguan, 2 mingguan dan bulanan, sedangkan observasi volume penjualan dan lainnya dilakukan setiap kwartal, semesteran, atau setahun sekali.

Pendataan Volume Penjualan Eceran Beras dan bahan pokok dilaksanakan dalam dua tahap, sebagai berikut:

- (1) Tahap pertama adalah pendaftaran seluruh pedagang di semua pasar terpilih di masing-masing kota untuk keperluan ini digunakan daftar SB-I; dan
- (2) Tahap kedua adalah untuk mendapatkan keterangan tentang volume penjualan dengan daftar SB-II.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil Survei Harga Konsumen antara lain:

- (1) IHK Gabungan 33 provinsi dan 33 ibukota kabupaten/kota terpilih di Indonesia menurut kelompok pengeluaran;
- (2) Laju inflasi gabungan 66 ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di Indonesia menurut tahun kalender dan tahun anggaran;
- (3) Laju inflasi 66 ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di Indonesia menurut tahun kalender dan tahun anggaran;
- (4) Berbagai perkembangan harga dan perubahannya di berbagai kota dan nasional;
- (5) Laporan harga beras dan bahan pokok secara periodik ke pemerintah/terkait;

Hasil survei volume penjualan eceran beras antara lain:

- (1) Volume penjualan eceran beras dan bahan pokok menurut pasar dan jenis;
- (2) Daftar jenis beras dan bahan pokok diurutkan menurut volume dan penjualan terbanyak untuk penghitungan harga eceran umum di 66 kota; dan
- (3) Harga tertimbang di 33 ibukota provinsi dan 33 ibukota kabupaten/kota.

5) Survei Statistik Lembaga Keuangan dan *Monitoring Kurs* Valuta Asing

a. Abstraksi

Jasa perantara keuangan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penggerak ekonomi masyarakat maupun melalui devisa yang dihasilkan. Penyajian Statistik Lembaga Keuangan secara rinci dan berkesinambungan adalah merupakan kewajiban BPS. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang secara rutin dan berkesinambungan akan dilakukan kegiatan pengumpulan data yang merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, baik survei lembaga keuangan maupun *monitoring kurs* valuta asing.

b. Tujuan dan Sasaran

Mendapatkan struktur dan kegiatan usaha lembaga keuangan masing-masing jenis perusahaan. Mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh sub sektor lembaga keuangan. Memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan lembaga keuangan. Memperoleh data secara bulanan mengenai *kurs* beli maupun *kurs* jual beberapa valuta asing di 33 provinsi di Indonesia.

c. Metodologi

Statistik lembaga keuangan dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan seluruh perusahaan di sektor lembaga keuangan kecuali untuk Perusahaan Pegadaian sebagai unit pencacahannya adalah kantor cabang.

d. Hasil dan Keluaran

Data keuangan perusahaan lembaga keuangan yang berupa neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan, dan data karakteristik setiap usaha di sektor lembaga keuangan.

6) Survei Statistik Harga Perdagangan Besar

a. Abstraksi

Pengumpulan data Statistik Harga Perdagangan Besar merupakan kegiatan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Data harga yang dicakup dalam survei HPB secara umum (HPB-S) adalah harga-harga di tingkat produsen dan perdagangan besar yang dibagi dalam 5 sektor, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri, Impor dan Ekspor. Data tersebut dikumpulkan melalui survei harga perdagangan besar di kabupaten/kota terpilih dari 33 provinsi di Indonesia dan pencacahan dilakukan secara rutin (bulanan). Sedangkan kegiatan persiapan data survei harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi ditujukan untuk memperoleh data harga perdagangan besar

bahan bangunan/konstruksi, dan harga alat-alat berat yang diimplementasikan ke dalam suatu survei yaitu survei HPB-K2. Periode survei tersebut juga dilakukan secara bulanan yang dilaksanakan di 33 provinsi yang mencakup 91 kabupaten/kota potensial. Banyaknya sampel per bulan berkisar antara 20-50 responden. Kegiatan survei ini menghasilkan data tingkat perkembangan harga khususnya harga bahan bangunan/konstruksi, yang sangat berguna untuk bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan nasional yang sedang dilakukan pemerintah.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data harga perdagangan besar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks harga dan indikator harga lainnya, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Survei HPB ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Indikator Ekonomi yang diterbitkan oleh BPS. Di samping itu juga diterbitkan publikasi seri tahunan untuk Indeks Harga Perdagangan Besar.

c. Metodologi

- (1) Pengumpulan data HPB-S dilakukan di ibukota provinsi, dan kota yang potensial yang dipilih secara purposif dengan kriteria banyak terdapat perusahaan besar seperti perusahaan industri, eksportir, importir, dan pedagang besar, serta lalu lintas perdagangan di daerah tersebut cukup ramai dan banyak variasi barang yang diusahakan;
- (2) Pengumpulan data HPB-K2 dilakukan di beberapa kabupaten/kota terpilih di seluruh Indonesia dengan responden antara lain : produsen, pedagang besar/distributor, pedagang campuran, importir dan kategori lainnya. Besarnya sampel perusahaan (HPB-S + HPB-K2) adalah sebanyak 86.010 responden.
- (3) Banyaknya cakupan jenis barang pada survei HPB-S adalah 257 jenis barang yang dikelompokkan ke dalam barang-barang Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Impor, dan Ekspor, sedangkan untuk survei HPB-K2 mencakup 23 kelompok jenis barang. Perkiraan kualitas setiap jenis barang berkisar 10-90 kualitas. Pencacahan dengan cara melakukan kunjungan dan wawancara langsung terhadap responden setiap bulan sekitar tanggal 1-20 baik untuk HPB-S maupun HPB-K2.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil yang telah dicapai selama ini: Publikasi Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia menurut Sektor/*Group*, Subsektor, Jenis Barang, Bahan Bangunan/Konstruksi maupun IHPB Menurut Penggunaan dan Proses Produksi.

7) Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD

a. Abstraksi

Perkembangan pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien.

- (1) Program pembangunan daerah dijabarkan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan semakin cepatnya derap pembangunan dan semakin luasnya jangkauan serta lingkup pembangunan daerah, maka jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah juga semakin meningkat. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tercermin dalam struktur pengeluaran pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut sektor, sub sektor, program, dan proyek.
- (2) Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang semakin menampakkan sumbangannya.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Menyediakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Realisasi Penerimaan dan Belanja Desa;
- (2) Mendapatkan indikator tentang kemandirian keuangan daerah, dan penggunaannya untuk belanja daerah; dan
- (3) Mendapatkan data penerapan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa/Kelurahan yang sudah disesuaikan dengan aturan yang baru (APBDes).

c. Metodologi

- (1) Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota datanya dikumpulkan dari masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di Indonesia, yang berjumlah 33 provinsi dan 456 kabupaten/kota; dan
- (2) Statistik keuangan pemerintah desa (desa/kelurahan) datanya diambil dari desa terpilih baik *urban* maupun *rural* sebesar lebih dari 10% dari seluruh desa yang ada

di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 7.250 desa/kelurahan. Sampel diambil secara proporsional pada strata desa kota dan desa pedesaan untuk masing-masing kabupaten/kota.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan per tahun anggaran.
- (2) Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana data Realisasi Belanja Daerah dirinci menurut belanja langsung dan belanja tak langsung, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- (3) Data realisasi Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan sistem pelaporan yang baru (APBDes).

8) Survei Statistik Harga Produsen

a. Abstraksi

Survei Statistik Harga Produsen dilakukan untuk memperoleh data guna penghitungan Indeks Harga Produsen atau *Producer Price Index* (PPI). Harga di tingkat produsen merupakan *price leader* dalam sistem penentuan harga suatu produk, yang secara fundamental memiliki potensi *contagion effect* terhadap level harga selanjutnya, baik dari tingkat perdagangan besar hingga eceran. Oleh karena itu, suatu indeks harga berperan sebagai *early warning system* dalam upaya mengantisipasi fluktuasi harga yang terjadi di pasaran. Sebagaimana telah diterapkan di sebagian besar negara maju, keberadaannya menjadi variabel penting dalam berbagai analisis yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan di bidang perekonomian.

b. Tujuan dan Sasaran

Mendapatkan data harga di tingkat produsen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

c. Metodologi

- (1) Melakukan kompilasi data Harga Produsen Tahun Dasar 2005, penghitungan diagram timbang dari Tabel I-O Indonesia 2005, penyusunan paket komoditas berdasarkan klasifikasi sektoral I-O Indonesia 2005 dan Survei Harga Perdagangan Besar sebagai pembanding, penetapan kerangka sampel berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2006, Sensus Pertanian 2003, dan survei-survei terkait yang secara rutin dilakukan oleh BPS; dan

- (2) Melakukan pengumpulan data ke seluruh provinsi di Indonesia, dengan kriteria daerah potensi ekonomi (produsen).

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Publikasi Diagram Timbang Statistik Harga Produsen 2005;
- (2) Pedoman Teknis Survei Statistik Harga Produsen;
- (3) Publikasi Statistik Harga Produsen Gabah;
- (4) Publikasi Indeks Harga Produsen;
- (5) Pedoman Pelaksanaan *Monitoring* Harga Produsen Gabah;
- (6) Kuesioner HP-S;
- (7) Kuesioner HP-K; dan
- (8) Kuesioner HP 2.1.1.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 10. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI HARGA PRODUSEN & KONSUMEN PEDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Survei Harga Produsen Gabah		Survei Harga Produsen Sektor Pertanian		Survei Harga Produsen Makanan dan Non Makanan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	648	648	876	852	336	312
2	Sumatera Utara	1 134	1 134	1 656	5 472	456	1 260
3	Sumatera Barat	1 512	1 512	1 176	3 996	432	1 296
4	Riau	180	180	540	1 908	336	972
5	Jambi	360	360	564	1 836	312	828
6	Sumatera Selatan	-	-	996	3 312	336	936
7	Bengkulu	-	-	420	1 404	312	900
8	Lampung	576	576	996	1 572	288	288
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	804	2 916	312	792
10	Kepulauan Riau	-	-	420	420	192	192
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	108
12	Jawa Barat	2 808	2 808	5 160	16 344	1 392	4 104
13	Jawa Tengah	1 056	1 056	5 652	17 820	2 496	7 380
14	D.I. Yogyakarta	576	576	1 272	4 428	336	900
15	Jawa Timur	3 240	3 240	7 692	7 692	2 496	2 496
16	Banten	720	720	1 104	3 888	336	756
17	Bali	1 080	1 080	768	2 448	432	1 260
18	Nusa Tenggara Barat	630	630	624	2 016	288	684
19	Nusa Tenggara Timur	48	48	900	3 132	408	1 332
20	Kalimantan Barat	150	150	732	2 484	432	1 152
21	Kalimantan Tengah	252	378	396	372	288	288
22	Kalimantan Selatan	918	918	660	2 196	408	1 152
23	Kalimantan Timur	144	144	504	1 728	264	792
24	Sulawesi Utara	252	252	576	1 944	264	720
25	Sulawesi Tengah	270	270	468	1 620	432	1 152
26	Sulawesi Selatan	1 575	1 575	1 704	5 616	288	936
27	Sulawesi Tenggara	72	72	468	1 584	456	1 188
28	Gorontalo	-	-	528	1 584	192	576
29	Sulawesi Barat	378	378	456	228	264	192
30	Maluku	-	-	540	1 908	324	828
31	Maluku Utara	-	-	504	1 836	264	648
32	Papua Barat	108	108	540	1 692	192	468
33	Papua	108	108	780	1 634	528	1 176
Jumlah		18 795	18 921	40 476	107 882	16 092	38 064

Tabel 11. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN DAN KUNJUNGAN SURVEI HARGA KONSUMEN DAN VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010

No.	Provinsi	Jumlah Pasar Tradisional		HK 1.1 Mingguan		HK 1.2 2 Mingguan		HK 2.1 Bulanan		HK 2.2 Bulanan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NAD	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
2	Sumatera Utara	8	8	896	1 728	480	896	416	480	384	416
3	Sumatera Barat	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
4	Riau	4	4	864	864	448	448	240	240	208	208
5	Jambi	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
6	Sumatera Selatan	4	4	864	864	448	448	240	240	208	208
7	Bengkulu	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
8	Lampung	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	216	216	112	112	60	60	52	52
10	Kepulauan Riau	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
11	DKI Jakarta	5	5	1 080	540	560	280	300	150	260	130
12	Jawa Barat	17	17	3 672	3 672	1 904	1 904	1 020	1 020	884	884
13	Jawa Tengah	12	12	2 592	2 592	1 344	1 344	720	720	624	624
14	D.I. Yogyakarta	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
15	Jawa Timur	19	19	4 104	4 104	2 128	2 128	1 140	1 140	988	988
16	Banten	5	5	1 080	1 080	560	560	300	300	260	260
17	Bali	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
18	Nusa Tenggara Barat	5	5	1 080	1 080	560	560	300	300	260	260
19	Nusa Tenggara Timur	4	4	864	864	448	448	240	240	208	208
20	Kalimantan Barat	6	6	1 296	1 296	672	672	360	360	312	312
21	Kalimantan Tengah	4	4	864	864	448	448	240	240	208	208
22	Kalimantan Selatan	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
23	Kalimantan Timur	5	5	1 080	1 080	560	560	300	300	260	260
24	Sulawesi Utara	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
25	Sulawesi Tengah	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
26	Sulawesi Selatan	8	8	1 728	1 728	896	896	480	480	416	416
27	Sulawesi Tenggara	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
28	Gorontalo	1	1	216	216	112	112	60	60	52	52
29	Sulawesi Barat	1	1	216	216	112	112	60	60	52	52
30	Maluku	2	2	432	432	224	224	120	120	104	104
31	Maluku Utara	2	2	540	432	280	224	150	120	130	104
32	Papua Barat	4	4	864	864	448	448	240	240	208	208
33	Papua	3	3	648	648	336	336	180	180	156	156
Jumlah		149	149	31 460	31 644	16 328	16 408	8 906	8 790	7 742	7 618

Lanjutan Tabel 11

No.	Provinsi	HK 3 Bulanan		HK 4 Bulanan		HK 5 Bulanan		HK 6 Bulanan		Outlet/Dept Store	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NAD	144	144	1 440	1 440	720	720	552	552	144	144
2	Sumatera Utara	3 120	384	3 120	3 120	1 200	1 200	1 248	1 248	936	936
3	Sumatera Barat	96	96	960	960	360	360	336	336	192	192
4	Riau	192	192	1 440	1 440	600	600	552	552	300	300
5	Jambi	96	96	960	960	360	360	336	336	72	72
6	Sumatera Selatan	192	192	1 680	1 680	480	480	576	576	720	720
7	Bengkulu	96	96	960	960	360	360	336	336	72	72
8	Lampung	144	144	960	960	360	360	336	336	144	144
9	Kep. Bangka Belitung	48	48	720	720	360	360	312	312	72	72
10	Kepulauan Riau	144	144	1 200	1 200	600	600	432	432	204	204
11	DKI Jakarta	240	120	2 400	2 400	1 200	1 200	912	912	5 400	5 400
12	Jawa Barat	816	816	4 560	4 560	1 920	1 920	1 896	1 896	1 368	1 368
13	Jawa Tengah	576	576	3 120	3 120	1 200	1 200	1 248	1 248	936	936
14	D.I. Yogyakarta	144	144	960	960	480	480	360	360	192	192
15	Jawa Timur	912	912	4 560	4 560	1 920	1 920	1 896	1 896	1 128	1 128
16	Banten	240	240	1 440	1 440	840	840	744	744	288	288
17	Bali	96	96	960	960	360	360	336	336	144	144
18	NTB	240	240	1 440	1 440	600	600	552	552	240	240
19	NTT	192	192	1 440	1 440	600	600	552	552	120	120
20	Kalimantan Barat	288	288	1 440	1 440	600	600	552	552	240	240
21	Kalimantan Tengah	192	192	1 440	1 440	600	600	552	552	144	144
22	Kalimantan Selatan	96	96	960	960	360	360	336	336	72	72
23	Kalimantan Timur	240	240	1 920	1 920	840	840	768	768	192	192
24	Sulawesi Utara	96	96	960	960	360	360	336	336	144	144
25	Sulawesi Tengah	96	96	960	960	360	360	336	336	72	72
26	Sulawesi Selatan	384	384	3 120	3 120	1 200	1 200	1 248	1 248	864	864
27	Sulawesi Tenggara	144	144	960	960	360	360	336	336	72	72
28	Gorontalo	48	48	960	960	360	360	312	312	72	72
29	Sulawesi Barat	48	48	480	480	240	240	216	216	48	48
30	Maluku	96	96	960	960	360	360	336	336	72	72
31	Maluku Utara	120	96	960	960	360	360	312	312	72	72
32	Papua Barat	192	192	1 440	1 440	600	600	552	552	144	144
33	Papua	144	144	960	960	360	360	336	336	72	72
Jumlah		9 912	7 032	51 840	51 840	21 480	21 480	20 040	20 040	14 952	14 952

Lanjutan Tabel 11

No.	Provinsi	Jumlah Pasar Swalayan		HK 1.1. Mingguan		HK 1.2 2 Mingguan		HK 2.1 Bulanan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pusat	10		260		120		60	
1	NAD	2	2	104	104	48	48	24	24
2	Sumatera Utara	7	7	364	364	168	168	84	84
3	Sumatera Barat	2	2	104	104	48	48	24	24
4	Riau	2	2	104	104	48	48	24	24
5	Jambi	1	1	52	52	24	24	12	12
6	Sumatera Selatan	4	4	208	208	96	96	48	48
7	Bengkulu	1	1	52	52	24	24	12	12
8	Lampung	2	2	104	104	48	48	24	24
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	52	52	24	24	12	12
10	Kepulauan Riau	3	3	156	156	72	72	36	36
11	DKI Jakarta	5	5	260	260	120	120	60	60
12	Jawa Barat	13	13	676	676	312	312	156	156
13	Jawa Tengah	7	7	364	364	168	168	84	84
14	D.I. Yogyakarta	2	2	104	104	48	48	24	24
15	Jawa Timur	9	9	468	468	216	216	108	108
16	Banten	4	4	208	208	96	96	48	48
17	Bali	2	2	104	104	48	48	24	24
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	104	104	48	48	24	24
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	52	52	24	24	12	12
20	Kalimantan Barat	4	4	208	208	96	96	48	48
21	Kalimantan Tengah	2	2	104	104	48	48	24	24
22	Kalimantan Selatan	1	1	52	52	24	24	12	12
23	Kalimantan Timur	2	2	104	104	48	48	24	24
24	Sulawesi Utara	2	2	104	104	48	48	24	24
25	Sulawesi Tengah	1	1	52	52	24	24	12	12
26	Sulawesi Selatan	4	4	208	208	96	96	48	48
27	Sulawesi Tenggara	1	1	52	52	24	24	12	12
28	Gorontalo	1	1	52	52	24	24	12	12
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	1	1	52	52	24	24	12	12
31	Maluku Utara	1	1	52	52	24	24	12	12
32	Papua Barat	2	2	104	104	48	48	24	24
33	Papua	1	1	52	52	24	24	12	12
Jumlah		103	93	5 096	4 836	2 352	2 232	1 176	1 116

Lanjutan Tabel 11

No.	Provinsi	Jumlah Pasar		Survei Volume Penjualan Eceran Beras	
		2009	2010	2009	2010
		(3)	(4)	(5)	(6)
	Pusat	20		200	
1	NAD	4	4	320	320
2	Sumatera Utara	12	12	1 080	1 080
3	Sumatera Barat	5	5	500	500
4	Riau	7	7	640	640
5	Jambi	3	3	300	300
6	Sumatera Selatan	2	2	200	200
7	Bengkulu	3	3	240	240
8	Lampung	3	3	300	300
9	Kep. Bangka Belitung	5	5	400	400
10	Kepulauan Riau	4	4	360	360
11	DKI Jakarta	20	15	200	200
12	Jawa Barat	22	22	1 900	1 900
13	Jawa Tengah	13	13	1 160	1 160
14	D.I. Yogyakarta	3	3	300	300
15	Jawa Timur	20	20	1 700	1 700
16	Banten	6	6	520	520
17	Bali	5	5	500	500
18	Nusa Tenggara Barat	8	8	720	720
19	Nusa Tenggara Timur	5	5	360	360
20	Kalimantan Barat	9	9	720	720
21	Kalimantan Tengah	4	4	320	320
22	Kalimantan Selatan	5	5	500	500
23	Kalimantan Timur	7	7	620	620
24	Sulawesi Utara	3	3	300	300
25	Sulawesi Tengah	2	2	200	200
26	Sulawesi Selatan	8	8	680	680
27	Sulawesi Tenggara	3	3	240	240
28	Gorontalo	2	2	200	200
29	Sulawesi Barat	2	2	160	160
30	Maluku	2	2	160	160
31	Maluku Utara	2	2	160	160
32	Papua Barat	4	4	360	360
33	Papua	5	5	400	400
Jumlah		228	203	16 920	16 720

**Tabel 12. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN DAN MONITORING *KURSVALAS*
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Lembaga Keuangan		Monitoring Kurs Valuta Asing	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	73	78	52	52
2	Sumatera Utara	280	272	156	130
3	Sumatera Barat	162	152	104	130
4	Riau	127	130	156	130
5	Jambi	59	61	52	52
6	Sumatera Selatan	102	110	104	52
7	Bengkulu	52	57	52	52
8	Lampung	106	112	104	78
9	Kep. Bangka Belitung	34	36	52	52
10	Kepulauan Riau	117	119	104	104
11	DKI Jakarta	1 547	1 576	312	208
12	Jawa Barat	685	591	260	208
13	Jawa Tengah	879	851	260	208
14	D.I. Yogyakarta	152	183	260	130
15	Jawa Timur	882	974	312	208
16	Banten	169	162	52	26
17	Bali	376	332	312	156
18	Nusa Tenggara Barat	258	241	52	52
19	Nusa Tenggara Timur	90	92	52	52
20	Kalimantan Barat	91	94	52	52
21	Kalimantan Tengah	53	54	52	52
22	Kalimantan Selatan	84	82	52	52
23	Kalimantan Timur	89	93	52	104
24	Sulawesi Utara	82	82	52	78
25	Sulawesi Tengah	55	59	52	52
26	Sulawesi Selatan	165	166	104	208
27	Sulawesi Tenggara	53	55	52	52
28	Gorontalo	33	35	52	52
29	Sulawesi Barat	20	20	52	52
30	Maluku	28	28	52	52
31	Maluku Utara	22	25	52	52
32	Papua Barat	20	23	52	104
33	Papua	55	55	52	52
Jumlah		7 000	7 000	3 588	3 094

**Tabel 13. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	HPBS (Bulanan)		HPB-K2 (Bulanan)	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2 520	2 520	960	792
2	Sumatera Utara	3 000	3 000	1 200	1 800
3	Sumatera Barat	3 000	3 000	960	528
4	Riau	1 800	1 800	960	792
5	Jambi	1 200	1 200	720	504
6	Sumatera Selatan	2 040	2 040	720	960
7	Bengkulu	1 200	1 200	480	480
8	Lampung	1 200	1 200	720	792
9	Kep. Bangka Belitung	1 200	1 200	480	480
10	Kepulauan Riau	1 200	1 200	480	480
11	DKI Jakarta	4 200	1 050	600	1 800
12	Jawa Barat	3 000	3 000	1 500	2 160
13	Jawa Tengah	3 600	3 600	1 500	2 160
14	D.I. Yogyakarta	1 800	1 800	480	480
15	Jawa Timur	3 600	3 600	1 500	2 160
16	Banten	1 200	1 200	720	600
17	Bali	1 320	1 320	720	528
18	Nusa Tenggara Barat	1 800	1 800	720	504
19	Nusa Tenggara Timur	1 800	1 800	960	480
20	Kalimantan Barat	1 800	1 800	720	480
21	Kalimantan Tengah	2 400	2 640	720	480
22	Kalimantan Selatan	2 400	2 400	720	528
23	Kalimantan Timur	1 800	1 800	960	1 200
24	Sulawesi Utara	1 200	1 200	720	528
25	Sulawesi Tengah	1 200	1 200	720	480
26	Sulawesi Selatan	3 000	3 000	960	720
27	Sulawesi Tenggara	1 200	1 200	720	528
28	Gorontalo	1 200	240	480	480
29	Sulawesi Barat	1 200	1 200	480	480
30	Maluku	1 200	1 200	480	528
31	Maluku Utara	1 200	1 200	480	480
32	Papua Barat	1 200	1 200	480	480
33	Papua	1 800	1 800	720	528
Jumlah		63 480	59 610	25 740	26 400

**Tabel 14. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI STATISTIK KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Keuangan Daerah				APBD TK I & II		Keuangan BUMN/ BUMD	
		TK I & II		TK Desa		2009	2010	2009	2010
		2009	2010	2009	2010				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NAD	24	24	651	651	24	24	20	21
2	Sumatera Utara	29	34	588	600	29	34	25	24
3	Sumatera Barat	20	20	103	106	20	20	20	20
4	Riau	12	13	165	168	12	13	10	10
5	Jambi	11	12	136	140	11	12	8	8
6	Sumatera Selatan	16	16	314	319	16	16	17	17
7	Bengkulu	10	11	140	143	10	11	6	6
8	Lampung	12	15	237	241	12	15	12	15
9	Kep. Bangka Belitung	8	8	37	39	8	8	3	3
10	Kepulauan Riau	7	8	36	38	7	8	4	3
11	DKI Jakarta	7	7	30	30	7	7	10	10
12	Jawa Barat	27	27	599	600	27	27	73	73
13	Jawa Tengah	36	36	873	873	36	36	136	136
14	D.I. Yogyakarta	6	6	46	46	6	6	19	19
15	Jawa Timur	39	39	867	867	39	39	94	90
16	Banten	8	9	153	171	8	9	6	6
17	Bali	10	10	74	75	10	10	22	22
18	Nusa Tenggara Barat	10	11	94	94	10	11	12	12
19	Nusa Tenggara Timur	21	22	285	289	21	22	27	27
20	Kalimantan Barat	15	15	168	176	15	15	11	11
21	Kalimantan Tengah	15	15	149	153	15	15	7	17
22	Kalimantan Selatan	14	14	200	202	14	14	13	13
23	Kalimantan Timur	15	15	147	147	15	15	13	13
24	Sulawesi Utara	14	16	149	162	14	16	9	9
25	Sulawesi Tengah	11	12	158	178	11	12	17	17
26	Sulawesi Selatan	24	25	302	306	24	25	28	28
27	Sulawesi Tenggara	13	13	198	214	13	13	13	13
28	Gorontalo	7	7	50	50	7	7	6	6
29	Sulawesi Barat	6	6	53	53	6	6	3	3
30	Maluku	10	12	90	93	10	12	9	9
31	Maluku Utara	9	10	88	109	9	10	3	3
32	Papua Barat	10	12	123	129	10	12	4	4
33	Papua	22	30	349	349	22	30	8	8
Jumlah		498	530	7 652	7 811	498	530	668	676

6. SURVEI TRANSPORTASI

1) Survei Transportasi

a. Abstraksi

Perencanaan pembangunan yang baik membutuhkan data statistik yang akurat, relevan, aktual dan komprehensif sebagai bahan perencanaan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Demikian halnya pembangunan sektor transportasi juga membutuhkan data pokok dengan ciri-ciri tersebut di atas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di sektor transportasi, seperti data: panjang jalan, bongkar-muat barang, asal-tujuan barang dan penumpang.

Selama ini BPS mengumpulkan data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara dari instansi terkait. Data tersebut meliputi jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan, bongkar muat barang, kunjungan kapal dan penumpang di pelabuhan, lalu-lintas pesawat, penumpang dan barang angkutan udara di bandara. Masing-masing data dikumpulkan periodik menggunakan kuesioner yang spesifik dengan frekuensi pengumpulan data yang berbeda: tahunan untuk data angkutan darat serta bulanan untuk data lainnya. Data angkutan darat dikumpulkan menggunakan kuesioner AJR II/2 (angkutan jalan raya, direktori perusahaan bus umum dan trayek AKDP), AJR II/3 (angkutan jalan raya, direktori perusahaan truk), PJ II/5 (panjang jalan kabupaten/kota), dan PJ II/6 (panjang jalan provinsi).

Data angkutan laut diperoleh dari dokumen SIMOPPEL yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.3/PR/203/Phb-92 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.72/7/7/7-92 tentang Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Operasional Pelabuhan (SIMOPPEL). Sejak tahun 1995, BPS mendapat satu *copy* dokumen SIMOPPEL tingkat II sesuai surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. U.M.48/9/15-94. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda, dalam rangka menciptakan sistem statistik perhubungan yang terpadu secara nasional.

Data angkutan udara dikumpulkan menggunakan kuesioner model III/1 (untuk lalu lintas angkutan udara di bandara) dan model III/2 (untuk produksi perusahaan penerbangan berjadwal). Untuk dapat memenuhi kebutuhan data sektor transportasi secara berkesinambungan dan sebagaimana tujuan yang telah diuraikan di atas maka pengumpulan data angkutan darat, laut, dan udara perlu dilanjutkan pada tahun anggaran yang akan datang.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari pengumpulan data perhubungan (angkutan darat, laut, dan udara) adalah sebagai berikut:

- (1) Menyediakan data angkutan darat, laut dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam: (i) Berita Resmi Statistik (BRS) dan Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi yang disajikan bulanan; (ii) Publikasi Statistik Perhubungan dan Publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (iii) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam *website*; dan
- (2) Sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang transportasi, baik di Pemerintahan Provinsi (Pemprov), Pemerintahan Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) maupun nasional.

c. Metodologi

(1) Angkutan Darat

Data angkutan darat yang dikumpulkan setiap tahun merupakan kompilasi data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI), Direktorat Lalu Lintas Angkutan – Departemen Perhubungan, Dinas Kimpraswil Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Angkutan Laut

Data angkutan laut yang dikumpulkan merupakan kompilasi data sekunder yang diperoleh dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan (KANPEL). Pengambilan dokumen SIMOPPEL dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik Daerah, dengan mendatangi Kantor Cabang pelabuhan (KANCAB) untuk pelabuhan yang diusahakan, dan ke KANPEL untuk pelabuhan yang tidak diusahakan. Bentuk dokumen SIMOPPEL yang diambil adalah dokumen Spesifikasi Trafik Tingkat II, yaitu T.II.01 s.d. T.II.09 dari pelabuhan yang diusahakan, dan T.II.UPT dari pelabuhan yang tidak diusahakan. Pengambilan dokumen SIMOPPEL sesuai surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Um.48/19/ 15 94 tanggal 11 Agustus 1994.

(3) Angkutan Udara

Data angkutan udara yang dikumpulkan merupakan kompilasi data sekunder yang diperoleh dari 6 perusahaan penerbangan berjadwal yaitu PT (Persero) Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Nusantara Airlines, PT Mandala Airlines, PT Dirgantara Air Service dan PT. Bouraq Indonesia. Selain itu ditambah beberapa sumber data lainnya, antara lain berasal dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – Departemen Perhubungan.

d. Kegiatan dan Luaran

(1) Angkutan Darat

Hasil pengolahan data angkutan darat dari dokumen PJ II/5 dan PJ II/6 adalah panjang jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota menurut kondisi, jenis permukaan dan kelas jalan. Sedangkan hasil pengolahan dokumen AJR II/2 dan AJR II/3 berupa daftar nama dan alamat perusahaan bis/truk. Selain itu, ada tambahan data lainnya seperti data angkutan kereta api. Hasil-hasil tolok ukur yang sudah dicapai dan publikasi yang telah diterbitkan:

- Bulanan, data keberangkatan penumpang dan barang yang diangkut kereta api yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik;
- Bulanan, data statistik angkutan darat, tergabung dalam Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi;
- Tahunan, data statistik angkutan darat, tergabung dalam Publikasi Statistik Indonesia;
- Tahunan, data statistik angkutan darat, tergabung dalam Publikasi Statistik Perhubungan; dan
- Tahunan, data statistik angkutan darat, disajikan dalam *Website* BPS.

(2) Angkutan Laut

Hasil pengolahan dari dokumen T.II.01 s/d T.II.09 dan T.II.UPT, meliputi:

- Bongkar muat barang dan penumpang angkutan antar pulau dan luar negeri menurut provinsi dan pelabuhan;
- Kunjungan kapal jenis pelayaran dalam negeri dan luar negeri, penumpang dan hewan menurut provinsi dan pelabuhan;
- Bongkar muat barang antar pulau di pelabuhan dalam negeri dan luar negeri menurut komoditi;
- Bongkar muat barang yang diangkut oleh armada asing dan nasional, menurut jenis pelayaran, provinsi dan pelabuhan;
- Kegiatan arus peti kemas melalui dermaga peti kemas dan konvensional di pelabuhan yang diusahakan; dan
- Bongkar muat barang antar pulau menurut asal tujuan serta jenis komoditi;

Hasil-hasil tolok ukur yang sudah dicapai dan publikasi yang telah diterbitkan:

- Bulanan, data muat barang dan keberangkatan penumpang angkutan laut dalam negeri yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik;
- Bulanan, data statistik angkutan laut, tergabung dalam Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi;

- Tahunan, data statistik angkutan laut, tergabung dalam Publikasi Statistik Indonesia;
- Tahunan, data statistik angkutan laut, tergabung dalam Publikasi Statistik Perhubungan; dan
- Tahunan, data kunjungan kapal, bongkar muat barang dan keberangkatan/kedatangan penumpang dari/ke 25 pelabuhan strategis, disajikan dalam *Website* BPS.

(3) Statistik Angkutan Udara

Hasil pengolahan data angkutan udara dari dokumen III/1, III/2 dan Register Pesawat Udara meliputi:

- Banyaknya pesawat terbang sipil yang terdaftar;
- Banyaknya pesawat terbang sipil menurut kepemilikan;
- Banyaknya pesawat terbang bersayap tetap menurut jenis;
- Banyaknya pesawat helikopter menurut jenis;
- Produksi perusahaan penerbangan pemerintah untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- Produksi perusahaan penerbangan swasta untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- Produksi perusahaan penerbangan nasional untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
- Lalu lintas udara penerbangan dalam negeri dan luar negeri menurut asal tujuan;
- Lalu lintas pesawat terbang untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri menurut pelabuhan udara;
- Lalu lintas penumpang untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri menurut pelabuhan udara;
- Lalu lintas barang untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri menurut pelabuhan udara;
- Lalu lintas bagasi untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri menurut pelabuhan udara; dan
- Lalu lintas pos paket untuk penerbangan dalam negeri.

Hasil-hasil tolok ukur yang sudah dicapai dan publikasi yang telah diterbitkan:

- Bulanan, data keberangkatan penumpang angkutan udara domestik dan internasional yang disajikan dalam Berita Resmi Statistik;

- Bulanan, data statistik angkutan udara, tergabung dalam Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi;
- Tahunan, data statistik angkutan udara, tergabung dalam Publikasi Statistik Indonesia;
- Tahunan, data statistik angkutan udara, tergabung dalam Publikasi Statistik Perhubungan; dan
- Tahunan, data statistik angkutan udara, disajikan dalam *Website* BPS.

2) Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi

a. Abstraksi

Pengumpulan data pola perdagangan komoditi telah dilakukan oleh BPS melalui Studi Pola Perdagangan Komoditi 1997 di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Studi ini hanya dilakukan di 2 provinsi, dengan hasil yang belum maksimal oleh karena itu perlu dilanjutkan kembali. *Pasca* Sensus Ekonomi 2006 (SE06), pada tahun 2009 dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi namun hanya dilaksanakan di 15 provinsi. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik tahun 2020 diperlukan suatu kajian lebih mendalam tentang Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2010 perlu dilakukan kembali Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 66 kota di 33 provinsi yaitu Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Padang Sidempuan, Sibolga, Pemantang Siantar, Medan, Padang, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Batam, Tanjung Pinang, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Surakarta, Semarang, Tegal, Purwokerto (Banyumas), Yogyakarta, Jember, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Madiun, Surabaya, Serang/Cilegon, Tangerang, Cilegon, Denpasar, Mataram, Bima, Sikka (Maukere), Kupang, Pontianak, Singkawang, Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Manado, Palu, Bone (Watampone), Makassar, Pare-Pare, Palopo, Kendari, Gorontalo, Mamuju, Ambon, Ternate, Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 66 kota ini di harapkan dapat memenuhi kebutuhan data pola perdagangan untuk komoditi-komoditi terpilih dan juga sekaligus dapat digunakan menjadi kerangka dasar dalam merencanakan kegiatan statistik perdagangan pada masa yang akan datang.

b. Tujuan dan Sasaran

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 66 Kota Tahun 2010 mempunyai tujuan, yaitu:

- (1) Mendapatkan pola distribusi barang dagangan yang dijual oleh perusahaan perdagangan baik oleh pedagang besar seperti agen dan distributor maupun oleh pedagang eceran seperti toko modern dan toko tradisional, untuk beberapa Komoditi di 66 kota;
- (2) Mendapatkan volume barang dagangan yang dijual; dan
- (3) Memperoleh data tentang margin perdagangan dan transportasi, margin yang diteliti mulai tingkat pedagang besar sampai dengan konsumen. Data tentang margin perdagangan ini sangat berguna dalam penghitungan *regional income* khususnya sektor perdagangan.

c. Metodologi

Dalam pelaksanaan VPDPBK 2010, kerangka sampel yang digunakan adalah direktori perusahaan perdagangan hasil SE'06, mengingat estimasi yang akan dilakukan dirinci menurut komoditi, maka unit-unit populasi dalam kerangka disusun berdasarkan kelompok komoditi. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 66 Kota Tahun 2010 adalah dengan memperhatikan stratifikasi berdasarkan jenis komoditi yang diunggulkan, selanjutnya alokasi sampel dilakukan dengan proporsional jumlah usaha/perusahaan perdagangan hasil pelaksanaan SE'06 di masing-masing kota.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 66 Kota di 33 Provinsi.

**Tabel 15. PERBANDINGAN JUMLAH KUNJUNGAN
SURVEI TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Angkutan Darat		Angkutan Laut		Angkutan Udara	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	276	276	408	120	216	216
2	Sumatera Utara	336	396	1 764	1 800	252	288
3	Sumatera Barat	228	228	324	324	72	72
4	Riau	132	144	1 368	1 368	180	180
5	Jambi	120	132	360	360	72	72
6	Sumatera Selatan	180	180	108	108	108	108
7	Bengkulu	108	120	144	144	72	72
8	Lampung	132	168	432	432	36	36
9	Kep. Bangka Belitung	84	84	216	216	72	72
10	Kepulauan Riau	72	84	972	972	180	144
11	DKI Jakarta	72	72	96	96	48	48
12	Jawa Barat	312	312	252	252	72	72
13	Jawa Tengah	420	420	468	468	144	144
14	D.I. Yogyakarta	60	60	-	-	36	36
15	Jawa Timur	456	456	1 692	831	144	72
16	Banten	84	96	324	432	36	36
17	Bali	108	108	396	396	36	36
18	Nusa Tenggara Barat	108	120	540	540	108	108
19	Nusa Tenggara Timur	240	252	1 512	1 512	468	468
20	Kalimantan Barat	168	168	432	432	216	216
21	Kalimantan Tengah	168	168	360	288	324	288
22	Kalimantan Selatan	156	156	360	360	108	108
23	Kalimantan Timur	168	168	612	612	360	360
24	Sulawesi Utara	156	180	972	972	108	108
25	Sulawesi Tengah	120	132	936	936	180	180
26	Sulawesi Selatan	276	288	1 008	1 008	180	180
27	Sulawesi Tenggara	144	144	1 224	1 188	108	108
28	Gorontalo	72	24	360	240	36	36
29	Sulawesi Barat	60	60	792	792	36	36
30	Maluku	108	132	1 260	1 260	252	252
31	Maluku Utara	96	108	1 692	1 692	216	216
32	Papua Barat	108	132	1 692	480	792	336
33	Papua	252	348	2 808	1 305	1 404	1 000
Jumlah		5 580	5 916	25 884	21 936	6 672	5 704

7. SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA

1) Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

a. Abstraksi

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penggerak ekonomi masyarakat maupun melalui devisa yang dihasilkan. Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, selain mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti bidang kerajinan rumah tangga dan industri kecil. Di samping itu tidak kalah pentingnya, kegiatan kepariwisataan akan memperluas pemerataan pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkenalkan budaya bangsa. Dari data statistik perhotelan dapat diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan usaha jasa perhotelan, salah satunya adalah tingkat penghunian kamar hotel yang berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha perhotelan. Selain itu, dari data statistik kunjungan tamu asing dapat diperoleh data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri. Sedangkan dari data restoran/rumah makan, *catering* dan bar dapat diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan jumlah usaha, jumlah tamu/pengunjung/pemesan, yang berguna sebagai bahan acuan dalam rangka penetapan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha. Selanjutnya dari data biro perjalanan wisata (BPW), yang sangat erat hubungannya dengan wisatawan, dimana BPW berperan sebagai penghubung antara wisatawan dengan fasilitas perjalanan yang diperlukan oleh wisatawan, dapat diperoleh data jumlah tiket yang terjual dan jumlah paket wisata yang terjual.

b. Tujuan dan Sasaran

(1) Tujuan Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah untuk mengumpulkan data:

- Tingkat penghunian kamar hotel, bulanan;
- Banyaknya kamar terjual/terpakai, bulanan; dan
- Lama tamu menginap/bermalam, bulanan.

(2) Tujuan Survei Usaha Akomodasi adalah untuk mengumpulkan data:

- Pertumbuhan jumlah hotel, tahunan;
- Jumlah tenaga kerja usaha akomodasi, tahunan; dan
- Jumlah kamar dan tempat tidur usaha akomodasi, tahunan.

(3) Tujuan pengumpulan data Statistik Kunjungan Tamu Asing adalah untuk mengumpulkan data:

- Banyaknya penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri;
- Banyaknya penduduk pelintas batas;
- Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia; dan
- Banyaknya warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Sasaran utama pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data jumlah wisman yang datang ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri di 103 pintu masuk (UPT imigrasi) yang telah ditetapkan oleh Ditjen Imigrasi. Penyajian data dilakukan secara tahunan dan dirinci menurut berbagai karakteristik, seperti kebangsaan dan jenis visa.

(4) Tujuan Survei Restoran/Rumah Makan adalah untuk mengumpulkan data:

- Pertumbuhan jumlah usaha restoran/rumah makan, tahunan;
- Jumlah tenaga kerja usaha restoran/rumah makan, tahunan; dan
- Banyaknya tamu yang datang, tahunan.

(5) Tujuan Survei Statistik Biro Perjalanan Wisata adalah untuk mengumpulkan data:

- Banyaknya paket wisata yang terjual, tahunan;
- Banyaknya tiket yang terjual, tahunan;
- Banyaknya armada yang dikuasai perusahaan, tahunan; dan
- Pertumbuhan jumlah usaha biro perjalanan wisata, tahunan.

c. Metodologi

Metodologi pelaksanaan survei-survei tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan data statistik hotel dan akomodasi lainnya dilaksanakan dengan wawancara langsung ke hotel terpilih dengan menggunakan daftar VHT-L;
- (2) Pengumpulan data profil hotel dilakukan dengan *listing* untuk seluruh hotel. Hasil *listing* ini digunakan sebagai *frame* untuk survei tingkat penghunian kamar hotel;
- (3) Untuk mengetahui tingkat penghunian kamar hotel berbintang dicacah secara sensus, sedangkan hotel non bintang dicacah secara sampel. Sampel dipilih secara *random*, proporsional dengan banyaknya hotel yang ada di setiap kabupaten/kota;
- (4) Pengumpulan data tingkat penghunian kamar hotel dilakukan dengan sistem wawancara langsung ke hotel yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan daftar VHT-S;
- (5) Sistem pelaporan cepat TPK untuk hotel bintang dilakukan melalui *fax/e-mail* dan untuk hotel non bintang dikirim melalui disket hasil pengolahan di daerah atau melalui *e-mail*;

- (6) Pengumpulan data statistik kunjungan tamu asing dan penduduk Indonesia yang ke luar negeri diperoleh dari catatan Dirjen Imigrasi di seluruh UPT Imigrasi dengan menggunakan daftar VIOT;
- (7) Data diperoleh setiap bulan dan dirinci menurut kebangsaan dan jenis visa (untuk tamu asing) dan paspor (untuk WNI);
- (8) Sistem pelaporan cepat untuk 15 pintu masuk utama dilakukan melalui *fax/e-mail* setiap bulan dan melalui dokumen kuesioner VIOT;
- (9) Pengumpulan data profil restoran dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk seluruh restoran yang berskala menengah besar di seluruh Indonesia dengan menggunakan daftar VREST;
- (10) Sebagai kerangka sampel untuk restoran adalah Direktori Hasil *Listing* SE06 yang berskala menengah besar;
- (11) Pengumpulan data profil BPW dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk seluruh BPW yang berskala menengah besar di seluruh Indonesia dengan menggunakan daftar VBPW; dan
- (12) Sebagai kerangka sampel BPW adalah Direktori Hasil *Listing* SE06 yang berskala menengah besar.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Publikasi Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya (Tahunan);
- (2) Publikasi Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Tahunan);
- (3) Publikasi Statistik Wisatawan Internasional di Indonesia (Tahunan);
- (4) Publikasi Statistik Restoran/Rumah Makan (Tahunan); dan
- (5) Publikasi Statistik Usaha Biro Perjalanan Wisata (Tahunan).

2) Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi

a. Abstraksi

Pembangunan secara terencana dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, secara bertahap dan konsisten berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, komunikasi dan teknologi informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini terbukti dengan masuknya komunikasi menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi serta tingginya pertumbuhan sektor komunikasi memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Sub sektor komunikasi yang tangguh akan memberikan dampak yang menguntungkan terhadap sektor ekonomi lainnya, bahkan terhadap aspek-aspek

lain dari kehidupan masyarakat (sosial, politik, dan keamanan). Perkembangan komunikasi dan teknologi informasi yang sangat pesat telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pembangunan yang terkait dengan komunikasi dan teknologi informasi secara nasional maupun regional.

Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah telepon berbayar (*line service*) yang terdiri atas pelanggan berbayar (*subscriber*) dan *public phone*. Jumlah telepon pengguna berbayar masih terus tumbuh walaupun melambat karena perkembangan produk telepon seluler bergerak sangat pesat. Perencanaan pembangunan yang baik tentu saja membutuhkan data statistik yang akurat, relevan, dan komprehensif sebagai bahan perencanaan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Demikian halnya pembangunan sektor komunikasi dan teknologi informasi, juga membutuhkan data pokok yang lengkap dan rinci dengan ciri-ciri tersebut di atas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di sektor komunikasi dan teknologi informasi, seperti data: indikator produksi, struktur pengeluaran dan pendapatan serta prospek dan kendala usaha. Untuk dapat memenuhi kebutuhan data sektor komunikasi dan teknologi informasi berkesinambungan dan sebagaimana tujuan yang telah diuraikan di atas maka pengumpulan data komunikasi dan teknologi informasi perlu dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari pengumpulan data komunikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Menyediakan data profil media komunikasi, yaitu pos dan telekomunikasi secara periodik dan berkesinambungan dalam: (i) Publikasi statistik komunikasi dan teknologi informasi dan publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (ii) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam *website*;
- (2) Mendapatkan struktur pengeluaran dan pendapatan;
- (3) Mendapatkan gambaran permodalan, prospek usaha dan kendalanya; dan
- (4) Sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang komunikasi dan teknologi informasi, baik di pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) maupun nasional.

c. Metodologi

Data komunikasi dikumpulkan oleh petugas BPS dari perusahaan BUMN yang dikoordinir oleh kantor pusatnya. Sedangkan, untuk perusahaan swasta kombinasi wawancara dan *mailing system*. Data komunikasi diperoleh dari PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, PT. (Persero) Pos Indonesia, serta perusahaan swasta lainnya.

d. Hasil dan Keluaran

Terdiri dari produk jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan jasa pos, yaitu indikator produksi, banyaknya perusahaan, banyaknya pelanggan, *input-output*, banyaknya pekerja serta balas jasanya.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 16. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	VHTS Bulanan		VHTL Tahunan		Kunjungan Tamu Asing (VIOT) Bulanan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NAD	86	93	183	205	5	5
2	Sumatera Utara	273	287	800	802	6	6
3	Sumatera Barat	140	147	285	285	2	2
4	Riau	87	91	290	290	7	7
5	Jambi	59	62	149	149	2	2
6	Sumatera Selatan	112	118	281	281	2	2
7	Bengkulu	41	43	106	106	1	1
8	Lampung	71	75	188	189	2	2
9	Kep. Bangka Belitung	32	34	76	76	2	2
10	Kepulauan Riau	98	118	341	345	8	7
11	DKI Jakarta	222	233	409	409	7	7
12	Jawa Barat	537	564	1 463	1 461	7	7
13	Jawa Tengah	527	553	1 320	1 320	6	6
14	D.I. Yogyakarta	186	195	1 181	1 181	1	1
15	Jawa Timur	495	483	1 766	1 728	6	6
16	Banten	77	77	220	220	3	3
17	Bali	412	433	1 864	1 864	3	3
18	Nusa Tenggara Barat	107	112	386	382	2	2
19	Nusa Tenggara Timur	91	97	291	291	3	3
20	Kalimantan Barat	84	88	288	288	4	4
21	Kalimantan Tengah	99	109	302	324	2	2
22	Kalimantan Selatan	87	91	205	205	2	2
23	Kalimantan Timur	114	120	459	459	4	4
24	Sulawesi Utara	62	65	176	176	3	3
25	Sulawesi Tengah	70	72	286	286	1	1
26	Sulawesi Selatan	163	171	529	529	2	2
27	Sulawesi Tenggara	59	62	202	202	1	1
28	Gorontalo	24	25	74	74	-	-
29	Sulawesi Barat	25	25	76	86	-	-
30	Maluku	55	58	139	139	2	2
31	Maluku Utara	32	34	109	109	1	1
32	Papua Barat	26	35	68	70	2	2
33	Papua	54	42	133	112	4	4
Jumlah		4 607	4 812	14 645	14 643	103	102

8. SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN

1) Survei Upah

a. Abstraksi

Survei Upah Buruh (SUB) telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1979/1980. Pada periode awal pelaksanaannya, survei ini mengumpulkan berbagai informasi tentang upah secara terinci di lapangan usaha pertambangan non-migas, industri pengolahan dan perhotelan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan SUB tahun-tahun sebelumnya masih ditemui beberapa kelemahan terutama menyangkut ketepatan dan kecepatan ketersediaan datanya. Sejak tahun 1994, BPS mempublikasikan data hasil SUB secara triwulanan yang mencakup tren rata-rata dan median upah pekerja produksi di bawah mandor/pengawas di sektor industri pengolahan, pertambangan non-migas dan perhotelan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama diselenggarakan Survei Upah adalah untuk memantau dengan cepat perubahan upah yang terjadi dari triwulan ke triwulan dan untuk mendapatkan informasi/data statistik upah berkesinambungan secermat dan sedini mungkin yang juga berguna untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan, pengendalian dan analisis upah pekerja/karyawan. Sasaran survei ini adalah perusahaan yang bergerak di lapangan usaha industri pengolahan, pertambangan non-migas, perhotelan, konstruksi, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan pekerja/karyawan yang dicakup yaitu karyawan produksi dibawah mandor/pengawas/supervisor dan tidak dirinci menurut jenis pekerjaannya. Tujuan utama dilakukannya *Updating* Kerangka Sampel SUB adalah untuk menghindari terlalu besarnya non respons dan memperpendek *time-lag*.

c. Metodologi

Metode *sampling* yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan-perusahaan besar dan sedang di sektor industri dipilih dengan *sampling fraction* yang berbeda untuk setiap sub sektor yang menyebar di seluruh provinsi. Demikian juga halnya untuk hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang. Perusahaan-perusahaan pertambangan non migas yang dipilih adalah yang mempunyai tenaga kerja 40 orang atau lebih dan yang sudah melakukan kegiatan penambangan;
- (2) Sedangkan perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, perdagangan dan pertanian yang dipilih adalah yang mempunyai tenaga kerja minimal 15 orang. Untuk

perusahaan konstruksi yang mencakup sub sektor perusahaan konstruksi gedung dan bangunan sipil, instalasi gedung dan bangunan sipil, penyelesaian konstruksi sipil. Sedangkan sektor perdagangan mencakup sub sektor ekspor, impor, perdagangan swalayan, perdagangan *department store*, serta pertanian mencakup sub-sektor ternak, unggas dan ikan; dan

- (3) Kegiatan pencacahan dilakukan secara triwulanan dengan jumlah sampel 3.675 perusahaan yang terdiri dari 2.183 perusahaan di sektor industri pengolahan, 109 perusahaan di sektor pertambangan, 867 perusahaan di sektor perhotelan, 292 perusahaan di sektor perdagangan dan 224 perusahaan di sektor pertanian.

d. Hasil dan Keluaran

Survei upah buruh akan menghasilkan luaran sebagai berikut:

- (1) Statistik Upah 2010;
- (2) *Leaflet* Survei Upah 2010; dan
- (3) Direktori perusahaan baru hasil *updating*.

2) Survei Struktur Upah

a. Abstraksi

Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan hidup minimum, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menimbulkan harga diri. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan upah, BPS selain melaksanakan Survei Upah Buruh, juga menyelenggarakan Survei Struktur Upah guna memenuhi permintaan data dari banyak pihak. Pada tahun 2010 dipandang perlu untuk melaksanakan penyempurnaan instrumen yang ada sehingga pelatihan bagi petugas tentang persepsi instrumen baru sangat perlu dilaksanakan. Survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas cakupan Survei Upah Buruh yang telah dilaksanakan secara triwulanan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama diselenggarakan Survei Struktur Upah adalah untuk mendapatkan informasi/data statistik upah yang lebih rinci seperti upah per jenis jabatan dan jenis kelamin untuk pekerja non produksi dan pekerja produksi baik yang di bawah mandor maupun pekerja produksi di tingkat mandor ke atas. Melalui survei ini dapat pula dipantau keadaan pengupahan regional dan nasional menurut klasifikasi jabatan. Sasaran survei ini adalah seluruh perusahaan sampel Survei Upah Buruh yaitu perusahaan di sektor (subsektor) industri pengolahan, pertambangan non migas,

perhotelan, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan pekerja/karyawan yang dicakup yaitu pekerja non produksi dan pekerja produksi baik yang di bawah mandor maupun pekerja produksi di tingkat mandor ke atas.

c. Metodologi

Metode sampling yang digunakan untuk pemilihan perusahaan-perusahaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan-perusahaan besar dan sedang di sektor industri dipilih dengan *sampling fraction* yang berbeda untuk setiap sub-sektor yang menyebar di seluruh provinsi. Demikian juga halnya untuk hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang. Perusahaan-perusahaan pertambangan non-migas yang dipilih adalah yang mempunyai tenaga kerja 40 orang atau lebih dan yang sudah melakukan kegiatan penambangan;
- (2) Sedangkan perusahaan-perusahaan di sektor perdagangan dan pertanian yang dipilih adalah yang mempunyai tenaga kerja minimal 15 orang. Sektor perdagangan mencakup sub-sektor ekspor, impor, perdagangan swalayan, perdagangan *department store*, serta pertanian mencakup sub sektor peternakan dan perikanan; dan
- (3) Kegiatan pencacahan dilakukan setahun sekali, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan lapangan SUB triwulan II yang merujuk pada keadaan bulan Juni, pengumpulan datanya dilakukan pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan yang akan dilakukan dalam survei ini antara lain:

- (1) Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Survei Struktur Upah 2010;
- (2) Pengumpulan data SSU 2010;
- (3) Pengolahan hasil pencacahan lapangan SSU 2010;
- (4) Supervisi Pelaksanaan Lapangan SSU 2010; dan
- (5) Evaluasi dan pembahasan hasil akhir data SSU 2010 Luaran yang akan dicapai adalah Publikasi Tahunan (Laporan Intern) Statistik Struktur Upah 2010.

3) Sakernas Semester I 2010

a. Abstraksi

Pembangunan nasional harus terus berlanjut melalui tahapan-tahapan yang terencana dan cermat. Pembangunan sumber daya manusia seperti diamanatkan dalam Propenas 2004, memerlukan informasi-informasi keadaan ketenagakerjaan secara terus menerus, baik jumlah, perubahan maupun karakteristiknya. Karena itu, keadaan angkatan kerja

dan semua aspeknya, baik untuk tingkat nasional maupun regional, perlu selalu dipantau. Survei Angkatan Kerja Nasional adalah salah satu kegiatan untuk maksud tersebut. Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik, tentang penanganan terpadu data ketenagakerjaan. Sakernas diharapkan akan dapat menjadi sumber data utama di samping data dari sumber-sumber lain. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga berbagai kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, hingga tujuan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat tercapai.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakan Sakernas Semester Februari 2010 adalah untuk memperoleh data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja, pengangguran, pernah berhenti/pindah pekerjaan serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sasaran kegiatan Sakernas Semester Februari 2010 adalah untuk mendapatkan data keadaan ketenagakerjaan melalui survei yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 69.904 rumah tangga dari 4.369 BS *updating* dan 66 BS *listing* pada Semester I bulan (Februari), yang tersebar diseluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Rumah tangga korp diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Secara khusus, hasil yang hendak dicapai dalam kegiatan ini dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksudkan dalam kerjasama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Pusat Statistik untuk penanganan terpadu data statistik ketenagakerjaan.

c. Metodologi

Kerangka sampel yang digunakan Sakernas 2010 adalah Daftar blok sensus terpilih Sakernas 2009 berikut daftar nama kepala rumah tangga hasil listing Agustus 2009. Blok sensus sebagai *first stage sampling unit* dan rumah tangga sebagai *second stage sampling unit*. Blok sensus dalam kerangka sampel dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi (periode pencacahan Februari 2009), dan blok sensus komplemen yang bila ditambahkan kedalam blok sensus untuk estimasi provinsi dapat digunakan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Kerangka

sampel ini digunakan untuk periode pencacahan (Februari dan Agustus) pada tahun 2008-2010. Untuk tahun 2011 dan seterusnya menggunakan kerangka sampel SP10. Kerangka Pembentukan Sampel Blok Sensus dan Rumah Tangga Kerangka sampel yang digunakan dalam Sakernas Februari 2010 terdiri dari: kerangka sampel untuk pembentukan blok sensus, dan kerangka sampel pembentukan rotasi sampel rumah tangga dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih, antara lain:

(1) Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus:

- Blok sensus dalam kerangka sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dibagi empat gugus sampel blok sensus yang berukuran sama dan tidak saling tumpang tindih (*non overlapping*) secara sistematis, sedangkan kelompok blok sensus komplemen dibagi menjadi dua paket sampel. Pembentukan gugus sampel blok sensus antara daerah perkotaan dan pedesaan dilakukan secara terpisah (*independent*);
- Hitung interval awal penarikan sampel blok sensus pada masing-masing kelompok blok sensus. Bila awal interval bukan bilangan bulat, maka tambahkan sejumlah blok sensus dari *master file* sedemikian rupa sehingga interval merupakan bilangan bulat terdekat dengan interval awal. Pemilihan sampel blok sensus tambahan dilakukan secara acak. Tambahan blok sensus dalam daftar sampel diberi tanda * pada NKS-nya;
- Paket sampel blok sensus untuk estimasi provinsi diberi kode 1, 2, 3, dan 4, sedangkan paket sampel blok sensus komplemen diberi kode 5 dan 6. Pemberian kode paket dilakukan secara acak terhadap gugus-gugus sampel blok sensus yang telah terbentuk;
- Periode pencacahan Pebruari menggunakan paket sampel blok sensus 1, 2, 3, dan 4, sedangkan untuk periode pencacahan Agustus seluruh paket sampel blok sensus digunakan (1, 2, 3, 4, 5, dan 6); dan
- Nomor paket sampel blok sensus dicantumkan pada digit pertama Nomor Kode Sampel (NKS) Blok Sensus.

(2) Pemutakhiran *Frame* Rumah tangga dan *Listing* Rumah Tangga

- Pemutakhiran rumah tangga dilakukan pada setiap blok sensus terpilih Sakernas 2009 (Agustus), sedangkan *listing* rumah tangga dilakukan pada seluruh blok sensus tambahan;
- Pemutakhiran *frame* rumah tangga dan *listing* rumah tangga untuk blok sensus tambahan pada tahap pertama dilakukan pada pertengahan Januari 2010 untuk

Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, dan 4. Hasil pemutakhiran dan *listing* rumah tangga ini selanjutnya digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga. Kelompok sampel rumah tangga yang dibentuk pada setiap Paket Sampel Blok Sensus berdasarkan hasil *updating* dan *listing* rumah tangga tahap pertama adalah sebagai berikut:

- Paket 1: dibentuk 3 kelompok sampel rumah tangga, yaitu A, E, dan I;
 - Paket 2: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu B dan F;
 - Paket 3: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu C dan G; dan
 - Paket 4: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu D dan H.
- Pemutakhiran *frame* rumah tangga pada tahap kedua dilakukan pada pertengahan Januari 2010 untuk Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. *Listing* rumah tangga untuk blok sensus tambahan hanya dilakukan blok sensus dalam Paket Sampel Blok Sensus 5 dan 6. Hasil pemutakhiran *frame* rumah tangga dan *listing* rumah tangga pada Paket Sampel Blok 5 dan 6 selanjutnya digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga. Kelompok sampel rumah tangga yang dibentuk pada setiap Paket Sampel Blok Sensus berdasarkan hasil *updating* dan *listing* rumah tangga tahap kedua adalah sebagai berikut:
 - Paket 5: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu J dan L; dan
 - Paket 6: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu K dan M.
- Pemutakhiran *frame* rumah tangga tahap kedua untuk Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, dan 4 ditujukan untuk mengantisipasi penambahan populasi rumah tangga dalam blok sensus sehingga dimungkinkan adanya penambahan sampel rumah tangga bila tambah tambahan tersebut masih dalam jangkauan angka *random* pemilihan.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari survei ini adalah:

Publikasi kegiatan ini berupa publikasi "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Pebruari 2010" dan "Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia Pebruari 2010" serta "Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Indonesia Pebruari 2010". Publikasi ini akan disebarluaskan sebagai sumber informasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan data mentah, akan disimpan dalam *disk/disket* agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya: analisa dengan penekanan pada hal-hal yang bersifat khusus dan belum atau tidak dipublikasikan.

4) Sakernas Semester II 2010

a. Abstraksi

Pembangunan nasional harus terus berlanjut melalui tahapan-tahapan yang terencana dan cermat. Pembangunan sumber daya manusia seperti diamanatkan dalam Propenas 2004, memerlukan informasi-informasi keadaan ketenagakerjaan secara terus menerus, baik jumlah, perubahan maupun karakteristiknya. Karena itu, keadaan angkatan kerja dan semua aspeknya, baik untuk tingkat nasional maupun regional, perlu selalu dipantau. Survei Angkatan Kerja Nasional adalah salah satu kegiatan untuk maksud tersebut. Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Pusat Statistik, tentang penanganan terpadu data ketenagakerjaan. Sakernas diharapkan akan dapat menjadi sumber data utama di samping data dari sumber-sumber lain. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga berbagai kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, hingga tujuan pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat tercapai.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakan Sakernas Semester Agustus 2010 adalah untuk memperoleh data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja, pengangguran, pernah berhenti/pindah pekerjaan serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sasaran kegiatan Sakernas Semester Agustus 2010 adalah untuk mendapatkan data keadaan ketenagakerjaan melalui survei yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 293.088 rumah tangga dari 17 931 BS *updating* dan 387 BS *listing* baru yang tersebar diseluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan pada semester II bulan Agustus 2010. Tersebar di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Rumah tangga korps diplomatik, rumahtangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel. Secara khusus, hasil yang hendak dicapai dalam kegiatan ini dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dimaksudkan dalam kerjasama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Pusat Statistik untuk penanganan terpadu data statistik ketenagakerjaan.

c. Metodologi

Kerangka sampel yang digunakan Sakernas Agustus 2010 adalah daftar blok sensus terpilih Sakernas Februari 2009 berikut daftar nama kepala rumah tangga hasil *listing*

Februari 2009. Blok sensus sebagai *first stage sampling unit* dan rumah tangga sebagai *second stage sampling unit*. Blok sensus dalam kerangka sampel dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi (periode pencacahan Februari 2010) dan estimasi tingkat kab/kota (periode pencacahan Agustus 2010). Kerangka sampel ini digunakan untuk periode pencacahan (Februari dan Agustus) dalam tahun 2008-2010. Untuk tahun 2011 dan seterusnya menggunakan kerangka sampel SP10. Kerangka sampel yang digunakan dalam Sakernas Agustus 2010 terdiri dari kerangka sampel untuk pembentukan blok sensus dan kerangka sampel pembentukan rotasi sampel rumah tangga dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih, antara lain:

(1) Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus:

- Blok sensus dalam kerangka sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dibagi empat gugus sampel blok sensus yang berukuran sama dan tidak saling tumpang tindih (*non overlapping*) secara sistematis, sedangkan kelompok blok sensus komplemen dibagi menjadi dua paket sampel. Pembentukan gugus sampel blok sensus antara daerah perkotaan dan pedesaan dilakukan secara terpisah (*independent*);
- Hitung interval awal penarikan sampel blok sensus pada masing-masing kelompok blok sensus. Bila awal interval bukan bilangan bulat, maka tambahkan sejumlah blok sensus dari *master file* sedemikian rupa sehingga interval merupakan bilangan bulat terdekat dengan interval awal. Pemilihan sampel blok sensus tambahan dilakukan secara acak. Tambahan blok sensus dalam daftar sampel diberi tanda * pada NKS-nya;
- Paket sampel blok sensus untuk estimasi provinsi diberi kode 1, 2, 3, dan 4, sedangkan paket sampel blok sensus komplemen diberi kode 5 dan 6. Pemberian kode paket dilakukan secara acak terhadap gugus-gugus sampel blok sensus yang telah terbentuk;
- Periode pencacahan Agustus 2009 menggunakan paket sampel blok sensus (1, 2, 3, 4, 5, dan 6), dimana paket sampel blok sensus (Kode 5 dan 6 masing-masing paket terdiri dari 6.077 BS); dan
- Nomor paket sampel blok sensus dicantumkan pada digit pertama Nomor Kode Sampel (NKS) Blok Sensus.

(2) Pemutakhiran *Frame* Rumah tangga dan *Listing* Rumah Tangga

- Pemutakhiran rumah tangga dilakukan pada setiap blok sensus terpilih Sakernas Februari 2010, sedangkan *listing* rumah tangga dilakukan pada seluruh blok sensus tambahan;

- Pemutakhiran *frame* rumah tangga dan *listing* rumah tangga untuk blok sensus tambahan pada tahap pertama dilakukan pada pertengahan Januari 2009 untuk Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, dan 4. Hasil pemutakhiran dan *listing* rumah tangga ini selanjutnya digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga. Kelompok sampel rumah tangga yang dibentuk pada setiap Paket Sampel Blok Sensus berdasarkan hasil *updating* dan *listing* rumah tangga tahap pertama adalah sebagai berikut:
 - Paket 1: dibentuk 3 kelompok sampel rumah tangga, yaitu A, E, dan I;
 - Paket 2: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu B dan F;
 - Paket 3: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu C dan G; dan
 - Paket 4: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu D dan H.
- Pemutakhiran *frame* rumah tangga pada tahap kedua dilakukan pada pertengahan Januari 2009 untuk Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. *Listing* rumah tangga untuk blok sensus tambahan hanya dilakukan blok sensus dalam Paket Sampel Blok Sensus 5 dan 6. Hasil pemutakhiran *frame* rumah tangga dan *listing* rumah tangga pada Paket Sampel Blok 5 dan 6 selanjutnya digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga. Kelompok sampel rumah tangga yang dibentuk pada setiap Paket Sampel Blok Sensus berdasarkan hasil *updating* dan *listing* rumah tangga tahap kedua adalah sebagai berikut:
 - Paket 5: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu J dan L; dan
 - Paket 6: dibentuk 2 kelompok sampel rumah tangga, yaitu K dan M.
- Pemutakhiran *frame* rumah tangga tahap kedua untuk Paket Sampel Blok Sensus 1, 2, 3, dan 4 ditujukan untuk mengantisipasi penambahan populasi rumah tangga dalam blok sensus sehingga dimungkinkan adanya penambahan sampel rumah tangga bila tambah tambahan tersebut masih dalam jangkauan angka random pemilihan sampel dengan tetap mempertahankan rumah tangga sampel periode sebelumnya.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari survei ini adalah:

Publikasi "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2010" dan "Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia Agustus 2010" serta "Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Indonesia Agustus 2010". Publikasi ini akan disebarluaskan sebagai sumber informasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan data mentah, akan disimpan

dalam disk/disket agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya: analisa dengan penekanan pada hal-hal yang bersifat khusus dan belum atau tidak dipublikasikan.

5) Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Pemuda

a. Abstraksi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar atau aset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Oleh karena itu, penduduk suatu negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Sumber daya manusia tersebut akan berdaya guna dan berhasil guna apabila memiliki kualitas yang baik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk relatif besar. Oleh karena itu secara kuantitas sumber daya manusia untuk pembangunan sangat mudah diperoleh. Namun, apabila dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia untuk kebutuhan pembangunan, jumlah penduduk yang besar belum tentu dapat memenuhinya. Hal ini mengingat kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan biasanya dikaitkan dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, baik secara kemampuan formal maupun informal. Sejalan dengan itu, perlu upaya agar kualitas penduduk senantiasa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Untuk memenuhi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih memprioritaskan ke arah peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini diupayakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan agar dapat tepat sasaran dan tepat waktu. Disadari bahwa kebijakan peningkatan sumber daya manusia memerlukan data atau informasi yang terpercaya dan tepat waktu sebagai bahan pertimbangan dan penentu arah, maka BPS senantiasa berusaha menyediakan data dasar secara makro secara periodik. Upaya penyediaan data dasar tersebut salah satunya dikumpulkan melalui Susenas secara rutin setiap tahun. Untuk memudahkan pengguna data sumber daya manusia yang tergolong sebagai penduduk lanjut usia dan pemuda, maka BPS menyajikan data tersebut dalam bentuk publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Statistik Pemuda agar mudah diakses oleh segenap lapisan pengguna data. Dalam kegiatannya penyusunan publikasi tersebut, bukan saja memerlukan pengolahan data primer maupun sekunder, tetapi juga membutuhkan studi literatur, konsultasi dengan para ahli di daerah untuk perbaikan perumusan metodologi yang tepat, sehingga publikasi ini mempunyai nilai akurasi yang tinggi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama dari penulisan publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Statistik Pemuda Indonesia adalah: memberikan gambaran mengenai kuantitas, kualitas dan tingkat kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia dan pemuda pada tingkat nasional maupun provinsi.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metodologi yang digunakan oleh Susenas tahun 2009, karena dalam penyusunan publikasi ini sebagian besar menggunakan data Susenas 2009.

d. Hasil dan Keluaran

Seluruh kegiatan penyusunan publikasi statistik penduduk lanjut usia dan statistik pemuda akan dilakukan dalam tahun anggaran 2010 dengan menggunakan data Susenas 2009. Setiap tahapan akan disusun hasilnya agar dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kegiatan penyusunan publikasi ini.

6) Penghitungan Penduduk dan Rumah Tangga Untuk Penimbang Survei Kependudukan 2010

a. Abstraksi

Berbagai kegiatan di bidang statistik kependudukan mempunyai sasaran unit pencacahan penduduk atau rumah tangga. Kegiatan survei bidang statistik kependudukan yang dilakukan BPS antara lain adalah Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei Urbanisasi, dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Berbagai survei kependudukan ini dilakukan dengan jumlah sampel yang telah ditentukan tergantung level penyajiannya. Beberapa survei yang disebut di atas, dalam pengolahan dan penyajian, jumlah penduduknya diestimasi untuk mendapatkan jumlah penduduk total baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan data jumlah penduduk sampai wilayah administrasi kabupaten/kota yang akan dipakai sebagai angka penimbang. Jumlah penduduk yang diperlukan dirinci menurut daerah perkotaan perdesaan, jenis kelamin serta kelompok umur. Selain data jumlah penduduk yang dipakai sebagai penimbang, diperlukan juga data jumlah rumah tangga per kabupaten/kota, yang dipilah menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Dengan adanya angka penimbang penduduk, maka dapat disajikan berbagai tabulasi karakteristik penduduk. Sedangkan, angka penimbang rumah tangga dipakai untuk menyajikan berbagai data yang berhubungan dengan karakteristik rumah tangga, seperti data perumahan, pelaporan kejadian vital, rumah

tangga yang mendapat kartu kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan penghitungan penduduk dan rumah tangga untuk keperluan penimbang ini sebelumnya hanya dilakukan *ad-hoc*, namun dengan kondisi berkembangnya survei kependudukan yang dirancang BPS, pekerjaan ini harus dilakukan secara rutin, mengingat beberapa survei dilakukan pada saat yang berlainan atau bahkan secara triwulanan dalam satu tahun. Sehingga, jumlah penduduk dan rumah tangga yang dibutuhkan juga harus dihitung sesuai untuk periode dimana kegiatan lapangan dari survei kependudukan dilakukan. Sebagai contoh, Survei Angkatan Kerja Nasional dilakukan pada bulan Februari dan Agustus. Sakernas Februari dilakukan dengan sampel yang cukup besar untuk mendapatkan statistik ketenagakerjaan secara dini terutama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Angka Pengangguran menurut provinsi. Sakernas Agustus disebut juga Sakernas Tahunan, dimana pertanyaan yang dicakup lebih lengkap, dan hasilnya dapat disajikan secara nasional, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Susenas dilakukan dua kali, Susenas Panel dilaksanakan pada bulan Maret, dengan tingkat penyajian sampai kabupaten/kota. Susenas Panel dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga/penduduk miskin. Sementara, Susenas rutin KOR dan Modul dilaksanakan pada bulan Juli. Kegiatan-kegiatan lain seperti SUPAS dan survei kependudukan lain umumnya dilakukan pada pertengahan tahun (Juni).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakan penghitungan estimasi penduduk per kabupaten/kota menurut jenis kelamin dan daerah perkotaan/perdesaan serta estimasi rumah tangga menurut daerah perkotaan perdesaan adalah untuk bahan penghitungan penimbang yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian data statistik yang dihasilkan dari survei kependudukan yang dilakukan BPS. Sasaran penyediaan data ini diharapkan tepat waktu dan akurat.

c. Metodologi

Perhitungan jumlah penduduk pada bulan-bulan yang dibutuhkan berbagai survei di atas didasarkan pada jumlah penduduk SUPAS 2005. Jumlah kabupaten yang dihitung adalah jumlah kabupaten kondisi terbaru. Bila terjadi pemekaran wilayah, maka wilayah yang baru dan wilayah asal/induk disesuaikan kembali jumlah penduduknya. Perhitungan proyeksi penduduk total kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode geometrik, yaitu memproyeksikan penduduk berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten/kota periode 2000-2005. Untuk akurasi, pertumbuhan penduduk dihitung per bulan, mengingat estimasi dilakukan untuk bulan-bulan tertentu dalam satu tahun yang sama. Penghitungan jumlah penduduk per kabupaten/kota menurut jenis kelamin

mengikuti pola rasio jenis kelamin per kabupaten kota menurut hasil SUPAS 2005. Pola rasio jenis kelamin untuk kabupaten/kota yang baru mengikuti pola rasio jenis kelamin kabupaten/kota induknya. Penghitungan jumlah penduduk per kabupaten/kota menurut daerah perkotaan/perdesaan mengikuti pola penduduk perkotaan/perdesaan hasil SUPAS 2005. Sama dengan penghitungan penduduk, perhitungan estimasi rumah tangga total kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan metode geometrik, yaitu memproyeksikan rumahtangga berdasarkan tingkat pertumbuhan rumah tangga kabupaten/kota periode 2000-2005.

Untuk akurasi, pertumbuhan rumah tangga dihitung per bulan, mengingat estimasi dilakukan untuk bulan-bulan tertentu dalam satu tahun yang sama. Penghitungan jumlah rumah tangga per kabupaten/kota menurut daerah perkotaan/perdesaan mengikuti pola rumah tangga perkotaan/perdesaan hasil SUPAS 2005.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah:

- (1) Jumlah penduduk per kabupaten/kota menurut jenis kelamin;
 - (2) Jumlah penduduk per kabupaten/kota menurut daerah perkotaan/perdesaan; dan
 - (3) Jumlah rumah tangga per kabupaten/kota menurut daerah perkotaan/perdesaan.
- Data yang dihitung adalah untuk kondisi bulan Februari, Maret, Juni, Juli, dan Agustus.

7) Susenas Panel 2010 (Estimasi Provinsi)

a. Abstraksi

Informasi statistik kemiskinan yang selama ini digunakan oleh pemerintah dan banyak pihak untuk perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan serta pelbagai kajian kemiskinan didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, khususnya dari modul konsumsi yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Sejak tahun 2003 pemerintah membutuhkan informasi tersebut setiap tahun yang ditindaklanjuti oleh BPS dengan menyelenggarakan Susenas Panel dengan jumlah sampel 10.000 rumah tangga. Namun, dengan jumlah sampel tersebut informasi yang didapatkan hanya pada tingkat nasional saja, sementara angka kemiskinan semakin dibutuhkan pada tingkat provinsi.

Untuk mendapatkan informasi tersebut, pada tahun 2007 telah dilakukan Susenas Panel modul pengeluaran dan konsumsi rumah tangga dengan jumlah sampel sebanyak 68.800 rumah tangga. Pada tahun 2010 diselenggarakan pengulangan pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga dengan nama Susenas Panel 2010, untuk menghasilkan angka kemiskinan sampai tingkat provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Dalam tahun anggaran 2010 kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data yang tercakup dalam lingkup indikator kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu:

- (1) Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, dan perumahan; dan
- (2) Data modul, mencakup data rinci mengenai konsumsi/pengeluaran rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang.

c. Metodologi

Susenas Panel 2010 merupakan survei rumah tangga dengan lingkup nasional dan dilakukan secara sampel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kekuatan estimasi hasil Susenas ini dapat mewakili keadaan pada tingkat nasional dan provinsi.

Sampel Susenas Panel 2010 merupakan panel sampel Susenas Panel 2008. Metode pengumpulan data yang digunakan pada Susenas Panel 2010 dengan model tim. Satu tim terdiri dari 2 orang pencacah dan 1 orang koordinator. Setiap tim diharuskan menyelesaikan pencacahan di satu blok sensus terlebih dahulu, kemudian pindah ke blok sensus berikutnya.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Publikasi Konsumsi untuk Pengeluaran Penduduk Indonesia.

8) Susenas KOR (Estimasi Kab/Kota) 2010

a. Abstraksi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 disebutkan bahwa strategi pembangunan Indonesia diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Untuk mengetahui sejauh mana hak dasar rakyat dapat dipenuhi maka dibutuhkan berbagai data mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk.

Untuk memantau hasil-hasil pembangunan dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengkajian secara terus menerus melalui berbagai indikator yang ada dalam bentuk data yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi penduduk, sehingga peningkatan kesejahteraan di masa mendatang dalam kaitannya dengan usaha pembangunan akan terlihat secara bertahap.

b. Tujuan dan Sasaran

Dalam tahun anggaran 2010 kegiatan proyek ini difokuskan pada pengumpulan data yang tercakup dalam lingkup indikator sosial ekonomi dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran.

c. Metodologi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan lingkup nasional dan dilakukan secara sampel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kekuatan estimasi hasil Susenas dari data kor dapat mewakili keadaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk estimasi tingkat nasional dan provinsi, datanya dapat dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota datanya tidak dapat dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel Susenas 2010 terdiri dari 3 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus dalam blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai muatan rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga atau blok sensus yang telah dibuat sub blok sensus pada saat up-dating sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah. Setiap tahap dalam rancangan pemilihan sampel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Blok sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus:

- (1) Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *Probability Proportional to Size (PPS) – Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil P4B.
- (2) Tahap kedua, dari sejumlah rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010 di setiap blok sensus terpilih dipilih 16 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*.

Blok sensus yang dibentuk sub blok sensus:

- (1) Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *Probability Proportional to Size – Linear Systematic Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil P4B.
- (2) Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dibentuk sejumlah sub blok sensus, selanjutnya dipilih satu sub blok sensus secara *Probability Proportional to Size Sampling* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil listing P4B di setiap sub blok sensus.

- (3) Tahap ketiga, dari sejumlah rumah tangga hasil SP 2010 di setiap sub blok sensus terpilih dipilih 16 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- (1) *Draft* laporan; dan
- (2) Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kesehatan, Statistik Perumahan dan Pemukiman, dan Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia.

9) Identifikasi Aglomerasi Potensi Desa di Indonesia

a. Abstraksi

Kompleksitas budaya dan sosial di Indonesia yang tinggi disertai distribusi kemakmuran dan kesejahteraan yang tidak merata, diatasi oleh pemerintah melalui kebijakan otonomi daerah. Guna mendapatkan informasi yang jelas mengenai distribusi kemakmuran dan kesejahteraan antar wilayah, identifikasi aglomerasi dan lokasi kluster potensi desa terutama potensi ekonomi dan sosial berskala nasional perlu dilakukan. Dengan menggunakan data Podes 2008 dan analisis spasial, diharapkan data yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Dengan demikian ketimpangan wilayah yang relatif kaya dan miskin dapat dikurangi.

b. Tujuan dan Sasaran

Pembuatan publikasi aglomerasi potensi desa ini secara umum dimaksudkan sebagai upaya penyediaan data spasial yang dapat dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Secara rinci dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- (1) Menyediakan informasi spasial tentang lokasi potensi desa meliputi potensi ekonomi dan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia; dan
- (2) Menyajikan hasil analisis spasial yang menggambarkan lokasi aglomerasi potensi ekonomi dan sosial desa.

c. Metodologi

Data yang digunakan adalah data hasil pendataan Potensi Desa tahun 2008. Selain itu dibutuhkan peta dasar setingkat desa agar dapat dibuat peta tematik dan analisis spasial. Metode yang diperlukan untuk penyusunan publikasi aglomerasi potensi desa, antara lain:

- (1) Analisis deskriptif dan pemetaan tematik (GIS)
Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menghitung intensitas potensi ekonomi dan sosial setiap wilayah (regional). Sementara itu pemetaan tematik dimaksudkan untuk

menentukan lokasi sebaran potensi ekonomi dan sosial pada setiap wilayah regional).

(2) Analisis dan pemodelan spasial, dengan menggunakan dua metode yaitu:

- *Global Spatial Autocorrelation* dimaksudkan untuk menggambarkan pola terjadinya aglomerasi dan pembentukan kluster potensi ekonomi dan sosial antar wilayah (regional). Metode ini juga digunakan untuk evaluasi terjadinya interaksi antar anggota masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial; dan
- *Local Spatial Autocorrelation* dimaksudkan untuk menentukan lokasi kluster (pemusatan) potensi ekonomi dan sosial antar wilayah (regional). Metode ini juga digunakan untuk menguji secara statistik terbentuknya aglomerasi dan klusterisasi potensi ekonomi dan sosial antar regional.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Penyusunan Publikasi Nasional; dan
- (2) Penyusunan Publikasi Provinsi.

10) Penyusunan Publikasi Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei

a. Abstraksi

Migrasi dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi terjadi karena beberapa faktor seperti: berkurangnya sumber-sumber alam di daerah asal, berkurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, adanya kesempatan mendapat lapangan pekerjaan yang cocok, adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, dan lain-lain. Dengan demikian terdapat faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) seseorang untuk melakukan migrasi. Informasi tentang migrasi penduduk diperoleh dari hasil Sensus Penduduk dan SUPAS. Secara umum terdapat 4 item pertanyaan dalam sensus/survei kependudukan yang digunakan untuk mengukur migrasi yaitu tempat tinggal sekarang, tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Berdasarkan item pertanyaan mengenai migrasi pada sensus/survei kependudukan, penduduk yang dicacah dapat digolongkan menjadi migran dan bukan migran. Perbedaan antara SP2000 dengan sensus/survei kependudukan lainnya adalah mengenai migrasi yang dibedakan antara migran seumur hidup (*life time migrant*), migran risen (*recent migrant*) dan migran total (*total migrant*), pada SP2000 tidak dapat mengidentifikasi migran total karena informasi mengenai tempat tinggal sebelumnya tidak dikumpulkan. Migran seumur hidup (*life time migrant*) mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Dalam konsep

ini migrasi diperoleh dari keterangan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang, jika kedua keterangan ini berbeda, maka termasuk migrasi seumur hidup. Migran Risen (*Recent Migrant*) adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir ini (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen. Migran Total (*Total Migrant*) adalah mereka yang pindah dari tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahannya. Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di tempat tinggal sekarang dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran total. Untuk keterbandingan data dalam publikasi ini analisa migrasi yang akan dibahas adalah migrasi antar provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilakukannya penyusunan publikasi tren/pola migrasi dari berbagai sensus dan survei kependudukan adalah untuk mengetahui dan membandingkan dengan masa lampau data migrasi/perpindahan penduduk, yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program di bidang kependudukan.

c. Metodologi

Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah data hasil sensus/survei kependudukan (SP 1971, SP 1980, SUPAS 1985, SP 1990, SUPAS 1995, SP 2000, dan SUPAS 2005). Pertanyaan-pertanyaan mengenai migrasi ditanyakan kepada mereka yang bertempat tinggal tetap. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya; mereka dicacah di tempat tugasnya. Sebaliknya kalau ada seseorang atau keluarga menempati suatu bangunan belum mencapai enam bulan tetapi bermaksud menetap disana, mereka dicacah di tempat itu. Dalam sensus/survei kependudukan biasanya ada 3 pertanyaan mengenai migrasi yaitu: (1) tempat lahir adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal ibu responden pada saat melahirkan responden, (2) tempat tinggal terakhir adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum responden tinggal di provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang, (3) tempat tinggal 5 tahun yang lalu adalah provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal responden 5 tahun yang lalu atau 5 tahun sebelum sensus/survei.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah Publikasi Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei Kependudukan.

11) Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2010

a. Abstraksi

Mobilitas penduduk merupakan bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Proses pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk. Sebaliknya tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan. Menurut sifatnya, mobilitas/perpindahan penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2: Pertama, mobilitas/perpindahan penduduk yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela. Dalam hal ini, penduduk yang akan berpindah (migran) telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan didapat sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk pindah. Perpindahan penduduk yang bersifat sukarela didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kedua, mobilitas/perpindahan penduduk yang bersifat paksaan (terdesak). Contoh mobilitas penduduk yang bersifat paksaan adalah mereka yang berpindah akibat kerusuhan politik, gangguan keamanan atau bencana alam. Mereka berpindah ke daerah baru dalam kategori sebagai pengungsi. Sebagian besar migran melakukan perpindahan didasarkan pada motif ekonomi. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupun keluarganya yaitu tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan ekonomi memang akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk khususnya mobilitas tenaga kerja. Perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Untuk mencegah gejala migrasi penduduk menuju ke satu tempat saja, maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pemindahan penduduk yang lebih terarah (transmigrasi). Program transmigrasi pada awalnya merupakan upaya langsung mengarahkan mobilitas dan distribusi penduduk. Namun dalam perkembangannya, program transmigrasi saat ini sudah mulai dikaitkan dengan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah. Publikasi ini merupakan perangkat data dan sistem pemantauan yang mampu berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan mobilitas penduduk dan sekaligus bagi pengembangan pembangunan daerah dan wilayah setempat.

b. Tujuan dan Sasaran

(1) Menyediakan data migrasi internal seperti data transmigrasi;

(2) Menyediakan data migrasi internasional seperti data imigran, emigran, TKA (Tenaga Kerja Asing) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia); dan

(3) Menyediakan data pengungsi.

c. Metodologi

Data yang diperlukan dalam penyusunan publikasi ini merupakan data sekunder dari instansi-instansi terkait. Data transmigrasi, TKA dan TKI didapat dari Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi (Depnakertrans), Kanwil Depnakertrans, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kanwil Depdagri. Data imigran dan emigran didapat dari Ditjen Imigrasi dan Depdagri. Sedangkan data pengungsi didapat Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kanwil Depdagri.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk & Tenaga Kerja 2010.

12) Pilot Pendataan Podes 2010

a. Abstraksi

Data Potensi Desa (Podes) yang akurat, *up to date*, dan relevan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Data Podes merupakan suatu data yang sangat kaya menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat desa. Data ini akan sangat bermanfaat sebagai data *input* bagi perumusan kebijakan dan dalam membuat skala prioritas. Podes merupakan gambaran potensi yang dimiliki suatu wilayah pemerintahan yang paling rendah. Selain itu seberapa jauh hasil pembangunan dapat dilihat dari fasilitas dan sarana yang terekam dalam data Podes. Guna mengoptimalkan mutu data yang akan dikumpulkan diperlukan inventarisasi dan penetapan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Mulai tahun 2008, variabel Podes yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kor dan modul. Kelompok variabel kor akan selalu dikumpulkan pada setiap pendataan Podes. Sedangkan variabel-variabel modul yang dikumpulkan terkait dengan kebutuhan sensus yang akan diselenggarakan kemudian. Untuk tahun 2011, modul akan berisi variabel-variabel terkait kebutuhan penyelenggaraan sensus pertanian. Terobosan lainnya adalah data Podes 2008 dikumpulkan tidak hanya pada level desa namun di level kecamatan dan kabupaten/kota. Pertanyaan yang tidak relevan di level desa, karena lebih tepat ditanyakan pada level kecamatan atau kabupaten/kota tidak akan ditanyakan di level desa. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data Podes. Namun demikian pada kenyataannya masih dibutuhkan penyempurnaan pengumpulan data di level

kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu diperlukan perbaikan metodologi secara umum untuk meningkatkan akurasi data Podes Desa. Untuk maksud tersebut dibutuhkan pilot pendataan yang dimaksudkan sebagai studi mendalam sehingga kelemahan yang ada dapat diperbaiki.

b. Tujuan dan Sasaran

Pilot Pendataan Podes 2010 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- (1) Mengkaji feasibilitas pertanyaan-pertanyaan pada modul terkait dengan persiapan sensus pertanian;
- (2) Mengkaji feasibilitas pertanyaan-pertanyaan dengan realitas ketersediaan informasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- (3) Mengkaji relevansi pertanyaan dengan data yang tersedia di desa/kelurahan/nagari; dan
- (4) Mengkaji pertanyaan-pertanyaan pada Podes desa guna penyederhanaan.

c. Metodologi

Guna mencapai tujuan dan sasaran Pilot Podes 2011, akan dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada:

- (1) Nara sumber yang tepat di level desa guna mendapatkan data yang akurat;
- (2) Nara sumber pada instansi di level kecamatan Puskesmas seperti Puskesmas, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kecamatan, Dinas Industri dan lainnya; dan
- (3) Nara sumber sekaligus pengguna data di daerah seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Bappeda, dan dinas-dinas terkait variabel yang dikumpulkan, serta Pemerintahan Desa/Kelurahan itu sendiri.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Instrumen Pilot Pendataan Podes 2010 yang meliputi:
 - Kuesioner Desa-KOR;
 - Kuesioner Desa-Modul;
 - Kuesioner Kecamatan; dan
 - Kuesioner Kab/Kota.
- (2) Laporan hasil Pilot Pendataan Podes 2010.

13) Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2010

a. Abstraksi

Pembangunan kesehatan di Indonesia masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya pembangunan kesehatan ibu dan anak menjadi sangat penting artinya karena kondisi kesehatan ibu, terutama yang sedang hamil akan sangat

mempengaruhi kesehatan bayi yang sedang dikandungnya. Namun perlu disadari bahwa masalah kesehatan sangat dipengaruhi oleh aspek demografi, keadaan ekonomi dan aspek sosial budaya dari suatu masyarakat. Publikasi Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2010 ini merupakan lanjutan publikasi sejenis yang pernah diterbitkan pada tahun anggaran 2002, 2006, dan 2008. Publikasi ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai kesehatan ibu dan anak. Dengan semakin rinci dan akuratnya informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang sangat berkompeten dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Oleh karena itu, di dalam publikasi ini akan disajikan beberapa indikator yang dapat memberi gambaran umum kesehatan ibu dan anak.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama dari dibuatnya analisis tentang profil kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk memberikan gambaran secara rinci tentang kesehatan penduduk yang dikaitkan dengan kondisi perumahan, pendidikan, pengeluaran dan jenis penyakit serta penyebab memburuknya maupun membaiknya kesehatan penduduk. Data rinci serta analisisnya sangat diperlukan untuk mengukur sampai seberapa jauh dampak pembangunan terhadap kesehatan.

c. Metodologi

Sumber data utama publikasi ini adalah hasil Susenas, sehingga metodologi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sepenuhnya mengikuti metodologi Susenas. Sementara itu, data yang bersumber dari instansi lain berupa pencatatan laporan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi "Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2010".

**Tabel 17. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI UPAH DAN SURVEI STRUKTUR UPAH
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Survei Upah		Survei Struktur Upah	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	172	172	43	43
2	Sumatera Utara	944	944	236	236
3	Sumatera Barat	312	312	78	78
4	Riau	92	92	23	23
5	Jambi	172	172	43	43
6	Sumatera Selatan	244	244	61	61
7	Bengkulu	56	56	14	14
8	Lampung	244	244	61	61
9	Kep. Bangka Belitung	104	104	26	26
10	Kepulauan Riau	160	160	40	40
11	DKI Jakarta	1 508	1 508	377	377
12	Jawa Barat	2 132	2 132	533	533
13	Jawa Tengah	1 860	1 860	465	465
14	D.I. Yogyakarta	240	240	60	60
15	Jawa Timur	2 528	2 528	632	632
16	Banten	572	572	143	143
17	Bali	780	780	195	195
18	Nusa Tenggara Barat	184	184	46	46
19	Nusa Tenggara Timur	172	172	43	43
20	Kalimantan Barat	280	280	70	70
21	Kalimantan Tengah	172	172	43	43
22	Kalimantan Selatan	204	204	51	51
23	Kalimantan Timur	468	468	117	117
24	Sulawesi Utara	140	140	35	35
25	Sulawesi Tengah	96	96	24	24
26	Sulawesi Selatan	404	404	101	101
27	Sulawesi Tenggara	160	160	40	40
28	Gorontalo	16	16	4	4
29	Sulawesi Barat	24	24	6	6
30	Maluku	84	84	21	21
31	Maluku Utara	64	64	16	16
32	Papua Barat	32	32	8	8
33	Papua	80	80	20	20
Jumlah		14 700	14 700	3 675	3 675

**Tabel 18. PERBANDINGAN JUMLAH BLOK SENSUS DAN RUMAH TANGGA
SAKERNAS ESTIMASI I & SAKERNAS ESTIMASI II
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Sakernas Estimasi I 2009 (Propinsi)				Sakernas Estimasi II 2009 (Kab/Kota)			
		Blok Sensus		Rumah Tangga		Blok Sensus		Rumah Tangga	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NAD	128	128	2 048	2 048	756	756	12 096	12 096
2	Sumatera Utara	188	188	3 008	3 008	1 102	1 192	19 072	21 920
3	Sumatera Barat	112	112	1 792	1 792	706	706	11 296	11 296
4	Riau	104	104	1 664	1 664	446	446	7 136	7 744
5	Jambi	72	72	1 152	1 152	390	390	6 240	6 720
6	Sumatera Selatan	116	116	1 856	1 856	576	576	9 216	9 216
7	Bengkulu	68	68	1 088	1 088	356	356	5 696	6 272
8	Lampung	140	140	2 240	2 240	451	504	8 064	9 504
9	Kep. Bangka Belitung	52	52	832	832	238	238	3 808	3 808
10	Kepulauan Riau	52	52	832	832	236	236	3 776	4 256
11	DKI Jakarta	192	192	3 072	3 072	430	430	6 880	6 880
12	Jawa Barat	452	452	7 232	7 232	1 352	1 352	21 632	21 632
13	Jawa Tengah	476	476	7 616	7 616	1 622	1 622	25 952	25 952
14	D.I. Yogyakarta	144	144	2 304	2 304	218	218	3 488	3 488
15	Jawa Timur	556	556	8 896	8 896	1 904	1 904	30 464	30 464
16	Banten	124	124	1 984	1 984	314	366	5 856	6 848
17	Bali	120	120	1 920	1 920	368	368	5 888	5 888
18	Nusa Tenggara Barat	136	136	2 176	2 176	370	370	5 920	6 400
19	Nusa Tenggara Timur	116	116	1 856	1 856	702	740	11 840	12 320
20	Kalimantan Barat	120	126	1 920	2 016	494	534	8 544	8 544
21	Kalimantan Tengah	72	72	1 152	1 152	548	548	8 768	8 768
22	Kalimantan Selatan	115	115	1 840	1 840	510	510	8 160	8 160
23	Kalimantan Timur	72	72	1 152	1 152	485	507	8 224	8 112
24	Sulawesi Utara	76	76	1 216	1 216	486	486	7 776	8 736
25	Sulawesi Tengah	76	76	1 216	1 216	404	404	6 464	6 944
26	Sulawesi Selatan	132	132	2 112	2 112	938	938	15 008	15 520
27	Sulawesi Tenggara	72	72	1 152	1 152	494	494	7 904	7 904
28	Gorontalo	52	52	832	832	250	250	4 000	4 000
29	Sulawesi Barat	40	40	640	640	204	204	3 264	3 264
30	Maluku	52	52	832	832	224	248	3 968	4 704
31	Maluku Utara	32	32	512	512	218	218	3 488	3 968
32	Papua Barat	32	32	512	512	154	154	2 464	2 880
33	Papua	72	72	1 152	1 152	359	435	7 200	7 568
Jumlah		4 363	4 369	69 808	69 904	18 305	18 700	299 552	311 776

**Tabel 19. PERBANDINGAN JUMLAH BLOK SENSUS DAN RUMAH TANGGA
SUSENAS PANEL & SUSENAS MODUL
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Susenas Panel (Propinsi)				Susenas Modul (Kab/kota)			
		Blok Sensus		Rumah Tangga		Blok Sensus		Rumah Tangga	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NAD	126	126	2 016	2 016	740	740	11 840	11 840
2	Sumatera Utara	184	184	2 944	2 944	1 172	1 348	18 752	21 568
3	Sumatera Barat	112	112	1 792	1 792	692	692	11 072	11 072
4	Riau	104	104	1 664	1 664	434	472	6 944	7 552
5	Jambi	72	72	1 152	1 152	380	410	6 080	6 560
6	Sumatera Selatan	114	114	1 824	1 824	566	566	9 056	9 056
7	Bengkulu	64	64	1 024	1 024	342	380	5 472	6 080
8	Lampung	136	136	2 176	2 176	488	578	7 808	9 248
9	Kep. Bangka Belitung	50	50	800	800	230	230	3 680	3 680
10	Kepulauan Riau	50	50	800	800	230	260	3 680	4 160
11	DKI Jakarta	192	192	3 072	3 072	427	427	6 832	6 832
12	Jawa Barat	450	450	7 200	7 200	1 332	1 332	21 312	21 312
13	Jawa Tengah	472	472	7 552	7 552	1 578	1 578	25 248	25 248
14	D.I. Yogyakarta	144	144	2 304	2 304	216	216	3 456	3 456
15	Jawa Timur	552	552	8 832	8 832	1 872	1 872	29 952	29 952
16	Banten	120	120	1 920	1 920	356	418	5 696	6 688
17	Bali	120	120	1 920	1 920	358	358	5 728	5 728
18	Nusa Tenggara Barat	136	136	2 176	2 176	360	390	5 760	6 240
19	Nusa Tenggara Timur	112	112	1 792	1 792	724	754	11 584	12 064
20	Kalimantan Barat	120	120	1 920	1 920	522	522	8 352	8 352
21	Kalimantan Tengah	72	72	1 152	1 152	534	534	8 544	8 544
22	Kalimantan Selatan	113	113	1 808	1 808	494	494	7 904	7 904
23	Kalimantan Timur	72	72	1 152	1 152	502	496	8 032	7 936
24	Sulawesi Utara	72	72	1 152	1 152	470	530	7 520	8 480
25	Sulawesi Tengah	72	72	1 152	1 152	388	418	6 208	6 688
26	Sulawesi Selatan	130	130	2 080	2 080	918	948	14 688	15 168
27	Sulawesi Tenggara	72	72	1 152	1 152	480	480	7 680	7 680
28	Gorontalo	50	50	800	800	240	240	3 840	3 840
29	Sulawesi Barat	36	36	576	576	196	196	3 136	3 136
30	Maluku	50	50	800	800	238	284	3 808	4 544
31	Maluku Utara	32	32	512	512	210	240	3 360	3 840
32	Papua Barat	30	30	480	480	146	170	2 336	2 720
33	Papua	70	70	1 120	1 120	414	450	6 624	7 200
Jumlah		4 301	4 301	68 816	68 816	18 249	19 023	291 984	304 368

9. SURVEI PERTAMBANGAN

1) Survei Pertambangan dan Energi

a. Abstraksi

Survei Pertambangan dan Energi dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berkala sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Karakteristik yang dikumpulkan untuk survei-survei di atas meliputi antara lain data mengenai jenis dan nilai *output* yang dihasilkan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan barang modal. Periode pelaksanaan survei untuk masing-masing sektor adalah setahun sekali dan triwulanan. Metode pengumpulan data untuk survei pertambangan dan energi tahunan adalah cacah lengkap. Sedangkan survei pertambangan dan energi triwulanan dan survei perusahaan penggalian bahan galian industri dan konstruksi dilakukan secara sampel. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari perusahaan adalah dengan wawancara, kecuali untuk perusahaan yang langsung ditangani BPS Pusat (perusahaan pertambangan besar di DKI Jakarta, PLN dan PGN) dilakukan dengan metode *mailing system* dan petugas khusus dari BPS. Sedangkan survei pertambangan dan energi triwulanan akan dilakukan melalui telepon/*fax*.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan dari survei-survei ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) struktural yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor-sektor pertambangan & penggalian, listrik, gas, dan air bersih secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.

c. Metodologi

Survei Pertambangan Migas dan Pertambangan Non Migas dilaksanakan secara *complete enumeration* atau cacah lengkap untuk perusahaan besar sedangkan perusahaan kecil hanya sampel saja. Survei sektor energi yang meliputi listrik PLN, gas PGN dan Air Bersih juga dilaksanakan secara cacah lengkap.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi yang dihasilkan dari survei ini ada 2 macam yaitu:

- (1) Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
- (2) Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi.

2) Survei Konstruksi

a. Abstraksi

Survei Konstruksi dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berkala sektor konstruksi berdasarkan survei konstruksi. Karakteristik yang dikumpulkan untuk survei tersebut

meliputi data mengenai jenis dan nilai *output* yang dihasilkan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan barang modal. Periode pelaksanaan survei untuk sektor konstruksi adalah setahun sekali dan triwulanan. Metode pengumpulan data untuk survei konstruksi adalah cacah lengkap untuk kualifikasi besar dan menengah, sedangkan untuk kualifikasi kecil dilakukan secara sampel. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dari perusahaan adalah dengan wawancara.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan dari survei-survei ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya. Sasaran yang ingin dicapai dari survei-survei ini, antara lain:

- (1) Mendapatkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di Indonesia serta peranannya dalam pembangunan;
- (2) Mendapatkan data mengenai penyerapan tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan dan struktur biaya lainnya;
- (3) Jumlah dan nilai produksi serta jenis *output* yang dihasilkan; dan
- (4) Sebaran nilai produksi/*output* menurut lokasi operasi perusahaan.

c. Metodologi

Untuk memperoleh *frame* yang *up to date* diperlukan pemutakhiran data yang didasarkan pada hasil *updating* periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2010 dilakukan *updating* pada perusahaan dengan kualifikasi usaha besar (*Grade 7, Grade 6*), kualifikasi usaha menengah (*Grade 5*) dan kualifikasi usaha kecil (*Grade 4, Grade 3, Grade 2*) dan data survei konstruksi tahunan hanya difokuskan sampai *Grade 2*. Survei Konstruksi Tahunan dilaksanakan dengan melalui pengambilan sampel yang dilakukan oleh BPS Pusat. Besarnya sampel perusahaan konstruksi adalah sebanyak 16.000 perusahaan dari sekitar 160.000 perusahaan yang aktif. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi *cut-off point* dan *stratified PPS sampling*. Pencacahan dilakukan secara wawancara langsung. Survei Triwulanan Konstruksi dilaksanakan secara sampel survei dengan jumlah sampel sebanyak 4.000 perusahaan dengan metode kombinasi *cut-off point* dan *stratified PPS sampling*, dan metode panel survei, yaitu perusahaan yang tersampel akan terus diobservasi selama masih aktif. Pencacahan dilakukan dengan cara wawancara langsung. Untuk survei Tahunan Perusahaan Konstruksi, estimasi atas populasi untuk setiap karakter menggunakan

kualifikasi usaha sebagai dasar faktor pengali. Kualifikasi usaha adalah penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. Secara berurutan kualifikasi usaha adalah berupa *Grade 7, Grade 6* usaha besar, *Grade 5* untuk usaha menengah dan *Grade 4, Grade 3, Grade 2, Grade 1* untuk usaha kecil. Untuk penyajian hasil survei Konstruksi Triwulanan ini menggunakan indeks berantai triwulanan sebagai gambaran dari kegiatan perusahaan konstruksi triwulanan (indikator triwulanan). Selain itu juga disajikan indeks persepsi bisnis sektor konstruksi yang menggunakan *diffusion index*.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi yang dihasilkan dari survei ini ada 4 macam yaitu :

- (1) Statistik Konstruksi;
- (2) Indikator Konstruksi; dan
- (3) Laporan *updating* direktori.

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 20. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI PERTAMBANGAN & ENERGI DAN SURVEI KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Survei Pertambangan & Energi						Survei Konstruksi			
		Survei Pertambangan Besar		Survei Energi		Survei Penggalian		Triwulanan		Tahunan	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NAD	16	16	31	13	70	14	40	200	271	788
2	Sumatera Utara	16	17	42	40	124	124	122	110	611	439
3	Sumatera Barat	11	12	20	20	40	40	89	72	444	279
4	Riau	33	33	18	17	80	80	67	167	335	660
5	Jambi	8	8	13	12	24	24	58	58	288	237
6	Sumatera Selatan	25	23	16	17	40	40	78	114	390	453
7	Bengkulu	13	13	7	7	40	40	30	22	116	89
8	Lampung	7	7	80	80	160	80	120	51	599	202
9	Kep. Bangka Belitung	165	93	10	11	100	49	10	21	55	83
10	Kepulauan Riau	21	20	21	20	23	2	20	50	47	201
11	DKI Jakarta	4	4	12	11	60	40	160	399	805	1 684
12	Jawa Barat	24	14	30	26	420	169	195	159	975	632
13	Jawa Tengah	20	20	55	55	410	410	229	180	762	705
14	D.I. Yogyakarta	3	3	10	10	100	100	37	26	186	103
15	Jawa Timur	18	18	45	45	205	204	270	203	1 003	796
16	Banten	2	2	12	12	150	150	41	61	203	247
17	Bali	4	3	30	30	120	16	54	47	270	183
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	10	6	24	38	36	39	186	153
19	Nusa Tenggara Timur	17	17	21	20	70	70	55	80	276	310
20	Kalimantan Barat	24	10	35	45	60	60	46	108	457	425
21	Kalimantan Tengah	24	19	20	15	70	70	30	87	100	344
22	Kalimantan Selatan	21	21	20	12	50	50	139	78	693	310
23	Kalimantan Timur	41	41	17	16	80	79	48	172	242	674
24	Sulawesi Utara	12	12	18	18	-	-	20	72	93	280
25	Sulawesi Tengah	16	16	16	16	40	40	69	59	230	233
26	Sulawesi Selatan	15	7	25	23	209	122	130	15	741	97
27	Sulawesi Tenggara	11	11	10	10	40	40	31	51	154	203
28	Gorontalo	2	4	7	14	-	-	34	30	171	115
29	Sulawesi Barat	2	2	10	5	10	10	24	12	118	50
30	Maluku	17	13	15	9	-	-	36	61	181	243
31	Maluku Utara	10	9	15	6	-	1	32	35	158	130
32	Papua Barat	26	26	17	4	4	4	27	44	135	176
33	Papua	26	26	30	30	5	5	68	117	339	476
Jumlah		664	547	738	675	2 828	2 171	2 445	3 000	11 634	12 000

10. SURVEI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

a. Abstraksi

Untuk dapat menilai kondisi lingkungan hidup dan potensi sumber daya alam secara benar, penyusunan kebijakan memerlukan data lingkungan hidup yang akurat dan andal. Sampai saat ini, Badan Pusat Statistik telah menghimpun data lingkungan dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Sejak tahun 1982, publikasi tersebut merupakan satu-satunya publikasi yang memuat berbagai data dan informasi dari berbagai sektor yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

Meningkatnya penggunaan sumber daya alam yang terus-menerus, serta adanya kecenderungan menurunnya kualitas (degradasi) lingkungan menjadikan pentingnya arti pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2002 BPS juga telah menyusun Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB) yang menggambarkan kondisi pembangunan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Indikator ini merupakan implementasi kesepakatan dunia yang digagasi oleh komisi khusus PBB yang menangani masalah pembangunan dan lingkungan yaitu *World Commission on Environmental and Development* (WCED) tahun 1987 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya lingkungan hidup. Seiring dengan adanya kesadaran untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP) perlu juga mendapat perhatian. Sejak tahun 2004, BPS juga telah menyusun Statistik SDLP untuk memenuhi kebutuhan informasi akan kelangsungan pembangunan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir yang sangat dibutuhkan. Mulai tahun 2010 BPS melakukan Studi Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH). Studi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku/aktivitas rumah tangga yang berdampak terhadap Lingkungan hidup khususnya pada perubahan iklim (pemanasan global). Perubahan iklim memberikan dampak serius pada kehidupan manusia dan rumah tangga. Data-data dan informasi rumah tangga sasaran yang akan dikumpulkan meliputi praktek dalam rumah tangga yang berkaitan dengan aspek penggunaan dan penghematan terhadap air dan energi serta pemilihan penggunaan alat transportasi. Hasil studi ini akan memberi gambaran kesiapan rumah tangga dalam adaptasi dan antisipasi dampak perubahan iklim.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Tersedianya informasi yang menggambarkan keadaan lingkungan dan usaha-usaha penanggulangan kerusakan terhadap alam secara berkesinambungan;
- (2) Dapat digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan dan potensi sumber daya alam, dan untuk analisis lebih mendalam;

- (3) Menyediakan informasi yang komprehensif, baik informasi mengenai tekanan-tekanan, dampak dan respon terhadap kegiatan sosial ekonomi pada lingkungan hidup;
- (4) Sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan; dan
- (5) Mengetahui aspek dan faktor-faktor yang berpengaruh pada perubahan iklim pada lingkup rumah tangga.

c. Metodologi

Penyusunan SLHI, IPB, dan SDLP dimulai dari konsultasi dengan ahli lingkungan pada pusat penelitian lingkungan hidup dan pusat penelitian sumber daya laut dan pesisir pada beberapa universitas. Masukan dari para ahli lingkungan akan digunakan sebagai bahan untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan publikasi. Disamping itu juga dilakukan studi literatur. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder di instansi/unit terkait dengan lingkungan di pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil literatur dan data/informasi yang didapatkan di pusat dan daerah akan dilakukan pengolahan data dan kompilasi untuk menyusun tabel yang diperlukan. Konsultasi dengan ahli lingkungan kembali dilakukan untuk penyempurnaan *draft* publikasi.

Penyusunan SPPLH 2010 dimulai dari studi literatur di perpustakaan di beberapa instansi yang terkait lingkungan hidup dan di universitas untuk melihat kajian yang dilakukan oleh lembaga penelitian lingkungan hidup dan pemerhati lingkungan hidup. Konsultasi dengan para ahli lingkungan hidup juga akan dilakukan untuk memperkaya studi ini. Selanjutnya pengumpulan data primer dilakukan melalui survei pada rumah tangga.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia;
- (2) Publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan;
- (3) Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan
- (4) Laporan Hasil Studi Perilaku Peduli Lingkungan Hidup.

11. SURVEI BIDANG SOSIAL EKONOMI

1) Penyusunan Neraca Regional

a. Abstraksi

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator ekonomi yang selama ini telah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, data PDRB secara periodik harus disusun dan selalu ditingkatkan kualitasnya, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

PDRB dapat dilihat dari sisi lapangan usaha, pengeluaran maupun pendapatan. Selama ini, PDRB menurut lapangan usaha sudah disusun di semua provinsi dan kabupaten/kota. Karena keterbatasan data pendukung, tenaga penyusun dan dana maka kualitasnya masih harus selalu ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan PDRB Triwulanan sangat dibutuhkan dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi daerah yang selama ini disusun oleh BPS Provinsi yang saat ini bekerja sama dengan Bank Indonesia provinsi setempat. Untuk menjaga independensi maka hal ini hendaknya secara keseluruhan dilakukan oleh BPS. Pada era otonomi daerah, peran BPS Kabupaten/Kota akan semakin dibutuhkan oleh pemerintah daerah, akademisi dan praktisi utamanya di dalam menyediakan data/informasi di wilayahnya. Oleh karena itu, BPS Kabupaten/Kota harus siap dengan segala kemampuan baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di daerah adalah melalui kaderisasi secara berkesinambungan. Selain kualitas PDRB dan SDM yang terus-menerus ditingkatkan, perlu juga dilakukan upaya untuk menyajikan data PDRB secara konsisten antara PDRB Kabupaten/Kota dengan PDRB Provinsi serta dengan PDB. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah merekonsiliasi data-data tersebut. Berbagai media dapat dimanfaatkan diantaranya lewat konsultasi yang bersifat nasional maupun regional. Kegiatan konsultasi serentak dan konsultasi regional ini dapat dimanfaatkan juga sebagai ajang konsolidasi dan penyempurnaan data.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi dari data yang digunakan untuk penyusunan PDRB menurut lapangan usaha baik tahunan maupun triwulanan;
- (2) Meningkatkan mutu data PDRB provinsi menurut lapangan usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor dalam kabupaten dan atau dalam provinsi, antar kabupaten/kota di tiap provinsi dan antar provinsi se-Indonesia dengan nasional;
- (3) Meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB dengan PDB;
- (4) Menyusun dan menyajikan PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha;
- (5) Menyajikan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Indonesia;
- (6) Membandingkan dan menganalisa Tabel I-O daerah dengan Tabel I-O nasional; dan
- (7) Selalu melakukan kaderisasi sehingga *output* di atas bisa diandalkan.

c. Metodologi

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produksi, yang mana PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha: 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri pengolahan, 4) Listrik, Gas dan Air Bersih, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayan pemerintah dan kemasyarakatan.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Publikasi PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2005-2009;
- (2) Publikasi PDRB menurut kabupaten/kota di Indonesia tahun 2005-2009; dan
- (3) Revisi buku pedoman PDRB.

2) Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK

a. Abstraksi

Penyusunan neraca nasional meliputi beberapa bidang, salah satunya adalah Produk Domestik Bruto menurut sektoral atau lapangan usaha. Angka PDB biasanya disajikan secara berkala setiap tahun. Namun demikian, karena perkembangan di berbagai bidang yang relatif cukup cepat, sehingga menuntut tersedianya informasi indikator makro ekonomi yang akurat dan tepat waktu maka dihitung juga PDB secara triwulan. Informasi ekonomi, seperti PDB triwulanan ini merupakan perangkat yang memainkan peranan cukup penting untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi. Angka-angka PDB triwulanan dimaksud disampaikan ke publik secara rutin dalam Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Triwulan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan PDB triwulanan adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat dan tersedia secara triwulanan, karena data yang dibutuhkan meliputi seluruh sektor, mulai dari Sektor Pertanian, Pertambangan, Industri sampai dengan Jasa-jasa. Data tersebut seyogyanya tersedia di *subject matter* secara lengkap, akurat, konsisten dan tepat waktu. Untuk itu, perlu dilakukan survei yang berkaitan dengan penyusunan indikator khusus secara triwulanan yang diharapkan dapat menunjang penyusunan PDB triwulanan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan indikator khusus PDB sektoral triwulanan adalah sebagai berikut:

- (1) Mengumpulkan indikator data bisnis yang akurat, konsisten dan tepat waktu secara triwulanan; dan
- (2) Mendapatkan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap triwulanan yang digunakan untuk *monitoring* maupun perencanaan makro ekonomi.

c. Metodologi

Untuk memperoleh data indikator makro yang digunakan dalam penghitungan PDB triwulanan maka dilakukan Survei Penyusunan Indikator Khusus yang dilaksanakan secara triwulanan di 10 provinsi. Penentuan wilayah survei berdasarkan *purposive sampling* atau *non probability sampling* dengan memperhatikan potensi komoditi di provinsi bersangkutan. Demikian pula penentuan responden dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan melihat potensi perusahaan/usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan ini adalah:

- (1) Publikasi PDB Triwulanan (tahun 2006 – 2009); dan
- (2) Berita Resmi Statistik Triwulan I tahun 2010 s.d Triwulan IV 2010.

3) Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan

a. Abstraksi

Produk dari penyusunan neraca nasional yang utama adalah Produk Domestik Bruto. Dari PDB dapat dilihat berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi. Selama ini, perubahan/pertumbuhan ekonomi dimaksud dihitung dengan tahun dasar yang tetap atau *fixed base year*. Penggunaan suatu tahun dasar yang tetap memerlukan suatu asumsi yang ketat terhadap keterbandingan struktur perekonomian dari waktu ke waktu. Hal ini tampaknya sulit dipertahankan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari perubahan tahun dasar tetap ke tahun dasar berjalan sebagai berikut :

- (1) Mendapatkan angka PDB yang lebih realistis dalam penghitungan laju pertumbuhannya;
- (2) Mengaplikasikan SNA 93 di dalam penyusunan angka PDB Indonesia; dan
- (3) Merupakan sebuah rangkaian dalam penyusunan *Supply and Use Table* (SUT) dimana nantinya akan diperoleh PDB dalam harga pokok (*Basic Price*).

Untuk memperoleh data dasar (primer) maka dilakukan Survei Khusus PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan dilaksanakan di 10 provinsi. Penentuan wilayah survei berdasarkan *puposive sampling* atau *non probability sampling* dengan memperhatikan potensi komoditi di provinsi bersangkutan. Demikian pula penentuan responden dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan melihat potensi perusahaan/usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian provinsi.

c. Metodologi

Untuk memperoleh data dasar maka dilakukan Survei Khusus PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan dilaksanakan di 10 provinsi. Penentuan wilayah survei berdasarkan *puposive sampling* atau *non probability sampling* dengan memperhatikan potensi komoditi di provinsi bersangkutan. Demikian pula penentuan responden dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan melihat potensi perusahaan/usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan ini adalah:

- (1) Pemutakhiran data PDB dengan sudah menerapkan tahun dasar berjalan sebagai tahun dasar baru, termasuk data pelengkap, indikator produksi, indikator harga, struktur *input* dan indikator non ekonomi;
- (2) Pemahaman konsep definisi dan metode penghitungan PDB tahun dasar berjalan dan inventarisasi data baik dari hasil survei yang dilakukan BPS maupun dari instansi di luar BPS yang dapat dijadikan bahan penghitungan PDB dengan tahun dasar berjalan; dan
- (3) Pengaplikasian SNA 93 yang terus dituntut secara internasional penggunaannya.

4) Persiapan Penyusunan *Updating Tabel Input-Output Indonesia 2010*

a. Abstraksi

Tabel *Input-Output* (I-O) Indonesia disusun dengan tujuan untuk menyajikan gambaran hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar sektor (satuan kegiatan) dalam perekonomian secara menyeluruh. Tabel I-O disajikan dalam bentuk matriks. Masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana *output* suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian *input* antara dan *input* primer oleh suatu sektor dalam proses produksi. Penyusunan Tabel I-O selain mampu menghasilkan alat yang efektif untuk analisis dan proyeksi perekonomian dalam suatu perencanaan pembangunan, dapat juga digunakan sebagai landasan untuk menilai dan mengetahui

berbagai kelemahan data statistik lainnya. Hasil dari penyusunan Tabel I-O selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam usaha penyempurnaan sistem perstatistikan nasional. Dengan menggunakan Tabel I-O, dapat dilihat bagaimana *output* dari suatu sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh *input* yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya. Tabel *Input-Output* merupakan sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh Tabel I-O yakni setiap sektor mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan sektor lainnya dalam perekonomian. Besarnya ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya *input* yang digunakan dalam proses produksinya. Dengan kata lain, sasaran pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai tanpa dukungan *input* yang memadai dari sektor lainnya. Tabel I-O Indonesia disusun setiap lima tahun sekali. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur ekonomi dan penggunaan teknologi oleh sektor-sektor ekonomi untuk proses produksi barang dan jasa, perubahannya cukup direkam berkala dengan tenggang waktu lima tahun. Tabel I-O 2010 ini nantinya merupakan tabel yang kesembilan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dengan didukung oleh lembaga/institusi lainnya. Tabel-I-O terdahulu yang telah dihasilkan adalah Tabel I-O Indonesia untuk tahun 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 dan 2005. Dalam rangka persiapan penyusunan Tabel I-O tahun 2010, maka tahap awal perlu diupayakan penyusunan klasifikasi sektor ekonomi. Tahap ini dianggap penting karena penentuan klasifikasi merupakan basis dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi perhatian utama dalam Tabel I-O. Setelah klasifikasi tersusun, dilakukan sosialisasi baik untuk lingkungan internal (*subject matter* terkait) maupun eksternal (departemen terkait). Kegiatan yang juga perlu dipersiapkan yaitu melakukan pembahasan kerangka dasar Tabel I-O 2010 yang akan digunakan. Kegiatan lainnya yang diperlukan pada tahap persiapan penyusunan adalah survei khusus untuk mendukung kegiatan penyusunan Tabel I-O 2010. Survei ini ditujukan untuk melakukan penelitian pengecekan koefisien *input* data-data pokok. Diharapkan dengan adanya survei khusus ini koefisien dari data pokok telah teruji validasi kebenarannya.

b. Tujuan dan Sasaran

Tabel Input-Output Indonesia disusun dengan tujuan untuk menyajikan gambaran hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar sektor (satuan kegiatan) dalam perekonomian secara menyeluruh. Tabel I-O disajikan dalam bentuk matriks. Masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana *output* suatu sektor dialokasikan untuk

memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian *input* antara dan *input* primer oleh suatu sektor dalam proses produksi. Penyusunan Tabel I-O selain mampu menghasilkan alat yang efektif untuk analisis dan proyeksi perekonomian dalam suatu perencanaan pembangunan, dapat juga digunakan sebagai landasan untuk menilai dan mengetahui berbagai kelemahan data statistik lainnya. Hasil dari penyusunan Tabel I-O selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam usaha penyempurnaan sistem perstatistikan nasional. Dengan menggunakan Tabel I-O, dapat dilihat bagaimana *output* dari suatu sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh *input* yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya. Tabel Input-Output merupakan sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh Tabel I-O yakni setiap sektor mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan sektor lainnya dalam perekonomian. Besarnya ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksinya. Dengan kata lain, sasaran pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai tanpa dukungan *input* yang memadai dari sektor lainnya. Tabel I-O Indonesia disusun setiap lima tahun sekali. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur ekonomi dan penggunaan teknologi oleh sektor-sektor ekonomi untuk proses produksi barang dan jasa, perubahannya cukup direkam berkala dengan tenggang waktu lima tahun. Tabel I-O 2010 ini nantinya merupakan tabel yang kesembilan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dengan didukung oleh lembaga/institusi lainnya. Tabel-I-O terdahulu yang telah dihasilkan adalah Tabel I-O Indonesia untuk tahun 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 dan 2005.

Dalam rangka persiapan penyusunan Tabel I-O tahun 2010, maka tahap awal perlu diupayakan penyusunan klasifikasi sektor ekonomi. Tahap ini dianggap penting karena penentuan klasifikasi merupakan basis dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi perhatian utama dalam Tabel I-O. Setelah klasifikasi tersusun, dilakukan sosialisasi baik untuk lingkungan internal (*subject matter* terkait) maupun eksternal (departemen terkait). Kegiatan yang juga perlu dipersiapkan yaitu melakukan pembahasan kerangka dasar Tabel I-O 2010 yang akan digunakan. Kegiatan lainnya yang diperlukan pada tahap persiapan penyusunan adalah survei khusus untuk mendukung kegiatan penyusunan Tabel I-O 2010. Survei ini ditujukan untuk melakukan penelitian pengecekan koefisien *input* data-data pokok. Diharapkan dengan adanya survei khusus ini koefisien dari data pokok telah teruji validasi kebenarannya.

c. Metodologi

Survei khusus koefisien *input* tahun 2010 dititikberatkan kepada beberapa data komoditi unggulan yang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu survei ini juga akan menitikberatkan pada beberapa sektor yang memperoleh perlakuan khusus seperti sektor pertambangan yang memperoleh perlakuan khusus pada komponen subsidi impor. Metode survei yang akan diterapkan dalam survei khusus koefisien *input* 2010 adalah dengan mendatangi unit usaha/perusahaan sesuai dari beberapa sektor unggulan yang telah ditetapkan. Data yang akan dikumpulkan bukan hanya bersifat kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan melihat kantong-kantong usaha hasil SE 06 pada provinsi terpilih. Dalam teknik ini, unit sampel yang ada dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Hal ini dilakukan karena tujuan dalam survei ini bukan untuk memperkirakan nilai populasi, tetapi untuk memperoleh informasi mengenai koefisien *input* pada suatu keadaan satu waktu/titik.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran dari penyusunan klasifikasi Tabel IO 2010 meliputi :

- (1) Tersusunnya klasifikasi Tabel IO tahun 2010;
- (2) Terpetakannya seluruh KBLI terbaru kedalam klasifikasi Tabel I-O 2010;
- (3) Tersosialisasinya rencana penyusunan dan klasifikasi Tabel I-O 2010 sehingga berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dapat mempersiapkan data-data pokoknya yang sesuai dengan klasifikasi yang telah disepakati. Data-data tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada saat penyusunan Tabel I-O 2010;
- (4) Terbentuknya kerangka pikir aplikasi dan metodologi penyusunan *Supply and Use Table* ke dalam kerangka Tabel I-O 2010;
- (5) Terbentuknya penyusunan *benchmarking* Tabel I-O;
- (6) Tersedianya buku teknik penyusunan Tabel I-O dan kerangka pikir analisis Tabel I-O yang telah dilakukan penyempurnaan. Kedua buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau pegangan bagi seluruh Tim Penyusun Tabel I-O 2010; dan
- (7) Tersedianya koefisien *input* beberapa sektor unggulan yang dapat digunakan dalam menyusun Tabel I-O 2010.

5) Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)

a. Abstraksi

Kegiatan Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa dalam rangka menyusun Neraca Perdagangan dan Jasa merupakan bagian integral dari ketersediaan sistem statistik neraca nasional, yang perlu disajikan secara reguler. Informasi yang

disajikan dalam Neraca Perdagangan dan Jasa ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penyusun kebijakan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Sebagai bagian yang terintegrasi, maka penyusunannya tidak lepas dari *System of National Account (SNA) 1993* yang dikeluarkan oleh PBB sebagai standar penghitungan untuk seluruh dunia. Oleh karena itu, Subdit Neraca Jasa pada tahun anggaran 2010 melakukan kegiatan dalam rangka implementasi SNA 1993 yaitu: Pertama, penyempurnaan penghitungan dan rasio PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta. Kedua, penyusunan matriks dan Rekonsiliasi Marjin Perdagangan dan Pengangkutan/ *Trade and Transport Margin (TTM)* dan Ketiga, evaluasi dan pembahasan interdepartemen (Bank Indonesia, Departemen Perhubungan, dan sebagainya) untuk menyamakan konsep dan definisi penyajian data sekunder oleh instansi lain. Pada tahun 2010, Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa akan mencakup beberapa kegiatan yang datanya diperlukan untuk segera diperbaiki. Subdit Neraca Perdagangan dan Jasa adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyempurnaan penghitungan PDB untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta serta bertanggung jawab dalam penyusunan matriks Marjin Perdagangan dan Pengangkutan/ *Trade and Transport Margin*. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan tepat waktu, karena kegiatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan dan penghitungan PDB Indonesia baik triwulanan maupun tahunan.

b. Tujuan dan Sasaran

Adanya penggarisan baru dalam Sistem Neraca Nasional yang dituangkan dalam buku panduan SNA 1993 terbitan PBB maka penyusunan Neraca Perdagangan dan Jasa pada tahun anggaran ini akan lebih dikembangkan dan dikonsentrasikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Hal lain yang menjadi dasar adalah dalam rangka penguatan statistik data dasar untuk penghitungan PDB tahunan dengan tahun dasar 2000 khususnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab menyusun neraca perdagangan dan jasa, maka pada penyusunan dan penghitungan PDB triwulanan dan tahunan yang dilakukan Subdit Neraca Jasa pada tahun anggaran 2010 adalah bertanggung jawab menyiapkan data dasar dan penyempurnaan rasio nilai tambah sektor perdagangan,

hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta. Tujuan akhir yang diharapkan dari seluruh kegiatan Studi Kebijakan Sektor Perdagangan dan Jasa melalui Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa tahun 2010 ini antara lain, meliputi:

- (1) Perbaikan dan penyempurnaan cakupan dan metodologi perhitungan PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta;
- (2) Pemutakhiran data rasio nilai tambah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta untuk menyusun PDB Indonesia;
- (3) Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi;
- (4) Evaluasi penghitungan PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta; serta
- (5) Evaluasi dan pembahasan penyusunan PDB dengan departemen/instansi terkait (interdepartemen seperti Bank Indonesia, Departemen Perhubungan, dan sebagainya) dalam rangka memperkuat data penunjang (sekunder) yang dikeluarkan oleh instansi/departemen yang bersangkutan.

Di sisi lain, statistik data dasar atau informasi mengenai kegiatan jasa-jasa secara tahunan pada umumnya sangat terbatas, bahkan beberapa diantaranya hampir tidak tersedia sama sekali. Dengan kondisi tersebut mengharuskan dilakukannya pengumpulan data, baik yang berupa data primer ataupun data sekunder untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

c. Metodologi

Pengumpulan data dalam SKSPJ 2010 ini dititikberatkan pada survei kegiatan perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa swasta (seperti hotel, pengangkutan darat dan jasa swasta lainnya). Metode survei yang akan diterapkan dalam SKSPJ 2010 adalah dengan mendatangi unit usaha/perusahaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Data yang akan dikumpulkan bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan melihat kantong-kantong usaha pada provinsi terpilih. Dalam teknik ini, unit sampel yang ada dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Hal ini dilakukan karena tujuan dalam survei ini bukan untuk memperkirakan nilai populasi, tetapi untuk memperoleh informasi mengenai keadaan satu waktu/titik seperti misalnya rasio-rasio dari karakteristik yang dibutuhkan, rasio nilai tambah dan rasio pelengkap (*mark-up*).

d. Hasil dan Keluaran

Dalam kurun waktu tersebut hasil akhir yang diharapkan akan dicapai:

- (1) Pemutakhiran statistik data dasar PDB tahunan, seperti data pelengkap, indikator produksi, indikator harga dan struktur input sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta;
- (2) Tersusunnya indeks produksi sektor sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta;
- (3) Tersusunnya nilai tambah bagi komponen PDB tahunan sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta;
- (4) Tersusunnya neraca produksi dan strukturnya, khususnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta;
- (5) Tersusunnya nilai total *supply* margin perdagangan dan pengangkutan;
- (6) Kompilasi informasi kualitatif dari berbagai media masa dan media elektronik; dan
- (7) Tersusunnya PDB tahunan sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa swasta yang handal.

6) Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa-jasa (SPPJ)

a. Abstraksi

Salah satu indikator makro ekonomi yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha (*industry*) adalah Produk Domestik Bruto. PDB disusun menurut periode tertentu, misalnya tahunan atau triwulanan. Selain PDB, BPS juga menyusun indikator makro ekonomi lainnya yang lebih komprehensif yaitu Tabel *Input-Output*. Tabel I-O yang disusun bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar kegiatan ekonomi (*inter-industry relationship*) yang terjadi pada suatu periode tertentu di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, sangat dibutuhkan tersedianya data mengenai penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang dan jasa. Di samping itu diperlukan pula tersedianya data struktur *input*/biaya, komposisi *output*, jumlah tenaga kerja, serta informasi pendukung lainnya menjadi perangkat penting dalam menyusun Tabel I-O ini. Untuk memperoleh indikator-indikator penting guna penyempurnaan data dasar yang lebih rinci yang akan digunakan untuk penyusunan SUT (*Supply and Use Table*) maka dilakukanlah survei yaitu Survei Khusus *Supply and Use Table* Sektor Jasa (SK-SUTJ). SK-SUTJ ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi berupa *output*,

susunan *input*; jumlah tenaga kerja, distribusi produk, dan beberapa variabel penting lainnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa swasta.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam survei ini adalah untuk memperoleh data yang rinci yang diperlukan dalam penyusunan SUT atau biasa disebut Matriks Penyediaan dan Penggunaan. Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah:

- (1) Memperoleh struktur *input*/biaya;
- (2) Mengetahui alokasi atau distribusi Jasa atau produk yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi;
- (3) Mendapatkan informasi mengenai struktur tenaga kerja;
- (4) Memperoleh indikator produksi atau harga; dan
- (5) Memperoleh informasi penunjang lainnya, mengenai kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa swasta.

c. Metodologi

Pengumpulan informasi pada SK-SUTJ menggunakan teknik *Indepth Study*. Petugas *indepth* dengan didampingi oleh petugas pendamping dari provinsi terpilih akan mendatangi perusahaan atau badan lainnya yang akan menjadi target responden. Penguasaan materi oleh petugas *indepth* akan mempengaruhi hasil akhir dari informasi yang akan diperoleh.

d. Hasil dan Keluaran

Dari SK-SUTJ 2010 diharapkan akan menghasilkan:

- (1) Tersusunnya kerangka SUT;
- (2) Tersusunnya struktur *input*/biaya sesuai dengan SUT; dan
- (3) Tersusunnya alokasi atau distribusi jasa sesuai dengan SUT.

7) Penyusunan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan dan Jasa

a. Abstraksi

Penyusunan Produk Domestik Bruto sektor jasa-jasa baik triwulanan maupun tahunan merupakan bagian integral dari ketersediaan sistem statistik neraca nasional, yang perlu disajikan secara reguler. Informasi yang disajikan dalam PDB sektor jasa-jasa merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan PDB Indonesia yang dapat langsung

dimanfaatkan oleh para penyusun kebijakan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Pada kenyataannya ketersediaan indikator produksi sektor jasa-jasa yang mendukung dalam penyusunan PDB sektor jasa-jasa masih terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak tersedia secara rutin. Oleh karena itu, penyusunan PDB triwulanan khususnya sektor jasa-jasa seringkali menggunakan model tanpa menggunakan indikator produksi yang dapat menggambarkan kenyataan ekonomi yang sebenarnya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Subdit Neraca Perdagangan dan Jasa pada tahun anggaran 2010 melakukan kegiatan dalam rangka membangun indikator produksi khusus sektor jasa-jasa melalui Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2010, STKU sektor Perdagangan dan Jasa-jasa akan mencakup beberapa kegiatan yang datanya diperlukan untuk segera diperbaiki. Cakupan sektor perdagangan dan jasa yang akan menjadi fokus penelitian diantaranya jasa restoran, jasa angkutan darat, jasa penunjang angkutan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

b. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka penguatan statistik data dasar untuk penghitungan PDB triwulanan sektor jasa-jasa dengan tahun dasar 2000 diperlukan suatu Survei Triwulanan Kegiatan Usaha sektor jasa-jasa. Survei ini dilakukan untuk memperoleh indikator produksi sektor jasa-jasa yang dapat dijadikan landasan bagi penghitungan PDB triwulanan dan tahunan khususnya sektor jasa-jasa. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab menyusun PDB tahunan dan triwulanan sektor jasa-jasa, maka pada penyusunan dan penghitungan PDB triwulanan dan tahunan yang dilakukan Subdit Neraca Jasa pada tahun anggaran 2010 diharuskan menyiapkan data dasar dan penyempurnaan rasio nilai tambah khususnya sektor jasa-jasa. Tujuan akhir yang diharapkan dari seluruh kegiatan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Sektor Jasa-jasa ini antara lain meliputi:

- (1) Ketersediaan indikator produksi sektor jasa-jasa sebagai data dasar yang mendukung penghitungan PDB triwulanan sektor jasa-jasa;
- (2) Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) sektor jasa-jasa yang representatif bagi penyusunan dan penghitungan PDB triwulanan sektor jasa-jasa;
- (3) Pemutakhiran data rasio nilai tambah sektor sektor jasa-jasa untuk menyusun PDB triwulanan dan tahunan Indonesia;
- (4) Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi sektor jasa-jasa; dan

(5) Evaluasi penghitungan PDB triwulanan sektor jasa-jasa.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka pada tahun anggaran 2010 penyusunan indikator produksi sektor jasa-jasa direncanakan akan menjadi salah satu kegiatan prioritas untuk segera dilaksanakan karena indikator produksi sektor jasa pada umumnya sangat terbatas, bahkan beberapa diantaranya hampir tidak tersedia sama sekali. Oleh karena itu, kegiatan STKU sektor jasa-jasa merupakan kegiatan yang penting untuk segera dilaksanakan agar menghasilkan data PDB triwulanan yang *valid* dan *reliable* khususnya sektor jasa-jasa.

c. Metodologi

Pengumpulan data dalam STKU sektor jasa-jasa 2010 ini dititikberatkan pada survei kegiatan jasa-jasa swasta (seperti jasa pendidikan, restoran, angkutan jalan raya, jasa kesehatan, jasa perorangan dan rumah tangga, dan sebagainya). Metode survei yang akan diterapkan dalam STKU sektor jasa-jasa 2010 adalah dengan mendatangi unit usaha/perusahaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan secara berkala yaitu secara 3 bulan sekali (triwulanan). Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan melihat kantong-kantong usaha pada provinsi terpilih.

d. Hasil dan Keluaran

Dalam kurun waktu tersebut hasil akhir yang diharapkan akan dicapai:

- (1) Pemutakhiran indikator produksi dan indikator harga PDB triwulanan sektor jasa-jasa;
- (2) Tersusunnya indeks produksi dan indeks harga PDB triwulanan sektor jasa-jasa; dan
- (3) Tersusunnya PDB triwulanan sektor jasa-jasa yang handal.

8) Penyempurnaan Data Dasar Penghitungan PDB dan PDRB

a. Abstraksi

Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian nasional selama satu periode tertentu. Terdapat tiga macam pendekatan dalam penyusunan PDB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Melalui pendekatan produksi akan ditelurkan *output* berupa PDB menurut lapangan usaha (sektoral), pendekatan pengeluaran menghasilkan *output* PDB menurut penggunaan, dan pendekatan pendapatan menelurkan PDB menurut pendapatan faktor produksi. Ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka PDB yang sama. Dalam proses penyusunannya, PDB menurut lapangan usaha membutuhkan indikator produksi seperti nilai omset penjualan, nilai *output* barang/jasa yang dihasilkan, *inventory* barang setengah jadi maupun bahan

baku, struktur biaya produksi, tenaga kerja dan struktur upah, indikator harga, serta jumlah unit usaha. Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar yang lengkap, rinci, dan *up to date* tentang kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia merupakan sumber data yang amat *powerfull* sebagai basis data penyusunan PDB nasional maupun regional. Dengan memanfaatkan data SE 2006 yang lengkap, rinci dan *up to date*, maka PDB nasional akan dapat di *update* levelnya sesuai dengan hasil cacah lengkap. Dari SE 2006 akan teridentifikasi seluruh kegiatan ekonomi (kecuali pertanian) dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai lapangan usaha, sehingga PDB nasional dan regional memiliki pijakan yang solid sebagai basis data sampai ke wilayah administrasi yang paling kecil, dalam hal ini tingkat provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- (1) Memperbaiki level PDB sesuai dengan hasil sensus ekonomi;
- (2) Mengukur omset/nilai produksi menurut lapangan usaha dan skala usaha; dan
- (3) Mendapatkan gambaran potensi ekonomi untuk seluruh lapangan usaha (kecuali pertanian) di Indonesia;
- (4) Menyusun lembar kerja (LK) terpadu di tingkat nasional maupun provinsi untuk seluruh lapangan usaha; dan
- (5) Meminimalisir tingkat perbedaan level (diskrepansi) antara PDB nasional dengan PDRB 33 provinsi.

Sementara itu, sasaran yang diinginkan adalah:

- (1) Menyusun neraca produksi (*T-account*) untuk masing-masing kegiatan ekonomi serinci mungkin (yaitu pada tingkat 3 digit KBLI);
- (2) Melakukan proses TITO *output* dan TITO *input* untuk *establishment* yang menghasilkan berbagai macam produk (*multi products*);
- (3) Mendapatkan indikator-indikator ekonomi penting yang berguna untuk penyusunan PDB tahun-tahun selanjutnya, seperti produktivitas per tenaga kerja, produktivitas per unit usaha, rasio biaya antara, rasio nilai tambah, dan struktur harga;
- (4) Memperoleh LK terpadu PDB sektoral; dan
- (5) Mendapatkan kerangka sampel (*sampling frame*) yang lengkap untuk keperluan survei khusus di lingkungan neraca.

c. Metodologi

Metode yang digunakan dalam *updating* level PDB sektoral berbasis SE 2006 adalah menggunakan instrumen pengolahan data sekunder SE 2006. Data sekunder SE 2006

tersebut selanjutnya diolah menjadi neraca produksi setelah melalui proses TITO. Pengolahan dilakukan menggunakan program pengolahan khusus (LK Terpadu) yang dirancang oleh Subdit Neraca Barang bersama-sama dengan *subject matter* terkait.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan *updating* level PDB sektoral berbasis SE 2006 ini diharapkan menjadi pijakan yang solid karena mampu menyediakan data populasi usaha dan sebarannya di seluruh wilayah Indonesia, serta mencakup seluruh kegiatan ekonomi (kecuali pertanian). Hasil atau keluarannya berupa PDB, atas dasar harga berlaku dengan level SE 2006, dan PDB atas dasar harga konstan.

9) Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling) 2010

a. Abstraksi

Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung karena dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, terutama minyak bumi, gas alam, beberapa jenis barang tambang, mineral, hutan tropis dengan berbagai jenis kayu dan hasil hutannya, kekayaan laut, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut selama ini telah membuahkan hasil nyata, sehingga ekonomi Indonesia tumbuh sangat mengesankan dan bahkan melampaui target rata-rata yang ditetapkan setiap tahapan pembangunan. Agar dapat memperoleh potret pertumbuhan ekonomi lebih akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka diperlukan inventarisasi data dasar yang akurat dan tepat waktu guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

- (1) Mendapatkan gambaran mengenai tingkat deplesi sumber daya alam yang tersedia;
- (2) Mendapatkan gambaran mengenai tingkat degradasi lingkungan;
- (3) Mengukur pengaruh deplesi sumber daya alam terhadap penciptaan PDB dan pertumbuhan ekonomi;
- (4) Mendapatkan bahan analisis tentang lingkungan; dan
- (5) Mendapatkan gambaran potensi sumber daya alam untuk seluruh komoditi di Indonesia.

Dan sasarannya adalah:

- (1) Menghitung/menghasilkan data Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu sampai pada tingkat EDP1 (*Environmentally Adjusted Net Domestic Product*) untuk skala nasional; dan

(2) Mengaplikasikan penghitungan NELT (Neraca Ekonomi Lingkungan Terpadu) Indonesia melalui provinsi terpilih.

c. Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam Sisnerling ini adalah menggunakan instrumen pengumpulan data primer berupa kuesioner/daftar isian yang harus diisi responden maupun pengumpulan data sekunder baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam yang dilakukan oleh para peneliti.

d. Hasil dan Keluaran

Kegiatan Sisnerling 2010 ini merupakan kelanjutan dari Sisnerling tahun sebelumnya yaitu dengan cakupan dan sebaran sampel yang berbeda guna memperoleh data PDB Hijau yang diturunkan dari data provinsi. Pengumpulan data yang dituangkan dalam Sisnerling juga merupakan pengumpulan data yang lebih terkini mengingat adanya *update* data guna membuat penyusunan Laporan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia.

10) Survei Khusus Input-Output (SKIO) 2010

a. Abstraksi

Produk Domestik Bruto merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha (*industry*) selama satu periode tertentu, misalnya setahun. Selain PDB, BPS juga menyusun indikator makro ekonomi lainnya yaitu Tabel Input-Output. Tabel I-O yang disusun bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar kegiatan ekonomi (*inter-industry relationship*) yang terjadi pada suatu periode tertentu di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, sangat dibutuhkan tersedianya data mengenai penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang dan jasa. Di samping itu pula tersedianya data struktur *input*/biaya, komposisi *output*, jumlah tenaga kerja, serta informasi pendukung lainnya menjadi perangkat penting dalam menyusun Tabel I-O ini. Untuk memperoleh indikator-indikator penting guna penyempurnaan data dasar yang rinci yang akan digunakan untuk penyusunan Tabel I-O 2010 maka dilakukanlah survei yaitu SKIO. SKIO ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi berupa *output*, susunan *input*, jumlah tenaga kerja, dan beberapa variabel penting lainnya seperti pada sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan dan lain-lain.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam survei ini adalah untuk memperoleh data yang rinci yang diperlukan dalam penyusunan Tabel I-O 2010 khususnya banyaknya *output*, struktur *input*, tenaga kerja sektor barang.

Sedangkan secara spesifik tujuannya adalah:

- (1) Memperoleh struktur *input*/biaya;
- (2) Mendapatkan informasi mengenai struktur tenaga kerja;
- (3) Memperoleh indikator produksi atau harga; dan
- (4) Memperoleh informasi penunjang lainnya, mengenai kegiatan subsektor pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan dan kegiatan *mixing farming*), pertambangan dan penggalian, industri pengolahan bukan migas, listrik gas dan air bersih, dan bangunan. Serta untuk penyempurnaan data dasar yang digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Bruto Indonesia.

c. Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam SKIO ini adalah menggunakan *purposive sampling*, mengingat yang akan diperoleh dari metode ini adalah besaran-besaran rasio melalui survei yang dilakukan. Pemilihan metode survei ini dilakukan dengan harapan akan diperoleh informasi yang akurat dan terinci sesuai tujuan penelitian, biaya penyelenggaraan yang lebih murah, waktu pencacahan yang lebih singkat, serta tenaga pencacahan yang lebih sedikit.

d. Hasil dan Keluaran

SKIO 2010 ini merupakan awal dari penyusunan tabel I-O 2010 yaitu dengan cakupan dan sebaran sampel yang terpilih guna melengkapi ketersediaan data *output* maupun struktur *input* yang mewakili seluruh sektor maupun komoditi khususnya di sektor *riil* dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

11) Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

a. Abstraksi

Data transaksi ekonomi sektor rumah tangga dan institusi nirlaba sangat diperlukan dalam rangka menyusun Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba. Data transaksi ekonomi tersebut juga dapat digunakan dalam menyusun komponen Produk Domestik Bruto, Neraca Terintegrasi Nasional, *System of National Account Indonesia*, Neraca Arus Dana, dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Data transaksi ekonomi yang dimaksud terdiri dari data pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan data investasi baik dalam bentuk fisik maupun finansial. Sejauh ini sektor rumah tangga dan institusi nirlaba tidak mempunyai dokumen laporan keuangan, serta tidak diwajibkan melaporkannya pada Pemerintah. Untuk itu guna memperoleh data transaksi ekonomi rumah tangga dan institusi nirlaba dilakukan melalui survei khusus (SKTIR dan SKLNP). Di pihak lain penelitian mengenai pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dan institusi nirlaba secara triwulanan belum

dilakukan BPS. Padahal informasi berbagai dampak kebijakan ekonomi terhadap sektor rumah tangga dan institusi nirlaba sangat penting untuk diketahui secara cepat dan berjangka pendek. Informasi tersebut diperoleh melalui survei khusus triwulanan (SKKRT).

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan neraca Rumah Tangga dan Instirusi Nirlaba adalah :

- (1) Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba;
- (2) Mengkonsolidasi data yang diperoleh dari sumber sekunder bagi penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba;
- (3) Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR, SKLNP dan SKKRT serta memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian; dan
- (4) Menyusun dan menyajikan Neraca Rumah Tangga dan Instisusi Nirlaba secara reguler.

Tujuan SKKRT :

- (1) Memperoleh pola konsumsi Rumah Tangga triwulanan, baik kuantum, harga, maupun nilai;
- (2) Memperbaiki kualitas data konsumsi Rumah Tangga tahunan;
- (3) Menunjang tersusunnya Neraca Rumah Tangga, Neraca Arus Dana, dan Tabel *Input* dan *Output* Indonesia secara berkala; dan
- (4) Meningkatkan kualitas komponen PDB triwulanan dan tahunan.

Sasaran :

- (1) Memanfaatkan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba di Indonesia sehingga terkait dengan semua aspek perekonomian nasional;
- (2) Menyiapkan data yang diperlukan guna penyusunan Neraca Terintegrasi Nasional, Neraca Arus Dana, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Komponen PDB; serta
- (3) Mengetahui pola transaksi ekonomi Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba.

c. Metodologi

SKLNP

Pencacahan dilakukan di beberapa provinsi terpilih. Sampel tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan yang dekat dengan ibukota provinsi. Jumlah sampel masing-masing provinsi ditentukan secara proporsional berdasarkan potensi keberadaan lembaga di wilayah tersebut. Unit sampel meliputi lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan diklasifikasikan ke dalam 7 bentuk

LNPRT, yaitu: Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

SKTIR

Sampel rumah tangga tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kabupaten/kota terpilih mengacu pada wilayah yang dekat dengan ibukota provinsi. Kerangka sampel yang digunakan adalah daftar rumah tangga terpilih modul konsumsi SUSENAS yang mempunyai informasi pendapatan/penerimaan rumah tangga selama setahun yang lalu di suatu kabupaten/kota. Dari kerangka sampel dipilih sejumlah rumah tangga secara acak.

SKKRT

Secara ruang lingkup, rumah tangga sampel masih jauh dari cukup untuk mempresentasikan pola konsumsi rumah tangga. Tapi kebutuhan akan adanya pola konsumsi Rumah Tangga sebagai penunjang komponen PDB triwulanan sangat diperlukan. Metodologi yang digunakan adalah listing dan *updating* direktori yang bersumber dari survei SUSENAS. Dari kerangka sampel tersebut akan dipilih secara *purposive* sejumlah rumah tangga untuk dijadikan responden.

d. Hasil dan Keluaran

Dari lingkup dan tahapan kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) Direktori LNPRT;
- (2) Neraca Rumah Tangga;
- (3) Neraca LNPRT; dan
- (4) Komponen PDB.

12) Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta

a. Abstraksi

Penyusunan neraca pemerintah dan badan usaha bertujuan untuk melihat peranan pelaku-pelaku ekonomi di sektor pemerintah dan badan usaha, yang mencakup kegiatan produksi, konsumsi dan investasi dalam perekonomian nasional. Pelaku-pelaku ekonomi tersebut adalah pemerintah, perusahaan pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta (BUS). Oleh karena itu, dalam rangka menyusun neraca pemerintah dan badan usaha ini diperlukan seperangkat data baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung seperti dari survei dan lain-lain. Hasil penyusunan dan penghitungan masing-masing neraca tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto

menurut lapangan usaha dan penggunaan, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, penyusunan Neraca Arus Dana (NAD), serta penyusunan *Financial Social Accounting Matrics* (FSAM). Di samping itu neraca-neraca ini diperlukan pula untuk menyusun neraca institusi/sector pemerintah dan badan usaha/korporasi non finansial dalam Sistem Neraca Nasional Indonesia menurut konsep SNA 1993. Penyusunan neraca sector pemerintah mencakup kegiatan penghitungan neraca pemerintah pusat triwulanan dan tahunan (data dasar neraca pemerintah pusat bersumber dari data realisasi APBN, Departemen Keuangan), neraca pemerintah umum tahunan yang terdiri dari neraca pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta desa (data dasar neraca pemerintah daerah berasal dari publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia oleh Sub Direktorat Statistik Keuangan, Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata dan Harga BPS dan data realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Departemen Keuangan) serta kegiatan Survei Khusus Jasa Pemerintah (SKJP). Sedangkan kegiatan penyusunan neraca badan usaha pemerintah, terdiri dari penyusunan neraca BUMN dan BUMD (pengumpulan data dasarnya diselenggarakan oleh Sub Direktorat Statistik Keuangan, Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata) dan data dari Kementerian Negara BUMN. Selanjutnya penyusunan neraca Badan Usaha Swasta mencakup kegiatan penyusunan struktur neraca BUS yang bersumber dari Survei Khusus Perusahaan Swasta non Finansial (SKPS).

b. Tujuan dan Sasaran

(1) Pemerintahan Umum

- Penyusunan neraca neraca pokok pemerintahan pusat (triwulanan dan tahunan) serta neraca pemerintahan umum tahunan;
- Penyusunan laporan SKJP; dan
- Penyusunan neraca sektor/institusi pemerintah dalam SNNI.

(2) BUMN dan BUMD

- Penyusunan neraca neraca pokok BUMN dan BUMD tahunan; dan
- Penyusunan neraca sektor/institusi BUMN/BUMD dalam SNNI.

(3) BUS

- Penyusunan struktur neraca pokok BUS non finansial tahunan;
- Penyusunan laporan SKPS; dan
- Penyusunan neraca/struktur neraca sektor/institusi BUS non finansial dalam SNNI.

c. Metodologi

Untuk penyelenggaraan SKJP dan SKPS digunakan metode *non probability sample survei*, dengan rancangan sampel *purposive*. Pada penyelenggaraan SKJP dengan *purposive sampling* sedemikian rupa sehingga departemen/dinas terwakili di setiap provinsi terpilih. Sedangkan pada penyelenggaraan SKPS dengan *purposive sampling* sedemikian rupa sehingga setiap perusahaan/korporasi non finansial terwakili di setiap lapangan usaha di provinsi terpilih.

d. Hasil dan Keluaran

(1) Pemerintahan Umum

- Publikasi neraca pemerintahan pusat (tahunan dan triwulanan) dan neraca pemerintahan umum tahunan;
- Laporan SKJP; dan
- Laporan penyusunan neraca institusi/sector pemerintahan tahunan dalam SNNI.

(2) BUMN dan BUMD

- Laporan Neraca BUMN dan BUMD tahunan; dan
- Laporan penyusunan neraca institusi/sector BUMN dan BUMD tahunan dalam SNNI.

(3) BUS

- Laporan Struktur Neraca BUS non Finansial tahunan;
- Laporan SKPS; dan
- Laporan penyusunan neraca institusi/sector BUS non finansial tahunan dalam SNNI.

13) Penyusunan Neraca Arus Dana

a. Abstraksi

Salah satu indikator pembangunan dalam suatu wilayah adalah terciptanya kegiatan investasi yang dapat menunjang sektor *riil*. Kegiatan investasi yang dimaksud disini adalah investasi dalam bentuk fisik dan finansial. Gambaran mengenai investasi finansial dapat dilihat dalam suatu sistem yang disebut neraca finansial. Sedangkan investasi fisik maupun investasi finansial sekaligus dapat dijelaskan melalui sistem data yang disebut Neraca Arus Dana. Penyusunan neraca finansial maupun NAD dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan tabungan dan pinjaman (melalui berbagai jenis instrumen finansial) masing-masing sektor untuk kegiatan pembentukan modal dan inventori, serta untuk kegiatan transaksi finansial antar institusi. Neraca finansial merupakan suatu sistem pencatatan statistik yang dapat menjelaskan sumber dan

penggunaan dana melalui transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu institusi. Sedangkan Neraca Arus Dana merupakan suatu sistem pencatatan statistik yang dirancang untuk memperlihatkan investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) serta transaksi finansial khususnya transaksi pinjam-meminjam antar institusi dalam suatu sistem perekonomian. Selain itu, penyusunan neraca finansial maupun NAD juga bertujuan untuk melihat perubahan berbagai agregat moneter seperti tabungan, deposito, uang beredar, saham, obligasi, kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang dibedakan menurut periode triwulanan dan tahunan. Berkaitan dengan penyusunan neraca finansial dan NAD, diperlukan dukungan data finansial masing-masing pelaku ekonomi/institusi baik dari kelompok institusi non finansial maupun kelompok institusi finansial, yang mencakup lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). LKBB sendiri mencakup Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Reksa dana, Perusahaan Asuransi, Modal Ventura, Pasar Modal, dan Pegadaian. Selain mencakup semua sektor ekonomi yang ada di Indonesia, neraca finansial maupun NAD pada prinsipnya juga mencakup semua jenis instrumen finansial yang ada di dalam perekonomian Indonesia saat ini. Beberapa instrumen finansial tersebut ditransaksikan secara luas di pasar uang serta bursa saham. Sedangkan sebagian instrumen finansial lainnya ditransaksikan secara terbatas. Salah satu sektor yang dicakup dalam NAD adalah sektor luar negeri. Hal ini adalah sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem transaksi terbuka dalam perekonomian nasional. Sehingga keterlibatan sektor luar negeri menjadi bagian tak terpisahkan dalam kerangka NAD, yang pada akhirnya penyediaan data luar negeri khususnya yang berkaitan dengan transaksi finansial juga perlu diupayakan. Dengan mempertimbangkan keterkaitan sektor luar negeri dalam penyusunan PDB (menurut penggunaan) serta ada indikasi terus defisitnya transaksi ekspor-impor jasa (dalam neraca pembayaran), maka penyediaan data institusi luar negeri ini juga disinergikan dengan upaya perbaikan kualitas data yang berkaitan dengan *trade in services* seperti transportasi, komunikasi, asuransi, informasi, jasa lisensi dan royalti, jasa *leasing* dan lainnya. Untuk mendukung upaya tersebut dipandang perlu untuk melakukan suatu studi yang terkait dengan *external account* secara lebih mendalam dan bertahap dalam rangka penyusunan Neraca Luar Negeri (*External Accounts*).

b. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan dan konsolidasi NAD bertujuan untuk merangkum seluruh transaksi finansial dari seluruh institusi/pelaku ekonomi baik domestik maupun luar negeri.

Dengan tersedianya matriks NAD yang lengkap dan akurat diharapkan akan:

- (1) Diperoleh neraca finansial untuk masing-masing institusi;
- (2) Diperoleh NAD Tahunan dan Triwulanan;
- (3) Diperoleh informasi tentang struktur tabungan dan investasi menurut institusi;
- (4) Diperoleh informasi mengenai *Saving-Investment Gap* menurut institusi;
- (5) Diketahui bagaimana perilaku sektor surplus menyalurkan dananya, dan bagaimana perilaku sektor defisit yang membutuhkan dana untuk melakukan investasi;
- (6) Diperoleh informasi finansial yang lengkap dan terpadu dalam bentuk sistem data makro yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar institusi; dan
- (7) Diperoleh informasi nilai dan struktur neraca luar negeri (*external account*) untuk ekspor dan impor jasa.

c. Metodologi

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan neraca finansial maupun neraca arus dana diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi.

Data tersebut mencakup transaksi finansial yang dilakukan oleh seluruh sektor yang diperoleh melalui Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP) serta melakukan kunjungan ke instansi-instansi terkait. Jumlah sampel yang digunakan pada pengumpulan data melalui kegiatan survei sebanyak 500 responden yang hanya dilakukan di DKI Jakarta. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Finansial dan Neraca Arus Dana, meliputi:

- (1) Pengolahan data, meliputi pengolahan data yang berasal dari hasil pengumpulan data;
- (2) Penyusunan program untuk melakukan estimasi matriks Neraca Arus Dana;
- (3) Diskusi internal dengan *subject matter* dan eksternal dengan institusi lain; dan
- (4) Pembahasan hasil penyusunan Neraca Finansial, dan estimasi Neraca Arus Dana.

d. Hasil dan Keluaran

Seluruh kegiatan seperti diuraikan pada bagian sebelumnya akan berlangsung selama satu tahun anggaran 2010 yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2010. Dari kegiatan ini akan dihasilkan publikasi NAD Indonesia Tahunan 2004-2009 dan NAD Indonesia Triwulanan 2007-2010:1 yang merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Selain itu juga akan dihasilkan laporan studi pembuatan model estimasi matrik NAD.

14) Studi Penyusunan Stok Kapital

a. Abstraksi

Bergeraknya perekonomian suatu wilayah/negara pada dasarnya ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kapital (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*). Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah *input* menjadi *output* yaitu berupa barang dan jasa. Studi empiris menunjukkan bahwa stok kapital merupakan faktor dominan dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengetahui kontribusi kapital terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dicari keterkaitan antara besaran stok kapital dengan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Stok kapital dapat menggambarkan *productive asset* yang dimiliki suatu negara. Namun demikian, untuk mengetahui informasi tentang stok kapital yang merupakan proses akumulasi tersebut tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu negara/wilayah dari tahun ke tahun. Stok kapital terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana investasi dibelanjakan untuk membeli barang modal (kapital) dan inventori yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Oleh karena itu, investasi merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan penambahan barang modal (kapital) berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan *output* dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan data tentang kapital secara statistik dapat dilihat dari dua pendekatan pengukuran, yaitu sebagai arus (*flows*) dan stok (*stocks*). Arus menunjukkan perubahan (penambahan atau pengurangan) sedangkan stok lebih menunjukkan kepada posisi (keadaan pada suatu saat). Proses pertambahan tersebut dalam terminologi statistik dikenal sebagai proses akumulasi. Dengan demikian stok kapital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang posisi barang modal yang terbentuk akibat dari proses akumulasi (proses arus) barang modal yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Arus dan stok merupakan dua prinsip pencatatan transaksi yang saling mendukung dalam merekam perubahan atas *asset* yang tersedia.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Gambaran dan karakteristik mengenai produk neto (surplus usaha neto, nilai tambah neto) dari hasil suatu proses produksi;

- (2) Gambaran tentang akumulasi kekayaan (*wealth*) yang diperoleh sebagai hasil dari proses pembangunan;
- (3) *Economic efficiency* dan *economic productivity* dari kapital yang digunakan dalam proses produksi;
- (4) Stok kapital bruto menurut kelompok jenis barang atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2001 – 2007;
- (5) Stok kapital neto menurut kelompok jenis barang atas dasar harga berlaku dan konstan;
- (6) Stok kapital bruto menurut sektor atas dasar harga berlaku & konstan; dan
- (7) Stok kapital *netto* menurut beberapa sektor atas dasar harga berlaku & konstan.

c. Metodologi

Beberapa pendekatan dilakukan dalam rangka memperoleh data untuk menghitung stok kapital Indonesia. Pertama-tama menentukan model penghitungan stok kapital yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Metode penghitungan yang biasa digunakan adalah dengan pendekatan *Simultaneously Exit* dan pendekatan *Delayed Survival Function*. Namun untuk dapat melakukan penghitungan dengan metode tersebut, maka beberapa variabel harus diketahui sebelumnya. Beberapa variabel yang diperlukan dalam penghitungan stok kapital dengan pendekatan tersebut di atas antara lain berkaitan dengan investasi yang digunakan dalam berbagai jenis barang modal yang digunakan oleh berbagai sektor ekonomi serta informasi yang berkaitan dengan pola penyusutan berbagai jenis barang modal di Indonesia serta berbagai indikator yang dapat mengetahui *retirement* atau *survival function* dari berbagai jenis barang modal yang sesuai dengan kondisi stok kapital di Indonesia. Untuk mengetahui beberapa variabel seperti pola penyusutan berbagai jenis barang modal di Indonesia serta berbagai indikator yang dapat mengetahui *retirement* atau *survival function* yang sesuai dengan kondisi stok kapital di Indonesia dapat diperoleh melalui pendekatan *survey* dan *non survey*. Pendekatan survei lebih ditekankan pada pengumpulan data yang lebih spesifik seperti *retirement* dan *survival function* dari berbagai jenis barang modal di berbagai lapangan usaha. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan yang memuat data tentang investasi khususnya PMTB.

d. Hasil dan Keluaran

Analisis tentang studi penghitungan stok kapital dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat produktivitas dan efisiensi investasi di masing-masing sektor serta mengetahui hasil kekayaan yang terakumulasi selama proses pembangunan. Dengan

diketahuinya stok kapital maka arah kebijakan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat dapat lebih terarah selaras dengan target pembangunan yang ingin dicapai. Data tentang stok kapital dapat juga digunakan sebagai peringatan dini terhadap implementasi investasi dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Keluaran dari penelitian tentang penghitungan stok kapital ini adalah berupa laporan hasil penghitungan stok kapital Indonesia.

15) Studi Rekonsiliasi Neraca Ekspor Impor Jasa Penunjang PDB

a. Abstraksi

Ketidakmampuan sektor jasa dalam negeri untuk memenuhi permintaan yang ada dapat menyebabkan arus jasa dari luar negeri memasuki wilayah Indonesia. Keadaan seperti demikian akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran Indonesia yang selanjutnya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi arus masuk dan arus keluar sektor jasa dibutuhkan informasi atau data yang berkaitan dengan sektor jasa-jasa, baik jasa-jasa yang masuk ke dalam wilayah Indonesia maupun yang keluar negeri. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang semakin berperan bagi negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat. Perubahan struktur ekonomi Indonesia yang pada awalnya bertumpu pada sektor pertanian, secara bertahap telah berubah ke sektor industri yang pada gilirannya berdampak kepada pengembangan di sektor jasa. Untuk itu, perkembangan sektor jasa dalam negeri harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk memenuhi permintaan terhadap jasa-jasa tersebut. Pada sisi yang lain, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data telah melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan berbagai sektor jasa ini seperti survei tentang turis, survei hotel dan sebagainya. Namun informasi yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan penyusunan PDB dari sisi penggunaan. Mempertimbangkan keterkaitan sektor jasa dalam penyusunan PDB menurut penggunaan serta adanya indikasi meningkatnya defisit transaksi jasa dalam neraca pembayaran, maka penyediaan data ini akan juga disinergikan dengan upaya perbaikan kualitas data yang berkaitan dengan *trade in services* seperti transportasi, komunikasi, asuransi, informasi, jasa lisensi dan royalti, jasa *leasing* dan lainnya. Untuk mendukung upaya tersebut dipandang perlu melakukan suatu studi yang terkait dengan neraca jasa secara lebih mendalam dan bertahap, guna meningkatkan kualitas data PDB

di sisi penggunaan. Selama ini informasi mengenai jasa yang ke luar negeri maupun yang masuk ke Indonesia masih sangat terbatas. Lembaga yang selama ini melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Bank Indonesia (BI), yang digunakan untuk penyusunan *Balance of Payment* (Neraca Pembayaran) Indonesia. Di samping itu, untuk mendapatkan data PDB triwulanan atas dasar harga konstan yang akurat khususnya komponen ekspor dan impor diperlukan pula deflator yang *up to date* dengan *time lag* yang pendek. Dalam kaitan semua itu, untuk menyelaraskan dan menyamakan metode penghitungan semua komponen dalam PDB triwulanan menurut penggunaan, diperlukan aplikasi konsep SNA 1993 yang tepat dan benar. Sehingga dalam penghitungan ekspor impor barang dalam PDB triwulanan juga selalu mengacu pada konsep SNA 1993.

b. Tujuan dan Sasaran

Studi mengenai transaksi jasa ini dimaksudkan untuk menunjang penyusunan neraca jasa yang lebih rinci khususnya dalam komponen PDB penggunaan. Dengan tersedianya data transaksi jasa tersebut diharapkan:

- (1) Diperoleh neraca jasa yang akurat yang dapat menunjang penyusunan PDB Penggunaan;
- (2) Diperoleh informasi nilai dan struktur transaksi jasa;
- (3) Melihat kinerja kegiatan transaksi jasa Indonesia yang lebih mendalam dan rinci menurut masing-masing sektor;
- (4) Melihat peranan masing-masing komponen dalam transaksi jasa maupun balas jasa faktor produksi dari dan ke luar negeri;
- (5) Sebagai pembanding atas data sejenis yang sebagian sudah tersedia khususnya yang disajikan oleh BI melalui *Balance of Payment* (BoP);
- (6) Menyelaraskan penghitungan data PDB pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat regional, khususnya untuk komponen ekspor impor jasa yang mengacu pada konsep SNA 1993; dan
- (7) Memperpendek *time lag* deflator ekspor – impor.

c. Metodologi

Penyusunan neraca jasa dapat dilakukan melalui pendekatan dari sektoral maupun institusional. Pendekatan sektoral digunakan untuk melihat karakteristik jasa yang ditransaksikan sehingga kategori transaksi jasa dapat disajikan lebih rinci. Sedangkan melalui pendekatan institusional (residen dan non-residen secara institusi berupa perusahaan, pemerintahan dan penduduk/rumah tangga) merupakan gambaran

transaksi yang dilakukan antara residen dengan non-residen atau sebaliknya untuk mendeteksi kegiatan transaksi jasa. Untuk itu maka metode pengumpulan informasi/data tentang transaksi jasa-jasa diusahakan dari berbagai sumber dan dari berbagai jenis data yang memungkinkan diperolehnya data tersebut, serta melalui suatu *indepth study*. Hal ini dikarenakan belum tersedianya laporan yang terpisah tentang transaksi jasa yang dilakukan oleh suatu institusi. Selain daripada itu, untuk menyempurnakan penghitungan PDB/PDRB khususnya komponen ekspor dan impor akan dilakukan pembahasan penghitungan deflator ekspor dan impor dan melakukan evaluasi terhadap penerapan konsep SNA 1993 dalam penghitungan PDB/PDRB penggunaan.

d. Hasil dan Keluaran

Seluruh kegiatan seperti diuraikan pada bagian sebelumnya akan berlangsung selama satu tahun anggaran 2010 yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2010. Dari kegiatan ini akan dihasilkan data transaksi jasa yang akan digunakan dalam penyusunan PDB penggunaan khususnya komponen ekspor impor jasa dengan deflator yang sesuai dengan konsep SNA 1993, serta laporan Hasil Kegiatan *Indepth Studi Neraca Jasa Penunjang PDB Penggunaan*.

16) PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan

a. Abstraksi

Statistik PDB triwulanan, selain digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi di berbagai sektor dalam jangka pendek, dapat pula dimanfaatkan sebagai peringatan dini bagi pemerintah mengenai kondisi perekonomian secara triwulanan. Kondisi perekonomian *pasca* krisis yang sangat tidak menentu, juga mengisyaratkan agar BPS mampu menyajikan data statistik yang lebih akurat dalam waktu yang relatif lebih cepat. Produk Domestik Bruto yang secara berkala disajikan oleh BPS dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan gambaran perekonomian secara umum. PDB sebagai salah satu indikator ekonomi merupakan perangkat data makro khususnya yang berkaitan dengan proses produksi dan kaitannya dengan proses konsumsi (akhir) dan investasi (fisik). Namun demikian, data PDB yang disajikan biasanya mempunyai *lag* waktu satu bahkan sampai dua tahun. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi seperti saat ini untuk membuat suatu kebijakan sangat dibutuhkan data yang *up to date*, karena perubahan-perubahan yang cepat harus didukung oleh informasi yang relatif baru. Dari sisi penggunaan, data PDB dirinci menurut konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal (termasuk perubahan inventori), ekspor dan impor. Secara berkala

BPS sudah menyajikan data PDB tahunan dan triwulanan. Namun pada kenyataannya data triwulanan untuk variabel-variabel makro seperti harga, ekspor-impor, volume uang beredar dan lainnya dapat berubah secara tajam dari triwulan ke triwulan lainnya. Oleh karena itu, PDB triwulan dengan *time lag* yang relatif pendek sangat dibutuhkan untuk dapat disinergikan dengan variabel-variabel triwulan yang lain dalam suatu model ekonomi, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai suatu alat analisis dalam mengambil kebijakan jangka pendek.

b. Tujuan dan Sasaran

Penghitungan PDB Triwulanan dilakukan agar menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Menyempurnakan metodologi penghitungan PDB triwulanan sehingga untuk selanjutnya data yang disusun akan konsisten antara satu sektor atau komponen penggunaan dengan sektor yang lainnya;
- (2) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas sumber data untuk penyusunan PDB triwulanan;
- (3) Membangun model ekonometrika untuk pendugaan PDB triwulanan; dan
- (4) Menyusun data PDB triwulanan menurut penggunaan dengan rentang waktu yang lebih pendek untuk dapat digunakan dalam perencanaan makro ekonomi nasional.

c. Metodologi

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan PDB Triwulanan diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi, mencakup investasi data yang dibutuhkan untuk kebutuhan estimasi, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi indikator-indikator khusus yang akan digunakan. Jumlah sampel yang digunakan pada pengumpulan data PDB Triwulanan di daerah sebanyak 1.000 responden yang hanya dilakukan di 10 provinsi yaitu Kepri, Babel, Bengkulu, NTB, Jatim, Yogyakarta, Kaltim, Kalbar, Sulsel, dan Sultra, sedangkan untuk DKI Jakarta pengumpulan data dilakukan di Pusat. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penghitungan PDB Triwulanan:

- (1) Pengolahan data, meliputi pengolahan data yang berasal dari hasil pengumpulan data sekunder maupun primer;
- (2) Penyusunan program ekonometrika untuk melakukan pendugaan PDB triwulanan;
- (3) Diskusi internal dengan *subject matter* dan eksternal dengan institusi lain, perguruan tinggi dan pakar ekonomi; dan
- (4) Pembahasan hasil penyusunan dan estimasi PDB triwulanan menurut sektor atau komponen penggunaan.

d. Hasil dan Keluaran

Dari seluruh kegiatan seperti yang diuraikan di atas, akan menghasilkan model ekonometrika PDB triwulanan. Data PDB Triwulanan tahun 2010 dan perkiraan PDB Triwulanan tahun 2011, akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

17) Konsolidasi Neraca Pengeluaran

a. Abstraksi

Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) meliputi kegiatan penyusunan neraca pengeluaran (nasional dan regional), neraca institusi (nasional dan regional) dan konsolidasi neraca sosial ekonomi SNNI digunakan sebagai perangkat induk (*central framework*) dan sebagai rujukan bagi penyusunan berbagai produk neraca seperti data Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi, maupun neraca satelit maupun indikator-indikator ekonomi lainnya. Secara prinsip SNNI ini disusun dari berbagai neraca institusi yang penggolongan besarnya terdiri dari institusi pemerintah, swasta, rumah tangga dan luar negeri. Peta situasi dan kondisi ekonomi nasional secara lengkap dan konsisten, baik yang menyangkut aspek neraca arus (*flow*) maupun neraca posisi (*stock*) dapat dilihat melalui perangkat SNNI menurut kategori institusi. Penyusunan statistik neraca nasional yang lengkap, komprehensif dan terintegrasi merupakan program internasional yang direkomendasikan PBB bagi seluruh negara dalam upaya mengukur kinerja ekonominya dengan mengacu pada buku pedoman yang telah diperbaharui yaitu buku manual *System of National Accounts* 1993. Buku panduan tersebut sudah diharmonisasikan sedemikian rupa oleh organisasi-organisasi internasional sehingga terdapat keselarasan dalam konsep, deskripsi, terminologi maupun dalam metodologi pengukuran. Tugas Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran adalah melakukan penggabungan serta penyelarasan (konsolidasi) berbagai data yang akan digunakan dalam penyusunan SNNI maupun perangkat neraca lain yang relevan melalui proses kompilasi berbagai transaksi ekonomi menjadi satu bentuk neraca yang komprehensif sehingga dapat dipelajari keterkaitan antar institusi ekonomi. Agregat makro penting yang dihasilkan meliputi PDB menurut penggunaan (tahunan dan triwulanan), tabel I-O (kuadran II), SNSE dan neraca lainnya. Kegiatan Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran juga melakukan penyelarasan terhadap statistik neraca regional (SNRI), sehingga konsistensi antara data nasional dan regional dapat terus terjaga. Untuk mendukung keberhasilan tersusunnya SNRI tersebut maka dilakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi konsep, pembinaan teknis tenaga pelaksana di pusat maupun di daerah, penterjemahan buku, penelitian

pustaka, pengumpulan data/informasi lapangan, rekonsiliasi data, studi banding, pembinaan tim kerja regional, diskusi teknis serta seminar hasil kegiatan. Selain itu tanggung jawab Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran adalah melakukan penggabungan serta penyelarasan (konsolidasi) data PDB dengan PDRB, khususnya dari sisi penggunaan atau permintaan akhir. Termasuk juga dalam kegiatan ini adalah menyusun analisis agregasi data PDRB agar informasi yang dihasilkan lebih berkualitas, konsisten dan berguna bagi banyak pihak yang berkepentingan. Pada gilirannya data yang dihasilkan dari kegiatan ini akan dipadukan dengan sistem data neraca nasional lainnya sehingga terbangun perangkat data ekonomi makro di pusat dan daerah. Untuk mendukung tersebut maka berbagai kegiatan dilakukan, seperti pembinaan bagi staf teknis atau tenaga-tenaga penyusun data PDRB provinsi maupun kabupaten, rekonsiliasi data PDB dan PDRB (tahunan dan triwulanan), konsultasi regional (KONREG) dan kegiatan lain yang relevan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pokok dari program kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun Sistem Neraca Nasional melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya;
- (2) Meneliti perbedaan prosedur estimasi penyusunan statistik neraca nasional yang selama ini dilakukan;
- (3) Meningkatkan kualitas sistem data yang sudah ada seperti halnya PDB dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi, untuk mendukung analisis kinerja perekonomian nasional;
- (4) Melakukan proses konsolidasi perangkat SNNI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten;
- (5) Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok sebagaimana yang direkomendasikan dalam SNA'93;
- (6) Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi ke dalam format SNNI;
- (7) Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan SNNI;
- (8) Menyiapkan dan mempublikasikan buku pedoman teknis operasional penyusunan PDRB;
- (9) Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNNI/SNRI khususnya kemampuan dalam menyusun statistik PDB/PDRB penggunaan, baik bagi staf BPS Pusat maupun BPS Daerah;

- (10) Meneliti perbedaan prosedur estimasi penyusunan statistik PDRB dan Pendapatan Regional yang selama ini dilakukan;
- (11) Mengaplikasikan konsep-konsep terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia;
- (12) Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statistik PDRB maupun Pendapatan Regional; dan
- (13) *Monitoring* dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDRB maupun Statistik Pendapatan Regional oleh BPS Pusat, dalam rangka penyesuaian dan pengembangan Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan dan peringkat antar wilayah/region.

c. Metodologi

- (1) Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI)

Pada dasarnya, penyusunan SNNI mengikuti konsep dan prosedur yang disarankan dalam panduan SNA'93. Format dan struktur neraca akan melatarbelakangi penyusunan SNNI ini mengikuti berbagai perilaku ekonominya. Perlakuan khusus, asumsi dan koreksi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi-sosial Indonesia. Konsekuensi logis ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan ketersediaan data dasar yang sangat luas karakteristiknya, baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

- (2) Konsolidasi Neraca Institusi

Proses konsolidasi neraca institusi pada akhirnya dapat bermanfaat dalam penyusunan PDB tabel I-O, SNSE, Matrik Investasi (kapital) serta neraca luar negeri dengan konsentrasi perilaku konsumsi akhir dan akumulasi yang juga merupakan bagian dari perangkat SNNI. Dengan menggunakan konsep yang serupa, transaksi yang terjadi di wilayah domestik maupun dengan luar negeri akan dihitung secara sinergi dengan wacana "Institusi".

- (3) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data/informasi melalui survei-survei khusus terhadap berbagai perilaku ekonomi, mengingat informasi yang dibutuhkan belum sepenuhnya dicakup dalam survei- survei yang diselenggarakan oleh BPS selama ini. Pemilihan sampel akan dilakukan secara *purposive* pada tingkat provinsi, berdasarkan pada direktori yang tersedia. Selain itu juga akan dikembangkan kegiatan penelitian "observasi" dengan melakukan kunjungan pada kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kegiatan ini akan lebih dioptimalkan karena dianggap mampu melengkapi informasi yang sudah ada.

(4) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data/informasi yang berada pada pihak lain juga dilakukan seperti yang berasal dari instansi atau departemen teknis terkait seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, BAPPENAS, BAPPEDA (PEMDA), dan sebagainya. Pada tahap awal prioritas diarahkan pada pengumpulan data mengenai institusi-institusi ekonomi yang bergerak di berbagai lapangan usaha. Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan data melalui berbagai literatur atau media massa yang ada, baik data kuantitatif maupun kualitatif.

(5) Analisis data

Mencakup kegiatan evaluasi dan analisis data PRDB menurut penggunaan (PDRB-E) yang data dasarnya berasal dari hasil kompilasi yang telah dilakukan secara berkala. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dimana sebagian besar datanya diturunkan dari data PDRB, termasuk pula yang dikombinasikan dengan variabel sosial-ekonomi lainnya.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Tersusunnya perangkat SNNI yang terdiri dari neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, neraca modal serta neraca finansial tahunan;
- (2) Konsolidasi PDB Penggunaan Indonesia menurut komponen tahunan dan triwulanan, serta PDB Indonesia menurut institusi tahunan;
- (3) Matriks SNSE tahun 2005 (matriks induk dan data agregat);
- (4) Matriks Stok Kapital Indonesia;
- (5) Berbagai jenis kegiatan penelitian observasi dengan topik-topik pilihan (Survei Khusus Konsolidasi Neraca Institusi/SKKNI), baik yang berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan;
- (6) Penggandaan laporan akhir PDB, PDRB, SNSE dan Stok Kapital Indonesia serta diseminasinya;
- (7) Pedoman penyusunan neraca regional;
- (8) Menjalinkan kerjasama teknis dengan lembaga/instansi terkait dalam upaya memperbaiki dan melengkapi sistem data yang ada; dan
- (9) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan BPS Pusat maupun BPS Daerah, termasuk juga pihak-pihak lain terkait yang mempunyai kontribusi dalam penyusunan PDB/PDRB, SNSE dan Neraca Institusi.

18) Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

a. Abstraksi

Sistem Neraca Nasional Indonesia meliputi kegiatan penyusunan neraca pengeluaran (nasional dan regional), neraca institusi (nasional dan regional) dan konsolidasi neraca sosial ekonomi SNNI digunakan sebagai perangkat induk (*central framework*) dan sebagai rujukan bagi penyusunan berbagai produk neraca seperti data Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi, maupun neraca satelit maupun indikator-indikator ekonomi lainnya. Secara prinsip SNNI ini disusun dari berbagai neraca institusi yang penggolongan besarnya terdiri dari institusi pemerintah, swasta, rumah tangga dan luar negeri. Peta situasi dan kondisi ekonomi nasional secara lengkap dan konsisten, baik yang menyangkut aspek neraca arus (*flow*) maupun neraca posisi (*stock*) dapat dilihat melalui perangkat SNNI menurut kategori institusi. Penyusunan statistik neraca nasional yang lengkap, komprehensif dan terintegrasi merupakan program internasional yang direkomendasikan PBB bagi seluruh negara dalam upaya mengukur kinerja ekonominya. Dengan mengacu pada buku pedoman yang telah diperbaharui yaitu buku manual *System of National Accounts* 1993. Buku panduan tersebut sudah diharmonisasikan sedemikian rupa oleh organisasi-organisasi internasional sehingga terdapat keselarasan dalam konsep, deskripsi, terminologi maupun dalam metodologi pengukuran. Tugas Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran adalah melakukan penggabungan serta penyelarasan (konsolidasi) berbagai data yang akan digunakan dalam penyusunan SNNI maupun perangkat neraca lain yang relevan melalui proses kompilasi berbagai transaksi ekonomi menjadi satu bentuk neraca yang komprehensif sehingga dapat dipelajari keterkaitan antar institusi ekonomi. Agregat makro penting yang dihasilkan meliputi PDB menurut penggunaan (tahunan dan triwulanan), tabel I-O (kuadran II), SNSE dan neraca lainnya. Kegiatan Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran juga melakukan penyelarasan terhadap statistik neraca regional, sehingga konsistensi antara data nasional dan regional dapat terus terjaga. Untuk mendukung keberhasilan tersusunnya SNNI tersebut maka dilakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi konsep, pembinaan teknis tenaga pelaksana di pusat maupun di daerah, penterjemahan buku, penelitian pustaka, pengumpulan data/informasi lapangan, rekonsiliasi data, studi banding, pembinaan tim kerja regional, diskusi teknis serta seminar hasil kegiatan. Selain itu, tanggung jawab Subdit Konsolidasi Neraca Pengeluaran adalah melakukan penggabungan serta penyelarasan (konsolidasi) data PDB dengan PDRB, khususnya dari sisi penggunaan atau

permintaan akhir. Termasuk juga dalam kegiatan ini adalah menyusun analisis agregasi data PDRB agar informasi yang dihasilkan lebih berkualitas, konsisten dan berguna bagi banyak pihak yang berkepentingan. Pada gilirannya data yang dihasilkan dari kegiatan ini akan dipadukan dengan sistem data neraca nasional lainnya sehingga terbangun perangkat data ekonomi makro di pusat dan daerah. Untuk mendukung tersebut maka berbagai kegiatan dilakukan, seperti pembinaan bagi staf teknis atau tenaga-tenaga penyusun data PDRB provinsi maupun kabupaten, rekonsiliasi data PDB dan PDRB (tahunan dan triwulanan), konsultasi regional (KONREG) dan kegiatan lain yang relevan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pokok dari program kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun Sistem Neraca Nasional melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya;
- (2) Meneliti perbedaan prosedur estimasi penyusunan statistik neraca nasional yang selama ini dilakukan;
- (3) Meningkatkan kualitas sistem data yang sudah ada seperti halnya PDB dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi, untuk mendukung analisis kinerja perekonomian nasional;
- (4) Melakukan proses konsolidasi perangkat SNNI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten;
- (5) Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok sebagaimana yang direkomendasikan dalam SNA'93;
- (6) Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi ke dalam format SNNI;
- (7) Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan SNNI;
- (8) Menyiapkan dan mempublikasikan buku pedoman teknis operasional penyusunan PDRB;
- (9) Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNNI/SNRI khususnya kemampuan dalam menyusun statistik PDB/PDRB penggunaan, baik bagi staf BPS Pusat maupun BPS Daerah;
- (10) Meneliti perbedaan prosedur estimasi penyusunan statistik PDRB dan Pendapatan Regional yang selama ini dilakukan. Mengaplikasikan konsep-konsep terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia;
- (11) Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statistik PDRB maupun Pendapatan Regional; dan

- (12) *Monitoring* dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDRB maupun statistik Pendapatan Regional oleh BPS Pusat, dalam rangka penyesuaian dan pengembangan Sistem Neraca Nasional Indonesia untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan dan peringkat antar wilayah/region.

c. Metodologi

(1) Tabel I-O Indonesia

Tabel *Input-Output* Indonesia digunakan sebagai dasar (*benchmark*) untuk menyusun kerangka SNSE Indonesia. Sehingga neraca-neraca yang diturunkan dari kerangka SNSE akan konsisten dengan tabel I O. Dengan perkataan lain, agregat agregat makro yang diperoleh dari kerangka SNSE Indonesia akan sama dengan yang diperoleh dari tabel I-O Indonesia.

Secara prinsip penyusunan SNSE merupakan kumpulan neraca-neraca makro yang saling berkait dalam bentuk kerangka data yang berupa matriks. Secara agregat komponen-komponen di dalam neraca-neraca pokok harus konsisten dengan indikator-indikator ekonomi makro yang sudah ada. Konsolidasi berbagai neraca makro dan konsistensi dengan berbagai indikator makro harus tetap terjaga. Neraca pokok yang menjadi kerangka agregat SNSE Indonesia antara lain neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca kapital dan neraca luar negeri. Selanjutnya, kerangka SNSE juga dapat diturunkan dalam bentuk sub matriks seperti sub matriks tenaga kerja, sub matriks pendapatan tenaga kerja, sub matriks pendapatan *capital*, transfer, dan sebagainya.

(2) Pengumpulan data sekunder dan pelengkap

Selain data yang dikumpulkan oleh BPS yang berasal dari berbagai survei, penyusunan SNSE Indonesia juga menggunakan berbagai informasi pelengkap lainnya yang berasal dari pengumpulan data/informasi yang berada pada pihak lain seperti yang berasal dari instansi atau departemen teknis terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, BAPPENAS, BAPPEDA (PEMDA), PT Dana Reksa, Bursa Efek, Departemen Kimpraswil, Asosiasi-asosiasi terkait, Sekretariat ASEAN). Pada tahap awal prioritas diarahkan pada pengumpulan data mengenai institusi-institusi ekonomi yang bergerak pada berbagai lapangan usaha. Selain itu juga akan dilakukan pengumpulan data melalui berbagai literatur atau media massa yang ada, khususnya yang berkaitan dengan data kualitatif.

(3) Rekonsiliasi Neraca Pokok

Karena SNSE merupakan kerangka data yang mengkaitkan indikator sosial dan ekonomi maka berbagai sumber data yang berasal dari berbagai survei maupun pengumpulan data pelengkap lainnya maka tahap selanjutnya adalah menyusun berbagai neraca pokok dan disagregasinya sesuai dengan klasifikasi dalam kerangka data SNSE Indonesia. Berbagai komponen dalam setiap neraca harus konsisten dan terjaga validitasnya. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi di setiap komponen dalam suatu neraca serta keterkaitan komponen-komponen di setiap neraca sesuai klasifikasi SNSE.

(4) Rekonsiliasi Matriks SNSE

Setelah neraca-neraca pokok di rekonsiliasi terutama dalam level maupun keterkaitan dengan komponen lainnya, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca-neraca tersebut ke dalam bentuk matriks. Proses ini juga memerlukan konsistensi berbagai komponen di dalam neraca serta keterkaitannya dengan komponen yang sama serta komponen yang terkait dalam neraca yang berbeda. Untuk rekonsiliasi ini juga diuji validitas dan konsistensi berbagai sumber data sehingga menghasilkan suatu matriks yang terdiri dari neraca-neraca dalam suatu kerangka data yang utuh.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Tersusunnya matriks SNSE Indonesia beserta neraca satelit;
- (2) Tabel-tabel analisis yang diturunkan dari Matriks SNSE (matriks induk dan data agregat) serta yang bersumber dari neraca satelit; dan
- (3) Laporan publikasi matriks SNSE, neraca satelit serta tabel-tabel analisis dan uraian deskriptifnya.

Tabel 21. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN DAN KUNJUNGAN SURVEI BIDANG NERACA PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010

No.	Provinsi	Neraca Regional		Survei Khusus Perdagangan dan Jasa		Survei Triwulanan Kegiatan Usaha		SKIO	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NAD	350	350	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	560	560	-	100	120	120	-	100
3	Sumatera Barat	490	490	100	100	-	-	-	80
4	Riau	245	245	100	100	-	-	-	-
5	Jambi	245	245	-	100	-	-	-	80
6	Sumatera Selatan	245	245	100	100	-	120	-	-
7	Bengkulu	350	350	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	245	245	100	100	-	-	-	80
9	Kep. Bangka Belitung	315	315	100	100	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	350	350	100	100	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	350	350	-	-	400	320	-	100
12	Jawa Barat	875	875	100	100	120	120	-	100
13	Jawa Tengah	1 225	1 225	100	100	120	120	-	100
14	D.I. Yogyakarta	315	315	-	100	-	-	-	80
15	Jawa Timur	1 295	1 295	100	100	120	120	-	100
16	Banten	245	245	100	100	-	120	-	100
17	Bali	315	315	100	100	-	120	-	80
18	Nusa Tenggara Barat	280	280	100	100	-	-	-	80
19	Nusa Tenggara Timur	420	420	100	100	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	315	315	100	100	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	245	245	100	100	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	280	280	100	100	-	120	-	80
23	Kalimantan Timur	245	245	100	100	-	-	-	-
24	Sulawesi Utara	245	245	100	100	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	805	805	100	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	245	245	100	100	120	120	-	80
27	Sulawesi Tenggara	245	245	-	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	245	245	100	100	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	245	245	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	245	245	-	-	-	-	-	-
31	Maluku Utara	245	245	100	100	-	-	-	-
32	Papua Barat	245	245	-	-	-	-	-	-
33	Papua	315	315	-	-	-	-	-	-
Jumlah		12 880	12 880	2 200	2 400	1 000	1 400	-	1 240

Lanjutan Tabel 21

No.	Provinsi	survei penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)		Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NAD	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	400	100	100
3	Sumatera Barat	200	400	-	-
4	Riau	-	400	100	100
5	Jambi	-	-	100	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	100
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	200	-	100	-
10	Kepulauan Riau	200	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	200	400	-	100
13	Jawa Tengah	-	-	100	-
14	D.I. Yogyakarta	-	400	-	100
15	Jawa Timur	200	400	100	-
16	Banten	-	-	-	100
17	Bali	200	400	100	100
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	100
19	Nusa Tenggara Timur	200	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	100	100
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	200	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	400	-	-
24	Sulawesi Utara	-	400	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	200	-	-	-
28	Gorontalo	-	-	100	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	100
31	Maluku Utara	200	400	-	-
32	Papua Barat	-	-	100	-
33	Papua	-	-	-	-
Jumlah		2 000	4 000	1 000	1 000

**Tabel 22. PERBANDINGAN JUMLAH KUNJUNGAN
SURVEI BIDANG NERACA KONSUMSI
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Neraca Rumah Tangga dan Lembaga Non Profit						Neraca Pemerintah & Badan Usaha Swasta			
		SKLNP		SKTIR		SKKRT		SKPS		SKJP	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	NAD	-	-	400	-	160	-	-	-	40	-
2	Sumatera Utara	250	250	-	400	-	160	100	100	-	40
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	75	75	-	40
4	Riau	-	-	400	-	160	-	75	75	-	40
5	Jambi	-	250	-	400	-	160	-	-	40	-
6	Sumatera Selatan	-	-	400	-	160	-	75	-	-	-
7	Bengkulu	250	250	-	400	-	160	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	400	-	160	-	-	-	40	-
9	Kep. Bangka Belitung	250	-	-	-	-	-	-	75	-	40
10	Kepulauan Riau	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	400	600	600	160	160	200	200	40	40
12	Jawa Barat	400	250	400	400	160	160	150	150	40	40
13	Jawa Tengah	250	250	400	400	160	160	75	150	40	40
14	D.I. Yogyakarta	250	-	400	-	160	-	150	75	40	40
15	Jawa Timur	250	250	400	400	160	160	75	200	40	40
16	Banten	250	-	-	-	-	-	200	75	40	40
17	Bali	-	-	400	-	160	-	75	75	40	40
18	Nusa Tenggara Barat	250	-	400	-	160	-	-	75	40	40
19	Nusa Tenggara Timur	250	250	-	400	-	160	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	250	-	400	-	160	-	75	40	40
21	Kalimantan Tengah	-	250	-	400	-	160	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	400	-	160	-	75	-	-	-
23	Kalimantan Timur	250	-	400	-	160	-	75	100	-	40
24	Sulawesi Utara	250	250	-	400	-	160	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	250	400	400	160	160	100	100	-	40
27	Sulawesi Tenggara	250	250	-	400	-	160	-	-	-	-
28	Gorontalo	-	250	-	400	-	160	-	-	40	-
29	Sulawesi Barat	250	-	400	-	160	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	250	-	400	-	160	-	-	40	-
32	Papua Barat	250	250	-	400	-	160	-	-	-	-
33	Papua	-	-	400	-	160	-	-	-	40	-
Jumlah		4 150	4 150	6 600	6 600	2 560	2 560	1 500	1 600	600	600

Lanjutan Tabel 22

No.	Provinsi	Studi Penyusunan Stok PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan		Kapital	
		2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NAD	-	300	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	300	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	300	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	100
8	Lampung	-	300	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	250	-	100
10	Kepulauan Riau	-	-	-	100
11	DKI Jakarta	400	-	-	-
12	Jawa Barat	400	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	400	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	300	-	100
15	Jawa Timur	-	-	-	100
16	Banten	300	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	250	-	-	100
19	Nusa Tenggara Timur	-	250	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	100
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	250	-	-	100
24	Sulawesi Utara	-	300	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	250	-	-	100
27	Sulawesi Tenggara	-	250	-	100
28	Gorontalo	-	250	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-
Jumlah		2 150	2 900	-	1 000

12. SURVEI BIDANG POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1) Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

a. Abstraksi

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan sangat terasa hawa perubahan dibandingkan era sebelumnya. Ditinjau dari pandangan asas demokrasi perkembangan bidang politik dinilai cukup positif. Hal ini terlihat nyata dari maraknya berbagai demonstrasi dengan beragam latar belakang sosial, baik yang dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa sampai warga sipil dan para petani. Nuansa kebebasan mengungkapkan ketidaksetujuan ("menentang") terhadap kebijakan yang diberlakukan, baik oleh institusi maupun pemerintah, yang diwujudkan dalam demonstrasi merupakan bagian dari kegiatan politik masyarakat yang jarang (bahkan hampir tidak ada) terjadi di era orde baru. Wacana kebebasan politik lebih terasa dengan bermunculannya partai-partai politik. Sejarah perpolitikan di negeri ini telah membukukan bahwa selama sekitar seperempat abad kancah perpolitikan Indonesia hanya dikuasai tiga partai politik. Namun *pasca* runtuhnya rezim orde baru, partai-partai bermunculan "seperti jamur di musim penghujan". Bukti empiris ini menunjukkan perkembangan dunia politik yang demikian pesat. Sebaliknya di bidang keamanan dan ketertiban, cenderung mengalami penurunan. Polisi dan aparat keamanan yang selama ini "berwibawa" di mata masyarakat tampaknya mulai kehilangan kewibawaannya. Pelaku kejahatan tidak lagi sembunyi, namun dengan terang-terangan melakukan tindak kejahatan di depan khalayak. Lima tahun belakangan, berita keamanan pun diwarnai adanya konflik fisik antara aparat keamanan (polisi) dengan massa. Penurunan tingkat keamanan terlihat nyata dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mencatat jumlah tindak kejahatan pada tahun 1997, tahun yang disepakati secara konvensi sebagai awal krisis multi dimensi, tercatat 142,7 ribu meningkat menjadi 256,5 ribu kasus pada tahun 2005. Perkembangan bidang politik dan keamanan yang demikian cepat tentu berpengaruh, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian sampai tahun 2007 belum ada statistik yang memonitor perkembangan bidang politik dan keamanan yang bersifat *series* antar waktu. Adapun Statistik Politik dan Keamanan yang terbit sejak 2002 hanya memuat perkembangan statistik politik yang sifatnya *current issue* yang merupakan rangkaian studi dalam rangka penyusunan statistik politik dan keamanan yang lebih mapan. Akibatnya keterbandingan antar waktu tidak dapat dilakukan. Dari hasil studi yang

dilakukan selama ini, mulai tahun 2008 muatan Statistik Politik dan Keamanan akan memuat jenis statistik yang tetap. Sehingga diharapkan dapat dilakukan keterbandingan antar waktu. Dengan kata lain, Statistik Politik dan Keamanan dapat digunakan untuk memantau perkembangan bidang politik dan keamanan.

b. Tujuan dan Sasaran

Studi ini bertujuan untuk:

- (1) Menghimpun data statistik politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu;
- (2) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan; dan
- (3) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah mampu menyajikan data yang dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah provinsi.

c. Metodologi

- (1) Melakukan kompilasi data dari instansi terkait, seperti Mabes Polri, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Sekretariat DPR/MPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah, Sekretariat DPRD, Polda, dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi; dan
- (2) Melakukan konsultasi dan evaluasi data ke instansi daerah tingkat provinsi yang terkait.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan studi ini adalah Publikasi Statistik Politik dan Keamanan.

**Tabel 23. PERBANDINGAN JUMLAH RESPONDEN
SURVEI BIDANG POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2009 & 2010**

No.	Provinsi	Responden	
		2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	200	690
2	Sumatera Utara	200	840
3	Sumatera Barat	200	600
4	Riau	200	360
5	Jambi	200	330
6	Sumatera Selatan	200	480
7	Bengkulu	200	300
8	Lampung	200	360
9	Kep. Bangka Belitung	200	240
10	Kepulauan Riau	200	210
11	DKI Jakarta	200	210
12	Jawa Barat	200	810
13	Jawa Tengah	200	1 080
14	D.I. Yogyakarta	200	180
15	Jawa Timur	200	1 170
16	Banten	200	240
17	Bali	200	300
18	Nusa Tenggara Barat	200	300
19	Nusa Tenggara Timur	200	540
20	Kalimantan Barat	200	420
21	Kalimantan Tengah	200	450
22	Kalimantan Selatan	200	420
23	Kalimantan Timur	200	420
24	Sulawesi Utara	200	300
25	Sulawesi Tengah	200	330
26	Sulawesi Selatan	200	720
27	Sulawesi Tenggara	200	330
28	Gorontalo	200	210
29	Sulawesi Barat	200	180
30	Maluku	200	270
31	Maluku Utara	200	270
32	Papua Barat	200	300
33	Papua	200	630
JUMLAH		6 600	14 490

2) Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010

a. Abstraksi

Selama lima tahun terakhir, kejadian tindak kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Data laporan kriminalitas yang dikumpulkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat sebanyak 196.931 kejadian kriminalitas selama tahun 2003. Jumlah tersebut pada tahun 2007 meningkat sekitar dua kali lipat menjadi sebanyak 330.354 kejadian. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa penggunaan senjata api untuk aksi kejahatan dari sebanyak 242 kejadian pada tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 292 kejadian pada tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya kejadian tindak kriminalitas, jumlah pelaku tindak kriminalitas secara keseluruhan juga semakin meningkat baik pelaku laki-laki maupun perempuan. Dari sejumlah kasus yang diselesaikan pihak kepolisian selama periode tahun 2003–2007 terungkap bahwa jumlah pelaku kriminalitas laki-laki dari sebanyak 176.516 orang pada tahun 2003, meningkat menjadi sebanyak 220.359 orang pada tahun 2007. Sementara itu, jumlah pelaku kriminalitas perempuan meningkat dari sebanyak 4.338 orang menjadi sebanyak 5.106 orang. Gambaran perkembangan kejadian kriminalitas di Indonesia juga ditandai dengan makin meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminalitas yang masih berusia anak-anak dan remaja. Berdasarkan laporan Polri, jumlah anak-anak dan remaja pelaku tindak kriminalitas pada tahun 2003 secara keseluruhan adalah sebanyak 2.963 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.222 orang dan perempuan sebanyak 741 orang. Pada tahun 2007 atau selama kurun waktu empat tahun, jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 3.145 orang. Meningkatnya jumlah tindak kriminalitas maupun pelaku tindak kriminalitas merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung pada gilirannya akan mempengaruhi laju roda pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun demikian, hal lain yang lebih memprihatinkan adalah adanya keterlibatan anak-anak dan remaja sebagai pelaku tindak kriminalitas. Anak-anak dan remaja adalah calon pemimpin bangsa yang akan melaksanakan tugas pembangunan pada masa mendatang. Sejalan dengan perannya sebagai aset bangsa dan negara, upaya untuk mencegah keterlibatan anak-anak dan remaja dalam dunia kriminalitas merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan studi dalam rangka mempelajari faktor-faktor pendorong yang memicu anak dan remaja untuk melakukan tindak kriminalitas. Berbekal pengetahuan tentang faktor-faktor pendorong tersebut dapat disusun berbagai program pencegahan yang komprehensif dan akurat.

b. Tujuan dan Sasaran

Studi ini bertujuan untuk:

- (1) Menghasilkan profil mengenai anak dan remaja pelaku tindak kriminalitas;
- (2) Memberikan gambaran mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan anak dan remaja; dan
- (3) Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak dan remaja untuk melakukan tindak kriminalitas.

c. Metodologi

Unit observasi dalam studi ini adalah anak atau remaja yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Kerangka sampel (*sampling frame*) yang akan digunakan sebagai dasar untuk memilih unit-unit observasi yang akan diteliti adalah keseluruhan populasi anak dan pemuda, baik yang dibina di Lapas maupun Rutan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara macam pendekatan, yaitu:

- (1) Wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner; dan
- (2) Wawancara tidak terstruktur (wawancara mendalam).

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran yang dihasilkan pada tahapan terakhir ini adalah buku publikasi.

3) Penyusunan Laporan dan Stok Modal Sosial 2009

a. Abstraksi

Susenas 2009 perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk disusun dalam bentuk laporan per provinsi dan nasional. Hal ini penting dilakukan agar dapat diketahui pola dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan berbagai problema pembangunan akan lebih mudah diantisipasi dan diselesaikan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan pemanggilan peserta untuk diberikan arahan dari nara sumber yang tepat. Selain itu untuk dapat mendapatkan gambaran situasi kecenderungan sosial, diperlukan suatu indikator agar dapat dilakukan perbandingan antar daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan data modal sosial 2009 melalui penyusunan laporan dan stok modal sosial nasional dan provinsi.

Laporan akan disusun oleh BPS Pusat dan kepala seksi statistik ketahanan sosial seluruh Indonesia dengan diminta bantuan konsultasi dari nara sumber dari universitas yang kompeten di masing-masing provinsi.

c. Metodologi

Kegiatan penyusunan laporan dan stok modal sosial selain akan melibatkan BPS Pusat dan Daerah, juga akan dibantu oleh nara sumber yang kompeten di masing-masing provinsi. Untuk itu kepada BPS Daerah diminta untuk melakukan konsultasi dan pengumpulan bahan untuk referensi penulisan laporan. Tabel-tabel untuk bahan penulisan *draft* dikirimkan sebelum peserta daerah melakukan finalisasi penyusunan laporan.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi laporan modal sosial nasional dan daerah.

4) Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010

a. Abstraksi

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tercatat sebesar 34,96 juta orang (15,42% dari total penduduk). Penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Indonesia untuk menurunkan kemiskinan dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap tahunnya. Upaya ini perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan. Informasi penting tentang kemiskinan yang perlu secara terus menerus dipantau antara lain: 1) garis kemiskinan, 2) persentase dan jumlah penduduk miskin, 3) indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Data dan informasi mengenai kemiskinan di Indonesia juga sangat berguna untuk mengevaluasi keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk

miskin. Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2010, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada penghitungan data Susenas 2010;
- (2) Menghitung Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada penghitungan data Susenas 2010; dan
- (3) Menyusun profil kemiskinan tahun 2010 yang didasarkan pada penghitungan data Susenas 2010.

c. Metodologi

- (1) Penghitungan Kemiskinan

Penghitungan kemiskinan menggunakan formula yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984), yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$, z = Garis kemiskinan per kapita;

y_i = Pengeluaran perkapita penduduk miskin;

q = banyaknya penduduk miskin; dan

N = jumlah penduduk keseluruhan.

Z (garis kemiskinan) diperoleh dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar minimum makanan (yang dapat memenuhi kebutuhan energi 2100 kkal/ hari) dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan tersebut akan diperoleh garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan adalah garis kemiskinan makanan + garis kemiskinan bukan makanan. Sumber data yang digunakan adalah Susenas tahun 2010.

- (2) Profil Kemiskinan 2010

Informasi mengenai profil kemiskinan akan menyajikan profil rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin yang diwakili oleh indikator kepala rumahtangganya. Analisis profil kemiskinan akan difokuskan kepada beberapa aspek yang diduga sebagai akar permasalahan terjadinya insiden kemiskinan, antara lain:

- Karakteristik sosial demografi, mencakup variabel:
 - Rata-rata jumlah anggota rumah tangga;
 - % wanita sebagai kepala rumah tangga;
 - Rata-rata usia kepala rumahtangga (tahun); dan
 - Rata-rata lamanya bersekolah kepala rumahtangga miskin (tahun).
- Pendidikan, mencakup variabel:
 - % kepala rumah tangga yang buta huruf;
 - % kepala rumah tangga yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya; dan
 - % kepala rumah tangga menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.
- Ketenagakerjaan, mencakup variabel:
 - Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga menurut sektor/subsektor;
 - Status pekerjaan utama kepala rumah tangga; dan
 - Rata-rata jumlah jam kerja per minggu kepala rumah tangga.
- Perumahan, mencakup variabel:
 - Rata-rata luas lantai per kapita yang ditempati rumah tangga;
 - % rumah tangga menggunakan listrik;
 - % rumah tangga dengan rumah berlantai tanah;
 - % rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih;
 - % rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar; dan
 - % rumah tangga dengan rumah tanpa tangki septik
- Kesehatan, mencakup variabel:
 - % rumah tangga dengan keluhan kesehatan;
 - Rata-rata lamanya keluhan kesehatan (hari);
 - % rumah tangga sakit yang melakukan pengobatan sendiri;
 - % rumah tangga yang memanfaatkan fasilitas kesehatan; dan
 - % rumah tangga dengan wanita berstatus kawin sedang menggunakan alat/cara KB.

d. Hasil dan Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan 2010:

- (1) Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2010: Jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta indikator kemiskinan lainnya tahun 2010 dengan cakupan nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Luaran ini akan disajikan dalam bentuk publikasi Buku1: Provinsi dan Buku 2: Kabupaten/Kota; dan

- (2) Profil Kemiskinan Tahun 2010: Jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta indikator kemiskinan lainnya tahun 2010 dengan cakupan nasional.

5) Biaya Pendamping TF SCB

a. Abstraksi

Di era otonomi daerah saat ini, ketersediaan data statistik yang berkualitas dan relevan bagi kebutuhan pembangunan merupakan hal yang mendesak dan perlu. Berbagai bentuk perencanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi membutuhkan peningkatan umpan balik berupa apa yang paling strategis diperlukan untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Semua ini membutuhkan ketersediaan data statistik yang bermutu dan relevan.

Persoalan yang sangat mendasar yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perencana di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, bahwa dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999/2004 (berupa adanya transfer tanggung jawab dari pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota) menyebabkan distorsi ketersediaan data baik di Kabupaten/Kota, di Pemerintahan Provinsi maupun di Pemerintahan Pusat. Pengelolaan data Statistik Sektoral saat ini dilakukan oleh masing-masing Pemerintahan Kabupaten/Kota tanpa adanya kewajiban untuk melaporkannya ke Pemerintah Provinsi. Dampak negatif dari situasi yang digambarkan tersebut, Pemerintahan Provinsi (Dinas dan Instansi di tingkat provinsi) tidak memiliki data dari masing-masing Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten/Kota. Karena itulah, situasi ini perlu diatasi, dan dibutuhkan adanya upaya untuk menjembatani gap antara kebutuhan data dengan ketersediaan data di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Untuk itulah proyek TFSCB ini diperlukan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan koordinasi penyediaan data Statistik di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data Statistik sektoral yang ada di dinas/instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Dengan tersedianya data dimaksud akan memudahkan para perencana pembangunan di semua level untuk dapat menyusun perencanaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.

c. Metodologi

Kegiatan ini akan di fokuskan pada upaya inventarisasi ketersediaan data statistik

sektoral di daerah dan menghimpun masukan melalui aktifitas *workshop* di 6 Kabupaten/Kota.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi.

6) *Streamlining Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project (Grant-TF-057574)*

a. Abstraksi

Di era otonomi daerah saat ini, ketersediaan data Statistik yang berkualitas dan relevan bagi kebutuhan pembangunan merupakan hal yang mendesak dan perlu. Berbagai bentuk perencanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi membutuhkan peningkatan umpan balik berupa apa yang paling strategis diperlukan untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Semua ini membutuhkan ketersediaan Data Statistik yang bermutu dan Relevan. Persoalan yang sangat mendasar yang kini dihadapi oleh hampir seluruh Perencana di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, bahwa dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999/2004 (berupa adanya transfer tanggung jawab dari pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota) menyebabkan distorsi ketersediaan data baik di Kabupaten/Kota, di Pemerintahan Provinsi maupun di Pemerintahan Pusat. Pengelolaan data Statistik Sektoral saat ini dilakukan oleh masing-masing Pemerintahan Kabupaten/Kota tanpa adanya kewajiban untuk melaporkannya ke Pemerintah Provinsi. Dampak negatif dari situasi yang digambarkan tersebut, Pemerintahan provinsi (Dinas dan Instansi di tingkat provinsi) tidak memiliki data dari masing-masing Dinas/Instansi yang ada di kabupaten/kota. Karena itulah, situasi ini perlu diatasi, dan dibutuhkan adanya upaya untuk menjembatani gap antara kebutuhan data dengan ketersediaan data di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat provinsi dan di tingkat Nasional. Untuk itulah proyek TFSCB ini diperlukan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan koordinasi penyediaan data Statistik di tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data Statistik sektoral yang ada di Dinas/Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Dengan tersedianya data dimaksud akan memudahkan para perencana pembangunan di semua level untuk dapat menyusun perencanaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.

c. Metodologi

Kegiatan ini akan difokuskan pada upaya inventarisasi ketersediaan data Statistik Sektoral di daerah dan menghimpun masukan melalui aktifitas *workshop* di enam kabupaten/kota.

d. Hasil dan Keluaran

Publikasi hasil *Streamlining Data Flows From Regions To The Center Under Decentralization Project (Grant-TF-057574)* 2009.

G. PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS

1. SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN DATA DAN STATISTIK

1) Perencanaan SP2010

a. Abstraksi

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dengan menyelenggarakan kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi yang masing-masing dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Pada tahun 2010 BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk yang keenam kalinya sejak Indonesia merdeka. Sensus Penduduk 2010 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan tahapan perencanaan, persiapan, kemudian pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, hingga akhirnya analisis data dan diseminasi hasil pelaksanaan SP 2010. Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 sangat berguna bagi perencanaan pembangunan. Sampai saat ini, hasil registrasi penduduk belum dapat menghasilkan data kependudukan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, SP menjadi satu-satunya sumber data kependudukan yang diharapkan mampu memberikan gambaran keadaan penduduk Indonesia. SP2010 merupakan suatu kegiatan berskala besar yang melibatkan seluruh aparat BPS di tingkat pusat maupun daerah sehingga diperlukan tahapan perencanaan yang matang dalam rangka persiapan sebelum memasuki tahap pelaksanaan lapangan pada tahun 2010. Rangkaian kegiatan yang akan dilakukan sebagai tahap perencanaan antara lain seperti rapat-rapat pembahasan, penyelenggaraan workshop di daerah, pembentukan struktur tim pelaksana lapangan baik di pusat maupun daerah, persiapan seluruh instrumen yang diperlukan, serta penyusunan prosedur dan sistem rencana kerja di lapangan secara keseluruhan dan sistematis. Dengan adanya perencanaan yang matang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas pada setiap tahapan kegiatan sensus, dan dapat segera dicari jalan pemecahannya bila timbul masalah pada pelaksanaan suatu tahapan kegiatan.

Keterlambatan dalam menangani suatu masalah akan mengakibatkan keterlambatan suatu kegiatan dan akan berdampak pada tertundanya kegiatan lain yang mempunyai hubungan dengan kegiatan itu, sehingga secara keseluruhan dapat menghambat proses pelaksanaan SP2010.

b. Tujuan dan Sasaran

Melalui perencanaan SP2010 yang matang diharapkan pelaksanaan lapangan SP2010 akan berjalan lancar dan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu tidak terlepas dari kesiapan mental dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM di BPS khususnya pada para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu pada tahap perencanaan akan diisi dengan kegiatan *workshop* guna menambah informasi dan pengetahuan tentang segala sesuatu mengenai SP2010 bagi aparatur BPS baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Diharapkan dari penyelenggaraan *workshop* selain diperoleh berbagai pemahaman dan pengetahuan juga dapat membangkitkan motivasi bagi aparatur BPS untuk menyukseskan SP2010.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan antara lain adalah dengan menyelenggarakan *workshop* bagi seluruh aparatur BPS baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan *workshop* tersebut.

d. Hasil dan Keluaran

Pemahaman seluruh aparatur BPS menjadi semakin baik terhadap pelaksanaan SP2010 melalui berbagai *workshop* serta tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan SP2010.

2) Pelatihan SP2010

e. Abstraksi

Kegiatan Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelatihan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, hingga analisis data. Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 dapat memberikan gambaran secara faktual mengenai kondisi demografi, sosial-ekonomi dan infrastruktur hingga wilayah administratif yang paling kecil.

Pelatihan adalah salah satu tahap kegiatan yang sangat penting, karena kegiatan ini merupakan bekal bagi petugas lapangan dalam melaksanakan pengumpulan data. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan valid.

f. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dilaksanakannya pelatihan SP2010 adalah untuk memberikan pemahaman konsep dan definisi yang sama pada setiap peserta pelatihan (Innas, Inda, maupun Petugas Lapangan).

Tujuan khusus dari Pelatihan SP2010 adalah tersedianya Petugas Lapangan (Koordinator Lapangan/Korlap, Koordinator Tim/Kortim, dan Pencacah Lapangan/PCL) yang berkualitas, bertanggung jawab, dan disiplin.

g. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan praktek pencacahan di lapangan (*role playing*).

h. Hasil dan Keluaran

Pelatihan SP2010 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Pelatihan Innas (seluruh peserta Innas dari 33 provinsi berkumpul dalam satu tempat pelatihan), Pelatihan Inda (tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia), dan Pelatihan Petugas Lapangan (Korlap, Kortim, dan PCL) yang tersebar di kabupaten/kota, bahkan di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Pelatihan di daerah dilakukan secara serentak bersamaan.

3) Pelaksanaan Lapangan Sensus Penduduk 2010

a. Abstraksi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Sistem Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2010 yang akan datang. Kegiatan Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010 (SP2010) merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan tahapan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, hingga analisis data. Data yang dihasilkan dari kegiatan SP2010 dapat memberikan gambaran secara faktual mengenai kondisi demografi, sosial-ekonomi dan infrastruktur hingga wilayah administratif yang paling kecil. Merujuk pada penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan sebelumnya, kegiatan sensus penduduk secara keseluruhan mencakup sejumlah kegiatan berskala nasional, antara lain pemetaan wilayah administrasi, klasifikasi daerah *urban-rural*, pembentukan/pemetaan wilayah, pembentukan kerangka contoh induk, pendataan penduduk, pendataan perumahan dan rumah tangga, sensus survei (*long form*) modul kependudukan dan pendataan potensi desa. Masing-masing jenis kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan sistematis dimulai dari proses perencanaan hingga analisis data. Sebagai akumulasi dari

sejumlah kegiatan besar berskala nasional yang saling berkesinambungan, pelaksanaan kegiatan SP2010 secara keseluruhan dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun kegiatan, yaitu tahun 2007 – 2013. Pengalokasian jenis-jenis kegiatan dalam setiap tahun kegiatan dilakukan sesuai dengan urutan sistematika dan hierarkinya. Selama tahun anggaran 2008, telah dilaksanakan kegiatan uji coba secara independen untuk masing-masing jenis kegiatan SP2010. Hasil kegiatan uji coba tersebut adalah tersedianya seluruh instrumen, prosedur dan sistem yang telah siap untuk digunakan. Tahapan kegiatan SP2010 yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah Pelaksanaan Lapangan SP2010 yang merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan lapangan secara simultan dan berkesinambungan mulai dari pengumpulan data perumahan dan rumah tangga, penarikan sampel rumah tangga, pengumpulan data kependudukan, pengolahan hingga penyajian data. Dalam kegiatan Pelaksanaan Lapangan SP2010, setiap jenis kegiatan serta instrumen, prosedur dan sistem digunakan satu per satu secara simultan dalam satu rangkaian terpadu sesuai dengan urutan sistematika dan hierarkinya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran salah satu bagian kegiatan yang kegiatan perencanaannya telah disusun pada tahun 2007. Kegiatan SP2010 melibatkan beberapa direktorat di BPS yang terkait antara lain Direktorat Metodologi Statistik yang menangani kegiatan pemetaan wilayah, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang menangani kegiatan penyusunan kuesioner dan buku pedoman pencacahan data kependudukan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menangani kegiatan penyusunan kuesioner dan buku pedoman pencacahan data perumahan dan Direktorat Sistem Informasi Statistik yang menangani sistem pengolahan dan penyajian data.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dilaksanakannya SP2010 adalah tersedianya data kependudukan dan perumahan yang lengkap dan menyeluruh dalam sepuluh tahunan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan khusus dari SP2010 adalah tersedianya data kependudukan yang berguna sebagai evaluasi program pemerintah dalam rangka tujuan pembangunan nasional dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan global atau *Millenium Development Goals*.

c. Metodologi

Kegiatan SP2010 akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh

Kedutaan Besar Indonesia, untuk mencatat penduduk Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure*.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir kegiatan SP2010 adalah:

- (1) Tersedianya data kependudukan yang lengkap sampai tingkat administrasi terkecil;
- (2) Tersedianya data dasar untuk Nomor Induk Kependudukan; dan
- (3) Tersedianya data dasar perumahan yang lengkap sampai tingkat administrasi terkecil.

4) Pelatihan Demografi

a. Abstraksi

Masalah kependudukan saat ini menjadi bahan analisis yang menarik karena berbagai aspek pembangunan berkaitan dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi menjadi modal pembangunan apabila kita mampu memberdayakan (*empowerment*) masyarakat untuk berperan dalam pembangunan itu sendiri. Namun kondisi ini bisa menjadi kebalikannya yaitu menjadi beban pembangunan apabila kita tidak mampu memanfaatkan potensi ini.

Agar jumlah penduduk itu menjadi modal pembangunan, maka perencanaan pembangunan perlu memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah, struktur dan komposisi penduduk masa kini maupun masa yang akan datang. Sampai saat ini, para ekonom, demografer dan pengamat kependudukan serta pembuat kebijakan mempertanyakan dampak pertambahan penduduk. Pertanyaan ini terfokus pada tiga pilihan jawaban, yaitu: apakah pertumbuhan penduduk dapat menjadi penghambat, penunjang, atau tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi penduduk yang dibuat baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan di suatu wilayah.

Perkiraan atau proyeksi penduduk yang disusun secara komprehensif dapat memberikan informasi secara rinci "keadaan" penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah balita, remaja, lansia. Struktur dan komposisi umur penduduk memberikan informasi kepada kita seberapa besar beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu beban yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia muda (0-14 tahun) dan lansia (65+). Data dan informasi seperti ini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang kependudukan sampai pada wilayah terkecil untuk memenuhi

penyediaan data dalam rangka otonomi daerah.

Untuk mempersiapkan tenaga yang mengetahui dan memahami gambaran kependudukan serta permasalahannya pada suatu wilayah perlu diselenggarakan kursus teknik demografi. Materi dalam kursus ini mencakup pengetahuan dasar-dasar demografi, teknik perhitungan, interpretasi hasil serta analisis data.

Materi teknis kursus ini akan disiapkan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan baik berupa buku panduan teori maupun praktek dan paket program yang akan digunakan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan khusus dari kursus ini adalah tersedianya data parameter demografi yang berguna sebagai alat *monitoring* program-program pembangunan nasional dan daerah serta untuk mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan global atau *Millenium Development Goals (MDGs)*.

c. Metodologi

(1) Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam kursus ini antara lain:

- Sensus Penduduk;
- Survei Penduduk Antar Sensus;
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia; dan
- Data lainnya yang diperlukan.

(2) Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kursus ini lebih menitikberatkan pada analisis statistik deskriptif dengan besaran statistik berupa proporsi/persentase dan rata-rata. Selain itu, kajian ini juga menggunakan analisis determinan dengan teknik induktif dalam upaya untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang terjadi.

(3) Peserta

Peserta kursus adalah Kasi/staf Statistik Kependudukan yang berasal dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Setiap provinsi diminta untuk mengirimkan 2 (dua) orang peserta sehingga total jumlah peserta berjumlah 66 orang.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil akhir kegiatan Kursus Teknik Demografi adalah tersedianya data parameter kependudukan yang mencakup estimasi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi sampai tingkat administrasi terkecil (kabupaten/kota).

5) Pengolahan SP2010

a. Abstraksi

Sensus Penduduk merupakan salah satu kegiatan utama Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Indonesia. Pentingnya informasi mengenai kependudukan membuat pemerintah menyediakan dana yang cukup besar, agar tersedia data kependudukan yang baik, benar dan akurat. Untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 diperlukan sistem yang matang. Proses *entry data* merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengolahan SP2010. Agar data tersebut bisa diolah secara cepat diperlukan suatu tahapan pengolahan yang mendukung. Pembuatan program pengolahan data untuk Sensus Penduduk diharapkan mampu mempercepat dan menjaga kualitas data kependudukan hasil sensus penduduk di Indonesia. Data hasil pengolahan survei dan sensus harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendukung kegiatan tersebut diatas diperlukan kegiatan:

- (1) Pengumpulan dan penyusunan bahan pedoman;
- (2) Pengiriman tenaga teknis pengolahan data;
- (3) Pembahasan aturan *rule* validasi pengolahan data;
- (4) Penyusunan program pengolahan data; dan
- (5) Pembuatan buku pedoman program pengolahan dan *repository data*.

b. Tujuan dan Sasaran

Program pengolahan data adalah sarana untuk memindahkan data dari kuesioner ke dalam media komputer. Data tersebut akan diproses menjadi tabel untuk dilakukan analisa.

c. Metodologi

Desentralisasi di 8 (delapan) pusat pengolahan yang terletak di 8 (delapan) BPS Provinsi.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Program pengolahan data SP2010;
- (2) *Database server* data SP2010; dan
- (3) Buku pedoman Pengolahan SP2010 dan *Repository data*.

6) Updating Peta Wilayah Administrasi

a. Abstraksi

Master File Desa dalam hal ini adalah daftar nama dan kode wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota/kotamadya, kecamatan dan desa/kelurahan) beserta peta (peta *hardcopy* dan peta spasial) sangat diperlukan dalam setiap kegiatan sensus/survei.

Dalam rangka telah selesainya Sensus Penduduk 2010 wilayah administrasi dan blok sensus. Pemutakhiran wilayah administrasi dilakukan karena banyak terjadi perubahan (pemecahan dan penggabungan) sejak dilakukan kegiatan *Updating* Tahun 2007, PODES 2008, dan Pemetaan SP2010. *Pasca* kegiatan pemetaan SP2010 perlu dilakukan uji kualitas terhadap hasil pembuatan peta desa dan peta blok sensus, pembangunan metadata, dan pengelolaan master file desa kondisi terkini. Penggabungan data spasial desa dan blok sensus merupakan kegiatan penting untuk membuat data spasial tergabung menjadi satu kesatuan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Peta Indeks dapat dibuat dan SIG dapat dibangun. Uji coba pembuatan SIG SP 2010 dan Statistik Wilayah Kecil dilakukan tahun 2010 agar Tahun 2011 kegiatan pemrograman lebih terkontrol.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Menyusun MFD Hasil Sensus Penduduk 2010;
- (2) Meng-*update* peta spasial dari kondisi 2007, 2008, ,2010;
- (3) Menyusun publikasi peta indeks 2010;
- (4) Menggabungkan data spasial wilayah desa dan BPS untuk seluruh Indonesia; dan
- (5) Membangun SIG SP2010 dan Statistik Wilayah kecil.

c. Metodologi

- (1) Menyusun daftar nama dan kode wilayah administrasi secara *series*;
- (2) Membuat *plot out* peta *digital* kondisi terakhir;
- (3) Melakukan *updating* spasial pada *file* peta *digital*; dan
- (4) Membuat *print out* dari peta *digital* untuk publikasi peta indeks.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran dari kegiatan ini adalah Publikasi Peta Indeks 2010, penggabungan data spasial desa dan BS, aplikasi awal SIG SP2010 dan Statistik Wilayah Kecil.

7) PES 2010

a. Abstraksi

Pengumpulan data melalui sensus tidak terlepas dari *non sampling error*. Kesalahan ini merupakan sumber bias yang disebabkan oleh kesalahan petugas maupun responden. Kesalahan petugas berupa salah cakup (*coverage error*, baik *under coverage* maupun *over coverage*), dan kesalahan isian (*content error*). Kesalahan yang berasal dari responden berupa salah jawab (*response error*), yang merupakan *content error*. Kegiatan *Post Enumeration Survey* Sensus Penduduk 2010 (PES-SP2010) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketelitian pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. PES-SP2010

dirancang untuk penyajian tingkat nasional.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mengetahui tingkat ketelitian cakupan bangunan sensus, rumah tangga dan penduduk; dan
- (2) Mengetahui tingkat ketelitian isian karakteristik rumah tangga dan penduduk.

c. Metodologi

Sebelum pemilihan sampel kabupaten/kota dikelompokkan menurut jumlah penduduk. Penentuan kabupaten/kota lokasi PES-SP2010 proporsional dengan jumlah penduduk. Blok sensus lokasi PES-SP2010 merupakan sub sampel SP2010 yang dipilih secara sistematis. Untuk penelitian *coverage error* dan *content error*, seluruh bangunan sensus dan rumah tangga yang ada pada blok sensus terpilih dicacah. Metode pencacahan adalah wawancara langsung dengan mendatangi tempat tinggal (bangunan sensus) responden. Petugas harus menggunakan sketsa peta untuk mengenali batas-batas BS wilayah kerjanya.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) *Coverage error* untuk rumah tangga dan anggota rumah tangga; dan
- (2) *Content error* untuk variabel jenis kelamin, umur, dan hubungan dengan kepala rumah tangga.

8) Publisitas Pelaksanaan SP2010

a. Abstraksi

Sensus Penduduk merupakan kegiatan besar yang setiap sepuluh tahun sekali dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 diharapkan semakin maksimal sehingga data kependudukan Indonesia semakin berkualitas. Harapan ini dapat terwujud bila seluruh penduduk Indonesia berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan tersebut. Besarnya cakupan pendataan dalam SP2010, yang meliputi seluruh penduduk Indonesia, dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat menjadi tantangan dan batasan dalam pelaksanaan SP2010. Untuk itu, proses penyebarluasan informasi mengenai fokus, muatan, dan manfaat SP2010 perlu dilakukan sejak dini. Sehingga masyarakat memahami pentingnya SP2010 dan kegiatan pendataan tidak menemukan kendala yang berarti, seperti penolakan pendataan, pemberian jawaban yang tidak benar, dan berbagai kendala lainnya. Terkait dengan kepentingan tersebut, BPS dan segenap jajarannya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memandang perlu secara masif dan intensif menyebarluaskan informasi SP2010 melalui Kampanye SP2010. Untuk menunjang suksesnya kegiatan SP2010, BPS memerlukan beberapa strategi dalam

mengkampanyekan SP2010 kepada pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas sebelum dan menjelang hari pelaksanaannya secara cermat, strategis, efektif, efisien, dan berdaya guna. Alat bantu kampanye berupa atribut dan media penyampaiannya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kampanye ke semua lapisan masyarakat, dari wilayah perkotaan sampai dengan wilayah terpencil. Keseragaman atribut dan strategi pemanfaatannya merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar kampanye SP2010 dapat membangun pemahaman yang sama dan positif di mata masyarakat. Dengan menerapkan strategi kampanye yang sama dan berkesinambungan, diharapkan pada saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat sudah tahu (*aware*) terhadap kegiatan SP2010 dan dengan penuh kesadaran berpartisipasi aktif dalam memberikan jawaban yang benar.

b. Tujuan dan Sasaran

Target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Kampanye SP2010 adalah supaya masyarakat mengetahui bahwa pada tanggal 1-31 Mei 2010 akan dilaksanakan Sensus Penduduk, kemudian masyarakat merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak, merasa rugi bila tidak terdata, dan selanjutnya merasa perlu untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan SP2010. Secara umum tujuan utama dari mengkampanyekan SP2010 adalah semua penduduk harus terhitung.

c. Metodologi

Pelaksanaan Publisitas SP2010 tahun anggaran 2009 menggunakan beberapa cara, antar lain dengan melakukan sosialisasi sebelum dan setelah pelaksanaan SP2010. Sebelum dan menjelang pelaksanaan SP2010 akan dilakukan workshop dengan wartawan, melakukan dialog interaktif/*talk show* di radio dan TV sehingga "gaung" SP2010 terdengar oleh seluruh penduduk Indonesia sampai wilayah terpencil sekalipun.

d. Hasil dan Keluaran

Kampanye SP2010 melalui berbagai fasilitas media yang tersedia dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar statistik terutama statistik kependudukan yang dikumpulkan melalui SP2010 serta membangun "*corporate image*" yang baik.

9) Pembentukan MFD SP2010

a. Abstraksi

Kerangka Contoh Induk yang lengkap dan *up to date* akan dapat menjamin keberhasilan kegiatan Badan Pusat Statistik dalam melakukan kegiatan sensus maupun survei.

Karena untuk mendapatkan hasil sensus maupun survei yang dapat dipercaya sangat tergantung pada tersedianya kerangka contoh yang baik, yaitu akurat dan tepat waktu.

Oleh karena itu pemutakhiran kerangka contoh induk perlu dilakukan secara berkesinambungan agar seluruh kegiatan survei-survei yang dilakukan BPS dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Pemutakhiran dan penyempurnaan kerangka contoh induk wilayah dalam bentuk "Master File Desa" (MFD) yang didalamnya memuat blok sensus yang dilengkapi dengan berbagai variabel.

MFD digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan statistik di bidang sosial dan kependudukan yang pencacahannya dilakukan melalui pendekatan rumah tangga.

b. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan pemeliharaan *master file* desa berbasis *web* antara pusat dan daerah hingga tingkat blok sensus yang lengkap dan akurat yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan sensus dan survei, hingga menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi dan pemeliharaan *master file* desa adalah penyempurnaan sistem dan program pemeliharaan MFD & MBS berbasis *web* yang selanjutnya dapat digunakan untuk penentuan *sample size* pada kegiatan sensus maupun survei.

c. Metodologi

Master File Desa dibentuk berdasarkan data yang ada pada kerangka induk, yang berisikan seluruh *unit sampling* berupa identitas wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai ke unit terkecil suatu wilayah pencacahan yaitu blok sensus.

d. asil dan Keluaran

Hasil dan keluaran yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan penyusunan sistem dan program sinkronisasi MFD & MBS berbasis *Web*;
- (2) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan MFD & MBS;
- (3) Menyajikan hasil penyusunan MFD dalam bentuk media komputer yang mudah diakses untuk keperluan pemilihan sampel dan pembentukan master pengolahan baik di daerah maupun di pusat; dan
- (4) Menyempurnakan sistem dan program database MFD.

10) Pembangunan Desain dan Arsitektur Metadata SP2010

a. Abstraksi

Pelaksanaan penyusunan desain dan arsitektur metadata SP2010 perlu dilakukan. Hal ini terkait dengan tanggung jawab BPS sebagaimana diamanatkan dalam:

- (1) UU nomor 16 Tahun 1997;
- (2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 Tahun 1999;

- (3) PP nomor 38, 41 dan 86 Tahun 2007; dan
- (4) Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008.

Pembangunan desain dan arsitektur metadata SP2010 perlu diikuti pula dengan peningkatan kuantitas dan kualitas isian metadata SP2010. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan SP2010 yang dilakukan oleh BPS. Pembangunan desain dan arsitektur metadata SP2010 sarat dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas metadata kegiatan SP2010 yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sehingga pada akhirnya diperoleh sistem aplikasi yang baik dengan isian yang banyak dan akurat.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan terpenting dari pembangunan desain dan metadata SP2010 adalah:

- (1) Untuk meningkatkan kinerja;
- (2) Menyempurnakan metadata SP2010 yang digunakan untuk mempermudah pengisian, dan mempersiapkan integrasi dengan metadata lainnya; dan
- (3) Menyempurnakan diversifikasi sistem diseminasi metadata.

Adapun sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

- (1) Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini;
- (2) Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan SP2010;
- (3) Tersusun dan tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait; dan
- (4) Terbentuknya dasar-dasar panduan kegiatan SP2010.

c. Metodologi

Pengumpulan metadata SP2010 dilakukan dengan kunjungan/koordinasi ke *subject matter* BPS dan kunjungan instansi pemerintah untuk metadata sektoral yang mendukung SP2010.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Rancangan sistem aplikasi metadata SP2010;
- (2) Piranti lunak aplikasi metadata SP2010;
- (3) Piranti lunak aplikasi penunjang *monitoring* dan evaluasi sistem; dan
- (4) Laporan hasil *monitoring* dan evaluasi.

11) Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Publikasi SP2010

a. Abstraksi

Data SP 2010 diperlukan untuk program dan evaluasi dari pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Pada era teknologi informasi, pengguna data memiliki akses ke

fasilitas komputer menggunakan layanan berbasis *web* atau *online*, namun masih ada permintaan data dalam bentuk *hardcopy*. Berdasarkan pengamatan pengguna data telah dikembangkan berbagai produk dan layanan yang memungkinkan pengguna data untuk menentukan cara terbaik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. BPS mendorong pengguna data untuk menggunakan media *online* yaitu *website* BPS. Namun bagi pengguna data konvensional, BPS menyediakan media dalam bentuk publikasi *hardcopy*.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Menginformasikan kepada masyarakat luas tentang rangkaian kegiatan, muatan, dan fokus SP 2010 melalui sistem informasi;
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SP 2010;
- (3) Memberikan pemahaman bagi pengguna data tentang manfaat SP 2010; dan
- (4) Merancang sistem program diseminasi untuk mengoptimalkan SP 2010.

c. Metodologi

- (1) Pengembangan Produk Sensus Penduduk;
- (2) Evaluasi Hasil Sensus Penduduk sebelumnya;
- (3) Rilis Hasil SP 2010; dan
- (4) *Workshop*/Seminar dan Rapat Interdep.

d. Hasil dan Keluaran

Selain *softcopy* yang dikemas dalam bentuk media CD-ROM dan *hardcopy*, ada juga media produk dari penyajian dan diseminasi data SP 2010 yang dapat diakses secara *online* yaitu berupa produk berbasis *web*, *key data*, *GeoMap*, Sensus Tab, dan Sensus *e-book* serta produk metadata.

12) Pembangunan Desain dan Arsitektur Akses *Online* dan Layanan SP2010

a. Abstraksi

Tahap akhir dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS adalah menyajikan data dan informasi statistik kepada para pengguna data. Salah satu bentuk penyajian informasi statistik yang lazim digunakan adalah publikasi. Publikasi yang diterbitkan oleh BPS tidak saja meningkat dalam ragamnya, tetapi juga kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi statistik yang beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan keragaman dan aksesibilitas penyajian informasi statistiknya. Menyongsong kegiatan besar seperti Sensus Penduduk 2010, perlu segera dibangun desain dan arsitektur akses *online* dan layanan Sensus Penduduk 2010. Di samping itu, promosi merupakan suatu yang sangat diperlukan dalam memperkenalkan kegiatan Sensus Penduduk 2010 maupun hasil-hasil

dari publikasi yang telah diterbitkan melalui *booklet*, *leaflet*, dan media lainnya. Untuk menunjang kegiatan ini semua perlu kemasan yang lebih menarik, tidak saja dikemas dalam media komputer (CD, disket) tetapi juga dalam media internet (*website*).

b. Tujuan dan Sasaran

Pengemasan dan penyajian dalam bentuk *website*, *booklet* maupun kemasan elektronik (*softcopy*) bertujuan untuk memperluas jangkauan dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna data BPS. Melalui media tersebut, informasi dapat disebarluaskan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian sasaran BPS sebagai pusat informasi statistik dapat tercapai.

c. Metodologi

Informasi statistik atau sumber data utama diperoleh dari *subject matter*. Kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan metode *website*, promosi atau sosialisasi dengan nara sumber dari internal maupun eksternal BPS.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluarannya akan disebarluaskan kepada pengguna melalui media: *website*, *booklet*, kemasan elektronik (*softcopy*).

13) Pembangunan Desain dan Arsitektur Sistem Dokumentasi SP2010

a. Abstraksi

BPS sebagai instansi penyedia data melaksanakan Sensus Penduduk setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Penduduk merupakan produk unggulan BPS karena muatannya lengkap dan menjangkau sampai wilayah terkecil, sehingga sangat diperlukan pengguna sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan berbagai kegiatan lainnya. Mengingat pentingnya kegiatan Sensus Penduduk, maka pengelolaan dokumentasi SP 2010 sangat perlu dilestarikan sebagai acuan kegiatan Sensus Penduduk berikutnya. Kegiatan dokumentasi akan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, yang terbagi menjadi beberapa tahapan (gladi kotor, gladi bersih, pencacahan lengkap). Selain melestarikan dokumentasi akan disiapkan juga fasilitas layanan dokumentasi SP 2010. Melalui sistem pengelolaan dan layanan dokumentasi SP 2010 yang terstruktur diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna.

b. Tujuan dan Sasaran

Dengan dibuatnya sistem pengelolaan dan layanan dokumentasi Sensus Penduduk 2010 maka seluruh jenis dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2010 akan dikelola dan didokumentasikan melalui sistem yang terstruktur,

sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pengguna dalam pelaksanaan kegiatan lainnya ataupun sebagai acuan dalam kegiatan Sensus Penduduk berikutnya.

c. Metodologi

Sistem pengelolaan dan layanan dokumentasi Sensus Penduduk 2010 dibuat secara bertahap. Pada tahap awal lebih difokuskan pada pengelolaan dokumentasi seluruh jenis dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2010. Tahap selanjutnya difokuskan pada akses layanan dokumentasi kepada pengguna. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Membuat rancangan sistem pendokumentasian;
- (2) Membuat struktur kegiatan dalam pengelolaan dokumentasi;
- (3) Membuat rancangan jenis kemasan dan jenis layanan dokumentasi Sensus Penduduk 2010; dan
- (4) Melaksanakan pelestarian dokumentasi SP 2010.

d. Hasil dan Keluaran

- (1) Publikasi himpunan dokumen kegiatan yang digunakan dalam SP 2010;
- (2) Dokumentasi *digital* kegiatan SP 2010;
- (3) Sosialisasi akses dokumentasi SP 2010;
- (4) Kemasan layanan dokumentasi *digital* SP 2010; dan
- (5) Layanan dokumentasi SP 2010.

IV. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN (PK)

Program pendidikan kedinasan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedinasan di STIS. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BPS diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas pokok BPS. Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang. Berbagai kegiatan yang dicakup dalam program pendidikan kedinasan pada tahun 2010 diuraikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24. Kegiatan yang Dilaksanakan Pada Program Pendidikan Kedinasan Pusat Tahun Anggaran 2010

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
(1)	(2)
0110	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN
0016	PENDIDIKAN /PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)
A	Persiapan Belajar dan Bekerja Di Bidang Statistik
B	Pelaksanaan Belajar dan Bekerja Di Bidang Statistik
C	Pengajaran dan Perkuliahan
D	Penyelenggaraan Program DIV
E	Riset Dosen
F	Penerimaan Mahasiswa Baru

Secara rinci kegiatan pada program pendidikan kedinasan dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDIDIKAN/ PENGAJARAN/ PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)

1) Persiapan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik

a. Abstraksi

Dalam rangka menjalani proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik selain proses belajar mengajar yang dilaksanakan dikelas perlu juga menjalani praktek kerja lapangan (belajar dan bekerja di bidang statistik) yang dilaksanakan di daerah tertentu di provinsi Jawa Barat. Kegiatan praktek kerja lapangan dimaksudkan agar mahasiswa-mahasiswi STIS dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kelas dalam bentuk penelitian lapangan. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi STIS semakin bertambah kemampuan pengetahuannya, sehingga menjadi pegawai siap pakai. Oleh karena itu kegiatan praktek lapangan perlu ditingkatkan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mengaplikasikan ilmu;
- (2) Melengkapi kemampuan dan pengetahuan;
- (3) Meningkatkan kualitas; dan
- (4) Mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi menjadi tenaga siap pakai.

c. Metodologi

Dilaksanakannya tahap persiapan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa.

d. Hasil dan Keluaran

Terciptanya mahasiswa-mahasiswa menjadi tenaga siap pakai.

2) Pelaksanaan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik

a. Abstraksi

Dalam rangka menjalani proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik selain proses belajar mengajar yang dilaksanakan dikelas perlu juga menjalani praktek kerja lapangan (belajar dan bekerja di bidang statistik) yang dilaksanakan di daerah tertentu di provinsi Jawa Tengah. Kegiatan praktek kerja lapangan dimaksudkan agar mahasiswa-mahasiswi STIS mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kelas dalam bentuk penelitian di lapangan. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi STIS semakin bertambah kemampuan pengetahuannya, sehingga menjadi pegawai siap pakai. Oleh karena itu kegiatan praktek lapangan perlu ditingkatkan.

b. Tujuan dan Sasaran

- (1) Mengaplikasikan ilmu;
- (2) Melengkapi kemampuan dan pengetahuan;
- (3) Meningkatkan kualitas; dan
- (4) Mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa menjadi tenaga siap pakai.

c. Metodologi

Dilaksanakannya tahap pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa.

d. Hasil dan Keluaran

Laporan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL).

3) Pengajaran dan Perkuliahan

a. Abstraksi

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sesuai dengan visi dan misi STIS sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan, STIS berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik. Dalam pengelolaannya STIS tetap konsisten memberikan tunjangan ikatan dinas dan tunjangan tugas belajar. Perkuliahan dilaksanakan selama 8 semester. Ujian untuk tiap semester dilakukan dua kali yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada semester 5 dan 6 akan dilakukan praktek kerja lapangan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diselenggarakannya program pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi statistika dengan mencetak Sarjana Sains Terapan yang profesional yang siap pakai.

Sasarannya adalah para lulusan SMA jurusan IPA yang mempunyai nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 7 pada rapor untuk dididik menjadi tenaga ahli statistik.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menghasilkan tenaga siap pakai adalah dengan cara menyelenggarakan perkuliahan, memberikan ujian (evaluasi), dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui Praktik Kerja Lapangan.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan Keluaran dari kegiatan ini adalah para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang siap bekerja dan ditempatkan di BPS seluruh Indonesia.

4) Penyelenggaraan Program D-IV

a. Abstraksi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan BPS akan tenaga ahli statistik dan ahli di bidang lainnya, maka pegawai BPS Pusat dan daerah yang masih memiliki tingkat pendidikan sebatas SLTA diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sarjana statistik dan lainnya di beberapa perguruan tinggi lainnya serta kepada para pegawai yang tugas belajar diberi biaya bantuan belajar.

b. Tujuan dan Sasaran

Menghasilkan tenaga sarjana statistik yang mampu melaksanakan kegiatan statistik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hingga tahap analisis data.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menghasilkan tenaga siap pakai adalah dengan cara menyelenggarakan perkuliahan, memberikan ujian (evaluasi), dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui Praktik Kerja Lapangan

d. Hasil dan Keluaran

Mendapatkan tenaga sarjana statistik dan sarjana komputasi statistik yang handal.

5) Riset Dosen

a. Abstraksi

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sebagai institusi pendidikan tinggi, STIS memiliki kompetensi untuk menjawab dan merespon masalah-masalah yang terjadi di masyarakat melalui media penelitian. Untuk

mencapai tujuan tersebut, STIS merencanakan untuk melakukan penelitian dengan lima topik bahasan utama, yang akan dilakukan oleh kelompok Dosen.

Kelima topik bahasan utama tersebut adalah: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi non-respon pada Survei tahunan industri pengolahan Besar dan Sedang; 2) Produktivitas padi, studi kajian ubinan antara KSK dan Mantri Tani; 3) Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis*; 4) Efektivitas Penempatan lulusan STIS di kabupaten/kota; dan 5) Pembuatan sistem inventori ATK dan buku perpustakaan.

Diharapkan dengan adanya studi tersebut, STIS dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang akan bermanfaat bagi BPS dan STIS.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilakukannya studi adalah untuk memberikan solusi pada permasalahan peningkatan kualitas data dan statistik BPS, dan efektivitas penempatan tenaga S1-STIS dan efisiensi pengelolaan inventori di STIS.

Sasarannya adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas keluaran BPS dan STIS.

c. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur, observasi dan penelitian lapangan, wawancara dan diskusi untuk menggali informasi dan umpan balik (*feed back*) dari masyarakat pengguna data, dan membuat sistem rancangan inventori.

d. Hasil dan Keluaran

Bentuk keluaran yang dihasilkan adalah berupa hasil/ publikasi penelitian, dan rancangan sistem inventori.

6) Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Abstraksi

Kebutuhan tenaga ahli statistik semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya wilayah pemekaran, padahal tanpa adanya pemekaran wilayah pun tenaga ahli statistik di BPS masih kurang, ditambah lagi adanya pegawai yang pensiun setiap tahun.

Di samping itu, kualitas ahli statistik pun harus semakin ditingkatkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan di lapangan yang semakin besar terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Untuk itu semua diperlukan dukungan yang prima dan terus menerus dari unit-unit yang ada di STIS. Dukungan serta pelayanan prima dari unit-unit hanya bisa terwujud apabila

sumberdaya yang tersedia cukup memadai yang didukung dengan sumberdaya manusia yang mempunyai ketrampilan, keahlian, pengetahuan, serta dedikasi yang tinggi.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Tersedianya tenaga ahli statistik yang siap pakai di seluruh Indonesia; dan
- (2) Meningkatnya kualitas pegawai BPS di seluruh Indonesia.

c. Metodologi

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan di STIS Jakarta dengan merekrut calon mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia. Ditargetkan dalam satu angkatan diterima 500 mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan yang cukup ketat meliputi tes akademik, *psychotest*, dan wawancara.

d. Hasil dan Keluaran

Hasil dan keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah diterimanya 500 mahasiswa baru baik yang berstatus ikatan dinas maupun tugas belajar.

LAMPIRAN

<http://www.wps.go.id>

Lampiran 1. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROGRAM PKyB BPS PUSAT TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
01.01.09	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	
09.0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	
0001	PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511125	<u>Belanja Tunj. Pph PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
511192	<u>Belanja Tunj. Lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI</u>	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
512211	<u>Belanja uang lembur</u>	
	1 Uang lembur pegawai :	
	- Golongan I	} 1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	- Golongan II	
	- Golongan III	
	- Golongan IV	
	2 Uang makan lembur :	
	- Golongan I	} 1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	- Golongan II	
	- Golongan III	
	- Golongan IV	
512311	<u>Belanja Vakasi</u>	
	BIRO KEPEGAWAIAN	
	1 Honorarium Tim Penerima & Pemeriksa Hasil Ujian Pegawai Baru	1. Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai 2. Bagian Administrasi Kepegawaian
	STIS	
	1 Honorarium Pembuatan Naskah Ujian STIS	} Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
	2 Honorarium Koreksi Hasil Ujian STIS	
	3 Honorarium Pengawas Ujian STIS	
512412	<u>Belanja Pegawai Transito</u>	
	1 Belanja gaji pokok dan tunjangan lain-lain 3000 pegawai	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
09.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	
0024	PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/ANGKUTAN MAKANAN PNS	
521113	<u>Belanja untuk menambah daya tahan tubuh</u>	
	1 Pengadaan bahan makanan untuk pegawai	KORPRI
0025	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	1 Biaya check up kesehatan pejabat eselon III	Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai
	2 Biaya check up kesehatan pejabat eselon IV	Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai
	3 Biaya pemeriksaan kesehatan PNS ke Majelis Penguji Kesehatan	Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai

Lanjutan Lampiran 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
0026	POLIKLINIK/ OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Penyediaan obat-obatan untuk poliklinik umum 2 Penyediaan obat-obatan untuk poliklinik gigi	Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Honorarium dokter 2 Honorarium perawat 3 Biaya pengadaan poliklinik umum dan gigi termasuk gigi palsu	Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai Bagian Kesejahteraan & Pembinaan Pegawai
0028	PELANTIKAN/ PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Penyelenggaraan pelantikan	Bagian Administrasi Kepegawaian
0032	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> 1 Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai 2 Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai baru	Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga
0034	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u> 1 Pengadaan pakaian untuk pengemudi/ juru taman, 44 orang 2 Pengadaan pakaian untuk satpam 3 Pengadaan pakaian Para Medis 4 Pengadaan pakaian Resepsionis 5 Pengadaan pakaian juru bersih/CS taman 6 Cadangan pakaian dinas tenaga baru	Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga
0205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	
523111	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> BIRO UMUM 1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPS Pusat Jl. Dr. Sutomo 2 Pemeliharaan halaman, perawatan taman/ jalan lingkungan BPS Pusat Jl. Dr. Sutomo STIS 1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2 Pemeliharaan halaman, perawatan taman/ jalan lingkungan PUSDIKLAT 1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2 Pemeliharaan halaman, perawatan taman/ jalan lingkungan	Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga STIS STIS Pusdiklat Pusdiklat
1138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10	
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> 1 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 Esselon III & IV 2 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 Esselon III & IV 3 Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-6	Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga
2005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> BIRO UMUM 1 Pemeliharaan kendaraan operasional roda-2 2 Pemeliharaan roda-2 BPS daerah Pengadaan tahun 2010	Bagian Rumah Tangga Bagian Penyusunan Anggaran
2006	PERAWATAN SARANA GEDUNG	
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> BIRO UMUM 1 Pemeliharaan mesin STP (<i>Sewage Treatment Plant</i>) 2 Pemeliharaan Instalasi Listrik 3 Pemeliharaan Instalasi Air/PAM 4 Pemeliharaan Instalasi Telepon 5 Pemeliharaan BAS (<i>Building Automation System</i>) 6 Pemeliharaan Lift 7 Pemeliharaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (Mesin Tik, Meja/Kursi, fax, dsb) 8 Pemeliharaan Genset a. 40 KVA b. 147 KVA c. 350 KVA d. 500 KVA 9 Pemeliharaan Pompa Air a. Diesel Pump b. Pompa air 10 Pemeliharaan Rissografit Folio dan DK 11 Pemeliharaan AC Central BPS 12 Pemeliharaan AC Split	Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga

Lanjutan Lampiran 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
	13 Pemeliharaan <i>sound system</i>	Bagian Rumah Tangga
	14 Pemeliharaan travo 1250 KVA	Bagian Rumah Tangga
	15 Pemeliharaan Mesin cetak offset/roll & penunjangnya	Bagian Rumah Tangga
	16 Pemeliharaan Mesin Jahit Kawat/benang & Gestetner	Bagian Rumah Tangga
	17 Pemeliharaan Peralatan Dokter Gigi	Bagian Rumah Tangga
	18 Pemeliharaan <i>Viewer/Overhead Projector</i>	Bagian Rumah Tangga
	19 Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Bagian Rumah Tangga
	20 Pemeliharaan PABX Telepon dan instalasi (BPS, Pusdiklat, STIS)	Bagian Rumah Tangga
	21 Pemeliharaan Mesin <i>handkey</i>	Bagian Rumah Tangga
	22 Pemeliharaan <i>Fire Hydrant</i>	Bagian Rumah Tangga
	23 Pemeliharaan <i>Fire Detector</i>	Bagian Rumah Tangga
	24 Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran	Bagian Rumah Tangga
	25 Lampu neon <i>sign</i>	Bagian Rumah Tangga
	26 Pemeliharaan Mesin Print Document 7000 XEROX	Bagian Rumah Tangga
	27 Pemeliharaan Mesin Print Document 4750 XEROX	Bagian Rumah Tangga
	DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK	
	1 Pemeliharaan komputer dan alat penunjangnya	Subdit. Pengelolaan Teknologi Informasi
	2 Perawatan sistem UPS ruang data center & AC ruang server	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	3 Perawatan perangkat jaringan komunikasi data	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	4 Perawatan <i>server all risk</i>	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	PUSDIKLAT	
	1 Perawatan mesin penyaring	Pusdiklat
	2 Perawatan STP	Pusdiklat
	3 Pemeliharaan instalasi telpon	Pusdiklat
	4 Pemeliharaan Lift	Pusdiklat
	5 Pemeliharaan AC Split	Pusdiklat
	6 Pemeliharaan genset 150 KVA	Pusdiklat
	7 Pemeliharaan PABX, telpon, dan instalasi	Pusdiklat
	8 Perbaikan instalasi air	Pusdiklat
	9 Perbaikan <i>hydrant</i>	Pusdiklat
	10 Perbaikan <i>amplifier</i>	Pusdiklat
	11 Perbaikan <i>fire alarm</i>	Pusdiklat
	12 Perbaikan instalasi lampu taman	Pusdiklat
2007	LANGGANAN DAYA DAN JASA	
522111	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa</u>	
	1 Langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air)	Bagian Perbendaharaan
2178	JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT	
521114	<u>Belanja pengiriman surat dinas pos pusat</u>	
	1 Biaya pengiriman surat dinas	Bagian Perbendaharaan
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	
	A. OPERASIONAL PERKANTORAN	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>	
	DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK	
	1 Biaya Koneksi Internet Primer	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	2 Biaya Koneksi Internet Sekunder	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	3 Koneksi Virtual Private Networks	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
	BIRO KEUANGAN	
	1 Biaya operasional lain-lain dan keperluan kantor	Bagian Perbendaharaan
	2 Langganan majalah/surat kabar, buletin (dalam/luar negeri)	Bagian Hubungan Masyarakat
	3 Biaya foto copy	Bagian Perbendaharaan
	4 Biaya konsumsi RAPIM, rapat FMS, rapat Struktural dan lainnya	Bagian Perbendaharaan
	5 Biaya konsumsi kegiatan sosialisasi BPS	Bagian Perbendaharaan
	6 Biaya operasional sehari-hari perkantoran	Bagian Perbendaharaan
	7 Biaya operasional satpam khusus hari raya	Bagian Perbendaharaan
	8 Biaya konsumsi jamuan rapat	Bagian Perbendaharaan
	BIRO HUMAS DAN HUKUM	
	1 Biaya jasa resepsionis	1. Biro Humas dan Hukum 2. Bagian Perbendaharaan
	BIRO UMUM	
	1 Pengadaan ATK atau ARK untuk keperluan sehari-hari kantor	Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan
	2 Biaya jasa kebersihan/cleaning service	Bagian Perbendaharaan
	3 Biaya jasa pengemudi dan juru taman	Bagian Perbendaharaan
	4 Biaya jasa keamanan rumah dinas pondok bambu	Bagian Perbendaharaan
	5 Pengadaan pengharum ruangan kerja dan kelas Pusdiklat	1. Biro Umum 2. Pusdiklat
	6 Pengadaan peralatan lainnya	Biro Bina Program
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	BIRO KEUANGAN	
	1 Pengadaan Ensiklopedia Statistik	Biro Keuangan
	2 Biaya Pengawasan polisi untuk pengambilan uang dari Bank	Biro Keuangan

Lanjutan Lampiran 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
	BIRO BINA PROGRAM	
	1 Biaya penerimaan pegawai baru untuk BPS Pusat dan Daerah	Biro Kepegawaian
	2 Biaya penerimaan pegawai baru untuk BPS Pusat dan Daerah	Biro Bina Program
522114	<u>Belanja sewa</u>	
	1 Biaya sewa alat kebersihan dan pengharum ruangan	Bagian Rumah Tangga
	2 Biaya fumigasi & pengharum ruangan	Bagian Rumah Tangga
	3 Sewa ruang penerimaan pegawai	Biro Kepegawaian
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u>	
	1 Transpor lokal Satpam	Bagian Rumah Tangga
	2 Perjalanan dalam rangka penerimaan pegawai	Biro Kepegawaian
09.0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	
0007	PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	BIRO UMUM	
	1 Pencetakan buku kerja/agenda eselon I & II	Bagian Penggandaan
	2 Pencetakan buku kerja/agenda eselon III	Bagian Penggandaan
	3 Pencetakan buku kerja/agenda eselon IV	Bagian Penggandaan
	4 Pencetakan buku kerja/agenda KSK	Bagian Penggandaan
	5 Pencetakan kalender dinding	Bagian Penggandaan
	6 Pencetakan kalender meja	Bagian Penggandaan
	7 Pencetakan varia statistik	Biro Humas dan Hukum
	8 Pencetakan buku data strategis	Direktorat Diseminasi Statistik
	9 Pencetakan buku petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran	Biro Bina Program
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ ANALISA DATA DAN STATISTIK	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	BIRO UMUM	
	1 Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SABMN Pusat Daerah	Biro Umum
	BIRO BINA PROGRAM	
	1 Biaya pertemuan/koordinasi Kasie Binagram	Biro Bina Program
	BIRO KEUANGAN	
	1 Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SAK Pusat Daerah	Biro Keuangan
	KORPRI	
	1 Pembahasan dan evaluasi non teknis	KORPRI
	2 Pembahasan Kegiatan Sosial	KORPRI
	BIRO KEPEGAWAIAN	
	1 Pengumpulan, penilaian dan konsultasi data/administrasi Kepegawaian	Biro Kepegawaian
	INSPEKTORAT	
	1 Penyusunan adm, evaluasi dan laporan pengawasan	Inspektorat
524111	<u>Belanja perjalanan dinas biasa (DN)</u>	
	1 Transport lokal pemungutan data/administrasi Perlengkapan, Urdal & kearsipan	Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan
	2 Transport lokal pemungutan data/administrasi Perencanaan, Penyusunan Anggaran & Monitoring	Bagian Penyusunan Anggaran
	3 Perjalanan Kasie Binagram	Biro Bina Program
	4 Transport lokal pemungutan data/administrasi Keuangan	Bagian Perbendaharaan
	5 Transport lokal pemungutan data non teknis	KORPRI
	6 Perjalanan peliputan kegiatan sosial	KORPRI
	7 Transport lokal kegiatan sosial	KORPRI
	8 Transport lokal pemungutan data/administrasi Kepegawaian	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
	9 Transport lokal pemungutan data/administrasi/konsultasi pengawasan	Inspektorat
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	
	A. PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN BELANJA PEGAWAI MENGIKAT	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	1 Biaya tabulasi Penyusunan Anggaran/Perhitungan belanja Pegawai Pusat dan daerah	Bagian Penyusunan Anggaran
	2 Pengadaan ATK dan komputer supplies	Bagian Penyusunan Anggaran
	3 Biaya penyusunan anggaran/RKAL	Bagian Penyusunan Anggaran
	4 Rekonsiliasi data RKAL	Bagian Penyusunan Anggaran
	5 Penyusunan dan Perapihan data pendukung	Bagian Penyusunan Anggaran
	6 Biaya penyusunan anggaran di daerah	Bagian Penyusunan Anggaran
	B. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	1 Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan	Bagian Perbendaharaan
	2 ATK & Penggandaan Juknis Keuangan	Bagian Perbendaharaan

Lanjutan Lampiran 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	1 Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama luar negeri	Bagian Kerjasama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan
	2 Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama dalam negeri	Bagian Kerjasama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan
	3 Pengumpulan dan penyiapan materi, kehumasan, hukum & organisasi	Biro Humas dan Hukum
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u>	
	1 Monitoring/pembinaan Kehumasan dan sosialisasi statistik	Bagian Hubungan Masyarakat
	2 Transpot lokal pemungutan data/administrasi Kehumasan	Bagian Hubungan Masyarakat
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	BIRO KEPEGAWAIAN	
	1 Evaluasi keegiatan tata usaha kepegawaian	Bagian Administrasi Kepegawaian
	2 Penyusunan pembinaan kepegawaian	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
	3 Penyusunan laporan kepegawaian	Bagian Mutasi Pegawai
	4 Evaluasi jabatan fungsional	Bagian Jabatan Fungsional
	BIRO BINA PROGRAM	
	1 Evaluasi perencanaan anggaran	Bagian Penyusunan Rencana
	2 Evaluasi Penyusunan Anggaran	Bagian Penyusunan Anggaran
	3 Evaluasi Standar Harga dan Monitoring Program	Bagian Standar Harga, Monitoring Program & Evaluasi Program
	BIRO KEUANGAN	
	1 Penyusunan laporan TP/TGR dan Administrasi Keuangan	Bagian Administrasi Keuangan
	2 Penyusunan laporan akuntansi Keuangan	Bagian Akuntansi
	3 Penyusunan laporan perbendaharaan	Bagian Perbendaharaan
	4 Penyusunan laporan verifikasi keuangan	Bagian Verifikasi
	5 Penggandaan/pencetakan laporan TP/TGR, PNPB, juknis adm keuangan, pajak & laporan perhitungan anggaran negara	Biro Keuangan
	BIRO UMUM	
	1 Penyusunan laporan pengadaan, kearsipan & ekspedisi	Bagian Pengadaan, Arsip dan Ekspedisi
	2 Penyusunan laporan kerumah tangga	Bagian Rumah Tangga
	3 Penyusunan laporan inventaris/LMBT	Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan
	4 Penyusunan laporan penggandaan	Bagian Penggandaan
0475	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>	
	BIRO KEPEGAWAIAN	
	1 Pembahasan perencanaan kepegawaian	Biro Kepegawaian
	2 Penyempurnaan dokumentasi tata naskah kepegawaian	Bagian Administrasi Kepegawaian
	3 Biaya penyelenggaraan ujian dinas	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
	4 Pelatihan Teknis/Fungsional untuk pengembangan pegawai	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u>	
	BIRO KEUANGAN	
	1 Pemindahan/penempatan pegawai lulusan STIS	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	2 Mutasi/promosi pegawai dari pusat ke daerah/daerah ke pusat	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	3 Mutasi/promosi pegawai antar daerah	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	4 Pemulangan pegawai yang pensiun & pesangon ke tempat menetap,dsb	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Perbendaharaan
	5 Pemanggilan pegawai dalam rangka pelantikan jabatan	Biro Kepegawaian
0487	MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
524111	<u>Belanja perjalanan biasa (DN)</u>	
	1 Monitoring/pembinaan kepegawaian	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
	2 Monitoring/pembinaan Penyusunan Anggaran, Perencanaan dan Movev	Biro Bina Program
	3 Perjalanan nara sumber	Biro Bina Program
	4 Monitoring/pembinaan administrasi keuangan	Bagian Administrasi Keuangan
	5 Rekonsiliasi penghitungan anggaran negara	Bagian Verifikasi
	6 Monitoring/pembinaan dan penyelesaian TP/TGR	Bagian Administrasi Keuangan
	7 Sosialisasi jadwal retensi arsip keuangan, PNBP	Biro Keuangan
	8 Perjalanan pimpinan	Biro Keuangan
	9 Monitoring/pembinaan kearsipan, Urdal & Perlengkapan	Bagian Rumah Tangga
	10 Peliputan kegiatan di daerah	KORPRI
524211	<u>Belanja perjalanan biasa (LN)</u>	
	1 Perjalanan konferensi ke luar negeri, termasuk fiskal	Bagian Administrasi Keuangan
00518	PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL DAN KEGIATAN	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	
	1 Biaya Pembahasan dalam rangka penilaian awal Tim jabatan Fungsional	Biro Kepegawaian
	2 Biaya Evaluasi dalam rangka penilaian dan penelitian akhir Tim Jabatan Fungsional	Biro Kepegawaian

**Lampiran 2. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROGRAM PSPAN
BPS PUSAT TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	
17.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN	
2003	SEWA GEDUNG KANTOR/ PERALATAN/ KENDARAAN	
522114	<u>Belanja Sewa</u>	
	1 Sewa lahan parkir BPS Pusat	Bagian Rumah Tangga
	2 Sewa gudang/gedung pusat pengolahan di daerah	Bagian Penyusunan Anggaran
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>	
	1 Biaya Administrasi	Bagian Perbendaharaan
	2 Biaya Non operasional lainnya	Bagian Perbendaharaan
17.0079	PEMBANGUNAN GEDUNG	
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	
	1 Perencanaan Perluasan gedung dan Asrama Pusdiklat	Bagian Rumah Tangga
	2 Lanjutan pembangunan gedung STIS	Bagian Rumah Tangga
	3 Revitalisasi gedung STIS	Bagian Rumah Tangga
17.0081	PENGADAAN KENDARAAN	
0289	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	
	1 Pengadaan kendaraan Operasional Roda-2	Bagian Inventarisasi, Penyimpanan & Penghapusan
17.0089	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG	
0272	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	
	1 Pengadaah Genset	Bagian Rumah Tangga
	2 Pengadaan AC <i>Split Duck</i> & perbaikan lift gedung 3	Bagian Rumah Tangga
	3 Mesin Cetak konsep CPR (Corporate Print Room)	Bagian Rumah Tangga
	4 Pengadaan DocuCenter-III	Bagian Rumah Tangga
	5 Pengadaan perlengkapan kantor BPS Prop/Kab/Kota	Bagian Penyusunan Anggaran
	6 Pengadaan Meja dan Kursi kerja STIS	Bagian Rumah Tangga
	7 Pengadaan Meja dan Kursi kerja Gedung 2	Bagian Rumah Tangga
17.0113	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	
0508	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	
	1 Renovasi gedung 5 dan gedung 6	Bagian Rumah Tangga

Lampiran 3. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROGRAM P2S BPS PUSAT TAHUN ANGGARAN 2010

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
01.01.27	PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	
27.0002	PENYELENGGARAAN PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	
04863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	
A	Honor KPA, PPK, Pejabat Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Keuangan/Bagian Perbendaharaan
B	Honor Panitia Pengadaan	Bagian Pengadaan, Arsip dan Ekspedisi
27.0035	PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	
A	Penyusunan Renstra BPS 2010-2014	Bagian Penyusunan Rencana
B	Penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030	Bagian Penyusunan Rencana
C	Updating Database Peta Sarana dan Prasarana Fisik BPS	Bagian Penyusunan Rencana
D	Evaluasi Kegiatan Statistik	Bagian Penyusunan Anggaran
E	Penyusunan SBK dan SHBJ	Bagian Standar Harga, Monitoring Program & Evaluasi Program
F	Penyusunan Laporan Aktivitas dan LAKIP BPS	Bagian Standar Harga, Monitoring Program & Evaluasi Program
G	Monitoring dan Evaluasi Program	Bagian Standar Harga, Monitoring Program & Evaluasi Program
H	Pengelolaan BMN	Bag. Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan
I	STATCAP-CERDAS TF093092 Tahun 2010 (BLN)	PMU STATCAP-CERDAS/Sekretaris KORPRI
J	Biaya Pendamping STATCAP CERDAS	PMU STATCAP-CERDAS/Sekretaris KORPRI
K	Biaya PHRD Grant TF093092 Tahun 2010 (BLN)	PMU STATCAP-CERDAS/Sekretaris KORPRI
L	Biaya Pendamping PHRD Grant	PMU STATCAP-CERDAS/Sekretaris KORPRI
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN	
A	Kegiatan Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan BPS	Bagian Kerjasama, Protokol & Penyiapan Materi Pimpinan
B	Peningkatan Kualitas dan Wawasan SDM	Bagian Kerjasama, Protokol & Penyiapan Materi Pimpinan
C	Penyusunan <i>Soft Library</i> Materi Pimpinan	Bagian Kerjasama, Protokol & Penyiapan Materi Pimpinan
D	Sosialisasi Kegiatan BPS Tahun 2010	Bagian Hubungan Masyarakat
E	Studi Opini Publik Tentang Data Strategis BPS	Bagian Hubungan Masyarakat
F	Rancangan Peraturan Kepala BPS	Bagian Hukum dan Organisasi
G	<i>Soft Library</i> Dokumentasi Peraturan Perundangan	Bagian Hukum dan Organisasi
H	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi BPS	Bagian Hukum dan Organisasi
1436	PENYUSUNAN RENJA KL DAN ANGGARAN	
A	Penyusunan Renja KL	Bagian Penyusunan Rencana
B	Penyusunan Anggaran	Bagian Penyusunan Anggaran
27.0054	PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
0040	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	
A	Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data & Akses <i>Online</i>	Subdit. Jaringan Komunikasi Data
B	Pengembangan Sistem Basis Data	Subdit. Pengembangan Basis Data
C	Pengembangan Sistem Informasi	Subdit. Pengelolaan Teknologi Informasi
D	Pembuatan Program Pengolahan & Repository Data	Subdit. Integrasi Pengolahan Data
E	Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi	Subdit. Publikasi dan Kompilasi Statistik
F	Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik & <i>Website</i>	Subdit. Layanan dan Promosi Statistik
G	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik	Subdit. Rujukan Statistik
H	Pembuatan Kemasan Layanan Publik Berbasis <i>Digital</i>	Subdit. Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik
27.0067	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA	
00011	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL	
A	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
B	Diklat Pimpinan Tingkat III	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
C	Diklat Pimpinan Tingkat II	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
0014	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN	
A	Diklat Prajabatan Golongan II	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
B	Diklat Prajabatan Golongan III	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
0018	RINTISAN PENDIDIKAN GELAR	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
0021	PELATIHAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA	
A	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	1. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 2. Biro Kepegawaian
B	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 2. Biro Kepegawaian
C	Diklat Jarak Jauh Statistik Dasar	Bagian Diklat Teknis dan Fungsional

Lanjutan Lampiran 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
D	Diklat TOT KSK Pengolahan Data Statistik Dasar	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
E	Diklat Pemrograman <i>Database</i> Terintegrasi	1. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 2. Subdit. Integrasi Pengolahan Data
F	Diklat Kompetisi Pejabat Eselon IV	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
G	Pembinaan Administrasi dan Pemberkasan CPNS	Bagian Mutasi Pegawai
H	Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi	Bagian Jabatan Fungsional
I	Pemilihan KSK Berprestasi	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
J	<i>Assesment Center</i>	Bagian Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai
K	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Bagian Administrasi Kepegawaian
L	Penyusunan Uraian Pekerjaan Dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan	Bagian Administrasi Kepegawaian
M	Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian	Bagian Administrasi Kepegawaian
N	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	Bagian Akuntansi
O	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Bagian Perbendaharaan
P	Pembinaan Administrasi Keuangan	Bagian Administrasi Keuangan
27.0092	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS	
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN	
A	Review Laporan Keuangan BPS Tahun 2008	Inspektorat Wilayah I, II, dan III
B	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010	Inspektorat Wilayah I, II, dan III
27.0094	PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI	
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK	
A	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	Subdit. Analisis Statistik
B	Analisis Disparitas	Subdit. Analisis Statistik
C	Analisis Statistik Ekonomi	Subdit. Analisis Statistik
D	Penyempurnaan dan Pengembangan Konsistensi Statistik Ekonomi	Subdit. Konsistensi Statistik
E	Pengembangan Indikator Pembangunan Regional (IPR)	Subdit. Indikator Statistik
F	Penyempurnaan & Pengembangan Indikator Statistik Sosial	Subdit. Indikator Statistik
G	Penyempurnaan & Pengembangan Indikator Statistik Ekonomi	Subdit. Indikator Statistik
H	Pengembangan Model Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Subdit. Pengembangan Model Statistik
I	Pengembangan Model Perekonomian Indonesia	Subdit. Pengembangan Model Statistik
J	Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran-Ukuran Statistik	Subdit. Pengembangan Standarisasi & Klasifikasi Statistik
K	Penyusunan dan Pemeliharaan Kerangka Sampel Statistik Bidang	Subdit. Pengembangan Kerangka Contoh Induk
L	Studi <i>Baseline</i> SDM BPS	PMU STATCAP-CERDAS/Sekretaris KORPRI
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	Bagian Penyusunan Anggaran
0130	SURVEI BIDANG INDUSTRI	
A	Survei Industri Besar/Sedang Bulanan	Subdit. Statistik Industri Kecil & Rumah tangga
B	Survei Industri Mikro dan Kecil	Subdit. Statistik Industri Kecil & Rumah tangga
C	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	Subdit. Statistik Industri Besar dan Sedang
0131	SURVEI BIDANG PERTANIAN	
A	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubunan	Subdit. Statistik Tanaman Pangan
B	Survei Perusahaan Perkebunan	Subdit. Statistik Tanaman Perkebunan
C	Survei Perusahaan Perikanan, TPI dan Sosek Nelayan	Subdit. Statistik Perikanan
D	Survei Perusahaan Hortikultura dan Penyusunan Indikator Pertanian	Subdit. Statistik Hortikultura
E	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH	Subdit. Statistik Peternakan
F	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kedelai	Subdit. Statistik Tanaman Pangan
G	Survei Perusahaan Kehutanan	Subdit. Statistik Kehutanan
H	Statistik Kehutanan Rakyat	Subdit. Statistik Kehutanan
00133	SURVEI BIDANG PERDAGANGAN	
A	Kompilasi Data Statistik Ekspor	Subdit. Statistik Ekspor
B	Kompilasi Data Statistik Impor	Subdit. Statistik Impor
C	Survei Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan	Subdit. Statistik Harga Pedesaan
D	Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	Subdit. Statistik Harga Konsumen
E	Survei Statistik Lembaga Keuangan dan <i>Monitoring Kurs</i> Valuta Asing	Subdit. Statistik Keuangan
F	Survei Statistik Harga Perdagangan Besar	Subdit. Statistik Harga Perdagangan Besar
G	Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD	Subdit. Statistik Keuangan
H	Survei Statistik Harga Produsen	Subdit. Statistik Harga Produsen
00134	SURVEI TRANSPORTASI	
A	Survei Transportasi	Subdit. Statistik Transportasi
B	Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Subdit. Statistik Perdagangan Dalam Negeri
00135	SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA	
A	Survei Bidang Jasa dan Pariwisata	Subdit. Statistik Pariwisata
B	Survei Usaha Menengah Besar Jasa Komunikasi	Subdit. Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi

Lanjutan Lampiran 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN	
A	Survei Upah	Subdit. Statistik Upah dan Pendapatan
B	Survei Struktur Upah	Subdit. Statistik Upah dan Pendapatan
C	Sakernas Semester I 2010	Subdit. Statistik Ketenagakerjaan
D	Sakernas Semester II 2010	Subdit. Statistik Ketenagakerjaan
E	Statistik Penduduk Lanjut Usia dan Pemuda	Subdit. Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
F	Penghitungan Penduduk & Rumah Tangga Untuk Penimbang survei Pendudukan 2010	Subdit. Statistik Demografi
G	Susenas Panel 2010 (Estimasi Provinsi)	Subdit. Statistik Rumah Tangga
H	Susenas KOR (Estimasi Kab/Kota)	Subdit. Statistik Kesehatan dan Perumahan
I	Identifikasi Aglomerasi Potensi Desa di Indonesia	Subdit. Statistik Ketahanan Wilayah
J	Penyusunan Publikasi Tren/Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei	Subdit. Statistik Mobilitas Penduduk & Tenaga Kerja
K	Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2010	Subdit. Statistik Mobilitas Penduduk & Tenaga Kerja
L	Pilot Pendataan Podes 2010	Subdit. Statistik Ketahanan Wilayah
M	Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2010	Subdit. Statistik Kesehatan dan Perumahan
00138	SURVEI PERTAMBANGAN	
A	Survei Pertambangan dan Energi	Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi
B	Survei Konstruksi	Subdit. Statistik Konstruksi
00141	SURVEI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Subdit. Statistik Lingkungan Hidup
0142	SURVEI BIDANG SOSIAL EKONOMI	
A	Penyusunan Neraca Regional	Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Regional
B	Survei Penyusunan Indikator Khusus (PDB Triwulanan)/SPIK	Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
C	Penyusunan PDB Sektoral Tahun Dasar Berjalan	Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
D	Persiapan Penyusunan Updating Tabel Input-Output Indonesia 2010	Subdit. Konsolidasi Neraca Produksi Nasional
E	Penyusunan Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)	Subdit. Neraca Jasa
F	Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa-Jasa (SPPJ)	Subdit. Neraca Jasa
G	Penyusunan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan dan Jasa	Subdit. Neraca Jasa
H	Penyempurnaan Data Dasar Penghitungan PDB dan PDRB	Subdit. Neraca Barang
I	Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi Terpadu (Sisnerling 2009)	Subdit. Neraca Barang
J	Survei Khusus Input-Output (SKIO) 2010	Subdit. Neraca Barang
K	Penyusunan Neraca Rumahtangga dan Institusi Nirlaba	Subdit. Neraca Rumahtangga & Institusi Nirlaba
L	Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Swasta	Subdit. Neraca Pemerintah & Badan Usaha
M	Penyusunan Neraca Arus Dana	Subdit. Neraca Modal dan Luar Negeri
N	Studi Penyusunan Stok Kapital	Subdit. Neraca Modal dan Luar Negeri
O	Studi Rekonsiliasi Neraca Ex-Im Jasa Penunjang PDB	Subdit. Neraca Modal dan Luar Negeri
P	PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan	Subdit. Neraca Modal dan Luar Negeri
Q	Konsolidasi Neraca Pengeluaran	Subdit. Konsolidasi Neraca Pengeluaran
R	Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)	Subdit. Konsolidasi Neraca Pengeluaran
0145	SURVEI BIDANG POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN	
A	Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan	Subdit. Statistik Politik dan Keamanan
B	Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010	Subdit. Statistik Politik dan Keamanan
C	Penyusunan Laporan dan Stok Modal Sosial 2009	Subdit. Statistik Ketahanan Wilayah
D	Data dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010	Subdit. Statistik Kerawanan Sosial
E	Biaya Pendamping TF SCB	Subdit. Statistik Ketahanan Wilayah
F	<i>Streamlining Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project (Grant-TF-057574)</i>	Subdit. Statistik Ketahanan Wilayah
5551	PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS	
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN	
A	Perencanaan SP2010	Bagian Penyusunan Anggaran
B	Pelatihan SP2010	Subdit. Statistik Ketenagakerjaan
C	Pelaksanaan Lapangan SP2010	Subdit. Statistik Demografi
D	Pelatihan Demografi	Subdit. Statistik Demografi
E	Pengolahan SP2010	Subdit. Integrasi Pengolahan Data
F	Updating Peta Wilayah Administrasi	Subdit. Pengembangan Pemetaan Statistik
G	PES 2010	Subdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei
H	Publisitas Pelaksanaan SP2010	Bagian Hubungan Masyarakat
I	Pembentukan MFD SP2010	Subdit. Pengembangan Kerangka Contoh Induk
J	Pembangunan Desain dan Arsitektur Metadata SP2010	Subdit. Rujukan Statistik
K	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Publikasi SP2010	Subdit. Publikasi dan Kompilasi Statistik
L	Pembangunan Desain dan Arsitektur Akses Online dan Layanan SP2010	Subdit. Layanan dan Promosi Statistik
M	Pembangunan Desain dan Arsitektur Sistem Dokumentasi SP2010	Subdit. Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik

**Lampiran 4. DAFTAR PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROGRAM PK
BPS PUSAT TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
10.05.01	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	
10.05.01.0110	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN	
0110.0016	PENDIDIKAN /PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)	
A	Persiapan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik	Bag. Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
B	Pelaksanaan Belajar dan Bekerja di Bidang Statistik	Bag. Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
C	Pengajaran dan Perkuliahan	Bag. Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
D	Penyelenggaraan Program DIV	Bagian Administrasi Umum
E	Riset Dosen	Bagian Administrasi Umum dan UPPM
F	Penerimaan Mahasiswa Baru	Bagian Administrasi Umum

**Lampiran 5. JADWAL KEGIATAN BPS PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
01.01.09	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK												
09.0001	PENGLOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN												
0001	PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI												
511111	Belanja Gaji pokok PNS												
	- Belanja Gaji Pokok PNS												
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)												
	- Kenaikan gaji 15%												
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS												
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS												
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)												
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS												
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS												
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13)												
	- Kenaikan gaji 15%												
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS												
	- Belanja Tunjangan Anak PNS												
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)												
	- Kenaikan gaji 15%												
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS												
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS												
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)												
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS												
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS												
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)												
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS												
	- Belanja Tunjangan PPh PNS												
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)												
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS												
	- Belanja Tunjangan Beras PNS												
511129	Belanja Uang Makan PNS												
	- Belanja Uang Makan PNS												
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS												
	- Belanja Tunjangan Umum PNS												
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)												
511192	Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI												
	- Tunjangan uang duka PNS												
512211	Belanja Uang Lembur												
	Uang Lembur Pegawai:												
	- Golongan I												
	- Golongan II												
	- Golongan III												
	- Golongan IV												
	Uang Makan Lembur:												
	- Golongan I												
	- Golongan II												
	- Golongan III												
	- Golongan IV												
512311	Belanja Vakasi												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Honorarium Tim Penerima & Pemeriksa Hasil Ujian Pegawai Baru												
	a. Ketua Tim												
	b. Sekretaris												
	c. Anggota												
	STIS												
	- Honorarium Pembuatan Naskah Ujian STIS												
	- Honorarium Koreksi Hasil Ujian STIS												
	- Honorarium Pengawas Ujian STIS												
512412	Belanja Pegawai Transito												
	- Belanja gaji pokok dan tunjangan lain-lain 3000 pegawai												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN												
0024	PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH / UANG MAKAN PNS												
521113	Belanja untuk menambah daya tahan tubuh												
	- Pengadaan bahan makanan untuk pegawai												
0025	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	- Biaya check up kesehatan pejabat eselon III												
	- Biaya check up kesehatan pejabat eselon IV												
	- Biaya pemeriksaan kesehatan PNS ke Majelis Penguji Kesehatan												
0026	POLIKLINIK / OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)												
521111	Belanja Keperluan Perkantoran												
	- Penyediaan obat-obatan untuk poliklinik umum												
	- Penyediaan obat untuk poliklinik gigi												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	- Honorarium dokter												
	- Honorarium perawat												
	- Biaya pengadaan poliklinik umum dan gigi termasuk gigi palsu												
0028	PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	- Penyelenggaraan pelantikan												
0032	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI												
521111	Belanja Keperluan Perkantoran												
	- Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai												
	- Pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai baru												
0034	PENGADAAN TOGA / PAKAIAN KERJA SOPIR / PESURUH / PERAWAT / DOKTER / SATPAM / TENAGA TEKNIS LAINNYA												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	- Pengadaan pakaian untuk pengemudi/juru taman												
	- Pengadaan pakaian untuk Satpam												
	- Pengadaan pakaian paramedis												
	- Pengadaan pakaian resepsionis												
	- Pengadaan pakaian juru bersih/CS												
	- Cadangan pakaian dinas tenaga baru												
0205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR												
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												
	BIRO UMUM												
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan BPS Pusat Jl. Dr. Sutomo												
	- Pemeliharaan halaman, perawatan taman/jalan lingkungan BPS Pusat Jl. Dr. Sutomo												
	STIS												
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan												
	- Pemeliharaan halaman, perawatan taman/jalan lingkungan												
	PUSDIKLAT												
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan												
	- Pemeliharaan halaman, perawatan taman/jalan lingkungan												
1138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10												
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
	- Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 eselon III/IV												
	- Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-4 eselon III/IV												
	- Perawatan Mobil Caraka/Operasional Roda-6												
2005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2												
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
	BIRO UMUM												
	- Pemeliharaan kendaraan operasional roda-2												
	- Pemeliharaan roda-2 BPS daerah pengadaan tahun 2010												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
2006	PERAWATAN SARANA GEDUNG												
523121	<u>Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>												
	BIRO UMUM												
	- Pemeliharaan STP (Sewage Treatment Plant)												
	- Pemeliharaan instalasi listrik												
	- Pemeliharaan instalasi air/PAM												
	- Pemeliharaan instalasi telepon												
	- Pemeliharaan BAS (Building Automation System)												
	- Pemeliharaan lift												
	- Pemeliharaan inventaris kekayaan milik negara (mesin tik, meja kursi, fax, dsb)												
	- Pemeliharaan genset:												
	a. 40 KVA												
	b. 147 KVA												
	c. 350 KVA												
	d. 500 KVA												
	- Pemeliharaan pompa air												
	a. Diesel Pump												
	b. Pompa air												
	- Pemeliharaan Rissograft												
	a. DK												
	b. Folio												
	- Pemeliharaan AC central BPS												
	- Pemeliharaan AC split												
	- Pemeliharaan sound system												
	- Pemeliharaan travo 1.250 KVA												
	- Pemeliharaan mesin cetak offset sheet/roll & penunjangnya												
	- Pemeliharaan mesin jahit kawat/benang & gestetner												
	- Pemeliharaan peralatan dokter gigi												
	- Pemeliharaan viewer/overhead projector												
	- Pemeliharaan mesin fotocopy												
	- Pemeliharaan PABX telepon & instalasi (BPS, Pusdiklat, STIS)												
	- Pemeliharaan mesin handkey												
	- Pemeliharaan fire hydrant												
	- Pemeliharaan fire detector												
	- Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran												
	- Lampu neon sign												
	- Pemeliharaan Mesin Print Document 7000 Xerox												
	- Pemeliharaan Mesin Print Document 4750 Xerox												
	DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK												
	- Pemeliharaan komputer dan alat penunjangnya												
	- Perawatan sistem UPS ruang data center & AC ruang server												
	- Perawatan perangkat jaringan komunikasi data												
	- Perawatan server all risk												
	PUSDIKLAT												
	- Perawatan mesin penyaring												
	- Perawatan STP												
	- pemeliharaan instalasi telpon												
	- Pemeliharaan lift												
	- Pemeliharaan AC Split												
	- Pemeliharaan genset 150 KVA												
	- Pemeliharaan PABX, telpon, dan instalasi												
	- Perbaikan instalasi air												
	- Perbaikan hydrant												
	- Perbaikan Amplifier												
	- Perbaikan fire alarm												
	- Perbaikan instalasi lampu taman												
2007	LANGGANAN DAYA DAN JASA												
522111	<u>Belanja Langganan daya dan jasa</u>												
	- Langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air)												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
2178	JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT												
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat												
	- Biaya pengiriman surat dinas												
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN												
	A. OPERASIONAL PERKANTORAN												
521110	Belanja Keperluan Perkantoran												
	DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK												
	- Biaya Koneksi Internet Primer												
	- Biaya Koneksi Internet Sekunder												
	- Koneksi Virtual Private Networks												
	a. BPS pusat dan 33 propinsi												
	b. Koneksi Internet 37 Kota SBH												
	BIRO KEUANGAN												
	- Biaya Operasional lain-lain dan keperluan kantor												
	- Langganan majalah/surat kabar, buletin (dalam/luar negeri)												
	- Biaya fotocopy												
	- Biaya konsumsi Rapim, rapat FMS, rapat Struktural dan lainnya												
	- Biaya konsumsi kegiatan sosialisasi BPS												
	- Biaya operasional sehari-hari perkantoran												
	- Biaya operasional satpam khusus hari raya (30 org x 10hr)												
	- Biaya konsumsi jamuan rapat												
	BIRO HUMAS DAN HUKUM												
	- Biaya jasa resepsionis												
	BIRO UMMUM												
	- Pengadaan ATK atau ARK untuk keperluan sehari-hari kantor												
	- Biaya jasa kebersihan/cleaning service												
	- Biaya jasa pengemudi dan juru taman												
	- Biaya jasa keamanan rumah dinas ponsok bambu												
	PUSDIKLAT												
	- Pengadaan pengharum ruangan kerja dan kelas pusdiklat												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Pengadaan peralatan lainnya												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	BIRO KEUANGAN												
	- Pengadaan Ensiklopedia Statistik												
	- Biaya pengawalan polisi untuk pengambilan uang dari BANK												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Biaya penerimaan pegawai baru untuk pusat dan Daerah												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Biaya penerimaan pegawai baru untuk BPS Pusat dan Daerah												
522114	Belanja Sewa												
	- Biaya sewa alat kebersihan dan pengharum ruangan												
	- Biaya fumigasi & Pengharum ruangan												
	- Sewa ruang penerimaan Pegawai												
52411	Belanja Perjalanan Biasa (DN)												
	- Transport lokal Satpam												
	- Perjalanan dalam rangka penerimaan pegawai												
0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI												
0007	PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA												
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya												
	BIRO UMMUM												
	- Pencetakan buku kerja/agenda eselon I/II												
	- Pencetakan buku kerja/agenda eselon III												
	- Pencetakan buku kerja/agenda eselon IV												
	- Pencetakan buku kerja/Agenda KSK												
	- Pencetakan kalender dinding												
	- Pencetakan kalender meja												
	BIRO HUMAS DAN HUKUM												
	- Pencetakan varia statistik												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	DIREKTORAT DISEMINASI												
	- Pencetakan buku data strategis												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Pencetakan buku petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran												
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	BIRO UMUM												
	- Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SABMN Pusat Daerah												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Biaya pertemuan/koordinasi Kasie Binagram												
	BIRO KEUANGAN												
	- Pengumpulan, penyusunan dan evaluasi SAI-SAK Pusat Daerah												
	KORPRI												
	- Pembahasan dan evaluasi non teknis												
	- Pembahasan kegiatan sosial												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Pengumpulan, penilaian dan konsultasi data/administrasi Kepegawaian												
	INSPEKTORAT												
	- Penyusunan adm, evaluasi dan laporan pengawasan												
524111	<u>Belanja perjalanan dinas biasa (DN)</u>												
	BIRO UMUM												
	- Transport lokal pemungutan data/administrasi Perlengkapan, Urdal & Arsip												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Transport lokal pemungutan data/administrasi Perencanaan, peny. anggaran dan monitoring												
	- Perjalanan Kasie Binagram												
	BIRO KEUANGAN												
	- Transport lokal pemungutan data/administrasi Keuangan												
	KORPRI												
	Traspot lokal pemungutan data non teknis												
	Perjalanan peliputan kegiatan sosial												
	Traspot lokal kegiatan sosial												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	Traspot lokal pemungutan data/administrasi Kepegawaian												
	INSPEKTORAT												
	- Transport lokal pemungutan data/administrasi/konsultasi pengawasan												
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM												
	A PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN BELANJA PEGAWAI MENGIKAT												
521119	<u>Belanja barang operasional lainnya</u>												
	- Biaya tabulasi Penyusunan Anggaran/penghitungan belanja pegawai pusat dan daerah												
	- Pengadaan ATK dan Komputer supplies												
	- Biaya penyusunan anggaran/RKAL												
	- Rekonsiliasi data RKAL												
	- Penyusunan dan perapihan data pendukung												
	- Biaya penyusunan anggaran di daerah												
	B. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan												
	- ATK & Penggandaan Juknis keuangan												
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	- Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama luar negeri												
	- Penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kerjasama dalam negeri												
	- Pengumpulan dan penyiapan materi, kehumasan dan hukum & organisasi												
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa (DN)</u>												
	- Monitoring/pembinaan Kehumasan dan Sosialisasi Statistik												
	- Transport lokal pemungutan data/administrasi Kehumasan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Evaluasi kegiatan tata usaha kepegawaian												
	- Penyusunan pembinaan kepegawaian												
	- Penyusunan laporan kepegawaian												
	- Evaluasi jabatan fungsional												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Evaluasi perencanaan anggaran												
	- Evaluasi penyusunan anggaran												
	- Evaluasi standar harga dan monitoring program												
	BIRO KEUANGAN												
	- Penyusunan laporan TP/TGR dan administrasi keuangan												
	- Penyusunan laporan akuntansi keuangan												
	- Penyusunan laporan perbendaharaan												
	- Penyusunan laporan verifikasi keuangan												
	- Pengandaan/pencetakan laporan TP/TGR, PNPB, juknis administrasi keuangan, pajak & laporan												
	BIRO UMUM												
	- Penyusunan laporan pengadaan, kearsipan & ekspedisi												
	- Penyusunan laporan kerumahtanggaan												
	- Penyusunan laporan Inventaris/LMBT												
	- Penyusunan laporan pengadaan												
0475	PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Pembahasan perencanaan kepegawaian												
	- Penyempurnaan dokumentasi tata naskah kepegawaian												
	- Biaya penyelenggaraan ujian dinas												
	- Pelatihan teknis/fungsional untuk pengembangan pegawai												
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa (DN)</u>												
	BIRO KEUANGAN												
	- Pemindahan/penempatan pegawai lulusan STIS												
	- Mutasi/promosi pegawai dari pusat ke daerah/daerah ke pusat												
	- Mutasi/promosi pegawai antar daerah												
	- Pemulangan pegawai yang pensiun & pesangon ke tempat menetap, dsb												
	- Pemanggilan pegawai dalam rangka pelantikan jabatan												
0487	MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN												
524111	<u>Belanja Perjalanan Biasa (DN)</u>												
	BIRO KEPEGAWAIAN												
	- Monitoring/pembinaan kepegawaian												
	BIRO BINA PROGRAM												
	- Monitoring , pembinaan Peny. Anggaran, Perencanaan & Monev												
	- Perjalanan nara sumber												
	BIRO KEUANGAN												
	- Monitoring/pembinaan adm keuangan												
	- Rekonsiliasi penghitungan anggaran negara												
	- Monitoring/pembinaan dan penyelesaian TP/TGR												
	- Sosialisasi jadwal retensi arsip keuangan, PNPB												
	- Perjalanan pimpinan												
	BIRO UMUM												
	- Monitoring/pembinaan kearsipan, urdal dan perlengkapan												
	KORPRI												
	- Peliputan kegiatan di daerah												
524211	<u>Belanja Perjalanan Biasa (LN)</u>												
	- Perjalanan konferensi ke luar negeri, termasuk fiskal												
00518	PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSI												
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>												
	- Biaya pembahasan dalam rangka penilaian awal tim jabatan fungsional												
	- Biaya evaluasi dalam rangka penilaian dan penelitian akhir tim jabtung												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA												
17.0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN												
2003	SEWA GEDUNG KANTOR/PERALATAN/KENDARAAN												
522114	Belanja Sewa												
	- Sewa lahan parkir BPS Pusat												
	- Sewa gudang/gedung pusat pengolahan di daerah												
4863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN												
521111	Belanja Keperluan Perkantoran												
	- Biaya Administrasi												
	- Biaya Non operasional lainnya												
17.0079	PEMBANGUNAN GEDUNG												
0162	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR												
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan												
	- Perencanaan Perluasan gedung dan Asrama Pusdiklat												
	- Lanjutan pembangunan gedung STIS												
	- Revitalisasi gedung STIS (masih diblokir)												
17.0081	PENGADAAN KENDARAAN												
0289	PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2												
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												
	- Pengadaan kendaraan Operasional Roda-2												
17.0089	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG												
0272	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG												
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												
	- Pengadaah Genset												
	- Pengadaan AC Split Duck & perbaikan lift gedung 3												
	- Mesin Cetak konsep CPR (Corporate Print Room)												
	- Pengadaan DocuCenter-III												
	- Pengadaan perlengkapan kantor BPS Prop/Kab/Kota												
	- Pengadaan Meja dan Kursi kerja Gedung 5 dan 1												
	- Pengadaan Meja dan Kursi kerja Gedung 2												
0113	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA												
0508	REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA												
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan												
	- Renovasi gedung 5 dan gedung 6												
0002	PENYELENGGARAAN PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK												
04863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN												
521115	Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja												
	- Honor kuasa pengguna anggaran												
	- Honor PPK Kegiatan 0067, 0092												
	- Honor PPK Kegiatan 0094												
	- Honor PPK Kegiatan 0002, 0035 dan 0054												
	- Honor PPK untuk program kedinasan												
	- Honor PPK untuk program PKYB												
	- Honor PPK untuk program PSPAN												
	- Honor pejabat penandatanganan SPM												
	- Honor bendahara pengeluaran/pemegang uang muka												
	- Honor bendahara pengeluaran kegiatan 0067, 0092												
	- Honor bendahara pengeluaran kegiatan 0094												
	- Honor bendahara pengeluaran kegiatan 002, 0035 dan 0054												
	- Honor bendahara pengeluaran untuk program PKYB												
	- Honor bendahara untuk program kedinasan												
	- Honor staf pengelola anggaran kegiatan 0067, 0092,												
	- Honor staf pengelola anggaran kegiatan 0094												
	- Honor staf pengelola anggaran kegiatan 0002, 0035, 0054												
	- Honor staf pengelola untuk program kedinasan												
	- Honor staf pengelola untuk program PKYB												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor staf pengelola untuk program PSPAN												
	- Honor pejabat pengadaan barang dan jasa												
	HONOR PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA BARANG/JASA												
	- Pengadaan barang < 500 juta atau jasa < 200 juta												
	- Pengadaan barang > 500 juta atau jasa > 200 juta												
	- HONOR PNBP												
	- Atasan langsung bendahara PNBP												
	- Bendahara PNBP												
	- Honor staf pengelola anggaran PNBP												
	HONOR PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI												
	- Pagu di bawah 100 juta												
	- Pagu di bawah 250 juta												
	- Pagu di bawah 500 juta												
	- Pagu di bawah 1 milyar												
	- Pagu di bawah 2,5 milyar												
	HONOR PANITIA PENGADAAN JASA NON KONSTRUKSI												
	- Pagu di bawah 100 juta												
	- Pagu di bawah 250 juta												
	- Pagu di bawah 500 juta												
	- Pagu di bawah 1 milyar												
	- Pagu di bawah 2,5 milyar												
0035	PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN												
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM												
	A. PENYUSUNAN RENSTRA BPS 2010-2014												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan bahan materi rapat												
	- Seminar kit (map binder, blocknote, pulpen)												
	- Konsumsi seminar												
	- Pengadaan bahan materi seminar												
	- Pencetakan buku renstra BPS 2010-2014												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Finalisasi penyusunan renstra BPS 2010-2014												
	- Seminar Renstra BPS 2010-2014												
521215	Belanja Jasa Profesi												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III-IV												
	- Honor moderator seminar												
	- Honor keynote speech seminar												
	- Honor pembicara seminar												
	B. PENYUSUNAN SIGMAPLAN BPS 2010-2030												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Konsumsi seminar												
	- Pengadaan bahan materi seminar												
	- Pencetakan buku Sigmaplan BPS 2010-2030												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah pengolahan penyusunan Sigmaplan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Seminar Sigmaplan BPS 2010-2030												
	- Finalisasi penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030												
	- Operasional Daerah												
	- Operasional Pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III-IV												
	- Honor moderator seminar												
	- Honor keynote speech seminar												
	- Honor pembicara seminar												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dalam rangka penyusunan Sigmaplan BPS 2010-2030												
	C. UPDATING DATABASE PETA SARANA DAN PRASARANA FISIK BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan buku laporan hasil studi												
	- Pengadaan ATK, Kertas, dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah pengolahan hasil update												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyempurnaan sistem updating data												
	- Evaluasi hasil updating data												
	- Penyusunan naskah laporan hasil updating data												
	- Operasional												
	- Operasional daerah												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengumpulan data dan informasi di daerah												
	D. EVALUASI KEGIATAN STATISTIK												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan perlengkapan Rateknas Pimpinan BPS Provinsi												
	- Pengadaan atk, kertas, dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan materi Rateknas												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Inventarisasi dan pengolahan hasil evaluasi												
	- Cadangan upah												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan materi, kuesioner, dan buku pedoman												
	- Penyusunan laporan												
	- Pembahasan materi Rateknas												
	- Penyelenggaraan Rateknas Pimpinan BPS Propinsi												
	- Pembahasan hasil Rateknas												
	- Operasional rateknas												
	- Operasional evaluasi studi evaluasi penganggaran di daerah												
	- Operasional pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III-IV												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan petugas studi evaluasi penganggaran												
	- Supervisi												
	- Perjalanan Pimpinan												
	- Perjalanan narasumber												
	- Transport peserta DK1												
524219	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (LN)</u>												
	- Perjalanan mengikuti konferensi & undangan badan dunia												
	E. PENYUSUNAN HSPK DAN SHBJ												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dab bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan SBK dan SHBJ												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pendataan SHBJ di Jakarta												
	- Pengolahan SBK 2011												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan kuesioner dan buku pedoman												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil lapangan												
	- Pengolahan dan penyusunan draft SBK dan SHBJ												
	- Finalisasi laporan SBK dan SHBJ												
	- Operasional daerah												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber Eselon I												
	- Honor narasumber Eselon II												
	- Honor narasumber Eselon III-IV												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dalam rangka penyusunan SBK												
	- Supervisi dan studi banding SBK BPS												
	- Transport lokal pendataan SHBJ di Jakarta												
	F. PENYUSUNAN LAPORAN AKTIVITAS DAN LAKIP BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK Kertas dan Bahan Cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan dokumen instrumen pengumpulan data laporan aktivitas												
	- Percetakan publikasi laporan program kegiatan aktifitas BPS												
	- Percetakan/pengadaan LAKIP												
	- Pengadaan laporan penetapan kinerja												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung Jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengumpulan dan pengolahan data												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan laporan aktivitas												
	- Pembahasan /evaluasi naskah lakip BPS												
	- Pembahasan awal penyusunan penetapan kinerja BPS												
	- Operasional pusat												
	- Operasional daerah												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pengumpulan data dan informasi												
	- Supervisi pembinaan lakip, eselon I/II (LAKIP & penetapan kinerja)												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pengadaan perlengkapan peserta workshop												
	- Pengadaan perlengkapan peserta training												
	- Biaya pemasangan iklan kebutuhan konsultan												
522113	<u>Belanja Jasa Konsultan</u>												
	- Honor konsultan Firm lanjutan PHRD												
	- Honor owner's agent												
	- Honor konsultan Firm												
522114	<u>Belanja Sewa</u>												
	- Sewa ruang workshop												
	- Sewa ruang training												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DL)</u>												
	- Perjalanan mendampingi konsultan												
	- Transpot lokal untuk peserta workshop												
	- Transpot lokal untuk peserta training												
	J BIAJA PENDAMPING STATCAP CERDAS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- ATK dan computer supplies												
	- Penggandaan laporan hasil sosialisasi												
	- Konsumsi rapat												
	- Pembuatan spanduk dan digital banner untuk sosialisasi												
	- Pembuatan sertifikat												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor koordinator												
	- Honor ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor penunjang												
521219	<u>Belanja barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan persiapan materi workshop												
	- Pembahasan persiapan materi training												
	- Evaluasi hasil kegiatan STAPCAP CERDAS												
	- Penyusunan laporan kegiatan												
	- Pengadaan seminar/workshop/training kit												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	HONOR NARASUMBER												
	- Setara eselon I												
	- Setara eselon II												
	- Setara eselon III												
	HONOR PEMBICARA/MODERATOR												
	- Setara eselon I												
	- Setara eselon II												
	- Setara eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pendamping konsultan dan studi banding												
	- Transpot lokal												
524219	<u>Belanja Perjalanan lainnya (LN)</u>												
	- Perjalanan studi visit quality assurance and management strategy												
0061	PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN												
	A. KEGIATAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK dan kertas												
	- Pengadaan Komputer supplies												
	- Pencetakan laporan kegiatan												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data/informasi dan konsultasi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan laporan tahunan MoU												
	- Pembahasan laporan tahunan RDP												
	- Pembahasan laporan perjalanan pejabat ke LN												
	- Biaya operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengumpulan data dan informasi daerah												
	B. PENINGKATAN KUALITAS DAN WAWASAN SDM												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK dan Kertas												
	- Pengadaan Komputer Supplies												
	- Pengadaan buku petunjuk/pedoman pelatihan												
	- Pencetakan laporan peningkatan kapasitas SDM												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan penyusunan buku pedoman peningkatan kapsitas SDM												
	- Pembahasan final penyusunan laporan peningkatan kapasitas SDM												
	- <i>Workshop</i> kesekretarisan dan <i>official statistics</i>												
	- Seminar keprotokoleran dan komunikasi perkantoran												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber eselon I												
	- Honor Narasumber eselon II												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pemanggilan peserta <i>workshop</i> kesekretariatan dari daerah												
	C. PENYUSUNAN SOFT LIBRARY MATERI PIMPINAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK dan Kertas												
	- Pengadaan Komputer Supplies												
	- Pengadaan buku pedoman												
	- Pengadaan laporan akhir kegiatan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan program/tabel												
	- Penyusunan data dari berbagai narasumber												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan buku pedoman keprotokoleran dan laporan												
	- Pembuatan basis data materi pimpinan												
	- Updating basis data materi pimpinan												
	- Penyusunan bahan materi pimpinan dan pedoman protokol												
	- Operasional pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber eselon I												
	- Honor Narasumber eselon II												
	- Honor Narasumber eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dalam rangka pengumpulan materi pimpinan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	D. SOSIALISASI KEGIATAN BPS TAHUN 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan Komputer Supplies												
	- Pengadaan Bahan Materi Rapat Kehumasan												
	WORKSHOP HARI STATISTIK												
	- Pengadaan bahan materi workshop hari statistik												
	- Seminar Kit (Map binder, block note, pulpen)												
	- Konsumsi workshop hari statistik												
	SOSIALISASI KEGIATAN STATISTIK												
	- Pengadaan bahan materi sosialisasi												
	- Pengadaan perlengkapan sosialisasi												
	- Konsumsi acara sosialisasi kegiatan sosialisasi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan bahan workshop dan seminar												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyiapan materi sosialisasi												
	- Penyiapan materi workshop hari statistik												
	- Penyusunan bahan materi varia statistik												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber eselon I												
	- Honor Narasumber eselon II												
	- Honor Narasumber eselon III												
	- Honor Moderator Sosialisasi Kegiatan Statistik												
	- Honor Keynote Speech Sosialisasi Kegiatan Statistik												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Peliputan Kegiatan Statistik di Daerah												
	E. STUDI OPINI PUBLIK TENTANG DATA STRATEGIS BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan buku pedoman studi opini												
	- Pengadaan kuesioner studi opini												
	- Pengadaan laporan hasil studi												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penanggung jawab pelaksanaan propinsi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan petugas studi												
	- Finalisasi laporan hasil studi												
	- Pembahasan pengolahan data dan draft hasil studi mendalam												
	- Operasional daerah												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan petugas pencacah studi opini												
	- Transpot penunjuk jalan												
	- Perjalanan supervisi studi opini												
	F. RANCANGAN PERATURAN KEPALA BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan buku peraturan Kepala BPS tentang organisasi daerah												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan materi RKEPKA BPS tentang organisasi bps daerah												
	- Pembahasan akhir RKEPKA BPS tentang organisasi bps daerah												
	- Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah daerah												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Peninjauan lapangan organisasi BPS daerah												
	- Transport lokal peninjauan lapangan organisasi di DKI												
	G. SOFT LIBRARY DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengumpulan data/studi literatur dan konsultasi ke instansi terkait												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan studi undang-undang serta dokumentasi pendukungnya												
	- Penyusunan dan studi keputusan presiden dan peraturan presiden												
	- Finalisasi penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan												
	- Operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi, pengumpulan data dan konsultasi di daerah												
	H. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ORGANISASI BPS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan Buku SOP												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan bahan standar operasional prosedur												
	- Pembahasan awal penyusunan buku pedoman												
	- Penyusunan akhir penyusunan buku pedoman												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Studi banding pelaksana SOP												
1436	PENYUSUNAN RENJA KL DAN ANGGARAN												
	A. PENYUSUNAN RENJA KL												
521211	<u>Belanja bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan dokumen perencanaan memotor 2011 hasil evaluasi												
	- Pengadaan buku Renja-KL BPS Tahun 2011												
	- Pencetakan buku petunjuk teknis pengelolaan kegiatan dan anggaran tahun 2010												
	- Pengadaan buku pedoman penyusunan RKP & RKF TA 2012												
	- Pengadaan buku <i>booklet</i> rencana kegiatan tahun 2010												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengolahan bahan Renja KL												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional lainnya</u>												
	- Pembahasan awal penyusunan Renja-KL BPS th 2011												
	- Pembahasan penyusunan petunjuk teknis												
	- Pembahasan penyusunan Buku pedoman RKA & RKF TA 2012												
	- Operasional												
	B. PENYUSUNAN ANGGARAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan perlengkapan penyusunan anggaran daerah												
	- Pencetakan bahan penyusunan anggaran												
	- Penggandaan POK 2010												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Editing dan Entry data RKAKL												
	- Pengolahan data penyusunan anggaran												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional lainnya</u>												
	- Penyusunan pagu anggaran BPS dan perubahannya												
	- Penyusunan RKAKL BPS Daerah												
	- Penyusunan RKAKL pagu daerah indikatif, sementara, dan definitif												
	- Penyusunan POK 2009 dan penjelasannya												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber eselon I												
	- Honor Nara sumber eselon II												
	- Honor Nara sumber eselon III-IV												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta penyusunan anggaran daerah												
	- Perjalanan evaluasi penyusunan anggaran daerah												
	- Transport lokal peserta dari BPS DKI												
0054	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI												
0040	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN												
	A. PENGEMBANGAN LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN AKSES ON LINE												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer suplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pemograman web server dan modul												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Biaya operasional layanan jaringan komunikasi data dan online												
	- Evaluasi ketersediaan <i>avalability</i> jaringan komunikasi data												
	- Evaluasi prosedur standar layanan jaringan komunikasi data												
	- Pembahasan dan evaluasi prosedur jaringan dan server												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Sosialisasi dan supervisi pengembangan dan implementasi jaringan dan server												
	- Pengiriman tenaga teknis permasalahan jaringan di daerah												
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>												
	- Peningkatan dan peremajaan perangkat jaringan pusat dan daerah												
	- Peremajaan perangkat voip												
	- Peremajaan perangkat keras untuk <i>off-line backup</i>												
	- Pengadaan suku cadang <i>system ups data center</i>												
	- Pengadaan <i>collaboration software</i>												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	B. PENGEMBANGAN SISTEM BASIS DATA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Penggandaan materi pembinaan pengelola database												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pemrograman sistem indeks harga konsumen												
	- Pemrograman sistem statistik ekspor impor												
	- Pemrograman sistem informasi manajemen keuangan												
	- Pemrograman sistem informasi manajemen kepegawaian												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan pengembangan sistem statistik harga konsumen												
	- Pembahasan pengembangan sistem indeks ekspor-impor												
	- Pembahasan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi pengelola sistem basis data												
	C. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Biaya pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Biaya pengadaan computer supplies												
	- Biaya penggandaan pedoman operasional semua sistem yang dibuat												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pembuatan sistem repository data												
	- Pembuatan sistem pengelolaan software												
	- Pembuatan sistem pengelolaan hardware												
	- Pembuatan sistem entry ekspor-impor												
	- Pembuatan sistem pengelolaan buku dan majalah teknologi informasi												
	- Pembuatan sistem perawatan komputer dan perlengkapannya												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan sistem repository data dan pengelolaan software												
	- Pembahasan sistem perawatan komputer dan perlengkapannya												
	- Pembahasan sistem pengelolaan hardware												
	- Biaya seminar teknologi informasi												
	- Biaya operasional BPS												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pengiriman tenaga teknis												
	D PEMBUATAN PROGRAM PENGOLAHAN & REPOSITORY DATA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan buku pedoman pengolahan data statistik distribusi												
	- Pengadaan buku pedoman pengolahan data statistik sosial												
	- Pengadaan buku pedoman repository data stat, produksi, distribusi dan sosial												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- pengolahan statistik produksi												
	- pengolahan statistik distribusi												
	- pengolahan statistik sosial												
	- sistem repository data statistik produksi												
	- sistem repository data statistik distribusi												
	- sistem repository data statistik sosial												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan aturan dan rule validasi pengolahan statistik produksi												
	- Pembahasan aturan dan rule validasi pengolahan statistik distribusi												
	- Pembahasan aturan dan rule validasi pengolahan statistik sosial												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman tenaga teknis untuk pengolahan												
	E. PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK , kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan Komputer supplies												
	- Pencetakan buku katalog publikasi 2010												
	- Penggandaan buku pedoman sistem pembuatan katalog BPS												
	- Penggandaan buku pedoman pembuatan publikasi BPS												
	- Penggandaan buku pedoman pembuatan publikasi DDA												
	- Pencetakan buku data strategis BPS 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Kompilasi data sistem aplikasi BPS-Publication Production Workbench												
	- Upah kompilasi data pemutahiran pedoman pembuatan aplikasi												
	- Upah pembuatan program sistem aplikasi												
	- Upah pembuatan program modul aplikasi												
	- Upah kompilasi data modul aplikasi sistem informasi peredaran publikasi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan naskah buku pedoman pembuatan publikasi DDA												
	- Pembahasan naskah buku katalog publikasi BPS 2010												
	- Biaya operasional peningkatan kualitas dan layanan publikasi												
	- Pembahasan naskah buku pedoman pembuatan publikasi BPS												
	- Pembahasan sistem pembuatan katalog BPS												
	- Biaya Pengadaan penomoran ISBN												
	- Biaya Pengadaan penomoran ISSN												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalan pembinaan teknis penerapan standar kualitas DDA												
	- Perjalanan supervisi teknis manajemen dan pembuatan katalog BPS												
	- Transport lokal pengurusan ISBN & ISSN												
	F. PENGEMBANGAN KEMASAN STATISTIK ELEKTRONIK DAN WEBSITE												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan leaflet												
	- Pencetakan sampul kemasan data statistik												
	- Penggandaan bahan dan toolkit workshop website												
	- Pencetakan booklet 2 kali												
	- Pencetakan buku standarisasi layanan statistik												
	- Pencetakan pedoman sistem layanan statistik												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah penyusunan leaflet dan booklet												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan kemasan elektronik												
	- Pembahasan materi workshop website BPS												
	- Refresing webmaster												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- <i>Workshop website</i> BPS												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pengiriman tenaga teknis untuk pengembangan <i>website</i>												
	- Perjalanan peserta <i>workshop website</i> BPS												
	- Transpot lokal tenaga teknis pengembangan <i>website</i> di DKI												
	G. PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan panduan rekomendasi kegiatan statistik												
	- Pengadaan panduan operasional												
	- Pencetakan leaflet												
	- Pencetakan buku ringkasan metadata 2010												
	- Pengadaan pedoman survei kebutuhan data												
	- Pengadaan laporan analisis survei kebutuhan data 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor penyusunan bahan koordinasi metadata statistik												
	- Honor pembuatan program aplikasi siRusa <i>offline</i>												
	- Penyusunan program editing dan entry metadata statistik												
	- Penyusunan program pengolahan survei kebutuhan data												
	- Honor pengumpulan data penunjang statistik sektoral khusus pusat												
	- Honor pengumpulan data survei kebutuhan data (skd) pusat												
	- Honor pemeriksaan hasil pengumpulan data survei kebutuhan data pusat												
	- Honor editing dan coding survei kebutuhan data pusat												
	- Honor data entry dan validasi survei kebutuhan data pusat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyempurnaan program aplikasi siRusa <i>offline</i> non internet												
	- Penyempurnaan lanjutan database rujukan statistik												
	- Penyusunan dan Penyempurnaan ringkasan metadata 2010												
	- Workshop instruktur survei kebutuhan data												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan instruktur survei kebutuhan data												
	- Supervisi survei kebutuhan data												
	- Evaluasi teknis pengelolaan metadata statistik sektoral khusus												
	H. PEMBUATAN KEMASAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan publikasi katalog pustaka												
	- Pencetakan publikasi database klasifikasi pustaka												
	- Penggandaan publikasi database master wilayah daerah												
	- Pembuatan leaflet												
	- Penggandaan sop perpustakaan dan dokumentasi												
	- Pembuatan kemasan dokumentasi digital												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengumpulan bahan layanan publik												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Finalisasi penyusunan/rancangan leaflet & publikasi katalog pustaka												
	- Finalisasi rancangan penyusunan database master wilayah desa												
	- Finalisasi rancangan aplikasi dokumentasi digital												
	- Biaya operasional												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan dinas pembinaan layanan perpustakaan												
	- Perjalanan dinas supervisi pembinaan												
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya												
	- Pembelian buku												
	- Perbaikan dan reproduksi bahan pustaka												
	I. PENYUSUNAN KEGIATAN & ANGGARAN SISTEM INFORMASI 2011												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan petugas												
532111	Peralatan dan Mesin												
	- Pengadaan peralatan teknis dan administrasi												
0067	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA												
00011	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL												
	A. DIKLAT PIMPINAN TINGKAT IV												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan/fotokopi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyelenggaraan Diklatpim IV												
	- Penyelenggaraan PKL Diklatpim IV												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan peserta diklatpim IV												
	- Perjalanan PKL peserta DIKLATPIM IV												
	- Perjalanan advance PKL DIKLATPIM IV												
	- Transpot pengawas ujian												
	B. DIKLAT PIMPINAN TINGKAT III												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan/Fotokopi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyelenggaraan Diklatpim III												
	- Penyelenggaraan PKL Diklatpim III												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan peserta Diklatpim III												
	- Perjalanan advance PKL Diklatpim III												
	- Perjalanan PKL Diklatpim III												
	- Transport pengawas ujian												
	C. DIKLAT PIMPINAN TINGKAT II												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Biaya borongan diklatpim II												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan dinas diklatpim II												
0067	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA												
0014	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN												
	A. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan/Fotokopi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol II reguler												
	- Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol II honorer												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Transpor Pengawas Ujian												
	B. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan/Fotokopi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol III												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Transpot pengawas ujian												
0018	RINTISAN PENDIDIKAN GELAR												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor penguji tesis ITS												
	- Honor penguji tesis UI												
	- Honor penguji tesis UNPAD												
	- Honor penguji tesis IPB												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Bantuan buku dan referensi												
	- Penyusunan laporan dan evaluasi TB												
	- Bantuan Riset/Penelitian/Seminar S2												
	- Bantuan Riset/Penelitian/Seminar S3												
	- Operasional Pusat												
	TUNJANGAN MAHASISWA (MASING-MASING 25 MHS)												
	- ITS angkatan III												
	- ITS angkatan IV												
	- UI angkatan I												
	- IPB angkatan I												
	- IPB angkatan II												
	- UNPAD angkatan I												
	- Biaya borongan S2 ITS angkatan III												
	- Biaya borongan S2 ITS angkatan IV												
	- Biaya borongan S2 UI angkatan II												
	- Biaya borongan S2 UNPAD angkatan I												
	- Biaya borongan S2 IPB angkatan I												
	- Biaya borongan S2 IPB angkatan II												
	- S3 ITS												
	- S3 IPB												
	- Biaya Borongan S3 ITS												
	- S2 UGM												
	- Biaya Borongan S3 IPB												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Pemanggilan dan pemulangan peserta												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Perjalanan dalam rangka kerjasama Perguruan tinggi												
0021	PELATIHAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA												
	A. DIKLAT FUNGSIONAL STATISTISI TINGKAT AHLI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK , kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan perlengkapan peserta												
	- Percetakan modul pelatihan												
	- Pencetakan sertifikat												
	- Housekeeping dan konsumsi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor pengajar												
	- Honor penyusunan materi dan naskah ujian												
	- Honor Pemeriksa hasil ujian												
	- Honor Petugas Piket												
	- Honor Pengawas Ujian												
	- Honor tutorial/pendamping												
	- Honor Programmer												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Operasional												
	- Pembahasan materi pelatihan												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta diklat												
	- Transport lokal pengajar												
	B. DIKLAT FUNGSIONAL PRANATAN KOMPUTER TINGKAT AHLI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan perlengkapan peserta												
	- Pengadaan buku modul pelatihan												
	- Pencetakan sertifikat												
	- Konsumsi housekeeping dan laundry												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor Pengajar teori												
	- Honor Pengajar Praktikum												
	- Honor Pengawas ujian												
	- Honor Pemeriksa hasil ujian												
	- Honor Petugas piket												
	- Honor Programmer												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan laporan dan evaluasi												
	- Operasional Pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor nara sumber eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta diklat												
	- Transport lokal												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	C. DIKLAT JARAK JAUH STATISTIK DASAR												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan buku pedoman												
	- Pencetakan modul pelatihan												
	- Pencetakan soal ujian												
	- Pencetakan sertifikat												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor tutorial												
	- Honor pengolahan hasil ujian												
	- Honor pemeriksaan hasil ujian												
	- Honor pengawas ujian												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pengiriman dokumen												
	- Biaya operasional daerah												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan monitoring dan supervisi ke daerah												
	- Transpor lokal peserta												
	D. DIKLAT TOT KSK PENGOLAHAN DATA STATISTIK DASAR												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan Komputer supplies												
	- Pengadaan perlengkapan peserta												
	- Pengadaan buku modul pelatihan												
	- Pencetakan sertifikat												
	- Konsumsi housekeeping dan cucian												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengawas ujian												
	- Honor pemeriksaan hasil ujian												
	- Honor petugas piket												
	- Honor pengajar												
	- Honor tutorial/pendamping												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Operasional pusat												
	- Pembahasan materi pelatihan												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber eselon II												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Transport lokal pengajar												
	- Transport lokal peserta dari DKI												
	E. DIKLAT PEMOGRAMAN DATABASE TERINTEGRASI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Perlengkapan peserta												
	- Pengadaan Modul												
	- Pengadaan Sertifikat												
	- Konsumsi, housekeeping dan cucian												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor pengajar teori												
	- Honor pengajar praktikum												
	- Honor penyusunan materi naskah ujian												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Upah pemeriksasi hasil ujian												
	- Honor pengawas ujian												
	- Honor petugas piket												
	- Honor programmer												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan bahan diklat												
	- Barang Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta												
	- Transport pengajar tutor												
	F. DIKLAT KOMPETENSI PEJABAT ESELON IV												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan Perlengkapan peserta												
	- Konsumsi, housekeeping dan cucian												
	- Pencetakan sertifikat												
	- Pencetakan modul												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor pengajar												
	- Honor pemeriksasi hasil ujian												
	- Honor Penyusunan naskah ujian												
	- Honor pengawas ujian												
	- Honor petugas piket												
	- Upah Penyusunan dan Pengolahan bahan diklat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi dan laporan (30 org x 5 hr)												
	- Biaya operasional diklat kompetensi pejabat eselon IV												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber												
	- Honor penguji seminar												
524111	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta dari daerah												
	- Transport pengajar												
	G. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PEMBERKASAN CPNS												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
521119	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan persiapan penelitian berkas CPNS tahap I												
	- Pembahasan finalisasi berkas CPNS tahap I												
	- Pembahasan dalam rangka finalisasi CPNS tahap II												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan program peningkatan percepatan SK pengangkatan CPNS												
	- Transport lokal di DKI												
	H. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN STATISTISI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Bahan Bintek prakom di Pemprov dan BPS Provinsi												
	- Materi dan kelengkapan Bintek Prakom di Pemprov dan BPS Provinsi												
	- Konsumsi pembinaan statistisi di pemkab/pemkot												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan bahan pembinaan bintek												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembinaan BUP Statistisi Utama												
	- Pembahasan rencana pembinaan teknis (Bintek)												
	- Pranata komputer (Prakom) di pemprov dan BPS Propinsi												
	- Pembahasan lanjutan kegiatan bintek prakom di Pemprov & BPS Prov												
	- Pembahasan penambahan jenjang Statistisi Utama												
	- Pembahasan final penambahan jenjang Statistisi Utama												
	- Pembahasan lanjutan sistem informasi jabatan fungsional												
	- Operasional daerah untuk pembinaan statistisi di pemprov dan BPS Propinsi												
	- Operasional Pusat												
522115	Belanja Jasa Profesi												
	- Honor narasumber penambahan jenjang statistisi utama dan BUP Statistisi Utama												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan dinas dalam rangka bintek prakom di pemprov dan BPS Propinsi												
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan Jab. Fungsional Statistisi dan fungsional lainnya												
	- statistisi utama dan BUP statistisi utama												
	I. PEMILIHAN KSK BERPRESTASI												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan medali KSKP Propinsi												
	- Pengadaan perlengkapan KSKP												
	- Pencetakan buku pedoman dan dokumen												
	- Pencetakan kuesioner KSKP-1												
	- Pencetakan kuesioner KSKP-2												
	- Pencetakan kuesioner KSKP-3												
	- Pencetakan piagam kskp kab/kota												
	- Pencetakan piagam kskp propinsi												
	- Dokumentasi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor wakil ketua												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyusunan kuesioner												
	- Penyelenggaraan pemilihan KSKP												
	- Penyusunan jadwal acara, kegiatan												
	- Mengikuti acara kenegaraan dan orientasi lapangan di DKI												
	- Biaya operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan KSKP propinsi ke pusat												
	J. ASSESMENT CENTER												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan rencana kegiatan dan jadwal												
	- Pembahasan materi												
	- Penyusunan jadwal												
	- Penyelenggaraan assesment center												
	- Operasional												
524111	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Transport												
	- Transport lokal peserta DKI												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	K. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengandaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi standar kompetensi jabatan struktural												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengolahan dokumen												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Identifikasi kompetensi jabatan struktural												
	- Validasi kompetensi jabatan struktural												
	- Penentuan standar kompetensi jabatan struktural												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi												
	L. PENYUSUNAN URAIAN PEKERJAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN												
521211	<u>Belanja bahan</u>												
	- Pengandaan publikasi standar												
	- Workshop												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengumpulan data												
	- Pengolahan dokumen												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Biaya operasional												
	- Penentuan nama jabatan												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi pembinaan (validasi) BPS dan Menpan												
	M. PERBAIKAN DATA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan dan distribusi draft awal												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Verifikasi data kepegawaian												
	- Penyusunan Tabulasi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan mekanisme perbaikan data												
	- Pembahasan isi database												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi update data SIMPEG												
	N. REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Perlengkapan petugas												
	- Percetakan/pengandaan dokumen												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Upah pengolahan penyusunan laporan keuangan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan bahan rekonsiliasi dg propinsi												
	- Penyelenggaraan rekonsiliasi												
	- Penyusunan bahan rekonsiliasi dengan propinsi												
	- Pembahasan final program/software simwas												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber												
	- Honor Narasumber Eselon I												
	- Honor Narasumber Eselon II												
	- Honor Narasumber Eselon III												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dinas dim rangka rekonsiliasi laporan keuangan												
	- Transpor lokal rekonsiliasi laporan keuangan di DKI												
	O. SOSIALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan hasil sosialisasi												
	- Evaluasi dan laporan hasil sosialisasi												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dim rangka sosialisasi PNBPN												
	- Perjalanan Pimpinan												
	- Transport lokal peserta DKI												
	P. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan Perlengkapan Peserta												
	- Pengadaan Perlengkapan Pengajar												
	- Pengadaan Buku Wajib												
	- Pencetakan sertifikat												
	- Pengadaan dokumen												
521213	<u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>												
	- Honor Mengajar												
	- Honor Tutor												
	- Honor Piket												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Persiapan penyelenggaraan dan administrasi												
	- Penyelenggaraan kegiatan												
	- Operasional PKL												
	- Operasional Daerah												
	- Operasional Pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Narasumber												
	- Honor Pembicara												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta dari kab/kota ke TC												
	- Perjalanan pengajar												
	- Transport lokal pengajar dan pengawas												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
0092	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTRIAN/LEMBAGA												
0084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN												
	A. REVIEW LAPORAN KEUANGAN BPS TAHUN 2009												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengandaan/pencetakan												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan & pengolahan data												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan dan evaluasi naskah laporan												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi pembinaan, eselon I/II												
	- Supervisi pembinaan, tim auditor												
	- Perjalanan pimpinan dalam rangka rewiw laporan keuangan												
	B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 2010												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan hasil pemeriksaan di daerah												
	- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan di daerah												
	- Biaya Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Pemeriksaan langsung di daerah (PKPT) supervisi												
	- Pemeriksaan langsung di daerah (PKPT) Pengawasan												
	- Pemeriksaan khusus, pembinaan penyuluhan												
	- Perjalanan Pimpinan dalam rangka pengawasan keuangan												
0094	PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN INFORMASI												
0050	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISIS DATA DAN STATISTIK												
	A. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengandaan kuesioner survei tendensi bisnis												
	- Pengandaan kuesioner survei tendensi konsumen												
	- Pengandaan publikasi ITB dan ITK												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor pencacahan survei tendensi bisnis												
	- Honor pencacahan survei tendensi konsumsi												
	- Upah pengolahan												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan hasil ITB dan ITK												
	- Penulisan hasil ITB dan ITK												
	- Operasional												
	- Operasional sosialisasi ITB dan ITK di provinsi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
524119	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)												
	- Sosialisasi ITB dan ITK ke BPS Provinsi												
	B. ANALISIS DISPARITAS												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan Komputer supplies												
	- Pencetakan analisis disparitas input pembangunan												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Kunjungan analisis disparitas input pembangunan												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan metodologi analisis disparitas input pembangunan												
	- Pembahasan hasil analisis disparitas input pembangunan												
	- Penulisan hasil analisis disparitas input pembangunan												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Sosialisasi hasil analisis												
	C. ANALISIS STATISTIK EKONOMI												
521211	Belanja Bahan												
	- Pencetakan publikasi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan metodologi/rancangan analisis												
	- Pembahasan faktor-faktor ekonomi dan politik												
	- Pembahasan akhir dan finalisasi penulisan												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)												
	- Sosialisasi hasil study												
	D. PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN KONSISTENSI STATISTIK EKONOMI & SOSIAL												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas & bahan cetak												
	- Pencetakan laporan												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Tabulasi basket komoditas												
	- Kajian literatur dan kunjungan ahli												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Evaluasi konsistensi data												
	- Evaluasi hasil analisis												
	- Finalisasi laporan												
	- Pembahasan Metodologi Konsistensi												
	- Operasional Daerah												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)												
	- Perjalanan dinas ke daerah untuk verifikasi												
	- Honor Penunjuk jalan												
	- Perjalanan Supervisi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan data dan Tabulasi												
	- Upah penyusunan program/tabel												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan laporan perekonomian												
	- Penyusunan series data indikator ekonomi												
	- Penyusunan tinjauan kinerja perekonomian Indonesia (TKPI)												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Konsultasi ahli												
	- Pembinaan penyusunan indikator perekonomian												
	H. PENGEMBANGAN MODEL STRUKTUR EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas, dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplis												
	- Pengadaan instrumen field study												
	- Pencetakan publikasi pengembangan model												
	- Pengadaan/pembelian publikasi/referensi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan data dan tabulasi												
	- Upah penyusunan program dan tabel												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Honor seminar hasil pengembangan model												
	- Penyusunan finalisasi identifikasi model												
	- Pembahasan instrumen field study												
	- Pembahasan finalisasi pengembangan model												
	- Operasional												
52211	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor konsultan												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Sosialisasi pengembangan model												
	I. PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN INDONESIA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas, dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplis												
	- Pengadaan instrumen field study												
	- Pencetakan publikasi pengembangan model												
	- Pengadaan/pembelian publikasi/referensi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan dan tabulasi												
	- Upah penyusunan program tabulasi												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan finalisasi identifikasi model												
	- Pembahasan finalisasi pengembangan model												
	- Pembahasan evaluasi model												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Field study pengembangan model												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pembahasan hasil pengolahan & Penyusunan Laporan												
	- Operasional Pusat												
	- Operasional Daerah												
0051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengiriman dokumen												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan box dokumen												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Operasional												
	- Pembahasan rencana kerja/program												
	- Penyelenggaraan rateknas pimpinan BPS Propinsi												
	- Rapat evaluasi pimpinan BPS/BPS Prop/Kab/Kota akhir tahun												
	- Penyelenggaraan rateknas pimpinan BPS Kab/Kota												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dalam rangka penyusunan program & rencana kerja												
	- Perjalanan rateknas pimpinan BPS Prop I												
	- Perjalanan petugas studi baseline SDM												
	- Perjalanan rateknas pimpinan BPS Kab/Kota												
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>												
	- Pengadaan peralatan kebutuhan administrasi												
0130	SURVEI BIDANG INDUSTRI												
	A. SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan dokumen survei IBS bulanan												
	- Pengadaan bahan komputer supplies												
	- Pengadaan ATK												
	- Percetakan dokumen survei IBS bulanan												
	- Publikasi perkembangan indeks IBS												
	- Leaflet indeks IBS												
	- Sampul CD bergambar												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data ke instansi dan asosiasi												
	- Pengolahan (editing, coding, dan data entry)												
	- Pemeriksaan dan penyajian angka indeks												
	- Upah pencacahan di Jabodetabek												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan evaluasi finalisasi angka indeks IBS bulanan												
	- Pembahasan hasil IBS bulanan												
	- Pembahasan penyajian BRS IBS bulanan												
	- Operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengendalian pelaksanaan survei IBS bulanan dari pusat ke daerah												
	B. SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Percetakan dokumen VIKR tahunan												
	- Publikasi IKR (sektoral) VIKR tahunan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Anggota												
	- Upah kompilasi hasil pencacahan di pusat tahunan												
	- Upah penyusunan sistem dan program pengolahan												
	- Upah penyusunan dummy tabel VIKR tahunan												
	- Upah data entry listing VIKR tahunan												
	- Honor master intama VIKR tahunan												
	- Honor intama VIKR tahunan												
	- Honor innas VIKR tahunan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pengiriman dokumen												
	- Operasional pusat												
	- Pelatihan intama, innas dan pembahasan VIKR di pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dinas innas dari BPS Pusat VIKR tahunan												
	- Supervisi/pengecekan lapangan VIKR tahunan												
	- Transport lokal innas VIKR di DKI												
	C. SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan dokumen survei IBS												
	- Pencetakan dokumen updating direktori dan kabsis												
	- Pencetakan publikasi direktori IBS												
	- Pencetakan publikasi IBS												
	- Pencetakan brosur IBS												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Upah kunjungan ulang di wilayah Jabodetabek												
	- Upah pengolahan manual (editing, coding dan data entry) di BPS												
	- Upah pengutipan direktori dari instansi lain di BPS												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil survei IBS tahunan												
	- Penyeragaman dan pengkodean hasil survei IBS tahunan												
	- Pembahasan indikator industri												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi pembinaan dan perusahaan non respon												
0131	SURVEI BIDANG PERTANIAN												
	A. SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan daftar SP tanaman pangan												
	- Pencetakan rekap kab/kota SP tanaman pangan												
	- Pencetakan register kecamatan SP tanaman pangan												
	- Pencetakan daftar listing (sub-l) survei ubinan												
	- Pencetakan daftar sampel (sub-ds) survei ubinan												
	- pencetakan daftar sub-s survei ubinan												
	- Pencetakan publikasi produksi padi dan palawija												
	- Pencetakan publikasi luas lahan menurut penggunaannya												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Upah Receiving-batching data SP dan ubinan												
	- Honor kompilasi, validasi, tabulasi data SP & ubinan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan publikasi asem dan aram I												
	- Pembahasan publikasi atap dan aram II												
	- Pembahasan publikasi aram III												
	- Penyusunan publikasi												
	- Pengiriman dokumen SP & ubinan-pusat												
	- Biaya operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi pengumpulan data luas lahan/sp dan luas panen												
	- Supervisi pengumpulan dan produktivitas/ubinan												
	- Supervisi penghitungan aram I, II & III												
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>												
	- Pengadaan alat ubinan												
	B. SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan dokumen survei perusahaan perkebunan												
	- Pencetakan publikasi perusahaan perkebunan												
	- Pencetakan laporan akhir studi produktivitas 5 komoditas perkebunan rakyat												
	- Pengadaan bahan studi produktivitas 5 komoditas perkebunan rakyat												
	- Penggandaan dok. studi prod. 5 komoditas perkeb. rakyat												
	- Pengadaan perlengkapan petugas studi prod. 5 komoditas perkeb. rakyat												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan program survey perusahaan perkebunan bulanan												
	- Penyusunan program survey perusahaan perkebunan tahunan												
	- Upah pencacahan perusahaan perkebunan yang kantor pusatnya di DKI Jakarta												
	- Upah receiving-batching survei perush. Perkebunan												
	- Upah pengolahan survei perusahaan perkebunan bulanan												
	- Upah pengolahan survei perusahaan perkebunan tahunan												
	- Upah pengolahan direktori perusahaan perkebunan hasil pengecekan lapangan												
	- Upah penyusunan program studi prod. 5 komoditi perkeb. rakyat												
	- Upah inas studi prod. 5 komoditas perkeb. rakyat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan direktori perusahaan perkebunan												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survey perusahaan perkebunan												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil studi produktivitas												
	- Pengiriman dokumen												
	- Pelatihan inas studi produktivitas												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Sinkronisasi data perkebunan												
	- Perjalanan inas studi Produktivitas												
	- Supervisi pelatihan petugas studi prod. 5 komoditas perkeb rakyat												
	- Supervisi pelaksanaan lap. studi prod. 5 komoditas perkeb rakyat												
	C. SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI /PPI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan Kuesioner												
	- Pencetakan Publikasi												
	- Pencetakan Buku Pedoman												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Upah Pencacahan Perusahaan Kantor Pusat												
	- Upah Receiving-Batching Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI												
	- Upah pengolahan perusahaan perikanan dan TPI/PPI												
	- Tabulasi												
	- Cross Check Tabel												
	- Matching direktori perusahaan perikanan, tpi/ppi dengan instansi terkait												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan Direktori Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI												
	- Evaluasi dan Penyusunan Hasil Survei TPI/PPI												
	- Evaluasi dan Penyusunan Hasil Survei Perusahaan Perikanan												
	- Sinkronisasi Data Perikanan dengan Instansi Terkait												
	- Pengiriman dokumen dari pusat ke bps propinsi												
	- Operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi pusat												
	D. SURVEI PERUSAHAAN HORTIKULTURA DAN PENYUSUNAN INDIKATOR PERTANIAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan perlengkapan inas produktifitas hortikultura												
	- Pengadaan perlengkapan petugas survei produktifitas hortikultura												
	- pencetakan dokumen perusahaan hortikultura (kuesioner ph-cl horti)												
	- pencetakan dokumen perusahaan hortikultura (kuesioner ph-vp horti)												
	- pencetakan daftar isian bulanan survei hortikultura												
	- pencetakan daftar isian triwulanan/tahunan survei hortikultura												
	- pencetakan rekapitulasi daftar isian survei hortikultura												
	- pencetakan register bulanan survei hortikultura												
	- pencetakan register triwulanan/tahunan survei hortikultura												
	- pencetakan daftar listing dan kuesioner survei produktifitas hortikultura												
	- pencetakan buku pedoman survei produktifitas hortikultura												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggungjawab												
	- honor ketua												
	- honor wakil ketua												
	- honor anggota												
	- Upah receiving batchibg perush. Hortikultura												
	PERUSAHAAN HORTIKULTURA												
	- Upah pengutipan dan pemutakhiran direktori perusahaan hortikultura												
	- Upah pencacahan data perusahaan hortikultura di kantor pusat												
	- Pengolahan manual perusahaan hortikultura												
	- Upah Pengolahan direktori perusahaan hortikultura di BPS												
	SURVEI HORTIKULTURA												
	- Kompilasi data survei hortikultura												
	- Penyusunan/perbaikan program pengolahan												
	SURVEI PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA												
	- Penarikan sampel rumah tangga produktifitas hortikultura												
	- Pengolahan data survei produktivitas hortikultura												
	- Penyusunan program pengolahan dan tabulasi												
	- Honor inas produktifitas hortikultura												
	- Honor master intama s. produktifitas hortikultura												
	- Honor intama s. produktifitas hortikultura												
	INDIKATOR PERTANIAN (IP)												
	- Pengumpulan data indikator pertanian dari instansi terkait												
	- Penyusunan program dan tabulasi indikator pertanian												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Penyusunan tabel indikator produksi pangan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pengiriman dokumen survei hortikultura dari pusat ke propinsi												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei perusahaan hortikultura												
	- Penyusunan angka sementara (asem) survei hortikultura												
	- Penyusunan angka tetap (atap) survei hortikultura												
	- Akomodasi pelatihan innas survei produktifitas hortikultura												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei produktifitas hortikultura												
	- Operasional pusat hortikultura												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengecekan angka sementara (asem) survei hortikultura												
	- Pengecekan angka tetap (atap) survei hortikultura												
	- Uji lapangan survei produktifitas hortikultura												
	- Supervisi survei produktifitas hortikultura												
	- Pengiriman/pemanggilan innas survei produktifitas hortikultura												
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>												
	- Pengadaan perlengkapan petugas survei produktifitas hortikultura												
	E. SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan kuesioner perusahaan peternakan dan RPH												
	- Pengadaan kuesioner estimasi populasi temak												
	- Pencetakan publikasi statistik peternakan dan RPH												
	- Pencetakan publikasi statistik populasi temak												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah kompilasi data RPH dan keurmaster												
	- Programing tabulasi perusahaan peternakan dan RPH												
	- Upah receiving-batching perus. Peternakan dan RPH												
	- Upah pengolahan dan tabulasi perus. Peternakan dan RPH												
	- Upah kompilasi data estimasi populasi temak												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi dan penyusunan hasil perusahaan peternakan dan RPH												
	- Sinkronisasi dan verifikasi data perusahaan peternakan dengan instansi terkait												
	- Evaluasi dan penyusunan hasil estimasi populasi temak												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- supervisi survei perusahaan peternakan dan RPH												
	F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KEDELAI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan dokumen (kuesioner dan buku pedoman)												
	- Pencetakan laporan akhir publikasi												
	- Pengadaan perlengkapan infrastruktur												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetakan di pusat												
	- Pengadaan komputer supplies di pusat												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggungjawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor instruktur nasional												
	- Honor instruktur utama												
	- Upah Receiving-batching STU tanaman kedelai												
	- Upah pengolahan STU tanaman Kedelai												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan kuesioner dan buku pedoman												
	- Pelatihan instruktur nasional												
	- Pembahasan kerangka tabulasi dan rule validasi												
	- Pembahasan laporan akhir/publikasi												
	- Pengiriman dokumen dari BPS												
	- Biaya operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi pelatihan petugas dan pelaksana lapangan												
	- Pemanggilan/pengiriman innas												
	G. SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan dokumen survei perusahaan kehutanan dan data sekunder												
	- Pencetakan publikasi survei perusahaan kehutanan dan data strategis kehutanan												
	- Pengadaan bahan dan ATK di pusat												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah penyusunan program tabulasi												
	- Upah data entry & Validasi survei perusahaan kehutanan												
	- Upah editing, coding, survei perusahaan kehutanan												
	- Upah pencacahan perusahaan kehutanan yang kantor pusatnya di DKI												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei perusahaan kehutanan												
	- Pembahasan direktori perusahaan kehutanan												
	- Penyusunan kuesioner survei kehutanan triwulanan												
	- Pengiriman dokumen												
	- Operasional BPS Pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengecekan lapangan perusahaan kehutanan non respon												
	H. STATISTIK KEHUTANAN RAKYAT												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan kuesioner pilot I												
	- Penggandaan buku pedoman PCS pilot I												
	- Penggandaan buku pedoman PMS pilot I												
	- Penggandaan buku pedoman BPS kab/kota pilot I												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan laporan pilot I												
	- Penggandaan kuesioner pelaksanaan SKR												
	- Penggandaan buku pedoman PCS pelaksanaan SKR												
	- Penggandaan buku pedoman PMS pelaksanaan SKR												
	- Penggandaan buku pedoman BPS propinsi/kab pelaksanaan SKR												
	- Penggandaan publikasi SKR												
	- Pengadaan perlengkapan innas dan intama SKR												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor penyusunan program tabulasi pilot I												
	- Honor innas pelaksanaan SKR												
	- Honor intama dan master intama pelaksanaan SKR												
	- Upah receiving, batching, editing & entry dokumen pelaksanaan SKR												
	- Upah pengolahan dokumen SKR												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan metodologi, kuesioner, dan buku pedoman												
	- Workshop intama dan master intama												
	- Pelatihan innas pelaksanaan SKR												
	- Penyempurnaan kuesioner dan buku pedoman pelaksanaan SKR												
	- Evaluasi hasil akhir pilot												
	- Pengiriman dokumen pelaksanaan SKR dari pusat ke propinsi												
	- Penyusunan publikasi pelaksanaan SKR												
	- Operasional BPS												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan Petugas pilot												
	- Supervisi pusat pelaksanaan SKR												
	- Perjalanan innas pelaksanaan SKR												
0133	SURVEI BIDANG PERDAGANGAN												
	A. KOMPLIASI DATA STATISTIK EKSPOR												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan barang cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- Ekspor tahunan												
	- Ekspor bulanan												
	- Ekspor menurut ISIC												
	- Analisis komoditi ekspor												
	- Unit value indeks												
	- Laporan pembahasan database												
	- Direktori eksportir												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan dokumen ekspor di Jakarta												
	- Pengolahan manual (editing-coding)												
	- Entri data												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan penyusunan analisa komoditi ekspor												
	- Pembahasan penyusunan unit value indeks												
	- Pembahasan penyusunan ekspor menurut ISIC												
	- Pembahasan akhir perbaikan database												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan kompilasi												
	B. KOMPLIASI DATA STATISTIK IMPOR												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi impor bulanan												
	- Pencetakan publikasi impor tahunan												
	- Pencetakan direktori impor												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan sistem dan program pengolahan												
	- Pengumpulan dokumen impor di DKI Jakarta												
	- Editing coding dokumen impor bulanan BC 2.0												
	- Data entry dokumen impor bulanan BC 2.0												
	- Editing coding dokumen impor bulanan BC 2.3 (kb)												
	- Data entry dokumen impor bulanan BC 2.3												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan analisis komoditi impor												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil pengolahan statistik impor												
	- Finalisasi penyusunan direktori impor												
	- Finalisasi penyusunan statistik impor kawasan berikat												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi kompilasi data impor ke KBC												
	C. SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN DAN KONSUMEN PEDESAAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan buku pedoman survei harga produsen sektor pertanian												
	- Pencetakan buku pedoman survei harga konsumen pedesaan												
	- Pencetakan buku pedoman pengolahan Nilai Tukar Petani												
	PENGANGANDAAN DOKUMEN												
	- Daftar HP-1A												
	- Daftar HP-1B												
	- Daftar HP-2.1												
	- Daftar HP-2.6												
	- Daftar HP-2.2, HP-2.3 s.d HP-2.5												
	- Daftar HP-2.4.1 dan HP-2.4.2												
	- Register HP-1, HP-2.1 s.d. HP-2.6												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- Statistik Nilai tukar petani												
	- perkebunan rakyat												
	- sektor peternakan dan perikanan												
	- makanan												
	- non makanan												
	- Stat Upah buruh tani												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan kerangka dan daftar sampel HP sektor pertanian dan HKP												
	- Penyusunan program/tabel												
	- Cross check tabel												
	- Pengumpulan data sekunder/studi literatur dan konsultasi												
	SURVEI HARGA PRODUSEN SEKTOR PERTANIAN												
	- Upah editing coding												
	- Upah entry data												
	SURVEI HARGA KONSUMEN PEDESAAN												
	- Upah editing coding												
	- Upah entry data												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan perencanaan dan rancangan kuesioner												
	- Pembahasan evaluasi hasil survei												
	- Pembahasan penyusunan buku pedoman												
	- Biaya Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi HPKP												
	D. SURVEI STATISTIK HARGA KONSUMEN DAN VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN KUESIONER DAFTAR ISI HARGA KONSUMEN												
	- HK1-1 pasar tradisional di jakarta												
	- HK1-2 pasar tradisional di jakarta												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- HK2-1 pasar tradisional di jakarta												
	- HK2-2 pasar tradisional di jakarta												
	- HK3 pasar tradisional di jakarta												
	- HK1-1 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- HK1-2 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- HK2-1 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- HK4 di jakarta												
	- HK5 di jakarta												
	- HK6 di jakarta												
	- Daftar isian outlet di departemen store												
	- Pencetakan buku direktori SHK di Jakarta												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- IHK di 66 kota tahun 2009												
	- IHK beberapa barang kelompok makanan di 66 kota tahun 2009												
	- IHK beberapa barang kelompok perumahan di 66 kota tahun 2009												
	- IHK beberapa barang kelompok sandang di 66 kota tahun 2009												
	- IHK beberapa barang kelompok kesehatan, pendidikan, dan transport di 66 kota tahun 2009												
	- Harga konsumen nasional beberapa barang dan jasa												
	- Perkembangan mingguan harga eceran beberapa komoditas (jan-jun 2009)												
	- Perkembangan mingguan harga eceran beberapa komoditas (jul-des 2009)												
	- Survei volume penjualan eceran beras I di Jakarta tahun 2009												
	- Survei volume penjualan eceran beras II di Jakarta tahun 2009												
	- Survei volume penjualan eceran beras I di 65 kota tahun 2009												
	- Survei acara TV dan ekspektasi inflasi di Jakarta tahun 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	PENDATAAN FAKTOR PENYEBAB INFLASI DI JA												
	- Listing eceran beras												
	- Pencacahan eceran beras												
	- Pengawasan pencacahan eceran beras												
	- Pengawasan listing eceran beras												
	- Pengolahan eceran beras dan acara TV												
	- Pencacahan acara TV thd 100 ruta 3 bulan sekali												
	- Pencacahan ekspektasi inflasi 100 responden 3 bulan sekali												
	- Pemeriksaan pencacahan ekspektasi inflasi 100 responden 3 bulan												
	PENCACAHAN PASAR DI DKI JAKARTA												
	- Pencacahan HK 1.1 pasar tradisional jakarta												
	- Pencacahan HK 1.2 pasar tradisional jakarta												
	- Pencacahan HK 2.1 pasar tradisional jakarta												
	- Pencacahan HK 2.2 pasar tradisional jakarta												
	- Pencacahan HK 3 pasar tradisional jakarta												
	- Upah pencacahan beras harian di jakarta												
	- Pencacahan HK 1.1 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- Pencacahan HK 1.2 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- Pencacahan HK 2.1 pasar swalayan/modern di jakarta												
	- Upah pencacahan responden di luar pasar tradisional & swalayan												
	- Pengolahan hasil pencacahan												
	PENGAWASAN PASAR DI JAKARTA												
	- Upah pengawasan pencacahan HK 1.1 pasar tradisional di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan HK 1.2 pasar tradisional di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan HK 2.1 pasar tradisional di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan HK 2.2 pasar tradisional di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan HK 3 pasar tradisional di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan beras harian di jakarta												
	- Upah pengawasan pencacahan responden di luar pasar tradisional												
	- Pengawasan HK 1.1. pasar swalayan/modern di Jakarta												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pengawasan HK 1.2. pasar swalayan/modern di Jakarta												
	- Pengawasan HK 2.2. pasar swalayan/modern di Jakarta												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan akhir naskah publikasi												
	- Pembahasan persiapan pencacahan HK dan survei pendukung lainnya												
	- Pembahasan dan penyusunan daftar isian HK dan survei pendukung lainnya												
	- Pembahasan penyiapan direktori SHK												
	- Pembahasan evaluasi survei penyebab inflasi												
	- Pembahasan penyempurnaan buku pedoman statistik harga konsumen												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber setara eselon II												
524219	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pengecekan responden dan evaluasi pelaporan HK												
	E. SURVEI STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN DAN MONITORING KURS VALUTA ASING												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN DOKUMEN DAN BUKU PEDOMAN												
	- Buku pedoman survei lembaga keuangan												
	- Kuesioner SLK10-811												
	- Kuesioner SLK10-811S												
	- Kuesioner SLK10-812												
	- Kuesioner SLK10-813												
	- Kuesioner SLK10-814												
	- Kuesioner SLK10-815												
	- Kuesioner SLK10-816												
	- Kuesioner SLK10-817												
	- Kuesioner SLK10-818												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- Monitoring valuta asing												
	- Publikasi survei lembaga keuangan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengumpulan data sekunder												
	- Pengolahan survei lembaga keuangan												
	- Pengolahan monitoring kurs valuta asing												
	- Penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan hasil survei lembaga keuangan dan monitoring kurs valuta asing												
	- Pembahasan hasil & evaluasi pembinaan SLK												
	- Pembahasan Penyusunan Program Pengolahan Survei SLK												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi survei lembaga keuangan												
	F. SURVEI STATISTIK HARGA PERDAGANGAN BESAR												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan dokumen HPB-S												
	- Pencetakan dokumen HPB-K2												
	- Pencetakan publikasi indeks HPB												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Anggota												
	- Upah pengumpulan data komoditas tambahan IHPB												
	- Upah pencacahan HPB-S bulanan di DKI												
	- Upah pengolahan HPB												
	- Upah revisit pencacahan bulanan di DKI												
	- Upah pemeriksaan HPB-S di DKI												
	- Upah pengolahan HPB-K2												
	- Upah pencacahan HPB-K2 sektor konstruksi bulanan di DKI Jakarta												
	- Upah pemeriksaan HPB-K2 sektor konstruksi di DKI Jakarta												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi indeks harga perdagangan besar nasional												
	- Evaluasi hasil survei HPB-K2												
	- Evaluasi hasil survei HPB-S												
	- Pembahasan publikasi IHPB (2000=100)												
	- Operasional												
524219	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi dan pengecekan lapangan												
	G. SURVEI STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAN KEUANGAN BUMD												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN DOKUMEN DAN BUKU PEDOMAN												
	- Buku pedoman												
	- Daftar K-1												
	- Daftar K-2												
	- Daftar K-3												
	- Dokumen APBD-1												
	- Dokumen APBD-2												
	- Dokumen BUMN dan BUMD												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- Statistik keuangan pemda propinsi												
	- Statistik keuangan pemda kab/kota												
	- Statistik keuangan pemda desa												
	- Statistik keuangan BUMN dan BUMD												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan kerangka dan daftar sampel												
	- Pengolahan statistik keuangan daerah												
	- Upah kompilasi data statistik keuangan prop												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
	- Updating direktori perusahaan BUMN dan BUMD												
	- Pencacahan BUMN												
	- Pemeriksaan BUMN												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil survei statistik keuangan desa												
	- Pembahasan metodologi dan penyusunan daftar sampel statistik keuangan												
	- Pembahasan & Evaluasi hasil survei stat keuangan propinsi												
	- Pengiriman dokumen												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi pengecekan lapangan												
	H. SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	PENGGANDAAN DOKUMEN												
	- Kuesioner HP-S												
	- Kuesioner HP-K												
	- Buku pedoman harga produsen gabah												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	PENCETAKAN												
	- Publikasi indeks harga produsen												
	- Publikasi IHP bahan konstruksi												
	- Kuesioner HP.2.1.1												
	- Publikasi statistik harga produsen gabah												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah pengolahan data HP-S												
	- Upah Pengolahan data HP-K												
	- Penyusunan Program dan tabulasi												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan publikasi IHP, 2005 = 100												
	- Evaluasi survei HP-S												
	- Pembahasan indeks harga produsen (IHP)												
	- Biaya operasional												
524219	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi dan evaluasi lapangan HP-S dan HP-K												
5321	Belanja modal peralatan dan mesin												
	- Pengadaan peralatan analisa mutu gabah												
00134	SURVEI TRANSPORTASI												
	A. SURVEI TRANSPORTASI												
521211	Belanja Bahan												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Pencetakan publikasi statistik transportasi												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Receiving batching data PJ II 5 & 6, AJR 2 & 3												
	- Receiving batching data simoppel												
	- Receiving batching data model III/1												
	- Penyusunan program/tabel												
	- Pengumpulan data di DKI oleh Pusat												
	- Pengawasan/pemeriksaan data di DKI oleh Pusat												
	- Editing, coding, entry data simoppel												
	- Editing, coding, entry data model III/1												
	- Editing, coding, entry data pj II 5 & 6, ajr 2 & 3												
	- Validasi data model III/1												
	- Validasi data simoppel												
	- Validasi data pj II 5% & 6, ajr 2 & 3												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan dan pemeriksaan hasil pengolahan												
	- Pembahasan akhir dengan instansi terkait												
	- Pembahasan penyiapan penyusunan publikasi												
	- Operasional pusat												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi pengumpulan data statistik darat, laut, udara												
	B. SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI												
521211	Belanja Bahan												
	- Perlengkapan innas												
	- Perlengkapan petugas												
	- ATK												
	- Komputer supplies												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	PENCETAKAN												
	- Kuesioner												
	- Pedoman PCS												
	- Pedoman PMS												
	- Pedoman innas												
	- Pedoman teknis												
	- Pedoman editing coding												
	- Laporan hasil survei pola distribusi perdagangan												
	- Pedoman sistem dan program pengolahan												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor innas mengajar petugas lapangan												
	- Honor innas mengajar petugas pengolahan												
	- Honor editing, coding, data entry dan validasi												
	- Honor intama												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Finalisasi pembahasan dan penyusunan kuesioner dan pedoman												
	- Workshop intama												
	- Pelatihan innas												
	- Pelatihan petugas pengolahan di pusat												
	- Penyusunan rancangan tabulasi dan sistem pengolahan												
	- Pembahasan/penyusunan laporan												
	- Operasional pusat												
524119	Belanja Jasa Profesi												
	- Honor narasumber eselon II												
	- Honor narasumber eselon III												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Pengawasan khusus di DKI Jakarta oleh pusat												
	- Pengiriman innas ke seluruh Indonesia												
	- Supervisi pelatihan petugas												
	- Supervisi pelaksanaan lapangan oleh pusat												
	- Transport innas mengajar di DKI												
00135	SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA												
	A. SURVEI BIDANG JASA DAN PARIWISATA												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN DOKUMEN												
	- Daftar VHT-S												
	- Daftar VHT-L												
	- Daftar VREST												
	- Daftar VBPW												
	- Daftar VIOT												
	PENCETAKAN PUBLIKASI												
	- Tingkat penghunian kamar hotel (VHT-S)												
	- Statistik hotel dan akomodasi lainnya (VHT-L)												
	- Statistik wisata internasional (VIOT)												
	- Statistik restoran												
	- Statistik Biro Perjalanan Wisata												
	PENCETAKAN BUKU PEDOMAN												
	- Buku pedoman VHT-S												
	- Buku pedoman VHT-L												
	- Buku pedoman VIOT												
	- Buku pedoman VREST												
	- Buku pedoman VBPW												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Entry data kartu A/D												
	- Tabulasi wisatawan internasional												
	- Pengolahan VBPW												
	- Pengolahan VHT-L												
	- Pengolahan VHT-S												
	- Pengolahan VREST												
	- Pengumpulan data sekunder statistik pariwisata												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil pengolahan stat.hotel												
	- Evaluasi hasil pengolahan stat. Biro Perjalanan Wisata												
	- Evaluasi hasil pengolahan stat. wisatawan internasional												
	- Pembahasan dan evaluasi mekanisme sistem stat.akomodasi												
	- Pengiriman dokumen												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan supervisi VREST dan VBPW												
	B. SURVEI KHUSUS USAHA MENENGAH BESAR JASA KOMUNIKASI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN												
	- Kuesioner												
	- Pedoman												
	- Publikasi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Penyusunan program/tabel												
	- Cross check tabel												
	- Upah pengolahan												
	- Terjemahan indonesia-inggris												
	- Upah pengumpulan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan Penyusunan buku pedoman & kuesioner												
	- Pembahasan dan Pemeriksaan Hasil Pengolahan												
	- Evaluasi publikasi indikator perekonomian												
	- Operasional pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor narasumber eselon II												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi dalam rangka pelaksanaan lapangan												
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN												
	A. SURVEI UPAH												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan Komputer Supplies												
	- Pencetakan lembar pengendalian												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Pencetakan leaflet												
	- Pengadaan buku pedoman												
	- Pencetakan publikasi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pengolahan												
	- Revisit di Jabodetabek												
	- Penyusunan program/tabel												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan persiapan survei Upah 2010												
	- Pembahasan publikasi upah dan pendapatan												
	- Pengiriman dokumen dan publikasi stat upah ke daerah												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi												
	B. SURVEI STRUKTUR UPAH												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan lembar pengendalian												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Penggandaan buku pedoman												
	- Pencetakan publikasi												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan												
	- Penyusunan program dan tabulasi												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Operasional												
	- Pembahasan persiapan pelaksanaan survei												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil survei												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Pengiriman supervisi ke propinsi												
	C. SAKERNAS SEMESTER I 2010												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan atk , kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi statistik ketenagakerjaan feb 2010 BPS Pusat												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil Ketua												
	- Honor anggota												
	- Honor penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel												
	- Penyempurnaan program dan sistem pengendalian												
	- Kompilasi data Sakernas per blok sensus												
	- Cross chek tabel												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pengiriman dokumen SAK 2009												
	- Penyempurnaan Kuesioner & Buku pedoman												
	- Pembahasan awal hasil Sakernas semester I 2010												
	- Finalisasi pembahasan hasil SAK sem I 2010												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	D. SAKERNAS SEMESTER II 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi statistik ketenagakerjaan di Indonesia Agustus 2010												
	- Pencetakan buku pedoman pengolahan SAK Sem II 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel												
	- Penyempurnaan program dan sistem pengendalian												
	- Kompilasi data per blok data sensus												
	- Cross check tabel												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyempurnaan kuesioner dan buku pedoman												
	- Pembahasan awal hasil SAK Sem II (Ags) 2010												
	- Finalisasi pembahasan hasil SAK Sem II												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi lapangan Agustus 2010												
	- Transport lokal supervisi di DKI												
	E. STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA DAN PEMUDA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi profil kesehatan ibu dan anak 2009												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan program tabulasi statistik penduduk lanjut usia												
	- Pengumpulan data sekunder statistik penduduk lanjut usia												
	- Studi literatur statistik penduduk lanjut usia												
	- Pengumpulan data sekunder statistik pemuda												
	- Studi literatur statistik pemuda												
	- Penyusunan program tabulasi statistik pemuda												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan metodologi dan penyusunan outline statistik penduduk lansia dan pemuda												
	- Evaluasi dan pembahasan publikasi statistik penduduk lansia dan pemuda												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Konsultasi tenaga ahli (statistik penduduk lanjut usia)												
	- Kunjungan ke daerah dalam rangka statistik pemuda												
	F. PENGHITUNGAN PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA UNTUK PENIMBANG SURVEI KEPENDUDUKAN 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor Anggota												
	- Penghitungan proyeksi Februari, Maret												
	- Penghitungan proyeksi Juni, Juli, Agustus												
	- Penyusunan program, tabulasi, dan literasi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan evaluasi data dasar												
	- Penyusunan bahan proyeksi dan naskah laporan												
	- Finalisasi naskah laporan												
	- Operasional												
	G. SUSENAS PANEL 2010 (ESTIMASI PROPINSI)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi konsumsi dan pengeluaran												
	- Pencetakan dokumen pelatihan innas susenas panel maret 2011 (kuesioner)												
	- Pengadaan perlengkapan innas susenas panel												
	- Pencetakan dokumen pelatihan innas												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Kompilasi data												
	- Cross check tabel												
	- Honor master intama												
	- Honor intama												
	- Honor innas												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Finalisasi penyusunan laporan susenas												
	- Penyempurnaan pedoman dan kuesioner susenas												
	- Pelatihan intama susenas panel												
	- Pelatihan innas susenas panel												
	- Operasional												
	- Pengiriman dokumen susenas panel												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman supervisi pusat ke lapangan susenas panel 2010												
	- Pemanggilan innas susenas panel 2011												
	- Transport lokal peserta pelatihan innas susenas panel dari DKI Jakarta												
	H. SUSENAS KOR (ESTIMASI KAB/KOTA)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi												
	- Pencetakan buku pedoman pengolahan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel												
	- Kompilasi data												
	- Cross check tabel												
	- Penyempurnaan Program dan sistem pengendalian												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan awal kuesioner dan buku pedoman												
	- Finalisasi penyusunan laporan susenas												
	- Operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan Supervisi												
	- Transport lokal supervisi di DKI												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	I. IDENTIFIKASI AGLOMERASI POTENSI DESA DI INDONESIA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan dokumen verifikasi lapangan												
	- Pencetakan publikasi nasional												
	- Pencetakan publikasi provinsi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan program/tabel												
	- Studi literatur dan konsultasi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Identifikasi variabel potensi sosial dan ekonomi												
	- Penyusunan tabulasi dan peta tematik												
	- Seminar hasil												
	- Biaya operasional BPS pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Verifikasi lapangan												
	- Supervisi lapangan												
	- Honor penunjuk jalan												
	J. PENYUSUNAN PUBLIKASI TREN/POLA MIGRASI DARI BERBAGAI SENSUS DAN SURVEI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Studi literatur												
	- Pengumpulan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan outline dan rancangan tabulasi												
	- Penulisan publikasi												
	- Operasional												
	K. PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK MOBILITAS PENDUDUK DAN TENAGA KERJA 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan publikasi statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja												
	- Penggandaan publikasi analisis mobilitas tenaga kerja hasil sakernas												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Outbut Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data sekunder												
	- Studi literatur & konsultasi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan outline dan rancangan tabulasi												
	- Penulisan publikasi												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- pengumpulan dan konsultasi data												
	L. PILOT PENDATAAN PODES 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Kuesioner kabupaten/kota												
	- Kuesioner kecamatan												
	- Kuesioner desa/kelurahan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Penggandaan laporan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah pencacahan nagari (3 kunjungan)												
	- Upah Pengawasan dan Pemeriksaan pencacahan nagari												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan instrumen												
	- Evaluasi hasil lapangan												
	- Finalisasi laporan												
	- Seminar di BPS Prov Sumbar												
	- Operasional Kabupaten												
	- Operasional												
522113	<u>Belanja Jasa Konsultan</u>												
	- Konsultan Pilot Podes												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor Nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi												
	M. PROFIL KESEHATAN IBU DAN ANAK 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan publikasi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Pengumpulan data sekunder Profil (KIA) 2010												
	- Studi literatur Profil (KIA) 2010												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan metodologi dan penyusunan Outline Profil (KIA) 2010												
	- Evaluasi dan pembahasan awal Profil (KIA) 2010												
	- Finalisasi Naskah Profil (KIA) 2010												
	- Operasional												
00138	SURVEI PERTAMBANGAN												
	A. SURVEI PERTAMBANGAN DAN ENERGI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan direktori pertambangan dan energi												
	- Pencetakan dokumen survei pertambangan besar												
	- Pencetakan dokumen survei energi												
	- Pencetakan dokumen survei penggalian												
	- Pencetakan dokumen updating perusahaan pertambangan dan energi												
	- Pencetakan dokumen survei perusahaan pertambangan energi triwulanan												
	- Pencetakan kuesioner survei captiva power												
	- Penggandaan pedoman pertambangan dan energi												
	- Pencetakan pedoman survei captiva power												
	- Pencetakan publikasi survei pertambangan besar												
	- Pencetakan publikasi survei energi												
	- Pencetakan publikasi survei penggalian golongan C												
	- Pencetakan publikasi survei captiva power												
	- Pengadaan alat tulis dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan dan pengetikan naskah publikasi												
	- Upah pengumpulan data khusus dalam rangka penyusunan neraca energi												
	- Upah pengumpulan data sekunder ke instansi terkait												
	- Upah pencacahan kantor pusat perusahaan pertambangan besar di jakarta												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Upah revisit pertambangan dan energi triwulanan Jabodetabek												
	EDITING, CODING, DATA ENTRY, DAN VALIDASI												
	- Survei pertambangan besar												
	- Survei energi												
	- Survei penggalian												
	- Updating perusahaan pertambangan dan energi												
	- Survei pertambangan dan energi triwulanan												
	- Survei captiva power												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei pertambangan												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei energi												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil updating												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil kegiatan survei captiva power												
	- Operasional pusat survei pertambangan dan energi												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dinas survei pertambangan dan energi												
	- Supervisi survei pertambangan dan energi												
	- Supervisi updating direktori pertambangan dan energi												
	B. SURVEI KONSTRUKSI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan direktori konstruksi tahunan												
	- Pengadaan pedoman konstruksi Tahunan												
	- Pencetakan kuesioner survei konstruksi tahunan												
	- Pencetakan kuesioner survei konstruksi triwulanan (4 triwulan)												
	- Pencetakan publikasi survei konstruksi tahunan												
	- Pencetakan publikasi indikator konstruksi triwulanan (4 edisi)												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	EDITING, CODING, DATA ENTRY DAN VALIDASI												
	- Survei konstruksi tahunan												
	- Survei konstruksi triwulanan												
	- Pemeriksaan dokumen di pusat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan persiapan survei konstruksi tahunan												
	- Evaluasi dan pembahasan hasil survei konstruksi Tahunan												
	- Evaluasi dan pembahasan indikator konstruksi triwulan 1												
	- Evaluasi dan pembahasan indikator konstruksi triwulan 3												
	- Biaya operasional pusat survei konstruksi												
	- Pengiriman dokumen dari pusat ke propinsi												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dinas survei konstruksitahunan												
	- Perjalanan survei konstruksi triwulanan												
00141	SURVEI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi SLHI												
	- Pencetakan publikasi IPB												
	- Pencetakan publikasi SDLP												
	- Pencetakan publikasi studi RT dan Lingkungan												
	- Pencetakan/pengadaan dokumen (kuesioner dan buku pedoman)												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Anggota												
	- Honor Penterjemah (SLHI,IPB, SDLP)												
	PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP												
	- Upah pengumpulan data SLHI di 33 Prop												
	- Pengumpulan data sekunder di DKI Jakarta												
	PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BEI												
	- Upah pengumpulan data IPB di 33 Prop												
	- Pengumpulan data sekunder di DKI Jakarta												
	PENYUSUNAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESIK												
	- Upah pengumpulan data SDLP di 33 Prop												
	- Pengumpulan data sekunder di DKI Jakarta												
	STUDI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP												
	- Honor penanggungjawab pelaksana propinsi												
	- Honor Intama												
	- Honor Innas												
	- Honor Pencacahan												
	- Honor pengawas dan pemeriksa												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Operasional pusat												
	- Penyusunan finalisasi publikasi SLHI												
	- Penyusunan hasil dan evaluasi IPB												
	- Pembahasan finalisasi publikasi SLDP												
	- Finalisasi publikasi SPPLH												
	- Pembahasan metodologi dan instrument SPPLH												
	- Operasional studi SPPLH daerah												
	- Operasional pusat SPPLH												
	- Pelatihan innas dan petugas studi kualitatif SPPLH												
	- Pelatihan teknis petugas SPPLH daerah (Medan, Jakarta)												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP												
	- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan ahli												
	- Perjalanan konsultasi draft SLHI												
	PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BEI												
	- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan ahli												
	- Perjalanan konsultasi draft IPB												
	PENYUSUNAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESIK												
	- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan ahli												
	- Perjalanan konsultasi draft SDLP												
	STUDI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP												
	- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan ahli												
	- Perjalanan Innas dan petugas studi kualitatif												
	- Perjalanan supervisi SPPLH												
	- Penunjuk jalan												
	- Transport lokal petugas												
0142	SURVEI BIDANG SOSIAL EKONOMI												
	A. PENYUSUNAN NERACA REGIONAL												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Penggandaan materi konser PDRB Propinsi												
	- Pencetakan publikasi PDRB Propinsi menurut lapangan usaha dan PDRB kab/kot												
	- Pencetakan (revisi) buku pedoman analisis PDRB												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Inventarisasi data sektoral												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi hasil survei khusus sektoral di Pusat												
	- Kompilasi dan analisis tabel IO Propinsi												
	- Analisis data turunan PDRB												
	- Evaluasi rekonsiliasi PDRB Triwulanan												
	- Pembahasan materi rekonsiliasi PDRB												
	- Operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan konsultasi regional PDRB ke pusat penyelenggaraan												
	- Perjalanan nara sumber pematapan PDRB												
	- Perjalanan pembinaan analisis tabel I-O Proinsi												
	B. SURVEI PENYUSUNAN INDIKATOR KHUSUS (PDB TRIWULANAN)/SPIK												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Pencetakan pedoman												
	- Penggandaan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2010												
	- Penggandaan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2010												
	- Penggandaan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2010												
	- Penggandaan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2010												
	- Pencetakan publikasi PDB triwulanan 2006 - 2009												
	- Penggandaan laporan survei												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan program pengolahan												
	- Pengolahan data sekunder												
	- Pengolahan survei penyusunan indikator khusus												
	- Honor studi kepustakaan												
	- Upah inas mengajar (10 Org x 3 hari x 8 jam)												
	PENGUMPULAN DATA SEKUNDER DALAM												
	- Triwulan I												
	- Triwulan II												
	- Triwulan III												
	- Triwulan IV												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi dan penyusunan laporan hasil survei penyusunan indikator khusus (spik)												
	- Pelatihan inas SPIK												
	- Pembahasan hasil SPIK												
	- Rekonsiliasi data pdb triwulanan dengan subject matter												
	- Biaya operasional pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan inas survei penyusunan indikator khusus (SPIK)												
	- Supervisi survei penyusunan indikator khusus (SPIK)												
	C. PENYUSUNAN PDB SEKTORAL TAHUN DASAR BERJALAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Pencetakan buku pedoman												
	- Pencetakan publikasi PDB tahun dasar berjalan 2007 - 2009												
	- Pencetakan publikasi PDB nasional tahun 2006 - 2009												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor studi kepustakaan												
	- Penyusunan program pengolahan												
	- Pengolahan dokumen survei khusus penyusunan PDB tahun dasar berjalan												
	- Honor inas mengajar												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan inas dan Pembahasan di Pusat												
	- Persiapan perumusan rancangan survei												
	- Penyusunan penghitungan PDB tahun dasar berjalan												
	- Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penghitungan PDB tahun dasar berjalan												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan instruktur												
	- Supervisi												
	D. PERSIAPAN PENYUSUNAN UPDATING TABEL INPUT-OTPUT INDONESIA 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan kuesioner												
	- Pengadaan pedoman												
	- Pencetakan buku teknik penyusunan tabel IO												
	- Pencetakan buku kerangka analisis tabel IO												
	- Pengadaan klasifikasi tabel IO 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data sekunder dalam dan luar negeri												
	- Upah Inas Mengajar SKKI												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan petugas inas dan pembahasan di pusat												
	- Pembahasan SKKI												
	- Evaluasi dan penyusunan laporan hasil SKKI												
	- Penyusunan konversi KBLI ke dalam klasifikasi tabel IO 2010												
	- Biaya operasional pusat untuk survei khusus koefisien input (SKKI)												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan Supervisi SKKI												
	- Perjalanan SKKI												
	E. PENYUSUNAN SURVEI KHUSUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA (SKSPJ)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan kuesioner dan buku pedoman												
	- Penggandaan laporan SKSPJ												
	- Penggandaan dokumen PDB tahunan dan triwulanan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor inas mengajar												
	- Pengolahan SKSPJ												
	- Penyusunan program pengolahan												
	- penyusunan PDB tahunan dan triwulanan												
	- penyempurnaan metodologi penghitungan												
	- Upah pengumpulan data pelengkap SPJ												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan inas SKSPJ												
	- Pembahasan materi PDRB tahunan dan triwulanan												
	- Penyusunan dan pembahasan laporan SKSPJ												
	- Pembahasan metode penghitungan PDB tahunan dan triwulanan												
	- Evaluasi dan pembahasan PDB Inter Departemen												
	- Pembahasan dan penyusunan kuesioner SKSPJ & Buku pedoman												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Biaya operasional pusat untuk SKSPJ												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi												
	- Perjalanan Instruktur												
	F. SURVEI PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA-JASA (SPPJ)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan laporan akhir												
	- Pencetakan kuesioner dan buku pedoman												
	- Konsumsi pelatihan petugas di daerah (SKPA)												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah inas mengajar												
	- Upah pencacahan di daerah (SKKA)												
	- Upah pemeriksaan di daerah (SKKA)												
	- Uang saku pelatihan petugas di daerah												
	- Pengolahan												
	- Penyusunan program pengolahan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan dan pembahasan kuesioner/buku pedoman												
	- Penyusunan dan Pembahasan laporan akhir												
	- Biaya Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman inas SPPJ ke daerah												
	- Pengiriman supervisi SPPJ												
	- Transport lokal inas DKI												
	G. PENYUSUNAN SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA (STKU) SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Penggandaan kuesioner dan buku pedoman												
	- Penggandaan laporan STKU-SJ												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah inas mengajar (6 org x 3 hari x 8 jam)												
	- Pengumpulan data pelengkap STKU-SJ												
	- Penyusunan program pengolahan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan dan pembahasan kuesioner dan buku pedoman												
	- Pelatihan petugas inas												
	- Penyusunan dan pembahasan STKU												
	- Operasional												
	- Pengiriman dokumen STKU-SJ												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi												
	- Pengiriman inas STKU-SJ												
	- Transport lokal inas DKI												
	H. PENYEMPURNAAN DATA DASAR PENGHITUNGAN PDB DAN PDRB												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan laporan akhir												
	- Pengadaan ATK												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data pelengkap PDB tahunan dan triwulanan												
	- Pengolahan data dasar												
	- Penyusunan indikator produksi dan harga												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Konversi variabel-variabel dalam penghitungan PDB												
	- Pembahasan PDB dengan subject matter												
	- Rekonsiliasi PDB atas dasar harga berlaku dan konstan												
	- Pembahasan final laporan akhir												
	- Operasional pusat												
	- Biaya Operasional Daerah												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman petugas ujicoba/pilot LK terpadu PDB & PDRB												
	- Supervisi penyusunan LK terpadu PDB & PDRB												
	- Transport lokal petugas checking LK terpadu PDB & PDRB di DKI												
	I. SISTEM NERACA LINGKUNGAN DAN EKONOMI TERPADU (SINERLING) 2009												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan dokumen sinerling												
	- Penggandaan laporan sinerling												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data pelengkap sinerling												
	- Pengolahan data sinerling												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan kuesioner/daftar isian sinerling												
	- Penulisan laporan sinerling												
	- Penyusunan neraca fisik sumber daya alam												
	- Penyusunan neraca moneter sumber daya alam												
	- Pelatihan petugas sinerling												
	- Operasional pusat												
	- Operasional daerah untuk sinerling												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman petugas sinerling												
	J. SURVEI KHUSUS INPUT-OUTPUT (SKIO) 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan dokumen SKIO												
	- Penggandaan laporan hasil SKIO												
	- Penggandaan dokumen PDB tahunan/triwulanan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Upah pengumpulan data pelengkap SKIO												
	- Upah pengumpulan data pelengkap PDB tahunan												
	- Upah pengolahan SKIO												
	- Upah mengajar inas SKIO												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan petugas inas SKIO												
	- Pembahasan kuesioner SKIO												
	- Pembahasan dan evaluasi akhir PDB tahunan/triwulanan												
	- Penulisan laporan SKIO												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman inas petugas SKIO												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pengiriman petugas supervisi SKIO												
	- Transport lokal innas SKIO di DKI												
	K. PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan buku pedoman & daftar isian SKLNP, SKTIR & SKKRT												
	- Pencetakan buku pedoman pengolahan												
	- Penggandaan laporan SKLNP, SKTIR & SKKRT												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor innas mengajar												
	- Pengumpulan data LNP												
	- Pengumpulan data pelengkap untuk penyusunan neraca rumah tangga												
	- Penyusunan sistem dan program pengolahan												
	- Penyusunan program aplikasi												
	- Pengolahan hasil pencacahan SKLNP, SKTIR & SKKRT												
	- Penghitungan dan penyusunan komponen neraca rumah tangga di pusat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pelatihan instruktur SKLNP, SKTIR dan SKKRT												
	- Penyusunan dan penulisan laporan												
	- Evaluasi hasil penyusunan neraca rumah tangga & neraca institusi nirlaba												
	- Pembahasan pola konsumsi rumah tangga PDB triwulanan hasil SKKRT												
	- Rekonsiliasi dan evaluasi hasil pengolahan daerah												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan instruktur SKLNP, SKTIR dan SKKRT												
	- Supervisi dan cross check isian SKLNP, SKTIR & SKKRT												
	- Transport lokal innas mengajar di DKI												
	L. PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan laporan SKPS dan SKJP												
	- Pencetakan laporan neraca BUMN dan BUMD												
	- Pencetakan laporan struktur neraca BUS non finansial												
	- Pencetakan laporan keuangan dan neraca BUMD												
	- Pencetakan laporan keuangan dan neraca BUMN												
	- Pencetakan kuesioner dan pedoman SKJP												
	- Pencetakan kuesioner dan pedoman SKPS												
	- Pencetakan publikasi neraca pemerintah umum												
	- Pencetakan publikasi neraca pemerintah pusat triwulanan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor innas mengajar (SKPS dan SKJP)												
	- Pengumpulan data pelengkap untuk penyusunan neraca korporasi non finansial												
	- Updating perusahaan BUMN/D												
	- Upah updating sampel SKPS												
	- Pengumpulan data sekunder neraca/PDB sektor pemerintah tahunan & triwulanan												
	- Pengumpulan data sekunder struktur neraca BUMN/D												
	- Pengolahan SKPS dan SKPJ												
	- Pengolahan khusus BUS untuk NAD dan SNNI												
	- Pengumpulan data pembandingan proyek												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan kuesioner dan pedoman SKJP dan SKPS												
	- Pelatihan innas SKPS												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pelatihan innas SKPJ												
	- Pembahasan rekonsiliasi & pengkajian pola konsumsi RT u/ PDB triw I-IV												
	- pemerintah umum dan finalisasi naskah												
	- Penyusunan dan penulisan laporan SKPS dan SKJP												
	- Pembahasan data SE untuk penyempumaan neraca pokok BUMN/D												
	- Operasional												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan instruktur SKPS dan SKJP												
	- Supervisi lapangan SKPS												
	- Transport lokal innas DKI												
	M. PENYUSUNAN NERACA ARUS DANA												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Penggandaan daftar isian & buku pedoman SKDPP												
	- Penggandaan laporan estimasi matrik NAD 2006 - 2010												
	- Pencetakan publikasi NAD tahunan dan triwulanan												
	- Penggandaan laporan matrik NAD triwulanan												
	- Konsumsi penyusunan neraca financial												
	- Pelatihan petugas SKDPP												
	- Pelatihan petugas teknis dan aplikasi model NAD												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pencacahan SKDPP												
	- Pemeriksaan/pengawasan SKDPP												
	- Inventarisasi data laporan keuangan perbankan, asuransi dan lembaga												
	- Pengumpulan data pokok dan pelengkap NAD tahunan												
	- Pengumpulan data pokok dan pelengkap estimasi matriks NAD tahun 2007/2010												
	- Pengolahan khusus dan hasil SKDPP												
	- Pelaksanaan lapangan indeph												
	- Pengumpulan data sekunder/pelengkap external account												
	- Pengolahan daftar isian external account												
	- Pembuatan program pengolahan data												
	- Honor pengumpulan data pokok dan pelengkap neraca finansial												
	- Honor innas mengajar SKDPP												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan NAD tahunan												
	- Pembahasan estimasi matriks NAD 1999-2008												
	- Pembahasan NAD triwulanan												
	- Penyusunan aplikasi konsep transaksi luar negeri												
	- Operasional pusat												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Supervisi estimasi matrik NAD dan indeph study external account												
	N. STUDI PENYUSUNAN STOK KAPITAL												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pencetakan materi pembahasan studi penyusunan stok kapital												
	- Pencetakan buku pedoman studi penyusunan stok kapital												
	- Pencetakan kuesioner studi penyusunan stok kapital												
	- Pencetakan laporan hasil studi penyusunan stok kapital												
	- Konsumsi pelatihan innas studi penyusunan stok kapital												
	- Konsumsi penyusunan PMTB dan perubahan inventori triwulanan												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pengumpulan data sekunder												
	- Pengumpulan data sekunder PMTB												
	- Honor inas mengajar												
	- Pembuatan sistem dan program												
	- Pengolahan data												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan materi studi penyusunan stok kapital												
	- Pembahasan kuesioner dan metodologi												
	- Rekonsiliasi awal data PMTB dalam rangka penyusunan stok kapital												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan instruktur nasional (Innas)												
	- Supervisi studi penyusunan stok kapital												
	O. STUDI REKONSILIASI NERACA EKSPOR-IMPORT JASA PENUNJANG PDB												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan dokumen daftar isian												
	- Pencetakan dokumen lembar kerja penghitungan												
	- Pencetakan laporan penelitian												
	- Konsumsi pelatihan petugas indeph studi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data sekunder transaksi jasa-jasa												
	- Pengolahan hasil indepth studi												
	- Pembuatan program pengolahan data												
	- Pengumpulan data sekunder penyusunan full squence sektor LN												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Persiapan perumusan model neraca jasa												
	- Pembahasan final rekonsiliasi neraca jasa												
	- Pembahasan hasil penghitungan ekspor impor jasa propinsi												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honorarium pakar ekonomi domestik												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman petugas indepth studi neraca jasa												
	- Perjalanan petugas implementasi konsep SNA'93 dlm penyusunan deflator ekspor impor												
	P. PDB TRIWULANAN MENURUT SEKTOR DAN PENGGUNAAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pencetakan daftar isian SKMPDB												
	- Pencetakan LK penghitungan pendapatan nasional triwulanan												
	- Penggandaan laporan penelitian PDB triwulanan												
	- Pelatihan instruktur SKMPDB												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor instruktur SKMPDB												
	- Honor pembuatan program pengolahan data												
	- Honor pengumpulan data sekunder PDB triwulanan												
	- Honor pengolahan hasil SKMPDB												
	- Honor pengolahan data nilai tambah sektoral, subsektoral dan komoditi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan model ekonomi dan non ekonomi												
	- Evaluasi PDB triwulanan menurut sektor dan penggunaan												
	- Rekonsiliasi PDB triwulanan menurut sektor												
	- Rekonsiliasi PDB triwulanan menurut penggunaan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Biaya operasional pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honorarium pakar ekonomi & sosial												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman instruktur SKMPDB												
	- Perjalanan konsultasi ke propinsi												
	Q. KONSOLIDASI NERACA PENGELUARAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penggandaan laporan hasil SKKNI												
	- Penggandaan materi pembinaan teknis PDRB-E												
	- Pencetakan publikasi PDRB-E												
	- Pencetakan publikasi PDRB propinsi menurut penggunaan												
	- Penggandaan pembinaan implementasi SNA'93 bagi staf BPS pusat												
	- Pencetakan buku pedoman PDRB-E												
	- Pencetakan materi pembinaan neraca pengeluaran bagi BPS daerah												
	- Konsumsi pembinaan teknis program implemestasi SNA'93 staf pusat												
	- Konsumsi pelatihan petugas observasi SKKNI												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Studi kepastakaan PDB penggunaan												
	- Inventarisasi sumber data & Pengumpulan data sekunder												
	- Pengumpulan data dim rangka penyusunan n												
	- Upah pengolahan data sekunder (SKKNI)												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan hasil pengolahan SNNI												
	- Pembinaan neraca regional bagi BPS daerah												
	- Pembahasan materi pembinaan bagi pembina dan instruktur PDBE												
	- Rekonsiliasi PDB Triwulanan menurut Penggunaan Triwulanan												
	- Biaya operasional pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor penceramah (setara eselon I)												
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan petugas lapangan SKKNI												
	- Perjalanan dalam mendampingi pimpinan BPS dalam pelaksanaan kongreg												
	- Perjalanan Pembinaan teknis Program Implementasi SNA 93 bagi staf BPS Daerah												
	- Perjalanan dalam rangka pertemuan kongreg												
	R. PENYUSUNAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi SNSE												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pembuatan sistem & program SNSE												
	- Pengolahan data sekunder												
	- Pengumpulan data pokok & pelengkap SNSE												
	- Honor studi kepastakaan SNSE												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan konsep dan klasifikasi SNSE												
	- Pembahasan final disagregasi SNSE												
	- Rekonsiliasi penyalarsan data PDB dan tabel IO												
	- Operasional												
	S. PENYUSUNAN KEGIATAN DAN ANGGARAN NERACA												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Biaya penyusunan anggaran												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
0145	SURVEI BIDANG POLITIK PERTAHANAN &												
	A. PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan publikasi statistik politik 2010												
	- Pencetakan publikasi statistik keamanan 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggung jawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data antar instansi di pusat												
	- Penyusunan program dan tabulasi												
	- Cross cek tabel												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan metodologi & rencana kegiatan penyusunan statistik polkam												
	- Pembahasan hasil finalisasi penyusunan instrumen statistik polkam												
	- Finalisasi penyusunan instrumen statistik polkam												
	- Finalisasi laporan penyusunan statistik polkam												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Konsultasi dan evaluasi data statistik kriminal												
	- Transport lokal penunjuk jalan												
	B. PENYUSUNAN PROFIL KRIMINALITAS REMAJA TAHUN 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan kuesioner dan pedoman												
	- Pencetakan laporan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Pengumpulan data kuantitatif												
	- Pemeriksaan dokumen												
	- Pengumpulan data antar instansi di pusat												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan metodologi & rencana kegiatan												
	- Pembahasan hasil pengumpulan data												
	- Finalisasi laporan												
	- Pelatihan petugas kuantitatif												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Transport penunjuk jalan												
	- Perjalanan petugas studi kuantitatif ke lapasTangerang												
	- Supervisi												
	C. PENYUSUNAN LAPORAN DAN STOK MODAL SOSIAL 2009												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan publikasi nasional												
	- Pencetakan publikasi provinsi												
	- Penggandaan bahan penyusunan laporan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Penyusunan dan pengetikan naskah												
	- Studi literatur dan konsultasi												
	- Penyusunan program/tabel												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi laporan provinsi												
	- Penyusunan draft laporan nasional												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Finalisasi laporan nasional dan provinsi												
	- Sosialisasi laporan nasional dan provinsi												
	- Biaya operasional bps pusat												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan verifikasi lapangan												
	- Perjalanan konsultasi ke nara sumber												
	D. DATA DAN PENGHITUNGAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan data dan informasi kemiskinan tahun 2009												
	- Pencetakan profil dan penghitungan kemiskinan tahun 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penulisan hasil penghitungan kemiskinan 20												
	- Penghitungan garis kemiskinan												
	- penghitungan												
	- Biaya operasional												
	- Operasional sosialisasi kemiskinan di propins												
522115	<u>Belanja Jasa profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Sosialisasi penghitungan kemiskinan												
	E. TF SCB (TRUST FUND FOR STATISTICAL CAPACITY BUILDING)												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor Penanggung Jawab Kab/Kota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan Hasil Pilot												
	- Penyelenggaraan Evaluasi hasil Pilot												
	- Pembahasan Rancangan Revisi SSN												
	- Operasional Pusat												
	- Operasional daerah												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi												
	- Perjalanan peserta Evaluasi Hasil Pilot												
	F. STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT (GRANT-TF-057574)												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Publikasi hasil												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Workshop lanjutan hasil pilot di Jakarta												
	- Operasional												
522113	<u>Belanja Jasa Konsultan</u>												
	- Konsultan individual: Rancangan revisi national statistical system												
	- Konsultan firm: Pelaksanaan pilot												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan di daerah (workshop lanjutan hasil pilot di Jakarta)												
	- Transport lokal peserta Jakarta (workshop lanjutan hasil pilot di Jakarta)												
	- Perjalanan dari Jakarta ke daerah (workshop lanjutan di 6 kab/kota)												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Transport lokal peserta dari propinsi ke kabupaten (workshop lanjutan di 6 kab/kota)												
5551	PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS												
00137	SURVEI BIDANG KEPENDUDUKAN DATA DAN STATISTIK												
	A. PERENCANAAN SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK pusat												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan perlengkapan workshop BPS Propinsi												
	- Perlengkapan workshop BPS Kab/Kota												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Anggota												
	- Honor PPK BPS												
	- Honor staf pengelola BPS												
	- Cadangan upah Kegiatan SP 2010												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan materi workshop												
	- Penyusunan implementasi program												
	- Pembahasan materi Ratekda SP 2010												
	- Workshop BPS Propinsi												
	- Workshop BPS Kab/Kota												
	- Pengiriman dokumen												
	- Operasional Pusat												
	- Cadangan Operasional daerah												
52115	<u>Belanja jasa profesi</u>												
	- Honor narasumber/pembicara/moderator dan panitia pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta workshop BPS Propinsi												
	- Perjalanan dalam rangka pembahasan materi Ratekda SP 2010												
	- Perjalanan supervisi workshop di daerah												
	- Perjalanan peserta workshop BPS Kab/kota												
	- Monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah												
	- Perjalanan nara sumber												
	- Cadangan biaya perjalanan												
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>												
	- Pengadaan laptop kab/kota												
	- Pengadaan laptop Propinsi dan pusat												
	- Pengadaan Viewer Kab/kota												
	- Pengadaan Viewer Propinsi												
	- Pengadaan genset kab/kota												
	- Pengadaan scanner dokumen file												
	- Pengadaan rak dokumen untuk propinsi												
	B. PELATIHAN SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan spidol												
	- Rompi dan topi (executive)												
	- Rompi dan topi petugas												
	- Kalkulator (kortim)												
	- Pengadaan box non scanner												
	- Pengadaan ATK												
	- Pengadaan komputer supplies												
	PENCETAKAN BUKU PEDOMAN DAN KUESIONER												
	- Buku 4 (Pedoman KSK/Korlap)												
	- Buku 54 (Pedoman Kortim)												
	- Buku 7 (Kode suku bangsa, bahasa daerah dan wilayah)												
	- SP2010 L1												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- SP2010 L2												
	- SP2010 RBL 1												
	PENCETAKAN DOKUMEN SP 2010												
	- Buku 6 Prop jabar dan jatim												
	- Lembar Peraga												
	- Sertifikat lnda												
	- Piagam penghargaan petugas												
	PENCETAKAN KUESIONER SP 2010 - SCANNER DAN BOX DOKUMEN												
	- SP 2010 C1												
	- SP 2010 C1 (loose paper)												
	- SP 2010 KBC1												
	- Pengadaan Box dokumen uk kecil												
	- Pengadaan Box dokumen uk sedang												
	- Pengadaan Box dokumen uk besar												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor master intama dalam rangka workshop intama												
	- Honor master intama dalam rangka palatihan calon innas												
	- Honor Intama dalam rangka pelatihan calon innas												
	- Honor innas mengajar												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor Anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan penyusunan bahan ajar												
	- Tambahan pelatihan petugas SP 2010 di Kab pacitan												
	- Workshop intama												
	- Pelatihan calon Innas												
	- Operasional Pusat												
522115	<u>Belanja jasa profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan Innas												
	- Perjalanan Supervisi pelatihan oleh pusat												
	C. PELAKSANAAN LAPANGAN SP 2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor Anggota												
	- Pencacah apartement												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan materi dan jadwal monitoring pelaksanaan lapangan												
	- Workshop evaluasi hasil lapangan												
	- Laporan jumlah penduduk secara cepat melalui sms												
	- Workshop evaluasi hasil lapangan												
	- Tambahan biaya operasional DKI Jakarta												
	- Operasional Pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Monitoring pelaksanaan lapangan + Korlap oleh pusat												
	- Perjalanan koordinator nasional ke daerah												
	- Transport lokal kunjungan supervisi di DKI Jakarta												
	- Task force tim pusat												
	- Perjalanan peserta pembahasan hasil/evaluasi lapangan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	D. PELATIHAN DEMOGRAFI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan perlengkapan peserta, pengajar nara sumber												
	- Pengadaan bahan ajar												
	- Pengadaan ATK dan computer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengajar dalam rangka pelatihan demografi												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan modul pelatihan												
	- Pelatihan peserta												
	- Penyusunan laporan hasil penelitian												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja jasa Profesi</u>												
	- Honor nara sumber												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta pelatihan												
	E. PENGOLAHAN SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan aplikasi monitoring berbasis SMS												
	- Pengadaan consummable scanner												
	- Perawatan H/W (6 bulan dim 2010) onsite yec												
	- Pengadaan perlengkapan inas pengolahan												
	- Pengadaan ATK pusat												
	- Pengadaan computer supplies pusat												
	- Pengadaan computer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor intama pengolahan												
	- Honor intama pengolahan												
	- Honor inas pengolahan												
	- Kompilasi hasil pendataan SP 2010												
	- Honor Pengarah												
	- Honor Penanggungjawab												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor Anggota												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan bahan ajar												
	- Pelatihan inas pengolahan												
	- Penyusunan angka sementara hasil SP2010 di pusat												
	- Pembahasan hasil pengolahan di BPS pusat												
	- Operasional kegiatan di pusat												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan inas												
	- Perjalanan supervisi + Korlap												
	- Transport lokal kunjungan supervisi di DKI Jakarta												
	F. UPDATING PETA WILAYAH ADMINISTRASI												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan publikasi peta indeks												
	- Pengadaan tinta plotter												
	- Pengadaan tinta plotter (colour)												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Penyusunan program updating MFD												
	- Editing peta indeks secara manual, entry dan validasi data peta												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Kompilasi data per desa/ kelurahan												
	- Updating peta wilayah												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Evaluasi kegiatan												
	- Persiapan pembuatan SIG SP2010												
	- Pembangunan metadata spasial dengan tim bakosurtanal												
	- Pembahasan pengelolaan MFD												
	- Operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Supervisi kegiatan pembangunan MFD												
	- Perjalanan uji kualitas pembuatan peta blok sensus												
	G. PES 2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan kuesioner												
	- Fotocopy sketsa peta blok sensus												
	- Pencetakan buku pedoman pencacahan												
	- Pencetakan buku pedoman matching												
	- Pencetakan buku pedoman kepala BPS propinsi/kab/kota												
	- Pencetakan buku pedoman innas												
	- Pencetakan buku pedoman Kortim												
	- Pencetakan buku pedoman pengolahan												
	- Pengadaan lembar kerja dan dokumen												
	- Pencetakan laporan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Penggandaan komputer supplies												
	- Perlengkapan inas												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor sekretaris												
	- Honor anggota												
	- Upah master intama												
	- Honor pelatihan petugas lapangan												
	- Honor penyusunan sistem dan program pengolahan												
	- Honor rekonsiliasi hasil matching RT dan penduduk												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan metodologi dan materi/teknik penghitungan												
	- Penyusunan kuesioner dan buku pedoman												
	- Workshop intama												
	- Pelatihan innas												
	- Penghitungan statistik hasil lapangan												
	- Pembahasan penulisan laporan sementara												
	- Pembahasan penulisan laporan akhir												
	- Biaya operasional												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Pengiriman innas												
	- Pengendalian dan evaluasi pelatihan												
	- Pengiriman petugas dlm rangka mengkoordinir matching rumah tangga												
	H. PUBLISITAS PELAKSANAAN SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	PENGADAAN BAHAN PUBLISITAS PELAKSANAAN SP2010												
	- Perlengkapan publisitas												
	- Pengadaan PIN Sp 2010												
	- <i>Public Service Announcement (PSA)</i> SP 2010 tipe 3												
	PERTEMUAN BAKOHUMAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN SP2010												
	- Penggandaan bahan materi												
	- Seminar kit (map binder, block note, pulpen name tag)												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Konsumsi												
	- Sertifikat												
	- Dokumentasi												
	KAMPANYE PUBLISITAS												
	- Pengandaan bahan materi												
	- Seminar kit (map binder, block note, pulpen, name tag)												
	- Konsumsi												
	- Dokumentasi												
	PENAYANGAN BAHAN PUBLISITAS PELAKSANAAN SP2010												
	* PSA SP2010												
	- TVRI												
	- RCTI												
	- METRO TV												
	- TV One												
	* DIALOG INTERACTIVE/ TALK SHOW DI TV												
	- TVRI												
	- RCTI												
	- METRO TV												
	- TV One												
	* RADIO SPOT												
	- RRI PRO 3 (durasi 50 menit)												
	- RRI PRO 2												
	- TRIJAYA FM												
	- Elshinta												
	* TALKSHOW												
	- RRI PRO 3 (durasi 50 menit)												
	- RRI PRO 2 (durasi 45 menit)												
	- TRIJAYA FM												
	- Elshinta												
	* RUNNING TEXT												
	- METRO TV												
	- TV One												
	* Iklan di media cetak												
	- Gatra Gate Fold Cover (3 FC)												
	- Gatra halaman ganjil												
	- Tempo gate Fold Cover (3 FC)												
	- Tempo halaman dalam												
	SAFARI KAMPANYE												
	- Pengadaan bahan materi												
	- Seminar KIT (map binder, block note, pulpen)												
	- Konsumsi												
	- Dokumentasi												
	PENINGKATAN WAWASAN STATISTIK UNTUK WARTAWAN												
	- Pengandaan bahan materi rapat												
	- Pengandaan bahan materi workshop wartawan												
	- Seminar kit (map binder, block note, pulpen, name tag, name desk)												
	- Sertifikat workshop wartawan												
	- Banner dan spanduk												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor sekretaris												
	- Honor anggota												
	- Inventarisasi publisitas dan penyusunan hasil liputan												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Penyiapan materi publisitas pelaksanaan SP2010												
	- Pembahasan laporan hasil publisitas pelaksanaan SP2010												
	- Penyiapan materi peningkatan wawasan wartawan												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Penyelenggaraan workshop wartawan												
	- Pembahasan materi kunjungan pimpinan ke media massa												
	- Operasional												
522115	Belanja Jasa Profesi												
	- Honor narasumber eselon I												
	- Honor narasumber eselon I												
	- Honor narasumber eselon II												
	- Honor narasumber eselon III												
	- Honor moderator workshop wartawan												
	- Honor keynote speech workshop wartawan												
	- Honor pembicara workshop wartawan												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan dalam rangka monitoring publisitas pelaksanaan SP2010												
	- Transport peserta seminar Bakohumas												
	- Transport peserta kampanye												
	- Monitoring pelaksanaan workshop wartawan di daerah												
	- Perjalanan penyelenggara workshop wartawan												
	- Transport lokal pengumpulan data peningkatan wawasan wartawan												
	- Transport kunjungan pimpinan ke media massa												
	I. PEMBENTUKAN MFD SP2010												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan buku pedoman sistem & program MFD & MBS berbasis web												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor pengarah												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor sekretaris												
	- Honor anggota												
	- Honor innas												
	- Honor master intama												
	- Honor intama												
	- Penyempurnaan sistem dan program MFD dan MBS berbasis web												
	- Upah pelaksana sinkronisasi dan pemeliharaan MFD dan MBS												
	- Upah pengawasan sinkronisasi dan pemeliharaan MFD dan MBS												
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
	- Pembahasan dan penyusunan materi MFD dan MBS berbasis web												
	- Finalisasi buku pedoman MFD dan MBS berbasis web												
	- Workshop intama MFD dan MBS berbasis web												
	- Pelatihan innas MFD dan MBS berbasis web												
	- Pelatihan petugas kab/kota MFD dan MBS berbasis web												
	- Evaluasi hasil												
524119	Belanja Perjalanan Lainnya (DN)												
	- Perjalanan peserta pelatihan innas MFD												
	- Perjalanan supervisi												
	- Perjalanan pengawasan												
	J. PEMBANGUNAN DESAIN DAN ARSITEKTUR METADATA SP2010												
521211	Belanja Bahan												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pengadaan CD aplikasi offline dan pelabelan CD												
	- Pencetakan buku katalog metadata SP2010 dan pendukungnya												
521213	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Kompilasi metadata SP2010												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Pembuatan program integrasi aplikasi diseminasi rujukan stat. hasil SP 2010												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Finalisasi dan penyempurnaan rancangan database metadata SP2010												
	- Finalisasi dan penyempurnaan modul aplikasi website metadata SP2010												
	- Finalisasi & penyempurnaan integrasi aplikasi website sistem diseminasi												
	- Penyusunan materi katalog metadata SP2010 dan pendukungnya												
	- Operasional umum												
	K. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PUBLIKASI SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan buku katalog PUBLIKASI DAN DATABASE SP2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pembuatan program modul aplikasi pengelolaan softcopy, mailing list, dan												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan rancangan database sistem informasi												
	- penyusunan modul aplikasi												
	- Penyusunan materi digital web book hasil SP2010												
	- Penyusunan katalog publikasi dan database SP2010												
	- Operasional umum												
	L. PEMBANGUNAN DESAIN DAN ARSITEKTUR AKSES ONLINE DAN LAYANAN SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
	- Pencetakan booklet promosi SP2010												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor penanggung jawab												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Pembuatan program aplikasi layanan hasil SP2010												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan dan penyusunan rancangan modul tayangan website												
	- Pembahasan dan penyusunan desain materi tabel hasil SP2010												
	- Pembahasan dan penyusunan booklet promosi SP2010												
	- Workshop web master BPS												
	- Operasional umum												
	M. PEMBANGUNAN DESAIN DAN ARSITEKTUR SISTEM DOKUMENTASI SP2010												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan ATK, kertas dan bahan cetak												
	- Pengadaan komputer supplies												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor ketua												
	- Honor wakil ketua												
	- Honor anggota												
	- Kompilasi dokumentasi hasil SP2010												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan awal konversi file-file dokumentasi SP												
	- Finalisasi konversi file-file dokumentasi SP												
	- Finalisasi dan penyempurnaan materi dokumentasi Sensus Penduduk												
	- Operasional umum												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
10.05.01.0110	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN												
0110.0016	PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK)												
	A. PERSIAPAN BELAJAR DAN BEKERJA DI BIDANG STATISTIK												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan Alat Tulis pelatihan												
	- Pengandaan kuesioner dan buku pedoman												
	- Rapat penyusunan kuesioner dan pedoman												
	- Rapat pelatihan pelaksanaan lapangan												
	- Pelatihan pelaksanaan lapangan												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor anggota												
	- Honor pembimbing metodologi, kuesioner dan pedoman												
	- Honor instruktur pelatihan lapangan												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan tim advance dosen ke Palembang												
	- Perjalanan tim advance mahasiswa ke Palembang												
	- Transport lokal pembimbing metodologi, kuesioner dan pedoman												
	B. PELAKSANAAN BELAJAR DAN BEKERJA DI BIDANG STATISTIK												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pengadaan perlengkapan petugas/alat tulis												
	- Pencetakan laporan												
	- Pembahasan dan evaluasi hasil laporan												
	- Pembahasan pengolahan												
	- Seminar akhir												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pembimbing pembuat laporan												
	- Honor petugas BPS Propinsi												
	- Honor petugas BPS Kabupaten												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Biaya hidup peserta di daerah												
	- Biaya penginapan di daerah												
522114	<u>Belanja Sewa</u>												
	- Sewa kendaraan roda 4 Pimpinan dalam ranç												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan peserta belajar dan bekerja di bidang statistik												
	- Transpor lokal pembimbing pembuat laporan												
	- Transpor lokal peserta PKL di lapangan												
	- Supervisi												
	- Dosen pembimbing												
	- Sosialisasi hasil PKL di Palembang												
	C. PENGAJARAN DAN PERKULIAHAN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan profil STIS dalam bahasa inggris												
	- Pengandaan absensi mahasiswa dan pengandaan penunjang												
	- Pencetakan buku panduan mahasiswa												
	- Pengandaan angket dan evaluasi dosen												
	- Pencetakan buku catatan mahasiswa												
	- Biaya pembuatan ijazah												
	- Rapat pertemuan dosen												
	- Pengadaan bahan referensi												
	- Pengadaan Jurnal Statistik online												
	- Kuliah umum dan seminar statistik												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor Anggota												
	- Pengolahan angket dan evaluasi dosen												
	- Pembuatan program angket dan evaluasi dosen												
	- Cross check tabel angket dan evaluasi dosen												
	- Honor tutorial selama 2 semester												
	- Honor petugas piket												
	- Honor pembimbing ekstra kurikuler (UKM)												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Penyusunan/penyempurnaan SAP perkuliahan												
	- Persiapan penyusunan kurikulum S1 dan konsorsium												
	- Pendaftaran seminar/pelatihan dosen di luar kampus												
	- Rapat koordinasi (rakor) STIS												
	- Evaluasi kegiatan mahasiswa												
	- Pembahasan evaluasi akademik												
	- Pembahasan SOP STIS												
	- Pembahasan sistem STIS terpadu												
	- Operasional												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Nara sumber kuliah umum dan seminar akademik												
	- Moderator kuliah umum dan seminar akademik												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi												
	- Studi banding Sekolah Tinggi penyelenggara S1 statistik												
	- Perjalanan dalam rangka seminar/pelatihan dosen di luar kampus												
	- Transport lokal rapat pertemuan dosen												
	D. PENYELENGGARAAN PROGRAM D-IV												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Penerbitan Buletin Statistik												
	- Penerbitan media alumni												
	- Konsumsi wisudawan dan undangan												
	- Foto wisudawan ekspose cetak warna 10R												
	- DVD liputan acara lengkap												
	- Pencetakan buku wisuda												
	- rapat persiapan wisuda												
	- Pembuatan backdrop dan dekorasi												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor Ketua												
	- Honor Wakil Ketua												
	- Honor Sekretaris												
	- Honor Anggota												
	- Honor dosen dan asisten dosen												
	a. Dosen S3/Lektor Kepala/Eselon II												
	b. Dosen S3/Lektor /eselon III												
	c. Dosen S3/Asisten Ahli /eselon IV												
	d. Dosen S3 - Non fungsional												
	e. Dosen S2/Lektor Kepala/Eselon II												
	f. Dosen S2/Lektor /eselon III												
	g. Dosen S2/Asisten Ahli /eselon IV												
	h. Dosen S2 - Non fungsional/staf												
	i. Dosen S1/Lektor Kepala/Eselon II												
	j. Dosen S1/Lektor /Eselon III												
	k. Dosen S1/Asisten Ahli /eselon IV												
	l. Dosen S1 - Non fungsional/staf												
	- Honor petugas piket seminar dan sidang skripsi												
	- Honor pembimbing skripsi												
	- Honor dewan penyantun STIS												
	- Honor dewan SENAT STIS												
	- Honor panitia seminar dan sidang skripsi												
	- Honor pembimbing seminar skripsi												
	- Honor moderator seminar skripsi												

Lanjutan Lampiran 5

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Jadwal Kegiatan Tahun 2010											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)											
	- Honor pembimbing sidang skripsi												
	- Honor penguji sidang skripsi												
	- Honor web admin												
	- Honor web developer												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Tunjangan ikatan dinas												
	- Operasional kegiatan senat mahasiswa STIS												
522114	<u>Belanja Sewa</u>												
	- Sewa gedung dalam rangka kegiatan senat mahasiswa STIS												
	- Sewa gedung dalam rangka kuliah umum dan perlengkapannya												
522115	<u>Belanja Jasa Profesi</u>												
	- Pembicara pidato ilmiah widusa STIS												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Transport lokal dosen dan asisten dosen												
	E. RISET DOSEN												
521211	<u>Belanja Bahan</u>												
	- Pencetakan jurnal												
	- Seminar awal penelitian dosen												
	- Seminar akhir penelitian dosen												
	- Ceramah/diskusi pengabdian masyarakat												
	- Pencetakan buku ceramah/diskusi pengabdian masyarakat												
	- pembelian publikasi data sekunder dan instansi												
	- Pencetakan publikasi indikator fundamental												
521213	<u>Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan</u>												
	- Honor pembuatan artikel penelitian penelitian dosen												
	- Honor penanggungjawab tim penyusun jurnal												
	- Honor pimpinan umum redaksi jurnal												
	- Honor dewan editor jurnal												
	- Honor tim layout/desain grafis												
	- Honor pembuatan artikel jurnal												
	- Pengolahan data sekunder												
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>												
	- Pembahasan materi ceramah pengabdian masyarakat												
	- Penyusunan publikasi indikator fundamental												
	- Operasional riset dosen												
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u>												
	- Transport lokal pengumpulan data sekunder ke beberapa instansi												
	F. PENERIMAAN MAHASISWA BARU												
	<u>Belanja sewa</u>												
	- Sewa gedung dalam rangka PMB												
	- Sewa gedung tahap I di daerah												
	<u>Belanja Perjalanan lainnya (DN)</u>												
	- Perjalanan pengawasan tahap I ke 32 propinsi												
	- Perjalanan sosialisasi PMB ke 32 Provinsi												

FORMULIR

<http://www.pns.go.id>

RENCANA PENGGUNA ANGGARAN TRIWULANAN TAHUN ANGGARAN 2010

Kepada Yth.

Sekretaris Utama c.q. Biro Bina Program
di

Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Unit Eselon I : (2000) SEKRETARIS UTAMA
2. Unit Eselon II : (2100) BINA PROGRAM
3. Unit Eselon III : (2110) PENYUSUNAN RENCANA
4. Program : (01.01.27) PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK (P2S)
5. Kegiatan : (00035) PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

No.	Item Kegiatan	Pagu di POK (Rp)	Kumulatif realisasi s.d. bulan lalu	Volume	Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Jadual Kegiatan Triwulan I (Rp)		
							Jan (8)	Peb (9)	Mar (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1436	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	101 819 000	0			87 200 000	46 400 000	900 000	39 900 000
	A PENYUSUNAN RENJA-KL BPS & DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	101 819 000	0			87 200 000	46 400 000	900 000	39 900 000
521213	Honor.vang.Terkati.dengan.Cutput.Kegiatan	2 400 000	0	6 O-B	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000
1	Honor Ketua	1 500 000	0	6 O-B	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000
2	Honor Sekretaris	9 000 000	0	36 O-B	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000
3	Honor Anggota								
524119	Belanja.Barang.Non.Operasional.Lainnya								
1	Pembahasan dalam rangka penyusunan rekapitulasi rencana kegiatan BPS Triwulan	45 000 000	0	100 O-H	450 000	45 000 000	45 000 000		
2	Finalisasi penyusunan Renja-KL BPS tahun 2010	38 250 000	0	85 O-H	450 000	38 250 000			38 250 000
3	Operasional	5 669 000	0	1 paket	5 669 000	1 250 000	500 000		750 000

Mengetahui/Menyetujui :

Sekretaris Utama

Kepala Biro
Bina ProgramJakarta, 15 Januari 2010
Kepala Bagian
Penyusunan Rencana

(DjamaL.S.E.M.Sc)

NIP. 19520315.197503.1.003

(Drs..Eri.Hastoto..M.Si)

NIP. 19550825.197803.1.002

(Sentot.B.Widovono..MA.)

NIP. 19610904.198302.1.001

FORM - RPA

RENCANA PENGGUNA ANGGARAN TRIWULANAN TAHUN ANGGARAN 2010

Kepada Yth.

Sekretaris Utama c.q. Biro Bina Program
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Unit Eselon I : (No. Tlp)
2. Unit Eselon II : (No. Tlp)
3. Unit Eselon III : (No. Tlp)
4. Program : (Kode)
5. Kegiatan : (Kode)

No. (1)	Item kegiatan (2)	Pagu di POK (Rp) (3)	Kumulatif realisasi s.d. bulan lalu (4)	Volume (5)	Satuan (Rp) (6)	Nilai (Rp) (7)	Jadual Kegiatan Triwulanan		
							Bulan ke 1 (8)	Bulan ke 2 (9)	Bulan ke 3 (10)
(Kode)	Sub Kegiatan								
(Kode)	Group MAK								
521211	Belanja Bahan								
	1								
	2								
521213	Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan								
	1								
	2								
524111	Belanja Barang Non Operasional lainnya								
	1								
	2								
dst.									

Mengetahui/Menyetujui :

Sestama/Inspektur Utama/Deputi

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

FORM - OPS

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA**

Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencanadalam rangka (diisi sesuai item kegiatan di POK) :

1. Bagian/Sub Direktorat : (Kode)
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.
7. Nama Hotel/Akomodasi :

Daftar peserta sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Tanggal	Lamanya (o-h)

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(
NIP.

(
NIP.

Menyetujui,
Sesstama/Inspektur Utama/Deputi.....

(
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Biro Bina Program
3. Biro Keuangan

FORM - CTK

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA BAHAN**

(Khusus untuk pencetakan/penggandaan)
Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana (diisi sesuai item kegiatan dalam POK) :

1. Bagian/Sub Direktorat :
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

No.	Jenis Barang	Volume	Spesifikasi	Pagu di POK (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi.....

(.....)
NIP.

- Tembusan Yth. :
1. Pejabat Pembuat Komitmen
 2. Biro Bina Program
 3. Biro Keuangan

FORM - GDB

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**

Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana pengadaan barang/jasa (diisi sesuai item kegiatan di POK) :
1. Bagian/Sub Direktorat :
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

No.	Jenis Barang	Volume	Spesifikasi	Pagu di POK (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi

Tembusan Yth. :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Biro Bina Program
3. Biro Keuangan

(.....)
NIP.

FORM - PMF

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN/FISIK LAINNYA**

Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana pengadaan barang/jasa :

1. Bagian/Sub Direktorat :
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

No.	Jenis Barang	Volume	Spesifikasi	Pagu di POK (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi

Tembusan Yth. :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Biro Bina Program
3. Biro Keuangan

(.....)
NIP.

FORM - BHN

FORMULIR PERMINTAAN BELANJA BAHAN

Nomor :

Kepada Yth.
 Kuasa Pengguna Anggaran
 di
 Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana pengadaan barang/jasa :

1. Bagian/Sub Direktorat :
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

No.	Jenis Barang	Volume	Spesifikasi	Pagu di POK (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala

Jakarta,
 Kepala Bagian/Bidang/Subdit

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Menyetujui,
 Sestama/Inspektur Utama/Deputi

- Tembusan Yth. :
1. Pejabat Pembuat Komitmen
 2. Biro Bina Program
 3. Biro Keuangan

(.....)
 NIP.

FORM - JLN

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA PERJALANAN LAINNYA (DN)**

Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana perjalanan dinas dalam rangka (diisi sesuai item kegiatan di POK):

1. Bagian/Sub Direktorat : (Kode)
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

Daftar peserta sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Tanggal	Tujuan	Lamanya (o-h)

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(_____)
NIP.

(_____)
NIP.

Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi

(_____)
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Biro Bina Program
3. Biro Keuangan

FORM-JS

**FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA JASA PROFESI/KONSULTAN**

Nomor :

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran

di Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana pengadaan barang/jasa :

- 1. Sub Direktorat : (Kode)
- 2. Program : (Kode)
- 3. Kegiatan : (Kode)
- 4. Sub Kegiatan : (Kode)
- 5. Group MAK : (Kode)
- 6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

No.	Item Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Pagu di POK (Rp)
1	Honor Nara Sumber	...O-J	Setara Eselon I / II / III / IV	
2	Jasa KonsultanPaket	Tenaga Ahli dibidang..... Pengalaman kerja..... Pengalaman Pendidikan.....	

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....
Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen
- 2. Biro Bina Program
- 3. Biro Keuangan

FORM - UPH

**FORMULIR PERMINTAAN
HONOR YANG TERKAIT DENGAN OUTPUT KEGIATAN *)**

Nomor :

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik

Bersama ini disampaikan rencana dalam rangka (diisi sesuai item kegiatan di POK):

1. Bagian/Sub Direktorat :
2. Program : (Kode)
3. Kegiatan : (Kode)
4. Sub Kegiatan : (Kode)
5. Group MAK : (Kode)
6. Jumlah Pagu di POK : Rp.

Daftar peserta sebagai berikut :

No.	Nama	NIP	Volume	Jumlah (Rp)

Lembar ini bisa ditambah jika diperlukan.

Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ketua/Kepala
.....

(.....)
NIP.

Jakarta,
Kepala Bagian/Bidang/Subdit
.....

(.....)
NIP.
Menyetujui,
Sestama/Inspektur Utama/Deputi.....

Tembusan Yth. :
1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Biro Bina Program
3. Biro Keuangan

(.....)
NIP.

*) Diisi untuk pelaksanaan kegiatan aspek lapangan (honor imas, listing, pencacahan, dan sejenisnya)